

111 PENULIS PRANATA HUMAS INDONESIA

**GPR TOGETHER, GPR STRONGER:
DARI HUMAS PEMERINTAH
INDONESIA KITA PULIH BERSAMA**



LITBANGDIKLAT PRESS

**GPR TOGETHER, GPR STRONGER:
DARI HUMAS PEMERINTAH INDONESIA KITA PULIH BERSAMA**

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penulis :
Iprahumas Indonesia

Editor :
Dr. Dyah Rachmawati Sugiyanto

Assistant Editor :
Winda Eka Putri, S.Sos
Fany Rachmawati, S.I.Kom
Fachrudin Ali Ahmad, S. Sos., MKM
Karlina Gusmarani, S.I.Kom., M.A.
Dodi Rosadi, S.E., M.M.
I Gede Alfian Septamiarsa, S.Sos, M.I.Kom

Desain Cover & Layout :
A. Basith El Qudsy

xiv + 482 hlm, 15,5 x 23 cm
ISBN

Cetakan, I November 2022

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Diterbitkan oleh:
LITBANGDIKLAT PRESS
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lantai 17 Jakarta Pusat
Telepon: 021-3920688
Fax: 021-3920688
Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id
Anggota IKAPI No. 545/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

SAMBUTAN

Untuk pertama kalinya sejak G20 terbentuk, Indonesia memegang tampuk Presidensi sekaligus menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam forum tersebut. Keberadaan Forum G20 kian strategis secara global, mengingat keputusan dan langkah yang diambil kedua puluh negara anggotanya kiranya mampu memberikan kontribusi dan dampak bahkan terhadap negara-negara yang tidak tergabung di dalamnya.

Adalah sebuah peluang emas bagi bangsa ini untuk menunjukkan jati diri dan potensi yang dimilikinya tepat di saat kita memegang peranan sebagai pemimpin. Agar amanat Presidensi G20 ini terlaksana, kita perlu meraih kepercayaan dari dua sisi: internasional dan masyarakat kita sendiri. Presidensi G20 Indonesia adalah *nation branding* bagi negara kita.

Berbicara mengenai kepercayaan publik dan *nation branding* tentunya tidak akan lepas dari pengelolaan komunikasi publik juga. Baik publik internasional maupun internal, semuanya perlu memahami agenda Presidensi G20 Indonesia dan manfaat yang dapat mereka peroleh darinya. Untuk itulah komunikasi publik memainkan peran penting terutama untuk membawa agenda Presidensi G20 menjadi agenda publik. Oleh karena itu, perlu melibatkan seluruh kalangan untuk bergerak ke arah yang sama demi menunjukkan kekuatan Indonesia yang sebenarnya.

Langkah para Pranata Humas dengan meramu berbagai ide dalam tulisan bertema Presidensi G20 Indonesia memberi warna dalam memeriahkan momen bersejarah ini. Buah pemikiran 111

praktisi kehumasan dari berbagai instansi di seluruh Indonesia mampu mengupas ragam sisi Presidensi G20 Indonesia, mulai dari peluang bagi UMKM hingga terobosan teknologi untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara global. Semua terekam dalam buku ini dan mudah-mudahan menjadi sumber informasi yang dapat membuka wawasan bagi pembacanya.

Jakarta, 26 September 2022
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Usman Kansong

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat-Nya, sehingga buku yang ada dalam genggamannya Pembaca yang budiman dapat diterbitkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kebaikan yang setimpal. Aamiin ya Robbal ‘Aalamiin.

Buku ini merupakan dukungan konkrit Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bagi kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang bertajuk *Recover Together, Recover Stronger*. Adapun tujuan penerbitan buku adalah untuk memberikan wadah dan mengasah kemampuan menulis Pranata Humas dalam mengemas tulisan mengenai Presidensi G20 Indonesia.

Buku yang berisi gagasan, pemikiran, opini, dan harapan Pranata Humas di seluruh Indonesia mengenai Presidensi G20 Indonesia ini adalah bagian dari Program Kerja Nasional Pengurus Pusat Iprahumas periode 2022-2024, yaitu 100 Penulis Pranata Humas Indonesia. Di luar dugaan, penulis yang lolos naskahnya sebanyak 111 orang. Setiap penulis hanya diperbolehkan memuat satu tulisan, sehingga kekayaan sudut pandang dari para penulis tersebut dapat mewarnai 111 naskah dalam buku ini.

Besar harapan kami semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan kehumasan Pemerintah secara khusus, juga secara luas bagi kehumasan tanah air dan global. Lebih lanjut, kumpulan tulisan 111 Pranata Humas ini dapat menjadi sebuah

legacy kesuksesan atas penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Kami juga menyadari, karya ini memerlukan masukan yang konstruktif untuk pertimbangan perbaikan di masa yang akan datang. Maka, kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi.

Ketua Umum Iprahumas,

Thoriq Ramadani, S.I.Kom.,M.Tr.A.P.

DARI REDAKSI

Salam Komunikasi

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Tim Redaksi dapat menyelesaikan buku istimewa ini. Pada tahun 2022 ini, bertepatan dengan momentum Presidensi G20 atau *Group of Twenty*. Peran Pranata Humas Indonesia ikut menyukseskan forum ini. Salah satunya dengan menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran dalam sebuah tulisan berupa opini.

Sejalan dengan momentum Presidensi G20, buku yang berisi opini dari 111 Penulis Pranata Humas ini diberi judul “*GPR Together, GPR Stronger*: Dari Humas Pemerintah Indonesia Kita Pulih Bersama“. Buku ini merupakan buku kedua Iprahumas yang ditulis oleh rekan-rekan Pranata Humas Indonesia dari berbagai Instansi, baik yang bekerja di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai tema yang menarik hadir di dalam buku ini yaitu Digitalisasi, Jejaring dan Kolaborasi, Kesehatan, Pranata Humas Berkelas, dan Transisi Energi. Sehingga pembaca menjadi mengetahui dan mengenal lebih dekat warna-warni aktivitas Humas Pemerintah baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka maupun gagasan-gagasan serta sumbangan pemikirannya terkait komunikasi, kehumasan dan agenda Presidensi G20.

Semoga dengan hadirnya buku ini akan memberi motivasi bagi rekan-rekan pranata humas untuk selalu berkarya dalam sebuah tulisan. Harapannya melalui tulisan berupa opini ini juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kami selaku tim redaksi, mengucapkan terima kasih kepada rekan rekan Pranata Humas Indonesia yang telah menyumbangkan tulisannya, sehingga buku ini berhasil diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini.

Akhir kata, selamat membaca, salam semangat berkarya.

Ketua Bidang Kerja Sama dan Riset
Ikatan Pranata Humas Indonesia

Winda Eka Putri

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Dari Redaksi	vii
Daftar Isi	ix

DIGITALISASI

1. UMKM Digital, Upaya Mengentaskan Kesenjangan Ekonomi Digital di Tengah Perhelatan G20	3
2. Budaya Kerja Berbasis IT, Semangat dari Presidensi G20 Indonesia	7
3. Presidensi G20, Momentum UMKM untuk Mendunia	11
4. Gaungkan G20, Dengungkan Kolaborasi Riset di Indonesia	15
5. Belanja Lebih Mudah Lewat <i>Government E-Marketplace</i>	19
6. Moderasi Beragama Berbasis Literasi Digital	23
7. Mojo, Teknik Jurnalisme Humas Masa Kini	27
8. Cerdas Bergerak Manfaatkan Momentum G20 Indonesia	31
9. Layanan Digital, Sumbu Kualitas Layanan Prima	34
10. Makoyana, Pendukung Kolaborasi Riset dan Pemanfaatan Biodiversitas Indonesia	37
11. Bak Bunglon, Humas Harus Adaptif di Era Digitalisasi ..	41
12. Ketersediaan dan Distribusi Digital Pangan Global	45
13. ASN Agile Wujudkan Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia	49
14. G20 Momentum Transformasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas	52
15. Memanfaatkan <i>Chatbot WhatsApp</i> untuk Mengelola Penyebaran Informasi	56
16. Buku Elektronik <i>Open Access</i> : Dana Publik Untuk Pengetahuan Publik	60
17. <i>Blockchain</i> , Teknologi Digital Pelacak Kopi Indonesia ..	65
18. Transformasi Teknologi Digital di Daerah Sukseskan G20	68

19. Optimisme Indonesia sebagai Tuan Rumah G20	71
20. Mengenal Empat Pilar Literasi Digital	74
21. Kesiapan Humas Pemerintah Mendukung Transformasi Digital	78
22. Humas dan Momentum Presidensi G20 Indonesia	81
23. Saatnya UMKM Bergeser ke Mode Digital	85
24. Inovasi <i>Smart Farming</i> dan Digitalisasi Pertanian Antisipasi Perubahan Iklim	88

JEJARING DAN KOLABORASI

1. Informasi Geospasial, <i>Game Changer</i> untuk Hadapi Isu Global	93
2. Kemampuan Melobi Kuatkan Indonesia di Presidensi G20	97
3. Presidensi G20, Juleha Bisa Unjuk Gigi	100
4. G20 Dan Harapan Daerah Perbatasan	104
5. EWG G20, Perkuat Dukungan Pemerintah Bagi Penyandang Disabilitas	107
6. Persiapkan KTT G20, Belitung Pun Bersolek	111
7. Bayt Al-Qur'an Dan Museum Istiqlal Berbenah Menyambut Presidensi G20	114
8. Berikan Pemahaman G20 Secara Masif, Humas Pemerintah Manfaatkan Teknologi Digital	117
9. Melalui RIIG. Indonesia Perkuat Ekosistem Riset dan Inovasi Di Tingkat Internasional	121
10. Menebar Optimisme G20 Kepada Publik 3T, Sinergi Pemerintah di Layar Kaca	124
11. Presidensi G20 Momentum Pemulihan Ekonomi Global ..	128
12. Percepatan Penurunan Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupan	131
13. Bangkitkan Minat Wirausaha Berbasis UKM Digital	135
14. Jurnalisme Berkualitas Untuk Presidensi G20 Indonesia ..	139
15. Kolaborasi Dengan Media, Ini 3 Hal yang Perlu Dipahami Humas Pemerintah	143
16. Menggeliatkan Ekonomi Desa untuk Indonesia Pulih Bersama	147
17. Bisnis Hijau UMKM Mendukung Ekonomi Hijau	151

18. <i>City Branding</i> dalam Gaung Semangat Kolaborasi G20 ...	154
19. Jalur Alternatif Mengenalkan Presidensi G20 Versi Kementerian Keuangan	158
20. Presidensi G20 Indonesia, Humas KEMENAG Sukses Amplifikasi ‘Tahun Toleransi’	162
21. Presidensi G20 Indonesia, Kesempatan Indonesia Tunjukkan Pengembangan Infrastruktur di Mata Dunia	166
22. Presidensi Indonesia Di G20 dan Strategi <i>Word Of Mouth</i>	170
23. Mengedukasi dan Memotivasi Masyarakat, Sukseskan Presidensi G20 Indonesia	173
24. Strategi <i>Gastrodiplomacy</i> , Indonesia Sajikan Menu Perikanan di Ajang G20	176
25. Presidensi G20 Indonesia, Momen Komunikasi Kolaboratif Humas Pemerintah	180
26. Mengulik Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Presidensi G20 Indonesia	184
27. Geliat Suara Muda pada Ajang G20	188
28. Hybrid University, Jawaban UNPAD untuk Education Working Group G20	191
29. Memulihkan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19, Apa yang Bisa Kita Lakukan?	195
30. G20, Etalase Moderasi Beragama untuk Dunia	198
31. Presidensi G20 Indonesia, Membuka Peluang Investor Bidang Infrastruktur	202
32. Meramu Pantun, Membuka Peluang Diplomasi di G20	206
33. Program Sejuta Rumah, Indonesia Masih Butuh Modal Investasi	209
34. Momentum G20, Saatnya Jadikan Destinasi Wisata Kota Bogor Berkelas Dunia	212
35. Moderasi Beragama Dorong Kesuksesan G20	217
36. Informasi yang Renyah, Mudahkan Khalayak Mendukung Presidensi G20 Indonesia	221
37. Mengusung Narasi Keindonesiaan Melalui Fesyen dan Kuliner di Ajang G20	225
38. Transformasi Digital dan Aksesibilitas Informasi Pemerintah	228

39. Menjual Riset dan Inovasi Di Presidensi G20 Indonesia ..	231
40. Jadikan G20 sebagai Momentum Menuju Internasionalisasi Pengembangan Zakat dan Wakaf	234
41. Sukseskan KTT G20 dengan Sinergi Komunikasi	238
42. Semangat Berkolaborasi, Kota Depok Wujudkan UMKM Tangguh Di Masa Pandemi	242
43. G20 dan Kontribusi untuk Dunia	246
44. Kemaslahatan Untuk Indonesia Sebagai Tuan Rumah G20	250

KESEHATAN

1. Kontribusi Strategis Humas Kesehatan pada Gelaran G20	257
2. Harmonisasi Protokol Kesehatan Global di Presidensi G20 Indonesia	262
3. Agenda Utama G20, Membangun Arsitektur Kesehatan Global	266
4. Menyusun <i>Agenda Setting</i> Isu Kesehatan Global	270
5. G20 Ajang Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat	274
6. Presidensi G20 dan Kebalnya Pertanian Indonesia di Tengah Pandemi	277
7. RSUP Persahabatan, Rumah Sakit Rujukan Presidensi G20	280
8. Membangun Resiliensi terhadap Pandemi Mulai dari Pekarangan	284
9. G20, Jalan Wujudkan Pemulihan Kesehatan Global	288
10. Membangun Resiliensi Kesehatan Masyarakat dalam Presidensi G20 Indonesia	291
11. Geliat Laut Sehat untuk Presidensi G20 Indonesia	294
12. Isu Hak atas Kesehatan Mental Penting Dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia	298
13. Keterlibatan Penyuluh Perikanan Jadikan Masyarakat Berdaya	302
14. Tujuan Mulia Dibalik Mengabaikan Perjanjian TRIPS ...	306
15. UMKM dan Peluangnya dalam Presidensi G20	310

PRANATA HUMAS BERKELAS DUNIA

1. Belajar dari Mandalika, <i>Nation Branding</i> Tak Sekadar Jargon	315
2. Menarik Perhatian Publik terhadap Presidensi G20 Indonesia	319
3. Pranata Humas dan Narasi Keindonesiaan dalam Presidensi G20	323
4. Menu Spesial Presidensi G20 Indonesia: Covid-19, Pemulihan Ekonomi, dan Geopolitik	328
5. Mengaktifkan Humas di Tengah Kerumunan	334
6. Dari Humas untuk Dunia	338
7. SAI 20 Kawal Pemulihan Ekonomi Global	341
8. 5 Modal <i>Nation Branding</i> Indonesia Melalui G20	345
9. Memantik Semangat G20 Lewat Diseminasi Melek Media	349
10. Momentum G20, Kesempatan GPR Aktifkan Bauran Promosi	353
11. “Energi Risman” Pada Presidensi G20	357
12. Kala Mata Dunia Tertuju pada Indonesia	361
13. Pesan Perdamaian Dari Presidensi G20	365
14. Iprahumas Ramaikan G20 Dengan Karya	368
15. Kompetensi Wawasan Global Humas Membawa Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia	371
16. Tagar Bantu Perluas Percakapan G20 di Media Sosial	375
17. Mengartikulasikan Pemimpin dan Kepemimpinan yang Memberi Contoh	379
18. Informasi, Sumber Kekuatan Globalisasi	383
19. Bangun Jenama via Juru Bicara	387
20. Tantangan Pranata Humas Berkelas Mendukung Presidensi G20	391
21. 7 Taktik Menghadapi Perang Konten Versi Humas	395

TRANSISI ENERGI

1. Menyingkap Pesona Desa Karangrejo Borobudur sebagai Lokasi Kunjungan G20	401
---	-----

2. Sambut Gelaran KTT G20, Bali Darurat Sampah	404
3. Riset Kendaraan Listrik untuk Percepatan Energi Hijau Berkelanjutan	407
4. Dari Pemuda Indonesia, untuk Transisi Energi Dunia	411
5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Turunkan Emisi Karbon Dunia	415
6. Transisi Energi Menuju Energi Terbarukan	418
7. Transisi Energi Berikan Manfaat untuk Indonesia	422
Profil Penulis	427

DIGITALISASI

1

UMKM Digital, Upaya Mengentaskan Kesenjangan Ekonomi Digital di Tengah Perhelatan G20

Oleh: Achmad Djuhdi Endawan, S.Sos

Motivator ternama Winston Churchill mengatakan, ‘Orang pesimistis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan’. Kutipan kalimat motivasi ini mengingatkan kita pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di negeri ini.

Disadari benar oleh para pelaku UMKM, pandemi yang melanda dunia dua tahun kebelakang telah membawa banyak perubahan terhadap segala aspek manajemen proses bisnis usahanya. Sayangnya tidak semua perubahan ini dapat disikapi pelaku UMKM sebagai ‘peluang’, banyak UMKM yang mati suri, bahkan parahnya memilih untuk menutup secara permanen.

Mengapa demikian? Perlu kita pahami juga, selain terimbas pandemi, hingga saat ini UMKM masih banyak menghadapi permasalahan. Salah satunya disebabkan terbatasnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pemasaran dan proses bisnis di dalamnya. Lalu bagaimana agar perubahan tadi bisa berubah menjadi peluang yang menguntungkan?

tentunya harus diimbangi juga dengan inovasi dan kreatifitas lainnya.

Kondisi ini juga telah membawa banyak perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang awalnya terbiasa pergi berbelanja ke pasar, saat ini lebih banyak mengenal dan memanfaatkan beberapa *platform e-commerce* dalam negeri. Sebut saja Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia. Walaupun tidak semuanya pernah berbelanja ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan didalamnya, tapi setidaknya pernah mendengarnya.

Pemanfaatan *platform e-Commerce* seperti inilah yang dapat dijadikan peluang inovatif dan kreatif bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang sebagai pelaku industri nasional. *Platform e-commerce* merupakan langkah awal bagi UMKM untuk bertransformasi menggunakan alat promosi, sistem informasi, pembayaran, dan manajemen relasi dengan pelanggan seluruhnya dilakukan secara digital. Sekaligus agar pelaku UMKM dapat naik kelas, dan atau menjadi bagian dari rantai pasok (*supply chain*) nasional maupun global.

Bank Indonesia dalam laporan perekonomian 2021 mencatat, transaksi *e-commerce* Tanah Air diproyeksi menyentuh angka Rp 403 triliun, transaksi pembelian lewat *e-commerce* meningkat 51,6 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp 266 triliun. Begitu juga halnya pada 2022, transaksi *e-commerce* Indonesia diperkirakan akan terus naik mencapai Rp 530 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan.

Platform e-Marketing bagi UMKM

Pemerintah telah menetapkan tiga agenda prioritas Presidensi G20 tahun ini, isu transformasi digital menjadi salah satu dari 2 isu lainnya yang meliputi: *Global Health Architecture* dan *Energy Transition*. Topik transformasi digital yang berkaitan dengan UMKM dalam forum ini membahas upaya mendorong akses keuangan yang lebih inklusif dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pada skala lebih kecil, Pemerintah menjalankan strategi pemulihan perekonomian nasional yang diimplementasikan dalam *e-Smart* IKM. *e-Smart* IKM merupakan sistem basis data profil,

sentra dan produk IKM nasional yang diintegrasikan dengan marketplace dalam negeri, serta pendampingan tenaga ahli digital marketer untuk membantu pemasaran produk.

Apa saja yang diperoleh masyarakat jika mengikuti program ini? Peserta akan diikutsertakan dalam kampanye Bangga Besar Buatan Indonesia melalui promosi di *marketplace*, mendapatkan fasilitasi Kemenperin seperti pendaftaran merek dan sertifikasi serta *capacity building* media pemasaran *online*, aset digital, akun *marketplace* untuk *go-global*.

Pengembangan dan pembinaan konsep *e-marketing Government Public Relations* seperti ini dianggap cukup efektif dan efisien. Upaya ini sebagai jalur komunikasi penyebaran pesan dan memiliki kekuatan untuk pembentukan *branding* melalui internet marketing. Bukan hanya itu, upaya ini diproyeksikan menjadi sinergi yang mengarah pada *one stop solution*. Para pelaku UMKM didukung untuk dapat memahami ‘Moment of Truth’ lebih akurat, mampu melakukan inovasi dengan tepat terhadap *brand*-nya, hingga dapat bersinergi secara mandiri dengan melakukan kolaborasi *brand*.

Demikian juga ketika mulai memasuki sistem transaksi dan *marketing digital*, secara tidak langsung pelaku UMKM dituntut siap berkompetisi. Tidak hanya dengan pebisnis skala kecil saja, tetapi juga perusahaan besar. Menghadapi kondisi tersebut, pelaku UMKM bisa saling bergabung dan berkolaborasi. Strategi *marketing* kolaborasi *brand* bisa menjadi pilihan pengembangan daya saing. Walaupun terasa riskan bagi sebagian pelaku UMKM, karena jika dilakukan secara tidak tepat, dampak kerja sama ini bukan hanya berimbas pada *brand*, tapi juga profit perusahaan. Namun, di sisi lain kerja sama *brand* banyak menghasilkan keuntungan profit maupun peningkatan citra dari sebuah *brand* sendiri. Strateginya diterapkan mulai dari penciptaan bersama sebuah produk, *platform*, hingga logo baru sebagai elemen esensial sebuah *brand*. Aset yang dulu dianggap mahal, kini bisa dimiliki dan digunakan dengan biaya pemeliharaan jauh lebih murah. Inilah mengapa UMKM harus lebih fokus menjalin kerja sama daripada menyaingi kompetitor merek lainnya.

Bagaimana tingkat keberhasilan dari sebuah kolaborasi? Seperti kedua perusahaan Gojek dan Tokopedia misalnya, keduanya

berkolaborasi dalam layanan *e-commerce*, transportasi, pesan serta antar barang dan makanan, dan transaksi digital yang terintegrasi dalam satu ekosistem, yaitu GoTo. Kolaborasi ini berhasil menghadirkan *one stop solution* dalam memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat Indonesia.

Eksistensi UMKM sebagai model pengembangan ekonomi nasional dinilai mampu bertahan dan relatif lebih tangguh menghadapi krisis dampak pandemi Covid-19. Melalui tema “Recover Together, Recover Stronger” presidensi Indonesia dalam G20 diharapkan dapat mendorong kolaborasi konkret antarnegara dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis digital yang lebih merata dan berkelanjutan, terlebih lagi dalam upaya kolektif tidak hanya dalam sektor isu ekonomi saja melainkan isu internasional lainnya, termasuk iklim, pembangunan, dan perdagangan.

* * * * *

Budaya Kerja Berbasis IT, Semangat dari Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Andhika Pratama, S.IP., M.I.Pol.

Awal menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, saya ditempatkan dalam Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di sebuah Lembaga negara yang ditugaskan mengawasi jalannya Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu Bawaslu. Menjadi Humas dalam lembaga pemerintah khususnya lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemilu menjadi tantangan tersendiri, dimana banyak yang belum begitu mengenal lembaga pengawas pemilu ini. Adapun menurut Newsom, Turk dan Kruckeberg (2009: p5) Humas Pemerintah adalah:

“Job descriptions for PR positions in government vary dramatically. Some people who are called “public information officers” are really publicists, whereas others with precisely the same title may have all the responsibilities of a corporate vice president for PR.”

Sedangkan Menurut Ardianto, E. (2011:241): “Pejabat PR adalah seorang profesional atau komunikator profesional, ia diangkat oleh lembaga pemerintah dengan tugas melayani informasi kebijakan publik dan pelayanan. Seorang pejabat PR profesional adalah perantara atau jembatan antara lembaga pemerintahan dan rakyat atau masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ia harus mampu menjelaskan rencana. ”Dari pendapat-pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Humas Pemerintah adalah orang yang

profesional di bidang menghubungkan negara dan masyarakat, yang diangkat oleh lembaga pemerintah untuk memberikan informasi ke publik.

Mengubah budaya kerja ke arah yang lebih baik membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu tantangan bagi para Humas Pemerintah yaitu mengubah budaya kerja lama menuju budaya kerja yang baru untuk menjawab tantangan zaman. Orang tidak akan berubah dengan sendirinya hanya dengan sebuah instruksi saja. Sebuah budaya kerja organisasi benar-benar akan berubah ketika orang-orang yang ada di dalamnya menginginkan perubahan secara sadar dan sukarela.

Memang dalam awal pelaksanaan aksi perubahan, Humas Pemerintah akan menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi dalam tugas birokrasi pemerintah. Dibutuhkan pula komitmen dan konsistensi agar aksi perubahan digital pemerintah dapat terus dilaksanakan. Humas Pemerintah dalam hal ini harus konsisten melakukan pendekatan secara persuasif dan membangun komunikasi asertif kepada pimpinan dan staf yang ada di unit organisasi.

Menerapkan Budaya Bekerja Berbasis IT

Di sebagian besar instansi pemerintah seperti penatausahaan dokumen dan sebagainya yang ada masih menggunakan budaya kerja lama, yang belum sepenuhnya modern menggunakan teknologi informasi (IT). Manual, masih berupa dokumen fisik, dokumen tidak lengkap, atau dokumen belum terintegrasi satu sama lain, sebagai ciri khas budaya penatausahaan dokumen. Ciri tersebut berpotensi menimbulkan citra buruk di lingkungan instansi pemerintah.

Oleh karena itu, harus ada inovasi untuk melakukan perubahan didukung teknologi informasi. Dalam hal ini para Humas Pemerintah harus berusaha membangun dan membiasakan budaya pelayanan yang baru dan progresif yang berbasis IT untuk memperbaiki kinerja layanan penatausahaan dokumen dan data.

Ada 3 budaya IT yang diterapkan dalam aksi perubahan ini. Pertama, komunikasi dan koordinasi menggunakan media sosial seperti whatsapp, telegram dan lainnya, intensitas komunikasi,

kebutuhan akan koordinasi, perlunya responsivitas dalam melaksanakan pekerjaan khususnya tugas-tugas tim efektif dalam aksi perubahan ini mendorong pembuat perubahan dan tim efektif menggunakan media sosial di dalam melakukan komunikasi dan koordinasi. Perangkat media sosial seolah sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Kedua, Implementasi budaya digital dengan melakukan digitalisasi dokumen, seiring berjalannya waktu dokumen yang bersifat fisik mulai terganti dengan adanya dokumen digital. Dokumen fisik mempunyai keterbatasan usia dan kurang efisien karena memerlukan biaya. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini penatausahaan dokumen SDM yang ada akan dilakukan digitalisasi.

Ketiga, Pemanfaatan media/aplikasi IT yang efektif dan efisien dalam mendukung kinerja lembaga. Dalam aksi perubahan ini para Humas Pemerintah harus berusaha memanfaatkan aplikasi yang bersifat rutin dan jamak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi yang digunakan dalam aksi perubahan ini merupakan kombinasi aplikasi yang disediakan oleh google, media enkripsi thinkfi dan media penyimpanan awan (cloud). Aplikasi tersebut sangat mudah dalam pengelolaannya, mudah untuk dioperasikan, serta tidak memerlukan biaya.

Semangat Momentum Presidensi G20

Presidensi G20 tahun 2022 membuka jalan para birokrat Humas Pemerintah semangat melakukan perubahan nyata yang sesuai dengan perkembangan zaman. Digitalisasi menjadi suatu keniscayaan juga mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Impian menuju birokrasi kelas dunia dapat terwujud dengan mulus dan juga dalam kondisi G20 ini. Indonesia mempunyai kesempatan memperlihatkan pada dunia bahwa birokrasinya sudah dalam tahap menuju birokrasi yang berkelas dunia.

Termasuk reformasi birokrasi yang berlangsung di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan instansi yang terbentang dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Di Provinsi Jawa

Barat sendiri, terdapat 27 Bawaslu kabupaten/kota, yang artinya ada 27 fungsi hubungan antar lembaga yang harus berjalan.

Salah satu tupoksi bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga berdasarkan Perbawaslu 1 Tahun 2021 adalah fasilitasi kerja sama dan hubungan antar lembaga (sesuai dengan tingkatannya masing-masing). Karena banyaknya unit kerja, maka cakupan pantauan dalam bidang kerja sama antar lembaga pun juga cukup luas. Dalam hal ini, Bawaslu tingkat provinsi idealnya memiliki database atau sistem integrasi data kerja sama antar lembaga hingga ke Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang ada di provinsinya, yang pemanfaatannya dilakukan secara konsisten dan optimal.

Sistem ini penting untuk melakukan pendataan/inventarisasi data, mengukur capaian, melakukan evaluasi, hingga menentukan langkah strategis ke depannya. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Arah perubahan ini ialah mencoba untuk beradaptasi berdasarkan tugas Pokok dan fungsi unit kerja dan dikaitkan pada salah satu visi Bawaslu, yaitu memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

* * * * *

Presidensi G20, Momentum UMKM untuk Mendunia

Oleh: Arso Pranoto Nugroho, S.IP.

Munculnya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu terbukti merusak perekonomian nasional. Berbagai sektor perekonomian terdampak oleh pandemi tersebut yang mengakibatkan melambatnya roda ekonomi Indonesia. Banyak sektor usaha yang merugi dan tidak sedikit yang harus gulung tikar, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keterpurukan UMKM tentu memberikan pukulan telak terhadap perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan hampir sebesar 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Tanpa upaya membangkitkan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional akan sulit untuk diwujudkan.

Upaya membangkitkan UMKM dalam rangka memulihkan perekonomian nasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Apalagi dalam *event* tersebut, UMKM masuk menjadi salah satu pilar pembahasan dalam forum G20 tahun ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia mengusung isu pemulihan UMKM dengan mendorong terciptanya akses keuangan yang lebih inklusif dan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Keberadaan Presidensi G20 Indonesia, akan menjadi lokomotif sebagai momentum kebangkitan perekonomian Indonesia. Selain membawa peluang terhadap lapangan kerja yang lebih besar dan

investasi, Presidensi G20 juga akan membuka keran ekspor bagi produk-produk Indonesia, salah satunya UMKM ke berbagai belahan dunia. Presidensi G20 ini juga membawa peluang besar agar produk-produk unggulan daerah dapat mendunia. Apalagi saat ini sektor UMKM masih memiliki tingkat partisipasi UMKM di Indonesia masih cukup rendah dalam jaringan bisnis global.

Sampai saat ini, sebagaimana dilansir oleh ekonomi.bisnis.com, UMKM Indonesia yang terlibat dalam jaringan bisnis global hanya 6,3%. Angka tersebut jauh di bawah Malaysia (46,2%), Thailand (29,6%), Vietnam (21,4%) dan Filipina (20,1%). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum Presidensi G20 untuk membawa produk-produk UMKM Indonesia dapat mendunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia membawa transformasi digital sebagai salah satu isu prioritas dalam Presidensi G20, termasuk mewujudkan ekonomi digital di semua lini. Ekonomi digital sendiri, menurut Kementerian Keuangan, dapat menjadi penopang pemulihan ekonomi global karena kontribusi 15,5% terhadap PDB dunia. Sedangkan, visi transformasi digital akan memberikan dorongan besar bagi UMKM untuk dapat mendunia dan memberikan kontribusi terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Untuk itu, akselerasi transformasi digital dilakukan untuk menangkap peluang atas pesatnya perkembangan *e-commerce* yang dapat dimanfaatkan sektor UMKM, baik di skala nasional maupun global. Sebagai sektor yang berkontribusi atas penyediaan 97% lapangan kerja dan menyumbang PDB nasional sebesar 61,7%, sektor UMKM dikembangkan untuk dapat menerapkan visi transformasi digital untuk dapat mendominasi sektor *e-commerce* di Indonesia dan untuk membuka peluang-peluang dalam menjalin kerja sama ekspor dengan berbagai perusahaan dari berbagai negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah saat ini terus mengupayakan pembuatan ekosistem digital yang dapat mendukung pemasaran UMKM secara global. Tujuannya untuk menciptakan pasar tanpa batasan jarak dan waktu bagi berbagai produk UMKM di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga terus menggalakkan program agar berbagai UMKM di daerah dapat segera bersifat *go-digital* dan masuk ke dalam ekosistem digital tersebut sebagai bagian

dalam upaya agar UMKM dapat mendunia.

Selama pandemi, berdasarkan data yang diungkap smesco.go.id, jumlah pelaku usaha yang masuk ke dalam ekosistem digital sudah meningkat hingga dua kali lipat dari sebelum masa pandemi. Saat ini, jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 16,4 juta UMKM, yang sebelumnya hanya mencapai 8 juta UMKM. Pemerintah sendiri menargetkan di tahun 2024, terdapat 30 juta UMKM yang dapat masuk dalam ekosistem digital tersebut.

Sampai saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bersinergi dengan berbagai kementerian lainnya, terus menggenjot transformasi digital di sektor UMKM. Bahkan sebelum pandemi, kebutuhan digitalisasi untuk UMKM sudah menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah sendiri telah mencanangkan program-program seperti Peta Jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018, Peta *Jalan E-Commerce* di tahun 2019, dan Visi *Go Digital* 2020 yang semuanya menekankan pada pendampingan penguatan daya saing UMKM di ekonomi digital.

Pemerintah terus melakukan agenda akselerasi transformasi digital nasional yang mendukung ekosistem digital pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Agenda tersebut disusun dalam Peta Jalan Digital 2021-2024, yaitu dengan melakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital berbasis internet di berbagai daerah, penyiapan SDM digital nasional, dan penyiapan regulasi terkait skema pendanaan dan pembiayaan dalam transformasi digital.

Meski tidak mudah dalam mendorong ekspor produk UMKM, pemerintah Indonesia menjadikan Presidensi G20 sebagai momentum mendorong dialog untuk memperluas akses pasar UMKM. Di samping itu, pemerintah secara paralel juga menata strategi peningkatan ekspor. Momentum tersebut digunakan melalui transformasi digital di berbagai lini, termasuk UMKM agar dapat mendunia. Transformasi digital di sektor UMKM tersebut akan menciptakan pangsa pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM.

Adanya akselerasi transformasi digital juga dapat mengoptimalkan peranan UMKM sebagai pilar ekonomi di tengah terpaan pandemi

Covid-19. Transformasi digital juga dapat mendorong adanya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di sektor UMKM. Hadirnya kebijakan transformasi digital di sektor UMKM menunjukkan keseriusan Pemerintah berkomitmen memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

* * * * *

Gaungkan G20, Dengungkan Kolaborasi Riset di Indonesia

Oleh: Christine Widianingrum, S.Pd.

“Kemajuan ilmu pengetahuan harus bertujuan untuk menegaskan dan meningkatkan kehidupan manusia.” Demikian yang diungkapkan oleh Whitney. Dengan ilmu pengetahuan maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan manusia.

Seperti kita ketahui saat ini Indonesia dipercaya untuk menjadi Presidensi dalam forum G20 atau Group-20. Hal ini sangat membanggakan bagi kita, negara kita dianggap cukup mampu dalam memimpin dan berkolaborasi dengan negara-negara maju anggota G20.

Mulai November 2021, Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G20 meneruskan dari Italia. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa “Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan Presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema “*Recover Together Recover Stronger*,” pungkasnya.

Dilansir dari situs resmi G20, anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki dan Uni Eropa. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Ini merupakan kesempatan Indonesia untuk

menunjukkan kepemimpinannya di dunia internasional sekalipun masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo telah memberi arahan terkait tiga agenda utama G20 Indonesia yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital ekonomi, dan transisi energi. Dalam konteks aktivitas penelitian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menginisiasi pertemuan penting pembahasan riset dan inovasi dengan nama *Research and Innovation International Gathering (RIIG)*

BRIN merupakan badan resmi pemerintah yang memiliki tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi sebagai berikut: “Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Presidensi G20 Indonesia saat ini menjadi ajang bagi para periset di BRIN untuk bisa berkolaborasi dengan para periset di dunia. Mengutip siaran pers BRIN pada 12 April 2022, dikatakan bahwa “Sebagai salah satu rangkaian pendukung perhelatan Presidensi G20 Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menyelenggarakan *Research and Innovation International Gathering (RIIG)* sebagai *side event* untuk meningkatkan, mengintensifkan, serta memperkuat kolaborasi riset dan inovasi dengan berbagai sarana, prasarana, dan pendanaan di antara negara-negara anggota G20. 1st RIIG yang secara spesifik akan membahas tentang *Biodiversity Utilization to Support Green and Blue Economy* akan digelar pada Rabu, 13 April 2022, di Jakarta.”

“Pada G20 kali ini, RIIG akan difokuskan pada kesadaran dan membuat kesepakatan bagaimana kita berkolaborasi memanfaatkan biodiversitas berbasis pada kolaborasi riset, *sharing* infrastruktur, dan pendanaan secara sederhana,” ungkap Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

Keanekaragaman hayati (biodiversitas) merupakan isu yang sangat penting. Beberapa pemerintahan di dunia sendiri telah mengadopsi *mix digital green & blue economy*. Maka dari itu, pemanfaatan biodiversitas untuk mendukung *green & blue economy* juga perlu dikaitkan dengan pendekatan platform digital agar memaksimalkan hasil yang dicapai. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim BRIN sekaligus *Co-Chair* RIIG, Ocky Karna Radjasa. Momen G20 ini merupakan kesempatan yang sangat penting dan berharga sehingga dari RIIG yang diselenggarakan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi riset yang akan terjalin ke depan dengan anggota G20.

Kemampuan invensi dan inovasi dimaksudkan untuk menghasilkan produk hasil riset yang dilaksanakan dan inovasi yang berpotensi, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai sebagai keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan IPTEK yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan).

Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Peran Humas BRIN

Humas Pemerintah memiliki peran penting bagi Presidensi G20 di Indonesia. Hasyim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan Surat Imbauan pada 31 Januari 2022 kepada Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kementerian dan Lembaga serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota agar menyampaikan kepada seluruh pemangku jabatan Pranata Humas untuk mendiseminasikan informasi Indonesia sebagai Presidensi G20 baik di akun resmi instansi pemerintah/daerah maupun akun pribadi masing-masing.

Sesuai dengan tema G20 yang diangkat “Recover Together, Recover Stronger”, Pemerintah mengajak kita semua para pranata humas untuk turut mensukseskan Presidensi G20, “Dari Indonesia, kita pulih bersama.” Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia khususnya yang ada di daerah atau pelosok yang belum mengerti apa itu Presidensi G20, manfaat dan apa dampaknya.

Pranata humas BRIN diimbau turut menginformasikan manfaat dan pentingnya Presidensi G20 di Indonesia baik melalui akun resmi di satuan kerjanya ataupun akun pribadi dengan ide dan kreativitas yang dimiliki. Melalui konten yang diunggah dan digaungkan di setiap kegiatan di instansinya masing-masing, agar Presidensi G20 semakin dikenal masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pranata Humas BRIN turut berkontribusi dalam diseminasi informasi Presidensi G20 melalui pemberitaan di website dan media sosial, baik instagram maupun twitter dan youtube. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pada surat himbauan dari Kominfo yang sudah beredar. Melalui diseminasi G20 di setiap kegiatan yang dilakukan di BRIN maka diharapkan masyarakat dapat semakin mengerti pentingnya G20.

Melalui gaung G20 di berbagai kanal, diharapkan para periset BRIN baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih muda semakin semangat, solid dan kuat dalam melakukan kolaborasi riset baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

* * * * *

5

Belanja Lebih Mudah Lewat *Government E-Marketplace*

Oleh: Darmoyo, S.Pd., M.Kom.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan apresiasi atas peningkatan kinerja satker Badan Layanan Umum (BLU) agar tidak berpuas diri meskipun pertumbuhan pendapatan satker BLU tumbuh sebesar 80,85% dan berkontribusi pada PNBP negara sebesar 27,5%. Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional BLU, Maret 2022 lalu di Kementerian Keuangan. Prestasi BLU ini tentunya menarik perhatian nasional, lantas apakah satker BLU itu?

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP 23 Tahun 2005). Instansi pemerintah yang telah memiliki status pola pengelolaan keuangan BLU mempunyai keleluasaan atau fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam menerapkan praktik-praktik bisnis dan pelayanan kepada masyarakat yang sehat.

Hingga tahun 2021, jumlah instansi pemerintah dengan status badan layanan umum sebanyak 252 instansi. Jumlah ini dibarengi dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum dengan keleluasaan pengelolaan keuangan sendiri, diharapkan dapat mandiri dalam pembiayaan layanan dan kebutuhan operasional. Salah satu strategi yang diterapkan untuk menuju kemandirian finansial tersebut adalah dengan upaya meningkatkan pendapatan negara bukan pajak instansi BLU. Pendapatan yang semakin meningkat tentunya pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan instansi BLU lebih terjamin.

Upaya peningkatan pendapatan ini dapat melalui penyediaan barang dan atau jasa layanan sebagai keunggulan instansi BLU kepada masyarakat atau pihak mitra dengan skema kerja sama atau transaksi secara langsung. Pemanfaatan keunggulan sumber daya ini dalam kemandirian pendapatan menjadikan ciri tersendiri bagi instansi BLU dibanding instansi lainnya yang masih bergantung pada pembiayaan dari pemerintah.

Keunggulan produk barang dan atau jasa Instansi BLU. Setidaknya ada 2 bidang BLU yang mendukung, yaitu bidang pendidikan dan Kesehatan. BLU bidang pendidikan menyediakan buku-buku ilmiah karya dosen, jurnal ilmiah, produk hasil penelitian atau riset, inovasi dari mahasiswa dan dosen, jasa laboratorium, pelatihan-pelatihan teknis berbagai disiplin ilmu, sistem informasi, dan sebagainya.

BLU bidang kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, inovasi dalam kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sebagainya. Masih banyak keunggulan barang dan atau jasa di bidang BLU lainnya seperti pengelolaan dana, kawasan, dan barang/jasa lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, promosi keunggulan barang dan atau jasa layanan instansi BLU sangat dibutuhkan untuk mengenalkan produk barang dan atau jasa instansi BLU kepada masyarakat atau pihak mitra tentunya dengan tarif layanan yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan RI. Peran Humas dalam hal ini sangat penting sebagai ujung tombak dalam pengelolaan promosi ini. Peranan Humas ini sebagai penyampai informasi kepada pihak eksternal sekaligus sebagai negosiator dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan barang dan atau jasa yang dikelola oleh instansi BLU.

Semakin sering promosi yang terus menerus dilakukan tentunya

akan memberikan dampak terhadap ketertarikan pihak mitra untuk mengajak kerja sama atau menggunakan barang atau jasa instansi BLU. Hal ini tentunya memberikan hasil terhadap peningkatan pendapatan PNPB BLU sebagai strategi kemandirian finansial instansi BLU.

Government E-Marketplace

Di era digital sekarang ini, dengan memanfaatkan kecanggihan perkembangan teknologi informasi, media yang tepat dalam mempromosikan keunggulan produk barang dan atau jasa instansi BLU salah satunya dengan *Government E-Marketplace*. Sebuah platform yang tepat dan sesuai bagi instansi BLU untuk kemudahan dalam mempromosikan keunggulannya. Platform ini bisa juga difasilitasi oleh Kementerian Keuangan RI selaku kementerian pembina instansi BLU atau bisa dikembangkan oleh instansi BLU sendiri-sendiri.

Secara umum, gambaran dan proses bisnis *Government E-Marketplace* ini serupa dengan *marketplace* yang telah ramai sekarang ini seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Bli-Bli, dan sebagainya. Namun yang membedakan adalah bahwa *Government E-Marketplace* ini hanya menyajikan produk barang dan atau jasa keunggulan dari instansi-instansi BLU di Indonesia. Tentunya dengan regulasi, prosedur, pengaturan, dan tata penggunaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh instansi BLU tersebut.

Platform *Government E-Marketplace* ini sangat mudah untuk dikembangkan dan disajikan, bisa berbasis *website* dan atau berbasis android atau IOS. Hal ini juga sangat memudahkan untuk mempromosikan barang dan atau jasa instansi BLU. Peranan Humas pun sangat membantu dalam mempromosikan hal tersebut. Pihak eksternal dapat dengan mudah mengenali produk barang dan atau jasa BLU serta menangkap peluang untuk bekerja sama.

Government E-Marketplace ini tidak hanya sebagai promosi secara elektronik, namun dapat juga dilengkapi dengan fitur atau menu transaksi sekaligus dari order/pesanan yang dilakukan oleh pihak mitra atau masyarakat/pembeli. Sebagai contoh instansi BLU A memiliki buku hasil penelitian yang disajikan dalam *Government*

E-Marketplace, peluang yang ditangkap adalah masyarakat atau pembeli bisa secara langsung memesan buku tersebut, dengan cukup sekali klik dan akan muncul menu instruksi untuk pembayaran secara *online*. Setelah dibayar oleh pembeli, instansi BLU bisa langsung segera mengirimkan order tersebut ke pembeli dan pendapatan bisa langsung masuk ke rekening kas instansi BLU. Cukup mudah dan praktis, bukan?

Government E-Marketplace ini adalah salah satu strategi yang tepat untuk melakukan promosi keunggulan instansi BLU yang dimilikinya di era zaman digital sekarang ini. Langkah ini sebagai upaya yang akan memberikan hasil peningkatan pendapatan instansi BLU dan akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan kualitas instansi BLU di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

* * * * *

Moderasi Beragama Berbasis Literasi Digital

Oleh: Desi Hariati, S.Pd., M.Pd

Aparatur Sipil Negara (ASN), Integritas, dan Moderasi Beragama merupakan kata kunci yang selalu digaungkan pada kegiatan webinar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Akhir-akhir ini kehidupan umat beragama di Indonesia memiliki dinamika yang cukup keras dengan munculnya kasus kasus radikalisme dan terorisme yang berlatarkan pemahaman dan ideologi agama.

Pada 31 Oktober 2021 lalu, Presiden secara resmi menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Selanjutnya, Indonesia akan memegang keketuaan mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022. Tema Presidensi G20 yaitu *“Recover Together, Recover Stronger”* menyiratkan makna bahwa Indonesia ingin mengajak seluruh dunia saling bahu membahu untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Semua agama yang diakui di Indonesia juga mengenal ajaran moderasi beragama. Istilah moderasi beragama memang baru di negara kita, namun dalam Islam menyikapi moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan *“wasathiyah”*, bahkan umatnya mendapat julukan *ummatan wasathan*, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Dalam tradisi Kristen ada konsep *“golden mean”* dan Agama Buddha juga mengajarkan konsep jalan tengah, dikenal dengan Majjima Patipada.

Demikian halnya dalam tradisi Agama Konghucu ada konsep Chung Yung. Agama Katolik terbuka dengan perbedaan, tidak mengklaim sebagai yang paling benar, yang sesungguhnya hal ini merupakan ciri dan karakteristik agama yang moderat. Umat Hindu selalu mengadaptasi ajaran-ajaran agamanya sebagai bentuk moderasi (Moderasi Beragama, Convey-PPIM UIN Jakarta dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama).

Penguatan moderasi agama dengan literasi digital menjadi oase yang nyata dalam perhelatan G20. Keketuaan Indonesia dalam forum ini seolah menjadi momentum penguatan moderasi di tengah keberagaman Indonesia yang menyesuaikan dengan zaman serba canggih. Sebagai anggota negara G20 dengan keberagaman agama moderasi beragama menjadi isu global yang harus didengungkan dalam hajatan G20.

Indonesia memiliki peluang emas untuk menggemakan suara keragaman lintas agama yakni moderasi beragama ke dalam diskusi global G20. Hal ini disampaikan oleh wakil Presiden Forum Lintas Agama G20, Katherine Marshall. Senafas dengan hal itu, Kementerian Agama mendukung moderasi beragama sebagai salah satu upaya merawat karakter keberagaman yang moderat, toleran, dan saling menghormati.

Literasi Digital

Presidensi G20 Indonesia akan menjadi momentum baik dalam mengusung agenda strategis di tingkat global termasuk agenda moderasi beragama. Terwujudnya keharmonisan beragama didukung oleh semua pihak yang terlibat, bersinergi menggaungkan moderasi beragama dalam mencapai target yang diinginkan.

Terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan moderasi beragama berbasis literasi digital dalam ajang G20. Pertama, menyebarluaskan konten digital sebagai rujukan dalam menyebarkan paham moderat. Selanjutnya, mengadakan kegiatan moderasi beragama melalui penguatan literasi digital dengan fokus kepada empat indikator moderasi beragama.

Kemajuan teknologi terutama dunia digital membuat sebagian

masyarakat khususnya kaum milenial tidak lagi memperoleh ilmu agama dari guru atau kyai yang sifatnya otoriter. Mereka lebih menyukai belajar agama dengan instan dan praktis dengan memanfaatkan situs-situs online yang diakses lebih mudah tanpa harus keluar rumah. Dengan demikian gerakan moderasi beragama yang dikembangkan melalui literasi digital merupakan jalur edukatif dalam memerangi peredaran konten-konten negatif.

Literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, menganalisis sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori (Syamsir, 2020). Di era 4.0 diharuskan semua kalangan melek digital. Literasi digital berbasis moderasi beragama menjadi keharusan bagi masyarakat. Khususnya generasi milenial dan generasi Z merupakan kalangan yang rentan mengonsumsi media sosial bagi usia remaja. Apalagi Kelompok radikal yang dewasa ini gencar memperluas jangkauannya, tentu harus diimbangi dengan pendidikan digital yang mumpuni.

Literasi digital moderasi beragama fokus pada pendekatan analisis kritik terhadap konten-konten yang tersebar di dunia maya. Literasi ini sangat dibutuhkan agar generasi muda mempunyai tameng dan modal untuk memilih dan memilah isi media sosial. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diterima orang lain terjaga kebenarannya dan terhindar dari *kidzib*, *ghibah*, fitnah, dan *namimah*.

Kredibilitas suatu konten di media sosial harus diperhatikan oleh masyarakat agar terhindar dari doktrin-doktrin radikal. Sejatinya platform digital hanyalah penunjang bukan sebagai pedoman utama dalam mempelajari ilmu agama. Fitur media sosial akan bermanfaat apabila penggunaannya mampu menyortir konten yang baik sehingga terhindar dari konten yang radikal. Masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan tidak hanya penggunaan internet dan teknologi digital tapi juga membuka peluang di berbagai persoalan seperti contoh kurangnya kecakapan digital, rendahnya etika digital.

Generasi Z dan generasi milenial jumlahnya lebih dari 50% akrab dengan media sosial. Mereka menerima banyak informasi dari mulai wacana konservatif hingga liberalisme dan Islamisme. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau *hate speech* hingga letaknya hubungan umat beragama. Digitalisasi mestinya

dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan moderasi beragama. Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk pemersatu dan lebih produktif untuk bangsa yang lebih kondusif dan maju. Literasi digital berupa media sosial dianggap sebagai media dakwah yang sangat relevan saat ini. Intinya, nilai-nilai beragama dalam literasi digital harus diimplementasikan dengan baik.

Kebijakan penguatan moderasi beragama ini diharapkan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berpegang teguh dengan nilai dan esensi ajaran agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Moderasi beragama dapat menjadi parameter kebangkitan negeri ini, di tengah beberapa konflik yang mendera dunia yang mengaitkan agama di dalamnya.

Gunakan etika dalam menggunakan media. Saring sebelum *sharing*. Selalu *tabayyun*. Saling menghormati, nasehat menasehati. Jangan melihat aspek beda, tapi melihat aspek sama. Harapan, semoga moderasi agama Indonesia bisa menjadi panutan dunia.

* * * * *

7

Mojo, Teknik Jurnalisme Humas Masa Kini

Oleh: Dessy Angreni, S.Sos.

Memasuki era digital yang ada saat ini, mau tidak mau masyarakat harus dapat beradaptasi dengan cepat. Termasuk juga ketika kita ingin mengakses informasi. Era digital saat ini menjadi tantangan tersendiri buat kita yang bekerja dalam memberikan informasi, khususnya para praktisi hubungan masyarakat.

Pada penelitian “Perspectives of Communication in the Australian Public Sector” (Glenny, 2008) disepakati bahwa fungsi humas pemerintah adalah sebagai pemberi persuasi dan penyebaran informasi, serta berperan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat.

Humas pemerintah diharapkan mampu mengetahui apa masyarakat inginkan dari pemerintah, berusaha untuk membuat pemerintah responsif terhadap keinginan masyarakat, dan berusaha untuk memahami dan mempengaruhi opini publik (Baskin et al, 1992: 392).

Upaya ini diharapkan mampu membangun hubungan jangka panjang dan positif antara instansi pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dapat memenuhi tujuan untuk membangun pengertian, kepercayaan dan goodwill antara instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan komunikasi dialogis dan memelihara hubungan positif.

Sebagai humas pemerintah harus memiliki kompetensi terutama yang berhubungan dengan digitalisasi. Berdasarkan paparan dalam tulisan dari Alexander (2016), dapat kita pelajari bahwa, kebanyakan

dari industri secara internasional memerlukan humas yang memiliki keahlian-keahlian manajemen komunitas di media sosial (40%), pembuatan konten multimedia (39%), wawasan dan perencanaan (39%), kreativitas (39%), pengukuran dan analitik (31%), pembuatan dan produksi digital (23%). (The Holmes Report: 2015)

Dari data tersebut kita bisa pelajari bahwa kemampuan humas untuk menguasai pengelolaan teknologi digital sangat dibutuhkan oleh kebanyakan industri global maupun di pemerintahan. Ketidakmampuan menguasai hal itu sama artinya menjerumuskan diri untuk tertinggal informasi.

Sekarang ini, para petugas humas pemerintah atau yang juga dikenal sebagai *Government Public Relations*, telah mengalami evolusi dalam menjalankan perannya. Humas pemerintah yang kekinian, adalah mereka yang menguasai pengelolaan teknologi digital. Tugas berat memang ada di Pundak Humas. Selain sebagai salah satu aparatur negara, juga harus mampu membentuk opini publik, menampung, dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat. Humas Pemerintah juga melakukan kroscek data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Sebut saja hajatan G20. Indonesia terpilih sebagai pemegang Presidensi G20 yang memiliki nilai strategis untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju. Hal itu bisa terwujud apabila mampu mengkapitalisasi peluang dan tantangan dengan kemanfaatan optimal bagi kepentingan Indonesia.

Humas pemerintah sangat berperan dalam mensosialisasikan tentang Presidensi G20 ini kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah terpencil. Di dalam menyosialisasikan hal tersebut, hendaknya humas juga menyampaikan manfaat dari Presidensi G20 yakni momentum untuk meningkatkan ekonomi diplomasi melalui penciptaan arsitektur ekonomi dan kesehatan global pasca pandemi.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagian jurnalis maupun humas pemerintahnya menggaungkan berita terkait Presidensi G20 melalui mobile journalism dengan menggunakan smartphone karena lebih cepat diakses dan mereka bisa lebih mudah menyosialisasikan

peranan Presidensi G20 ke masyarakat hanya melalui smartphone tersebut.

Mobile Journalism

Perkembangan teknologi informasi saat ini tak dapat dipungkiri mejadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia tak terkecuali insan humas yang ada di lingkungan pemerintahan. Terbaru adalah adanya *Mobile Journalism* (Mojo). Mojo tak hanya menjadi sebuah bukti berkembangnya teknologi. Mojo sendiri merupakan sebuah teknik jurnalisme Humas.

Humas Pemerintah atau *Government Public Relation* (GPR) saat ini tidak hanya sekedar membentuk citra positif suatu pemerintahan saja. Namun GPR saat ini dituntut untuk lebih kreatif, memiliki kompetensi, serta memiliki loyalitas tinggi. GPR juga dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Kegiatan jurnalistik pun tidak terlepas dari keseharian GPR. Tak sekedar membuat rilis berita, saat ini GPR dituntut untuk mampu melakukan Mojo. Mendengar istilah Mojo mungkin tidak asing bagi sebagian insan Humas. Namun bagi sebagian lainnya, bisa ajai ini adalah sesuatu hal baru.

Seperti yang terjadi di salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yakni di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kebanyakan para jurnalis menggunakan smartphone saat melakukan peliputan. Mereka mengaku merasa lebih efisien karena hasil liputan tersebut (baik naskah berita maupun video dan foto) bisa langsung dikirim ke editor untuk diedit sehingga berita lebih cepat diterbitkan/ditayangkan.

GPR tidak bisa terlepas dari Mojo. GPR dituntut untuk kreatif cepat, dinamis dan flexible dalam bekerja. Untuk itu pemilihan smartphone yang berkualitas serta penguasaan teknik editing video sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan kehumasan sehari-hari pada saat melakukan peliputan di lapangan.

Saat ini semakin banyak aplikasi untuk pembuatan konten multimedia dan pengeditan pada smartphone. Perkembangan ponsel pintar yang memiliki resolusi tinggi dapat digunakan untuk

memproduksi dan mengedit paket berita video gaya TV, sosial media, siaran langsung video dan audio, berita dan fitur fotografi, berbasis foto. multimedia, dan film dokumenter pun semakin marak berkembang.

Tak hanya GPR, wartawan media pun juga menggunakan Mojo untuk berita radio dan podcast, video untuk berita TV dan dokumenter serta video untuk platform sosial. Oleh karena itulah sebagai seorang GPR dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya diharapkan mampu memanfaatkan Mojo.

Teknik Mojo tidak hanya terbatas pada perangkat yang statis tetapi juga mampu mengoptimalkan perangkat yang lebih dinamis. Mojo bahkan telah melekat dengan kegiatan Humas sehari-harinya.

* * * * *

Cerdas Bergerak Manfaatkan Momentum G20 Indonesia

Oleh: Dian Din Yati, S.Si

Terima apapun hasilnya, nikmati prosesnya, begitulah yang dikatakan orang bijak. Karena memang segala sesuatu butuh proses, tidak ada yang instan dalam kehidupan, kecuali mie instan. Menilik kasus judi *online* berkedok *trading* yang memakan banyak “korban” menjadi bukti bahwa masyarakat masih terdoda hal-hal yang bersifat mewah dan didapatkan secara instan.

Jangan berharap sesuatu yang instan akan membuahkan hasil yang baik. Membangun bisnis saja tidak dilakukan dalam waktu singkat. Banyak proses pembelajaran di dalamnya. Mulai dari manajemen keuangan, manajemen karyawan, *marketing* dan pemasaran, hingga membangun *branding* produk. Dalam suatu bisnis *brand awareness* merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Perusahaan besar tak akan tanggung-tanggung menggelontorkan dana untuk melakukan *branding*.

Tidak hanya perusahaan yang memerlukan *branding*, instansi pemerintahan juga memerlukan *branding*. Namun, berbeda dengan *branding* yang dilakukan perusahaan, strategi *branding* untuk instansi pemerintahan dilakukan bukan untuk keperluan komersial. Bila perusahaan melakukan *brand awareness* untuk menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas pelanggan, maka instansi pemerintah membutuhkan *branding* untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Membangun Branding

Branding tidak dilakukan dengan instan melainkan proses tumbuh dan berkembang yang memakan waktu, yang mungkin tidak sebentar. Butuh kesabaran, keuletan dan konsistensi dalam membangun citra lembaga. Menurut “Rhenald Kasali” dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Public Relations*”, *branding* dapat dibagi menjadi tiga jenis, *corporate branding*, *personal branding* dan *product branding*. Instansi pemerintahan dapat melakukan ketiga jenis *branding* ini sekaligus bila lembaga tersebut memiliki produk atau jasa yang dihasilkan. Namun, bisa juga hanya melakukan dua atau salah satunya.

Dalam membangun *institutional branding*, Pranata Humas memiliki peran penting. Sebagai jembatan antara lembaga, *stakeholder* dan masyarakat, Pranata Humas menjadi pilar dan punggawa dalam penyusunan strategi komunikasi dan kehumasan yang tujuan akhirnya adalah tercapainya *branding* lembaga yang baik, meningkatnya kepercayaan masyarakat, dan meningkatnya pelayanan publik.

Membangun citra lembaga dapat dilakukan dengan menggunakan teori *agenda setting*. Teori yang dikemukakan oleh McCombs & Shaw telah terbukti secara empirik dapat mempengaruhi opini publik. Dengan menggunakan *framing* media kesadaran masyarakat atau *public awareness* dapat dibangun melalui isu-isu yang dianggap penting untuk kemudian disebarkan ke khalayak. Dengan begitu persepsi publik dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan lembaga, yang dalam hal ini menyangkut citra baik lembaga.

Di era digital ini sesuatu yang viral akan dengan mudah mendapatkan perhatian. Sebisa mungkin konten yang diunggah adalah konten yang dapat menarik perhatian warganet sehingga dapat menjadi *trending topic*. Namun bila tidak dapat juga menggunakan strategi memanfaatkan tren atau sesuatu yang viral menjadi bahan konten untuk keperluan lembaga.

Memanfaatkan euforia Presidensi G20, Pranata Humas dapat membangun citra lembaga sekaligus mempromosikan lembaga hingga ke mancanegara. Presidensi G20 menjadi momentum untuk

menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu mempercepat pemulihan dunia pasca pandemi secara inklusif. Kepemimpinan Indonesia akan menjadi sorotan, sehingga apapun yang terkait dengan negara Indonesia akan menjadi sorotan dunia sehingga menjadi momen yang sangat baik mempromosikan diri di dunia internasional.

Branding instansi pemerintahan dapat dilakukan dengan mengusung tema Presidensi G20. Tiga aspek yang menjadi fokus Presidensi G20 yakni Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital, dan Transisi Menuju Energi Berkelanjutan dapat dijadikan bahan untuk melakukan *branding* instansi pemerintah.

Bergerak memanfaatkan viralitas Presidensi G20 untuk membangun citra lembaga, Pranata Humas harus pintar memanfaatkan momentum ini. Memasukkan isu-isu G20 ke dalam agenda setting lembaga hingga memproduksi konten-konten lembaga dengan mengaitkannya pada isu utama Presidensi G20. Pranata Humas dapat mengaitkan kegiatan lembaga dengan isu utama Presidensi G20 untuk menjadi bahan publikasi melalui tulisan di media massa, konten di *website* dan media sosial, *talkshow*, siaran *podcast*, hingga seminar.

Dengan memanfaatkan momentum Presidensi G20, mempermudah Pranata Humas untuk menaikkan nilai publikasi instansi pemerintah. Di sisi lain dengan turut mengangkat isu-isu G20 berarti telah turut mendukung dan membantu untuk mensosialisasikan Presidensi G20 sehingga isu-isu utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia dapat diketahui masyarakat luas dan mendapat dukungan baik di dalam dan luar negeri.

Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk membangun citra lembaga. Pranata Humas dituntut untuk selalu *up to date* mengikuti perkembangan terkini agar dapat melihat peluang-peluang yang dapat digunakan untuk membentuk citra lembaga dan menunjang tugas kehumasan lainnya, menjadi Pranata Humas berkelas yang mendunia.

* * * * *

Layanan Digital, Sumbu Kualitas Layanan Prima

Oleh: Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si.

Perkembangan teknologi digital menjadi kebutuhan utama masyarakat. Digitalisasi masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan. Mulai dari kebutuhan primer, maupun kebutuhan sekunder. Mulai dari memesan makanan ke rumah, naik kendaraan umum, hingga terkait dengan transfer uang. Semuanya menggunakan teknologi digital, yang dianggap dapat memberikan kemudahan.

Melihat data laporan yang diberikan oleh *We Are Social* dan *Kepios* di awal tahun 2022 ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang dimana pertumbuhannya di tahun 2022 meningkat sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu pengguna media sosial mencapai 191,4 juta orang dengan angka pertumbuhan 12,6% di tahun 2022.

Jika kita ambil suatu benang merah dari data tersebut, maka dapat menggambarkan bahwa potensi layanan digital sangat besar sekali. Utamanya, bagi dunia kehumasan dan pekerjaan yang berkaitan dengan layanan publik.

Dahulu, dalam memberikan atau mendapatkan setiap layanan mungkin kita akan sangat bergantung pada pertemuan secara fisik, tatap muka secara langsung, mengantri panjang, dan mengobrol secara langsung dalam ruang fisik. Namun kini keadaan mulai berubah, seiring kecanggihan teknologi dan perkembangan pesat dunia digital. Hal tersebut dapat dilakukan secara virtual tanpa

mengurangi kepastian layanan publik yang diberikan, walaupun terkadang layanan dalam ruang fisik pada beberapa hal masih dibutuhkan.

Seperti dikatakan oleh Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis dalam buku *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* bahwa salah satu tantangan di masa depan bagi komunitas riset media adalah revolusi teknologi komunikasi. Hal tersebut akan memproduksi teknologi dan aplikasi yang memenuhi setiap jenis spektrum komunikasi, mulai dari komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Teknologi dan plikasi tersebut memiliki kekuatan sehingga mampu untuk membentuk pengiriman pesan secara terus-menerus kepada setiap orang di bumi.

Masyarakat atau pemangku kepentingan menginginkan permasalahan yang sedang dihadapi terdapat solusi atau titik temu, sehingga dapat terselesaikan dengan cepat oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Transformasi Layanan

Pelayanan publik, yang menyangkut dunia kehumasan pemerintah sudah mulai beralih ke dunia digital. Informasi-informasi yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, kini bisa dijawab melalui teknologi atau aplikasi tertentu. Sementara media sosial misalnya, pertanyaan tertentu bisa dijawab langsung oleh humas kepada warganet yang bertanya.

Sesuai dengan pengertian media sosial di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Ini merupakan salah satu upaya humas memberikan layanan publik yang baik. Lewat fitur komentar, *reply*, dan *direct message*, hal tersebut dapat dilakukan oleh humas di mana

saja dan kapan saja lewat media sosial instansi.

Perubahan dalam melayani masyarakat juga dapat dilakukan oleh humas dengan membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang didalamnya juga terdapat inovasi ataupun transformasi layanan digital. Contoh inovasi yang dimaksud antara lain adalah fitur *live chat* pada laman instansi, *call center*, aplikasi digital permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan juga bisa disiapkan fitur nomor khusus instansi untuk media diskusi, percakapan, dan lumbung informasi.

Penciptaan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kehumasan akan mempermudah masyarakat untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Di sisi lain, tugas humas juga akan lebih terbantu dalam mengirimkan informasi kekinian kepada masyarakat.

Kualitas Layanan Prima

Layanan yang diinginkan oleh masyarakat adalah layanan dengan sepenuh hati. Jika ini diberikan, dapat memberikan kepuasan dari pengguna layanan. Dengan adanya transformasi layanan ke dalam layanan digital, maka diharapkan kepuasan tersebut dapat tercapai. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan akan menjadi tolok ukur keberhasilan layanan publik. Dengan demikian, Humas pemerintah akan memiliki andil besar dalam proses keberhasilan tersebut.

Berangkat dari kata “di mana saja layanan dapat diberikan”, yang berarti tak terbatas ruang fisik. Kualitas layanan digital yang baik akan menjadi tumpuan layanan prima. Karenanya transformasi layanan digital sudah harus lebih banyak diterapkan di dalam pelayanan publik. Tak salah jika akhirnya layanan digital menjadi sumbu kualitas layanan prima.

* * * * *

Makoyana, Pendukung Kolaborasi Riset dan Pemanfaatan Biodiversitas Indonesia

Oleh: Dwi Novia Puspitasari, A.Md

Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Presidensi G20. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan sejak akhir 2021. Termasuk menunjuk artis Maudy Ayunda sebagai juru bicara Presidensi G20. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar berkomitmen dalam menyukkseskan perhelatan besar tersebut.

Berbagai isu besar pun diangkat dalam perhelatan tersebut, salah satunya adalah biodiversitas. Biodiversitas merupakan salah satu isu yang akan menjadi prioritas dalam pembahasan mengenai lingkungan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki biodiversitas yang sangat potensial. Biodiversitas itu sendiri salah satu pilar dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya hal tersebut dapat terwujud jika pemanfaatan biodiversitas dibarengi dengan riset yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) salah satu lembaga yang mendorong kolaborasi riset dan pemanfaatan biodiversitas di antara negara anggota G20 dalam mendukung ekonomi biru dan hijau.

Dilansir dari laman brin.go.id, Maret 2022, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa BRIN akan melakukan kolaborasi riset dengan Negara G20. Salah satu yang menjadi

fokusnya adalah kolaborasi riset yang memanfaatkan biodiversitas. Hal ini merupakan salah satu upaya memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk memakmurkan masyarakat dan mendorong perbaikan perubahan iklim.

Kepala BRIN juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar yaitu biodiversitas, namun belum tereksplorasi dengan baik. Selain itu dari segi risetnya pun Indonesia masih jauh di bawah negara G20. Untuk itu diperlukan kolaborasi riset yang baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam guna memakmurkan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain Plt. Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian, Ocky Karna Radjasa dalam Preliminary Meeting Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG) G20 yang dilansir dari laman brin.go.id pada Maret 2022, juga menyampaikan BRIN ikut mendorong penguatan kapasitas riset dan pemanfaatan biodiversitas melalui kolaborasi secara global. Penelitian dan pemanfaatan biodiversitas tersebut dilakukan untuk mengatasi Covid-19. Pemanfaatan tumbuhan herbal dari keanekaragaman hayati tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan dan bahkan pengobatan Covid-19.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung pemanfaatan keanekaragaman hayati secara global adalah membangun berbagai fasilitas pendukung. Seperti membangun Indonesia Culture Collection (InaCC) sebagai sarana pusat penyimpanan koleksi mikroorganisme. Selain itu saat ini Indonesia juga sedang membangun fasilitas National Biodiversity Center (NBC)-KEHATI sebagai pusat seluruh data riset keanekaragaman hayati (biologi, mikrobiologi). Termasuk pengembangan fasilitas digital terkait keanekaragaman hayati flora guna mempermudah dan mendukung kegiatan penelitian.

Makoyana, Aplikasi Digital Keanekaragaman Hayati Kebun Raya

Tingkat kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini cukup tinggi. Hal ini disebabkan tingginya laju kerusakan lingkungan dan penurunan areal tutupan hutan. Kepunahan jenis tumbuhan yang

ada di Indonesia pun terus berlanjut. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya pencegahan maka keanekaragaman flora kita akan semakin terkikis.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan laju kepunahan tumbuhan adalah dengan melakukan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara bijak (konservasi) baik yang di luar maupun di dalam habitat aslinya. Salah satunya dengan adanya kebun raya.

Kebun raya merupakan suatu kawasan konservasi tumbuhan di luar habitat aslinya yang dapat meminimalisir adanya pengambilan tanaman secara langsung oleh manusia dari alam. Tidak hanya itu, kebun raya juga berfungsi untuk kegiatan penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Peran dan fungsi kebun raya itu sendiri dalam kebijakan pembangunan nasional pun sangat penting yaitu *to save*, *to study* dan *to use* yang meliputi kegiatan eksplorasi, adaptasi dan seleksi, manajemen koleksi dan kawasan, kajian potensi dan pemanfaatan. Kebun raya merupakan laboratorium hidup sebagai sumber penelitian dan pembelajaran. Kebun raya juga merupakan sarana penting dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Begitu pentingnya koleksi yang ada di dalam kebun raya maka dibuatlah sistem aplikasi Makoyana (Manajemen Koleksi Kebun Raya).

Aplikasi yang diinisiasi oleh Kepala Kebun Raya Purwodadi periode 2019-2021, Bayu Adjie ini diharapkan dapat menjadi literasi digital bagi masyarakat mengenai keanekaragaman hayati kebun raya Indonesia. Aplikasi ini juga memudahkan dalam mengetahui jenis tumbuhan yang memiliki nilai konservasi tinggi, dan jenis apa saja yang harus segera dilakukan upaya konservasi. Selain itu publik juga dapat melihat dan menganalisis data grafis flora yang ada di kebun raya, statistik koleksi setiap kebun raya, jumlah koleksi yang masuk ke dalam daftar IUCN dan yang terpenting adalah Indonesia telah memiliki sistem yang mampu membantu pengelolaan kebun raya. Aplikasi ini dapat diakses oleh semua orang melalui laman makoyana.brin.go.id.

Saat ini Makoyana baru menampung data koleksi yang ada di 5 kebun raya yang di bawah BRIN (Kebun Raya Bogor, Cibodas,

Purwodadi, Eka Karya Bali dan Cibinong) dan 5 kebun raya daerah. Namun, ke depannya ditargetkan data dari 45 kebun raya Indonesia dapat tertampung di sini. Penambahan fitur pun terus dikembangkan seperti foto koleksi, peta titik tanam, *barcoding* dan lain sebagainya. Sementara ini data yang dimasukkan ke dalam aplikasi lebih kepada master data (jumlah koleksi, tanaman terancam punah), data kegiatan registrasi (penerimaan dan verifikasi dinamika koleksi), koleksi (dinamika yang ada di koleksi seperti pengentrian tanaman mati, koleksi tumbuh kembali, perubahan nama koleksi), dan pembibitan (bibit siap tanam, bibit mati dan perubahan nama bibit).

Dengan adanya Makoyana ini diharapkan dapat menjadi literatur digital bagi keanekaragaman hayati kebun raya Indonesia. Sehingga dapat bersama-sama dengan National Biodiversity Center (NBC)-KEHATI dalam mendukung kolaborasi riset dan pemanfaatan biodiversitas Indonesia

* * * * *

Bak Bunglon, Humas Harus Adaptif di Era Digitalisasi

Oleh: Edi Susanto, SH.

Disadari atau tidak, hal pertama yang seringkali kita lakukan ketika bangun tidur adalah mencari telepon seluler (ponsel). Kenapa? selalu ada yang perlu dicek setiap pagi kaitannya dengan pekerjaan, kebutuhan informasi pribadi, atau pertemanan. Entah mengecek email, aplikasi *chat*, atau berselancar dengan internet untuk mengakses media sosial atau sekadar mencari informasi terkini. Selain itu, banyak pertemuan dengan konsep daring menjadi kegiatan yang lumrah diikuti saat ini.

Hal lain yang kini juga lazim kita temui adalah pilihan pemanfaatan berbagai layanan publik maupun swasta secara daring, seperti pada layanan kesehatan. Salah satunya adalah konsultasi kesehatan secara daring melalui aplikasi kesehatan. Banyak testimoni positif pengguna yang merasa lebih efektif dan aman ketika memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di masa pandemi Covid-19. Kita begitu akrab dengan teknologi yang serba canggih. Kini, sebagian besar orang pada berbagai kelompok umur umumnya telah memiliki pengalaman dan melakukan berbagai aktivitas yang sarat dengan basis teknologi komunikasi dan informasi setiap harinya. Informasi terkini dan jejaring komunikasi ada dalam genggam tangan atau dalam sekali sentuh pada *keyboard* laptop kita.

Pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi (TIK)

semakin maju dan berkembang pada era revolusi industri 4.0. Ditambah lebih dari dua tahun terakhir ini, dunia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak pada intensitas penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam kegiatan sehari-hari yang semakin tinggi dan masif. Digitalisasi menjadi sebuah proses yang mutlak terjadi, yaitu peralihan penggunaan media konvensional ke teknologi tinggi (digital, robot, *artificial intelligent* (AI), dan sebagainya) karena tuntutan akses informasi yang super cepat dan tuntutan membuat berbagai inovasi berbasis teknologi tinggi. Digitalisasi terjadi pada banyak lini seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Digitalisasi memberikan kemudahan, tetapi juga berdampak pada perubahan gaya hidup dan tingkah laku individu maupun sebuah instansi dan organisasi. Untuk itu, bak bunglon, Humas Pemerintah mutlak harus beradaptasi.

Hal ini menjadi tantangan bagi Humas Pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang tidak hanya cepat bagi publik, tetapi juga kredibel. Humas Pemerintah harus terus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan perannya sebagai makelar hubungan harmonis antara pemerintah dan publik. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, kebijakan dan program pemerintah harus tersampaikan dengan apik dan transparan kepada publik.

Humas Pemerintah harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi terkini. Transformasi Humas Pemerintah dalam era revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan. Humas Pemerintah dituntut memiliki kompetensi yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Humas Pemerintah bertanggung jawab terhadap distribusi informasi dan komunikasi publik, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transformasi tersebut akan terjadi dengan baik jika Humas Pemerintah dapat membangun rapor/ citra baik di mata publik dan mengedukasi publik pada segmen/sasaran yang dinilai potensial.

Bak bunglon yang beradaptasi dengan cara mimikri yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan/tempat hinggapnya. Humas Pemerintah pun harus adaptif menghadapi masyarakat kekinian (kontemporer) yang sangat dinamis dalam penggunaan

teknologi tinggi. Mengutip dari laman [internetworldstats](https://www.internetworldstats.com), pengguna internet di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 212,35 juta jiwa dan menduduki urutan ketiga terbanyak di Asia. Lebih rinci pada laman datareportal.com per Februari 2022 disebutkan pengguna Youtube, Facebook, Instagram, dan Tiktok di Indonesia berturut-turut sebanyak 139 juta; 129,9 juta; 99, 15 juta; dan 92, 07 juta jiwa.

Modal yang baik bahwa publik familiar dengan pemanfaatan teknologi tinggi. Akan tetapi, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Humas Pemerintah dalam menjalankan perannya saat ini. Tantangan yang dihadapi Humas Pemerintah saat ini diantaranya adalah belum meratanya kemampuan dan keterampilan Humas Pemerintah dalam menjalankan perannya, literasi digital publik masih kurang sehingga muncul fenomena penyebaran informasi bohong (hoaks), rantai birokrasi panjang sehingga ada kecenderungan tidak responsif terhadap gejolak publik, dan sebagainya. Banyak tantangan muncul bagi Humas Pemerintah, namun tidak menutup peluang untuk terus mengembangkan diri.

Lalu bagaimana strategi yang bisa diupayakan agar peran Humas Pemerintah optimal? Humas Pemerintah kini tidak boleh gagap teknologi (gaptek), tapi harus menguasai berbagai teknologi baru yang potensial untuk penyebarluasan informasi kehumasan. Hal ini dapat dilakukan dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan atau tukar informasi (*sharing session*) komunitas atau organisasi profesi dan sebagainya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi.

Selanjutnya strategi yang dapat diupayakan oleh Humas Pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi adalah memanfaatkan secara maksimal TIK agar pesan tersampaikan. Selain itu Humas Pemerintah juga harus kreatif dan harus memahami tren global dalam lingkup TIK. Segmentasi sasaran kehumasan dapat dipertimbangkan untuk diperluas, tidak melulu fokus pada kelompok dewasa.

Remaja atau anak-anak dapat dipertimbangkan menjadi segmen potensial penyebarluasan informasi/ edukasi, akan tetapi tergantung pada konten yang disampaikan. Hal yang tidak kalah penting adalah pesan yang ingin disampaikan harus dikemas menarik, selain bersifat

edukatif dan informatif. Pemilihan media juga harus tepat sesuai dengan segmen yang hendak dituju.

Media menjadi saluran penyampaian pesan kepada publik yang penting untuk membentuk dan mempertahankan citra pemerintah serta meminimalisir opini negatif publik terhadap pemerintah. Membangun jejaring kolaborasi antar Humas Pemerintah atau dengan humas swasta juga penting dilakukan untuk dapat menjangkau lebih luas sasaran.

Mari semangat diri bertransformasi menuju Humas Pemerintah yang lebih maju: adaptif dan responsif demi publik. Mari terus semangat memupuk dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Maju terus Humas Indonesia!

* * * * *

Ketersediaan dan Distribusi Digital Pangan Global

Oleh: Endah Kartikawati, SE., MM.

Kuasai pangan maka engkau akan menguasai rakyat, ini yang pernah disebutkan oleh Henry Kissinger, pemenang hadiah Nobel Perdamaian 1973, yang menunjukkan begitu strategisnya urusan pangan bagi semua bangsa.

Topik soal menjaga ketahanan dan perdagangan pangan yang berkeadilan juga menjadi pokok bahasan oleh 19 negara utama dan Uni Eropa (EU), anggota forum kerjasama multilateral G20. Kelompok negara G20 menjadi bagian penting, karena mempresentasikan 2/3 populasi dunia dan 75% perdagangan global dunia. Sehingga hasil pembahasan pada pertemuan kelompok negara-negara ini menjadi strategis bagi dunia.

Berbagai gelaran dengan pokok bahasan telah diselenggarakan sejak 1 Desember 2021 dan terus berlangsung hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) akhir tahun 2022 nanti. Yogyakarta, Makassar dan Denpasar telah menjadi tempat gelaran sejalan dengan tugas keketuan Indonesia di Forum G20.

Topik pembahasan pangan yang masuk dalam kelompok *Sherpa Track*, diampu oleh kelompok kerja bidang pertanian atau Agricultural Working Group (AWG) yang dipimpin oleh Kementerian Pertanian. Tiga isu prioritas menjadi agenda pembahasan, yakni Pertama, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, mempromosikan perdagangan pangan yang

terbuka adil dapat diprediksi dan transparan. Dan ketiga, mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk memperbaiki kehidupan pertanian di wilayah pedesaan. Yang dibalut dalam tema besar, *'Balancing Production and Trade to Fulfil Food for All'* atau Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Dunia dengan Keseimbangan Produktivitas dan Perdagangan.

Pemenuhan kebutuhan pangan bagi tiap individu menjadi isu sentral, terlebih dengan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang melanda global yang telah menciptakan tantangan terhadap ketahanan pangan. Penurunan produktivitas pangan dan pembatasan pergerakan orang dan barang yang terjadi di tingkat global menjadi penyebab.

Antar negara yang memiliki surplus komoditas pangan masing-masing tidak dapat saling berniaga akibat jalur logistik dan sistem distribusi pangan terkena dampak serius akibat pembatasan saat pandemi. Belum lagi beberapa negara menerapkan kebijakan proteksi melalui stok nasional, yang berdampak pada ketidakseimbangan sistem pangan global. Belum lagi tantangan perubahan iklim yang menjadikan masalah pangan menjadi kompleks.

Terobosan Sertifikat Elektronik

Sejalan dengan teori TR Malthus, yang menyebutkan bahwa pertambahan penduduk mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Masalah kekurangan pangan bakal berujung kematian dan penyakit.

Sebagai 'bahan bakar' manusia, pangan sangat strategis dan dalam pengertiannya, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah ataupun tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Sumber hayati yang dimaksud salah satunya berupa produk pertanian.

Ketersediaan pangan yang menjadi fokus dan dilakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan hasil pertanian, yakni dengan cara ekstensifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Hasil pertanian dinikmati hingga kini.

Ketersediaan pangan dianggap cukup pada tingkat global, meskipun di beberapa bagian negara masih ditemui krisis pangan.

Ketersediaan pangan saja tidak cukup, perlu pendistribusian. Pembahasan tentang ketersediaan dan pendistribusian pangan sangat dibutuhkan.

Perdagangan hasil pertanian menjadi perhatian dunia. Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) memberikan aturan yang khas terhadap komoditas pangan. Salah satunya, ketentuan kesehatan dan keamanannya yang dijamin oleh otoritas perkarantinaan di masing-masing negara.

Ketentuan dibuat untuk menjaga kelangsungan sumber daya hayati dunia akibat potensi ancaman hama penyakit hewan dan tumbuhan yang berbahaya. Ketentuan ini juga dibuat untuk mewujudkan perdagangan produk pertanian dan pangan yang berkeadilan. Tidak ada pembatasan tarif untuk perdagangan pertanian, melainkan difokuskan pada aspek kesehatan dan keamanan.

Sebagai salah satu alat atau tools perdagangan, efektivitas sistem perkarantinaan di seluruh negara menjadi suatu keharusan. Dengan berkelompok, forum G20 menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan ketersediaan dan pendistribusian pangan produk pertanian.

Dukungan teknologi informasi pada sistem perkarantinaan diperlukan guna percepatan layanan. Dukungan ini diperlukan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan menghubungkan antarnegara. Distribusi pangan yang berujung pada ketersediaan pangan bagi penduduk dunia ini selanjutnya akan menjadi suatu keniscayaan.

Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan terobosan inovasi berupa sertifikat elektronik, atau *e-certificate (e-Cert)*. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini potensinya ditolak atau re-ekspor produk pertanian di negara tujuan dapat diminimalisir.

Penjaminan kesehatan dan keamanan produk pertanian, berupa sertifikat kesehatan tumbuhan atau hewan yang dikeluarkan oleh Otoritas Karantina Pertanian. Sertifikat harus tiba sebelum produk

sampai di negara tujuan, agar kepastian keberterimaan menjadi solusi. Sertifikat kesehatan dan keamanan dikirimkan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan negara yang dituju, dilanjutkan pengiriman komoditi pertanian.

Perjalanan, proses bongkar muat, dan proses kepabeanan memakan waktu dan sangat rentan untuk produk pertanian ini. Sertifikat elektronik menjadi terobosan digital elektronik, sebagai kepastian keberterimaan negara tujuan dan menjadi solusi bagi pendistribusian bahan pangan.

Saat ini, penggunaan *e-Cert* telah diterapkan oleh Indonesia dengan tiga negara telah terhubung yakni Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya para eksportir produk pertanian adalah makin meningkatnya daya saing, sehingga tren peningkatan ekspor pertanian kita makin positif. Bagi negara tujuan, manfaat yang didapat adalah produk pangan asal pertanian telah terjamin kesehatan dan keamanannya.

Jika penggunaan inovasi ini dapat diperluas di seluruh negara G20, maka ketersediaan dan keseimbangan pangan global dapat terjaga. Ajang ini dapat dijadikan untuk mempromosikan salah satu terobosan digital pertanian Indonesia untuk kepentingan global.

* * * * *

ASN Agile Wujudkan Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Ismi Subhan Hehamahua, SH.

Era disrupsi digital AADC telah terjadi saat ini. AADC, bukan ‘Ada Apa Dengan Cinta’, tetapi Accept, Adapt, Digital, Creative dan Collaborative dalam langkah langkah yang telah dilakukan Pemerintah. Pada 2020 hingga 2022, kita saling bersinergi menuju rencana pemulihan di segala sektor.

Teknologi digital saat ini telah memasuki lompatan yang jauh ke depan. Hal itu terjadi seiring pandemi yang mengubah kebiasaan kita dalam bekerja dan beraktivitas. Saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini dituntut agar makin cakap dalam berliterasi digital. Terlebih tahun 2022 ini Bangsa Indonesia didaulat sebagai tuan rumah agenda bergengsi internasional. Tentunya bangsa Indonesia patut berbangga dan mendukung penuh kesuksesan perhelatan akbar ini.

Saat ini masyarakat Indonesia di segala lapisan tengah jamak mendengar kata *Presidensi G20* yang ramai dibicarakan. Hal tersebut adalah merupakan sebuah posisi dari suatu Negara jika menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Forum G20.

Menurut laman *Kantor Sherpa G20 Indonesia* melalui Kemenko Perekonomian RI, G20 atau *Group of Twenty* merupakan forum utama kerja sama *multilateral* yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Perhelatan G20 muncul pada 1999 telah

berkembang menjadi pertemuan tahunan yang melibatkan para kepala negara dan pemerintahan.

Di tengah upaya mempercepat transformasi digital, pemerintah telah melakukan terobosan Peta Jalan Digital Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Gerakan ini digencarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersama jajarannya sejak 2021 lalu.

GNLD merupakan bentuk antisipasi dan adaptasi dalam perkembangan/ perubahan teknologi. Apalagi saat Pandemi COVID-19, dan Pesatnya perubahan teknologi sedemikian cepat, Hal ini tentu saja dapat menimbulkan resiko besar bagi mata pencaharian masyarakat. Jangan sampai waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas saat ini di tempat kerja oleh manusia dan mesin akan sama.

Oleh karena itu, investasi mendesak dalam Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk menciptakan kesempatan bersaing secara adil dan profesional, Dengan memastikan orang-orang diberi kesempatan untuk memenuhi potensi mereka dan berkembang. Jangan sampai kita *dipaksa berubah* oleh teknologi itu sendiri sebelum kita sempat tersadar.

Diprediksi akan ada pertumbuhan dan penurunan permintaan pekerjaan. Namun, jika apalagi program-program pembelajaran yang ketinggalan zaman akan semakin memperburuk ketidaksesuaian keterampilan di masa depan.

Semangat Presidensi G20 Indonesia sangat relevan pada tuntutan kemampuan digital Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini dibutuhkan ASN yang mampu mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Bergerak lincah dan dinamis namun tetap terarah dan terukur serta dalam kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan saat ini Presiden Joko Widodo telah merampingkan struktur birokrasi ASN. Perampingan tersebut dilakukan melalui penetapan pejabat struktural, yaitu Pejabat Tinggi Madya dan Pratama. Pejabat Administrator hingga Pengawas pun telah banyak yang telah beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melalui skema penyetaraan jabatan atau *inpassing*. Pemangkasan regulasi yang menghambat pelayanan juga dilakukan. Tidak hanya itu, untuk

meninggalkan sekat ego sektoral, reformasi birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan organisasi yang gemuk sehingga mampu bergerak lebih lincah.

Birokrasi ASN kini meninggalkan prosedur yang rumit menjadi simpel dan yang lambat menjadi cepat. Birokrasi ASN meninggalkan zona nyaman ala *jaman Feodal*, beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan potensi dengan menjadi *trendsetter* bukan *follower*.

Mau tidak mau, suka tidak suka era, saat ini membuka mata dan pikiran ASN untuk melek digital dan teknologi. ASN harus mampu kerja mandiri, cepat, cerdas, agile, dan terukur dalam menyelesaikan permasalahan dalam bekerja, khususnya dalam mewujudkan keberhasilan Presidensi G20 Indonesia.

* * * * *

G20 Momentum Transformasi Digital Bagi Penyandang Disabilitas

Oleh: Lida Noor Meitania, S.H., M.H.

Sebuah kisah klasik menceritakan tiga orang penyandang disabilitas netra yang sama sekali belum pernah tahu bentuk gajah. Orang yang meraba telinga gajah berpendapat gajah itu besar, terasa kasar, luas, dan lebar seperti permadani. Orang yang memegang belalai, menggambarkan gajah mirip pipa lurus bergema, mengerikan dan suka merusak. Sedangkan orang yang memegang kaki gajah berpendapat gajah itu kuat dan tegak seperti tiang. Masing-masing penyandang disabilitas netra tersebut hanya menyentuh satu bagian saja dan keliru memahaminya. Gambaran gajah yang sebenarnya baru diperoleh jika semua gambaran tiga orang penyandang disabilitas netra tersebut digabungkan menjadi satu.

Lalu bagaimana jika disabilitas netra diajak menonton bioskop? Sebagai media komunikasi dan hiburan, film bioskop juga bisa ditonton oleh penyandang disabilitas netra. Museum Penerangan, salah satu UPT di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewujudkannya di Bandung, pada Maret 2022. Masing-masing penyandang disabilitas netra didampingi satu orang relawan pembisik (*visual reader*) yang akan membisikkan tayangan film di layar.

Kesempatan Kerja

Penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6,2 juta jiwa

(Susenas, 2020). Beberapa indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Sebanyak 71,4 persen penduduk penyandang disabilitas adalah pekerja informal, akibat kurangnya akses ke pasar tenaga kerja. Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas relatif lebih tinggi dibandingkan non penyandang disabilitas. Sebesar 11,42 persen penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan sementara non disabilitas sebesar 9,63 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada penyandang disabilitas ganda atau multi (lebih dari satu) lebih tinggi lagi yaitu sebesar 13,38 persen (Bappenas, 2021).

Akses teknologi juga masih relatif lebih rendah dibandingkan non disabilitas. Kepemilikan telepon genggam (*handphone*) di tahun 2020 pada kelompok non disabilitas mencapai 59,4 persen dan kelompok disabilitas sebesar 36,7 persen. Penggunaan internet pada kelompok disabilitas hanya 18,9 persen, sedangkan di kelompok non disabilitas sudah 52,7 persen (Bappenas, 2021). Padahal banyak peluang sosial ekonomi yang besar dengan memanfaatkan internet.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengubah paradigma dari pengelolaan penyandang disabilitas bukan lagi *charity* atau penerimaan sumbangan melainkan *right based*. Penyandang disabilitas tidak lagi hanya terkait sektor sosial saja tetapi juga berkaitan dengan sektor lainnya diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, dan komunikasi.

Peluang kerja bagi penyandang disabilitas sudah terbuka. Pemerintah pusat dan daerah telah membuka formasi disabilitas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2 persen untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Namun demikian, tidak semua formasi dapat terisi. Kemkominfo pada 2018 mengalokasikan 6 formasi CPNS penyandang disabilitas namun tidak diisi oleh penyandang disabilitas. Pada 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalokasikan

12 formasi CPNS penyandang disabilitas. Sama dengan tahun sebelumnya, tidak ada penyandang disabilitas yang mengisi. Baru pada 2021, dari 23 formasi disabilitas yang dialokasikan, diisi oleh 6 orang penyandang disabilitas (Kemkominfo, 2022).

Begitu juga di pemerintah daerah. Pada 2021, empat formasi CPNS penyandang disabilitas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan tidak terisi (Banjarmasin.tribunnews.com, 2021). Sebanyak tiga formasi disabilitas CPNS 2021 Pemerintah Kota Padang nihil pelamar (Kompas.com, 2021).

Salah satu isu prioritas yang akan dibahas pada Presidensi G20 Bidang Ketenagakerjaan atau *Employment Working Group (EWG)* adalah pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas. Terkait isu ini, Indonesia akan mendorong negara-negara G20 dan merumuskan kebijakan yang afirmasi dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Dengan demikian, para kelompok ini dapat berpartisipasi dalam pasar kerja untuk menghadapi disruptif digital dan dampak pandemi.

Transformasi Digital

Government Public Relations (GPR) mesti paham bahwa penyandang disabilitas membutuhkan cara khusus untuk mendapatkan informasi publik. Sejak awal pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, Kemkominfo secara responsif memenuhi harapan penyandang disabilitas rungu dalam mengakses informasi pandemi. Setiap hari, Juru Bahasa Isyarat (JBI) melakukan penjurubahasaan di setiap konferensi pers yang digelar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Konferensi pers tersebut bisa diakses secara langsung melalui media sosial Youtube.

Selain itu, penyandang disabilitas rungu bisa terbantu mengakses informasi siaran langsung konferensi pers melalui internet maupun webinar dengan fitur *closed* dan *open caption*. *Closed caption* bisa dipasang setelah video selesai diproses dan siap tayang. Contohnya di Youtube. Hal ini akan memudahkan mereka, karena mengubah suara menjadi tulisan. Fitur bisa dinyalakan atau dimatikan, sesuai

kebutuhan. Sedangkan fitur *open caption* tidak bisa dimatikan, dan melekat pada video.

GPR bisa menggunakan fitur *open caption* sejak proses editing video sebelum ditayangkan di media sosial, karena tidak semua media sosial memiliki fitur seperti Youtube. Fitur ini memudahkan para penyandang disabilitas rungu karena mengubah suara menjadi tulisan.

Bagi penyandang disabilitas netra, bisa mengakses informasi melalui media online di layar laptop atau smartphone menggunakan aplikasi *screen reader* (pembaca layar). Aplikasi ini akan membacakan teks dan mengeluarkan suara melalui *speaker* yang bisa diperdengarkan kepada mereka.

Konten video yang diproduksi GPR, sebaiknya menggunakan suara dan teks. Sehingga penyandang disabilitas netra bisa mendengarkan dan penyandang disabilitas rungu bisa membaca informasi yang dikemas dalam bentuk video. Mari optimalkan media komunikasi yang ramah disabilitas untuk Indonesia Inklusi.

* * * * *

Memanfaatkan *Chatbot WhatsApp* untuk Mengelola Penyebaran Informasi

Oleh: Luciana Retno Prastiwi, S.I.Kom., M.Med.Kom.

Indonesia menyelenggarakan perhelatan besar berskala Internasional berupa pertemuan para pimpinan dunia yang tergabung dalam G20. Berdasarkan laman situs web [g20.org](https://www.g20.org), G20 adalah *platform* multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara besar di dunia yang maju dan berkembang secara ekonomi. G20 memegang strategi penting dalam mengamankan pertumbuhan ekonomi global dan kemakmuran di masa depan. Pada tahun 2022 ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah G20 yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali.

Ajang G20 kali ini mengangkat tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Tema ini dipilih mengingat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian seluruh dunia. Maka dari itu Indonesia mendorong seluruh negara untuk bekerja sama dalam mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Terdapat tiga isu yang menjadi prioritas dalam G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Setiap isu ini sangat berkaitan dalam upaya untuk menopang kehidupan global agar bisa bersama-sama bangkit pasca pandemi COVID-19. Tulisan ini akan membahas isu transformasi digital, tentang bagaimana teknologi digital sangat memudahkan masyarakat memperoleh informasi, bahkan menangkal hoaks.

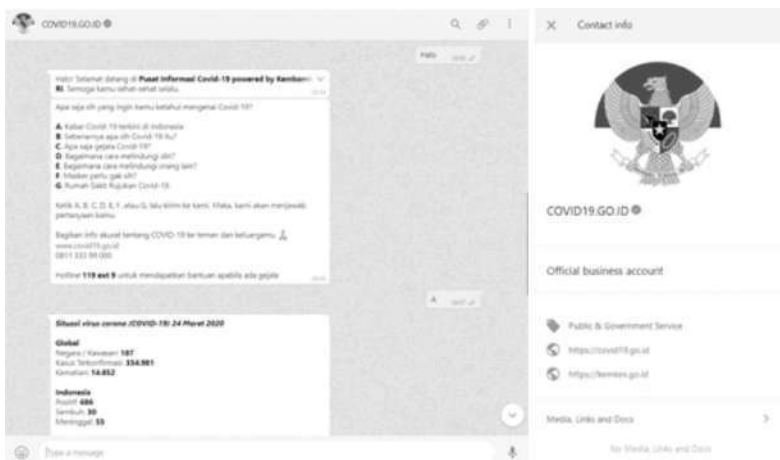
Keberhasilan pemerintah berinovasi berdampak pada kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Memanfaatkan *WhatsApp*

Seiring dengan perkembangan dan kemudahan akses teknologi saat ini, siapa saja dapat memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi. Beragam fitur tersedia untuk berbagai kebutuhan. Salah satu aplikasi yang saat ini digunakan oleh hampir semua orang di Indonesia adalah aplikasi *WhatsApp*. Pemanfaatan aplikasi dan fitur *WhatsApp* merupakan sebuah inovasi pemerintah dalam pengelolaan penyebaran informasi.

WhatsApp Messenger atau *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi perpesanan (*messenger*) instan dan lintas *platform* pada *smartphone* yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. Salah satu fitur terbaru *WhatsApp* yang menarik adalah *Chatbot*.

Chatbot atau balas otomatis adalah program yang dirancang untuk merespon pesan secara otomatis. Fitur *chatbot* ini tersedia dalam aplikasi versi *WhatsApp Business*. Menariknya pada Maret 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia memanfaatkan akun *chatbot* untuk memfasilitasi informasi akurat dan melawan hoaks seputar virus corona COVID-19 yang sedang berkembang (Cnbcindonesia.com, 2020).



Gambar 1: *Chatbot WhatsApp* Kominfo dengan akun Covid19.go.id

Sumber : <https://wa.me/6281133399000>

Pemanfaatan ini menunjukkan difusi inovasi yang dilakukan Kominfo terhadap teknologi komunikasi *WhatsApp*. Sesuai elemen difusi dari Rogers (1986), aplikasi ini dipilih karena merupakan inovasi. Bila sebelumnya pemerintah hanya menggunakan media konvensional, seperti televisi, koran dan radio, sekarang ini sudah bergeser pada media sosial. Salah satunya yaitu *WhatsApp*.

Tidak hanya media konvensional dan media sosial, pemerintah menyadari bahwa *WhatsApp* telah menjadi elemen penting dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin informasi yang beredar di *WhatsApp* sangat berpotensi menjadi *hoax*, maka dari itu Kominfo memanfaatkan *WhatsApp* menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, terutama terkait kabar terbaru COVID-19.

Bila seseorang sudah mengirimkan pesan pada *link* tersebut, maka akun COVID19.GO.ID akan secara otomatis mengirimkan pesan balik dengan pilihan opsi yang bisa dipilih. Setiap opsi memiliki jawaban berbeda sesuai kebutuhan. Termasuk berita perkembangan terbaru terkait pasien positif COVID-19 juga ada di sana. Jadi masyarakat tidak perlu takut atau ragu-ragu bila menerima informasi, karena data dari Kominfo sudah berkoordinasi dengan data dari K/L yang terkait untuk membantu agar masyarakat selalu *update* terhadap perkembangan pandemi COVID-19.

Berdasarkan kategori pengadopsi inovasi dari Roger (1983), langkah Kominfo ini tergolong sebagai mayoritas awal. Adapun *Chatbot WhatsApp* sebenarnya hanya ada di *WhatsApp Business*, sehingga tidak banyak yang mengetahui. Kominfo merupakan K/L pertama yang mengadopsi aplikasi *WhatsApp* dalam melaksanakan program kerjanya, oleh karena itu disebut mayoritas awal. Meskipun sebenarnya fitur *chatbot WhatsApp* sudah ada dari tahun 2018, tapi baru sekarang dimanfaatkan.

Pemanfaatan *Chatbot WhatsApp* ini dinilai lebih baik dari media konvensional maupun sosial media. Mengingat hampir semua warga Indonesia pasti memiliki *WhatsApp*. Jadi khalayak yang dijangkau juga lebih luas. Semua kalangan bisa mengakses informasi. Dengan

demikian pemakaian aplikasi ini sudah tepat karena manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Pemanfaatan *Chatbot WhatsApp* sangat baik terutama agar informasi terkait COVID-19 bisa cepat tersebar, sehingga lebih banyak masyarakat yang mendapatkan informasi. Diharapkan akan lebih banyak lagi difusi inovasi yang dilaksanakan pemerintahan, khususnya dalam mendukung kelancaran komunikasi publik.

* * * * *

Buku Elektronik *Open Access*: Dana Publik untuk Pengetahuan Publik

Oleh: Muhammad Fadly Suhendra, M.Hum.

Buku elektronik *open access* memungkinkan untuk dibaca oleh siapa saja, bahkan pembaca dari seluruh dunia. Dengan kata lain, model *open access* memungkinkan publik untuk mendapatkan akses lengkap ke konten buku tanpa batasan atau penghalang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar konten *open access* bebas dari pembatasan hak cipta karena dilisensikan di bawah *Creative Commons* (CC BY), yaitu salah satu dari beberapa lisensi hak cipta publik yang memungkinkan distribusi bebas dari “karya” yang dilindungi hak cipta. Dengan demikian, selain dapat membaca, publik juga dapat membagikan, mengunduh, menyimpan, dan mendistribusikan salinan buku atau bab yang diterbitkan tanpa perlu izin atau membayar apa pun. Dalam praktiknya, pembaca hanya perlu mengunjungi situs web yang disediakan untuk dapat mengakses buku atau bab yang diterbitkan dan tersedia secara elektronik tanpa perlu menghubungi penerbit atau penulisnya.

Open access (OA) adalah gerakan internasional yang telah dimulai sejak awal tahun 2000-an dan bertujuan untuk meningkatkan akses online gratis dan terbuka ke informasi akademik, seperti publikasi dan data penelitian (Johnson, 2019; Ross, 2014; Slim, 2020). Salah satu tujuan terpenting dari gerakan *open access* adalah meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan kembali hasil riset.

Walaupun awalnya *open access* hanya terkait dengan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara online dan gratis, namun konsep *open access* telah diperluas ke jenis konten lain, seperti buku elektronik dan multimedia. Dengan kata lain, *open access* mengacu pada konten digital yang tersedia gratis untuk semua orang.

Dalam perkembangannya, gerakan *open access* terus mendapat respons positif dari publik. Bahkan di Eropa pada tahun 2018 meluncurkan sebuah kebijakan yang dinamakan Plan S, yaitu kebijakan yang menegaskan bahwa mulai tahun 2021 semua publikasi ilmiah yang dibiayai oleh badan pendanaan publik harus diterbitkan pada platform akses terbuka atau segera tersedia untuk publik melalui repositori *open access* tanpa sistem embargo (Coalition-s, 2021; Johnson, 2019). Plan S merupakan inisiatif Coalition-s (2021), yaitu sebuah konsorsium pendanaan penelitian internasional untuk penerbitan *open access*, yang didukung oleh Science Europe, penyandang dana, the European Research Council, dan the European Commission.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Secara hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi serupa, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Pada Pasal 21 UU Sisnas Iptek disebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan. Lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 22 ayat 2 bahwa kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi hak pemerintah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa publikasi ilmiah yang didanai publik di Indonesia dilihat sebagai barang publik seperti halnya undang-undang atau laporan pemerintah yang tersedia untuk diakses secara gratis melalui sarana internet. Undang-undang ini juga dijamin oleh Irawan dkk. (2020) bahwa publikasi hasil riset yang didanai publik, sudah selayaknya dibuka seluas-luasnya untuk publik. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang maksimal bila aksesnya dibatasi untuk publik. Publik di sini bukan berarti hanya komunitas ilmiah, tetapi juga masyarakat umum yang juga sepatutnya diberi akses terhadap hasil riset (Irawan et al., 2020).

Sehubungan dengan itu, pada tahun 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyediakan berbagai buku elektronik dengan *open access* melalui penyelenggaraan Program Akuisisi Pengetahuan Lokal. Program ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan berbagai pengetahuan lokal, khususnya yang terkait dengan hasil-hasil riset, pemikiran, dan tinjauan dari berbagai bidang ilmu sebagai sumber literasi dan referensi proses pembelajaran. Dengan kata lain, BRIN menciptakan fasilitas publik yang berhubungan dengan berbagai publikasi yang terkait dengan dunia ilmiah. Harapannya, publik akan mudah mendapatkan berbagai informasi terkait pengetahuan lokal dan hasil-hasil riset yang mudah, murah, dan merata untuk diakses dan dimanfaatkan oleh publik. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk dapat menyediakan buku bermutu, murah, dan merata sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk). Dalam hal ini, publik hanya memerlukan adanya koneksi internet untuk membaca dan mengunduh konten buku-buku elektronik ataupun rekaman audio visual yang disediakan BRIN.

Dalam praktiknya, BRIN mendukung dan mengikuti prinsip-prinsip *open access*, yaitu untuk menyediakan akses lengkap ke setiap konten hasil-hasil riset yang diterbitkan, khususnya dalam bentuk buku dan rekaman audiovisual.

Selanjutnya, penyediaan buku elektronik dengan *open access* ini juga diharapkan menjadi jembatan penghubung antara penulis dan pembaca untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam menghasilkan buku-buku baru yang memuat berbagai informasi ilmu pengetahuan. Melalui upaya ini, para penulis yang notabene sebagai peneliti atau akademisi diharapkan dapat termotivasi dan tergerak untuk lebih mendiseminasikan informasi dan pengetahuan mereka agar dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas. Dengan kata lain, jika publikasi jurnal dimaksudkan bentuk komunikasi *science to science* maka publikasi buku merupakan bentuk komunikasi *science to society*. Alhasil, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan sumber informasi ilmiah yang kredibel.

Di beberapa kesempatan, Laksana Tri Handoko selaku Kepala

Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan bahwa upaya penyediaan buku elektronik *open access* dilandasi dari keprihatinan atas terbatasnya penyedia dan pembaca buku-buku ilmiah di Indonesia, khususnya kebutuhan akan sumber referensi ilmiah, baik untuk kegiatan riset maupun pembelajaran. Menurutnya, kebutuhannya sangat tinggi, namun dukung sumber daya (finansial) untuk mengakses sumber-sumber informasi utama sangat kurang. Di lain pihak, terdapat potensi penyedia sumber informasi, yaitu para dosen dan peneliti, namun mereka tidak memiliki dukungan infrastruktur yang memadai sehingga karya mereka sulit diakses oleh pemakai potensialnya.

Akhirnya, penyediaan buku elektronik *open access* BRIN melalui Program Akuisisi Pengetahuan Lokal merupakan bagian dari upaya BRIN untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Konkritnya, dapat mendukung cita-cita pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas dan unggul melalui penyediaan informasi yang kredibel dan inovatif, khususnya dalam bentuk buku dan audiovisual yang memuat berbagai pengetahuan lokal dan iptek sebagai sumber literasi. Selain itu, juga dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas buku-buku ilmiah hasil penelitian sehingga dapat berkontribusi aktif dalam kanca internasional, khususnya untuk meningkatkan sitasi dan indeksasi para peneliti. Dengan kata lain, diseminasi hasil penelitian melalui buku ilmiah diharapkan dapat lebih masif dan luas sehingga mampu mendukung daya saing bangsa melalui peningkatan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah nasional.

* * * * *

Daftar Pustaka:

Coalition-s. (2021). *Making full and immediate Open Access a reality: Plan S Principles*. <https://www.coalition-s.org/why-plan-s/>

Irawan, D. E., Priadi, B., Muharlisiani, L. T., Onie, S., & Rusnalasari, Z. D. (2020). Indonesia Nomor Satu Publikasi Jurnal Akses

Terbuka di Dunia, Apa Artinya? *The Conversation*. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/18/130500023/indonesia-nomor-satu-publikasi-jurnal-akses-terbuka-di-dunia-apa-artinya-?page=all>.

Johnson, R. (2019). From coalition to commons: Plan S and the future of scholarly communication. *Insights*, 32(1), 5. <https://doi.org/DOI>: <http://doi.org/10.1629/uksg.453>

Ross, D. (2014). A Publisher's Perspective on. *Information Standards Quarterly*, 26(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3789/isqv26no2.2014.04>

Slim, C. (2020). *Access in academic publishing and what it means for different stakeholders*. 10(November 2020), 1–13. <https://journalpublishingculture.weebly.com/uploads/1/6/8/4/16842954/cslim.pdf>

Blockchain, Teknologi Digital Pelacak Kopi Indonesia

Oleh: Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.

Rangkaian perhelatan negara-negara G20 saat ini masih berlangsung. Di antara anggota G20, Indonesia dan Brazil adalah negara dengan kekayaan sumber daya genetik yang tinggi. Kesamaan produk pertanian yang diekspor dari Brazil dan Indonesia yaitu kelapa sawit, kopi, dan kakao. Eksport produk pertanian di masa pandemi COVID-19 meningkat (databoks.katadata.co.id) ditulis pada 13 Januari lalu menyebutkan angka peningkatan 4,1% atau 3,83 M. Produk pertanian pengungkit ekspor dari komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan tebu mencapai 1,04 Miliar USD atau meningkat 14,85% dibanding sebelumnya.

Kontribusi dari komoditas perkebunan ini merupakan penyumbang tertinggi dari semua sektor perdagangan di Indonesia. Perdagangan dunia menuntut standard dan kualitas yang tinggi dan hal ini tidak dapat dihindari untuk bisa menembus pasar dunia. Terlebih beberapa syarat produk sangat ketat diberlakukan di beberapa negara konsumen.

Agricultural Working Group (AWG) G20 pada 30-31 Maret lalu mengusung isu penting yang berkaitan dengan Recover Together, Recover Stronger. Tema utama AWG “Balancing production and trade to fulfill food for all” mengangkat 3 kunci isu prioritas yaitu “Promoting resilient and sustainable food systems and agriculture”, “Promoting an open predictable and transparent agricultural trade

to ensure food availability and affordability for all” dan “*Promoting innovative agri-preneurship through digital agriculture to improve livelihood of farmers in rural areas*”. Selain juga sub topik pertanian terkait dengan *climate smart agriculture, global food supply and value chain, Open fair, predictable and transparent agricultural trade* terutama bagaimana menjamin tersedianya dan kemudahan akses pangan untuk semua masyarakat dunia.

Jeff Nielson dari University of Sydney di tahun 2013 sudah menuliskan pentingnya Pemerintah melakukan pendekatan global rantai nilai (*Global Value Chain*) untuk produk kopi Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan pembangunan sektor kopi yang lebih luas dan mempromosikan *green economy* nasional.

Global Value Chain punya ciri utama yaitu sistem produksi yang tersebar dan terbagi di beberapa lokasi bahkan di berbagai negara sehingga lebih efisien dan memberi keuntungan yang lebih besar di setiap bagian sistem produksi (Nurdiyati dan Sahara, 2015). Melalui sistem tersebut, keterlacakan atau ketelusuran (*traceability*) produk sangat berguna. Apalagi untuk produk pangan, tentang bagaimana suatu produk pangan dijamin aman ketika dikonsumsi. Bahkan juga keterlacakan ini akan memudahkan ketika suatu produk juga menjadi bahan dasar untuk produk lainnya. Sehingga dari informasi keterlacakan ini akan dimudahkan dalam membangun sistem rantai nilai dan nilai tambah produknya.

Ciri khas atas ketelusuran suatu produk untuk kopi misal, banyak diidentifikasi dengan label indikasi geografis yang diakui dengan cita rasa kopi yang berbeda akibat asal lokasi tanam yang berbeda secara geografis. Misalnya, Swiss sebagai negara yang dikenal dengan produk coklatnya, adalah bukan negara produsen kakao. Coklat dari Swiss menggunakan biji kakao dari Ghana, Afrika. Demikian juga dengan Jerman, negara ini tercatat sebagai negara importir kopi dari Indonesia terbesar.

Pertanian Modern Indonesia

Seringkali dibayangkan bahwa pertanian modern adalah pertanian yang dikelola dalam hamparan yang luas dan didukung dengan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang intensif.

Padahal, kepemilikan lahan di Indonesia skalanya kecil. Namun, dengan penerapan *Good Agricultural Practises* (GAP) dan *Good Handling Processes* (GHP) untuk kopi lokal akan menjamin kualitas hasil dan menjamin kepuasan konsumen. Misalnya, kopi Arabika Blue Korintji dari Kerinci, sudah menerapkan *blockchain* pada produknya sehingga menunjang ketelusuran hingga membangun *trust* konsumen.

Blockchain technology tidak lain adalah teknologi digital *QR Code* dengan sistem penyimpanan atau bank data digital yang terhubung dengan kriptografi. *Block* informasi per *chain*, sejak dari kopi dipanen, kemudian diproses di pengolahan, proses *roasting* sampai pada akhirnya dijual kepada *retailer* menjadikan cerita pada kopi terlacak sempurna dan *real time*.

Petani kopi di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat ini diberdayakan sedemikian rupa dengan keterlibatan petani, produsen dan sekaligus menerapkan *digital agriculture* untuk pemasaran produknya sehingga nilai tambah kopi lokal mampu meningkatkan kesejahteraan petani bahkan saat ini mulai berkembang menjadi bisnis gerai *startup* kopi lokal sehingga mulai dilirik pemuda tani.

Walau baru sedikit perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan *blockchain* dan baru untuk produk kopi, tentunya kedepan terobosan-terobosan pemanfaatan teknologi digital yang serupa akan lebih banyak lagi. Diyakini melalui *specialty* rasa dan ketelusuran produk kopi melalui *blockchain* di pasar global akan menambah *global value chain* dari produk pertanian Indonesia di pasar dunia memiliki daya saing tersendiri. *Blockchain coffee* mencirikan *agri-preneurship* petani lokal - pengusaha dan penerapan *digital agriculture* yang mampu meningkatkan *global value chain* produk kopi lokal yang terlacak di pasar global.

* * * * *

Transformasi Teknologi Digital di Daerah Sukseskan G20

Oleh: Nur Hidayat, S.Sos, M.AP.

Tidak bisa dipungkiri G20 atau yang kerap disebut *group of twenty* kini tertuju pada Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia ini menjadi Presidensi G20 yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia. Dengan kata lain Indonesia disejajarkan dengan perekonomian negara maju lain. Sebut saja Jerman, Rusia, Korea Selatan, Inggris, Turki, Tiongkok dan lainnya.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 bukan tanpa alasan. Dengan bonus demografi, geliat perekonomian yang bisa dibilang stabil di masa pandemi dibanding negara besar lain, serta upaya pemerintah dalam mentransformasi teknologi ke seluruh daerah, sudah cukup masuk akal jika Indonesia dianggap berpengaruh dalam G20. Namun demikian, isu transformasi teknologi dalam G20 menarik dibahas. Khususnya transformasi teknologi digital atau digitalisasi.

Tujuan digitalisasi sebenarnya mempermudah masyarakat. Dampak positifnya seperti Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah diakses, kemudian tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan. Muaranya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga telah banyak membuat terobosan dalam upaya transformasi digital. Yang terbaru

yaitu perubahan TV analog ke digital. Harapannya, arus informasi televisi bisa lebih jelas diterima. Hal itu dikarenakan TV Digital menjamin siaran terpancar dengan sempurna tanpa hambatan. Sehingga memudahkan alih informasi terkini melalui media televisi.

Selain itu, transformasi *e-marketing* atau pemasaran berbasis elektronik, *e-purchasing* atau transaksi elektronik kini sudah lumrah di masyarakat. Dengan perangkat digital, semuanya bisa melakukan transaksi jual beli layaknya di pasar bahkan tanpa tatap muka mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi wiraswasta, pedagang, petani dan pelaku usaha lain dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dari segi medis pun, penggunaan teknologi telah berkembang cukup pesat. Penggunaan *telemedicine*, menjadi salah satu inovasi teknologi dalam dunia kedokteran saat masa pandemi COVID-19 berlangsung. Selain dapat mencegah penularan COVID-19, *telemedicine* membuat masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.

Namun demikian, bila kita *breakdown* ke daerah, khususnya daerah dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) rendah serta akses informasi yang minim, hal tersebut justru menjadi tantangan tersendiri. Beberapa daerah sebenarnya memiliki potensi berkembang baik dari sisi ekonomi maupun keinginan bertransformasi digital. Namun jaringan internet sebagai jalur utama digitalisasi selain media pancar TV masih belum merata. Terdapat *blank spot area* karena faktor akses menuju lokasi yang sulit serta minim infrastruktur memadai. Terlebih lokasi pelosok yang terhalang sungai, serta tertutup area pegunungan.

Pemerintah daerah tentunya memiliki upaya luar biasa guna mensosialisasikan transformasi digital tersebut hingga pelosok desa. Terlepas dari keterbatasan anggaran daerah. Karena selain digitalisasi, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah seperti membuka akses jalan baru, perbaikan jalan rusak, pembangunan pasar tradisional serta menggenjot sektor pariwisata lokal yang cukup potensial dalam menanggung keuntungan finansial bagi masyarakat setempat.

Dalam upaya transformasi digital, pemerintah daerah tentunya sudah memetakan wilayah *blank spot area* meski perlu waktu bertahun-tahun untuk membuka akses karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dimulai dari penyediaan *hot spot area* secara gratis minimal di balai desa setempat. Masyarakat yang berada pada *blank spot area* tentu perlu didorong untuk aktif memanfaatkan fasilitas tersebut walau via *WiFi* karena *tower provider* belum merata.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperbanyak pertemuan, sosialisasi potensi perekonomian daerah. Aneka kuliner, kerajinan tangan, pariwisata, hasil pertanian dan perkebunan masih menjadi sektor primadona di desa. Sumber daya alam masih cukup melimpah. Untuk itu pengelolaan sumber daya alam melalui keahlian sumber daya masyarakat mutlak diperlukan. Terlebih pemerintah perlu mengadakan aneka pelatihan alih teknologi digital dalam membuat dan memasarkan barang dagangan atau jasa melalui media sosial hingga pelatihan pembuatan aplikasi berbasis *startup* guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pemasaran di desa.

Melalui berbagai upaya tersebut di atas, gerakan ekonomi desa melalui transformasi digital bisa menjadi tulang punggung dalam perekonomian nasional seperti terciptanya lapangan kerja baru serta menumbuhkan usaha mikro lainnya. Dengan transformasi teknologi digital yang menyentuh pelosok daerah, saya yakin perekonomian Indonesia akan lebih maju. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana menyiapkan kesiapan sumber daya teknologi di daerah khususnya pedesaan dalam mendukung Indonesia secara global sebagai presidensi G20.

* * * * *

Optimisme Indonesia sebagai Tuan Rumah G20

Oleh: Pongki Nangolngolan Harahap, S.Hum., M.S.E.

Badai kehidupan seolah belum sepenuhnya lenyap dari bumi Indonesia. Berbagai persoalan seperti adanya pandemi Covid-19, hingga persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok menjadi ujian bangsa. Namun selama 76 tahun merdeka, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berat di tahun 1998 dan 2008. Apakah kita menyerah?

Sepakat! kita tidak akan menyerah dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Apalagi saat ini kita juga memasuki era digital. Akan tetapi apa kita sudah memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik dan positif?

Saat ini di media sosial banyak tren postingan yang seolah menghakimi isu-isu berbau konflik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam negeri namun juga di dunia internasional, dengan alibi ‘demi konten’. Jarang disadari, tindakan itu tidak terpuji.

Satu hal yang terpenting adalah semuanya kita kembalikan ke nilai-nilai bangsa yang kita miliki. Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, serta bhinneka tunggal ika. Segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut jelas tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Persoalan berikutnya, melalui momentum apa kita bisa menyampaikan dan memperlihatkan sesuatu yang baik dan positif?

Tuan Rumah

Indonesia diberikan kesempatan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi *group of twenty* (G20). Puncak hajatan internasional digelar di Bali, November 2022. Presidensi G20 tahun 2022 merupakan yang pertama bagi Indonesia selama bergabung menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada 1999.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi. G20 diikuti oleh negara berkembang hingga kategori maju.

Sebagai informasi, anggota G20 terdiri atas negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

Terkait pengetahuan masyarakat tentang G20, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survey. Secara umum, hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui event ini.

namun secara random, jawaban salah satu responden dari kalangan ibu rumah tangga berikut ini cukup mengejutkan. Ibu yang bernama Nur tersebut mengungkapkan pendapatnya. Ia mengatakan, manfaat jangka panjang dari G20 akan membantu ekonomi domestik, penyerapan tenaga kerja baru, UMKM, serta pemulihan ekonomi secara bertahap. Lengkap sekali!

Hal lain, jawaban responden pada umumnya menyatakan persamaan ide tentang cara mempromosikan *event* G20. Menurut mereka, cara promosi yang paling ideal adalah melalui postingan media sosial. Hal tersebut dan sangat masuk akal untuk membangun jejaring komunikasi melalui media sosial dengan tujuan mempromosikan G20. Tepat sekali, G20 adalah momentum yang saat ini ada di depan mata kita dan ini adalah momen langka yang mungkin tidak akan pernah terulang kedua kalinya, serta berpotensi besar menjadi viral secara digital.

Dalam Presidensi G20 di bidang perdagangan dan investasi,

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menggelar pelaksanaan *Forum Trade, Investment, and Industry Working Group* (TIIWG). Forum dijadwalkan berlangsung pada September 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Tujuan forum tersebut adalah sebagai katalis pemulihan ekonomi global. TIIWG mengedepankan kemitraan dan inklusivitas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat global dan nasional. Forum TIIWG ini mengangkat 6 isu prioritas, yaitu *WTO Reform; the Role of Multilateral Trading System to Strengthen the Achievement of Sustainable Development Goals; Trade, Investment, and Industry Response to the Pandemic and Global Health Architecture; Digital Trade and Sustainable Global Value Chains; Spurring Sustainable Investment for Global Economic Recovery; dan Inclusive and Sustainable Industrialization via Industry 4.0.*

G20 memberikan semangat dan harus direspon dengan optimisme bangsa Indonesia. Sebagai salah satu contoh ilustrasi kehidupan, ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar, orangtua kita ingin agar kita pintar dan berprestasi di sekolah. Target meraih peringkat atau nilai yang bagus biasanya akan mendapat hadiah dari orangtua. Apalagi kalau si anak berhasil meraih peringkat 1 di kelas, bisa jadi keinginan kita saat itu juga akan berusaha disanggupi oleh mereka.

Bayangkan, bila di posisi ‘anak’ tersebut adalah Indonesia, sementara di posisi ‘orangtua’ adalah negara-negara besar yang menjadi kandidat kuat untuk berinvestasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin, kesuksesan Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi kunci utama kepercayaan negara-negara besar tersebut yang berbuntut pada keinginan mereka berinvestasi di dalam negeri.

Presidensi G20 tahun ini bukan sekedar *event* internasional biasa. Manfaatnya juga lebih besar bagi Indonesia melebihi Asian Games di Jakarta dan Palembang pada Agustus-September 2018 silam, atau SEA Games yang terakhir dilaksanakan di Vietnam bulan November 2021, bahkan AFF Cup 2020 di mana Indonesia menjadi *runner-up*. Suksesnya Presidensi Indonesia dalam G20 akan berdampak luas di segala aspek kehidupan masyarakat dalam negeri.

* * * * *

Mengenal Empat Pilar Literasi Digital

Oleh: Rita Nurlita S.Sos., M.I.Kom.

Transformasi digital menjadi salah satu isu penting dalam Presidensi G20. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan menjadi pemimpin Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau *Digital Economy Working Group* (DEWG). Forum ini mengusung tiga topik prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19, kecakapan dan literasi digital, serta arus data lintas batas.

Dalam konteks literasi digital, semua lapisan masyarakat - termasuk humas pemerintah - diharapkan memiliki kecakapan dalam memanfaatkan teknologi. Sebagai garda terdepan informasi pemerintah, humas dituntut untuk fasih dan mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Terlebih *platform* digital menjadi salah satu media yang berpengaruh dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah secara cepat, mudah dan massif kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan dari *Reportal*, disebutkan bahwa pada 2022 terdapat 204.7 juta pengguna internet di Indonesia. Besarnya jumlah ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pesan pemerintah bisa dengan cepat terdiseminasi tanpa mengenal batas, jarak dan waktu. Di sisi lain, berpotensi menjadi *boomerang* yang dapat kembali menyerang pemerintah bila informasi dan respon yang diberikan tidak cepat dan tepat.

Hadirnya internet dan pandemi COVID-19 telah memaksa semua lini untuk bertransformasi ke ruang-ruang digital. Praktik kerja humas pemerintah yang semula dilakukan secara konvensional

berubah menjadi serba digital. Sebagai contoh, penyampaian pesan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dengan biaya yang seringkali cukup besar, kini bisa dilakukan secara *online* dengan biaya yang relatif kecil, bahkan tanpa biaya.

Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, dimana hampir semua kegiatan berpindah ke ruang virtual, humas pemerintah bisa bergerak lebih lincah dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa tugas yang banyak dilakukan di ruang maya, antara lain mengikuti webinar, membuat pelatihan *online*, berkoordinasi dan kolaborasi lintas sektor, melakukan *virtual tour*, membuat konten untuk berbagai *platform* digital, mendiseminasikan pesan di media sosial, dan sebagainya.

Namun, berbagai keuntungan ini tentunya tidak akan maksimal bila humas pemerintah tidak bisa bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Humas pemerintah yang tidak mau beradaptasi, *keukeuh* bertahan bekerja dengan menggunakan cara lama, dan tidak memiliki daya pikir yang kritis, akan menghambat langkah organisasi, bahkan tertinggal. Karena itu, di era yang serba cepat ini diperlukan pemahaman literasi digital untuk humas di pemerintahan.

4 Pilar Literasi Digital

Secara sederhana, literasi digital bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang mendapatkan konten, berpikir kritis, memilih yang baik dan benar, lalu membagikannya kepada orang lain. Lebih jauh, dalam literasi digital juga masyarakat diharapkan mampu memproduksi konten-konten positif dan bermanfaat untuk dibagikan ke internet dan media sosial (Nurlita, 2019). Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Samuel A. Pangerapan dalam acara Siberkreasi *Hangout Online* menjelaskan bahwa ada empat pilar literasi digital, yaitu keterampilan digital (*digital skill*), budaya digital (*digital culture*), etika digital (*digital ethics*) dan keamanan digital (*digital safety*).

Pilar pertama, yaitu *digital skill* merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan

perangkat keras, perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. **Pilar kedua**, *digital culture* merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan. **Pilar ketiga**, *digital ethics* merupakan kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari. **Keempat**, *digital safety* kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital.

Humas pemerintah dalam kaitannya dengan empat pilar literasi digital, diharapkan mampu menerapkan secara komprehensif dalam menjalankan tugasnya baik sebagai *creator*, *conceptor*, *mediator*, sekaligus *problem solver*. Dalam konteks presidensi G20, humas pemerintah dituntut untuk mampu menggunakan keterampilan digitalnya seperti membuat *copywriting* dan desain grafis terkait agenda dan isu G20, konten video, *form digital* untuk berbagai kegiatan, membuat presentasi; mengoperasikan komputer untuk berbagai keperluan seperti mengetik dan mengirimkan pesan elektronik; mengelola media sosial, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan budaya digital misalnya dengan mengikuti serta membuat berbagai kegiatan virtual baik melalui *zoom*, Instagram Live, kanal *Youtube*, dan sebagainya. Untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia dan masyarakat, humas pemerintah juga perlu bersikap santun, jujur, *helpful*, dan bekerjasama dengan semua *stakeholder* yang terlibat dalam Presidensi G20 baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ini merupakan gambaran dari implementasi etika di ruang digital (*digital ethics*). Satu hal lagi, humas pemerintah harus memahami batasan privasi untuk menjaga terjadinya tindakan kriminal di dunia siber dengan memahami prinsip utama keamanan digital (*digital safety*).

Dengan memahami literasi digital, diharapkan humas pemerintah bisa lebih bijaksana dan maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung suksesnya Presidensi G20. Pemanfaatan teknologi ini bisa digunakan untuk merespons, mengamplifikasi atau mengglorifikasi Presidensi G20 oleh berbagai instansi pemerintah

baik di tingkat pusat maupun daerah. Harapannya, gema Presidensi G20 bisa sampai hingga ke masyarakat di tingkat *grassroot* dan menjadikannya sebagai agenda bersama seluruh elemen masyarakat untuk pulihnya dunia pasca pandemi COVID-19.

* * * * *

Kesiapan Humas Pemerintah Mendukung Transformasi Digital

Oleh Romlah Rachmayanti

Transformasi digital di Indonesia saat ini bergema besar mengusung keterbukaan Informasi Publik berskala dunia. Apalagi dengan adanya momen Presidensi G20, di mana Indonesia dilihat kemampuannya dalam memimpin selama periode satu tahun yaitu tahun 2022. Indonesia mencanangkan transformasi digital sebagai salah satu isu prioritas di Presidensi G20 2022.

Dituntutnya kesiapan tim humas pemerintah menyongsong keberhasilan program Presidensi G20 2022 di bidang transformasi digital ini, karena pemerintah menginginkan perubahan dalam memberikan informasi publikasi yang bisa diakses setaraf kelas dunia, yang tidak dihambat oleh kondisi dan keadaan alam.

Seiring dengan kemajuan era digitalisasi, seperti dikutip pada salah satu media online sas.com menyatakan bahwa transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, melainkan dipandu oleh strategi bisnis yang lebih luas. Sukses hadir ketika organisasi dapat secara efektif menggunakan data yang dibuat oleh atau melalui teknologi dengan cara yang memungkinkan perubahan bisnis terjadi secara dinamis. Dengan begitu, urgensi digitalisasi dirasakan semua aspek terutama efisiensi informasi. Bahkan bagi pemerintah era digitalisasi ini membuat perubahan besar dalam informasi publikasi kinerja yang bisa diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh praktik dunia transformasi digital yang

digunakan dalam konteks bisnis adalah penerapan teknologi digital. Hal ini memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan, disebabkan tingkat kecepatan informasi dan keindahan visual dalam promosi kepada *audiens* lebih tepat, cepat, dan menarik. Teknologi kecerdasan buatan (AI), *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT) mempercepat transformasi. Teknologi dasar, manajemen data dan analitik menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital.

Banyak pejabat pemerintah sekarang mengubah kebutuhan dan kebiasaan bisnis serta cara kerjanya dalam menerima dan memberikan informasi dengan menggunakan media digital, dibandingkan media tradisional yang biasa digunakan.

Melihat urgensinya, penyesuaian kebutuhan akan transformasi digital tentu memerlukan kerja sama dengan tujuan yang sama. Komitmen berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha di berbagai sektor, organisasi, akademisi, dan komunitas teknis menjadi penting.

Maka praktisi humas pemerintah yang berperan sebagai *source* (sumber informasi terpercaya), *surveillance* (pengawasan informasi yang beredar) serta *service* (melayani masyarakat) dalam pelayanan informasi pemerintah atau lembaga kepada masyarakat umum, dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan dan meningkatkan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhan di era transformasi digital ini.

Bentuk kesiapan praktisi humas meng*upgrade* kemampuan dan keahliannya dalam peralihan transformasi digital di Presidensi G20 tahun 2022 ini, salah satunya dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Mendukung percepatan ekonomi inklusif, kementerian ini telah meluncurkan kerja sama dengan komunitas humas untuk meningkatkan kecakapan dan literasi digital. Kerja sama tersebut sebagai salah satu faktor pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana dikutip dari Sindonews.com dalam artikelnya yang bertajuk ‘Dorong Transformasi Digital Presidensi G20, PR Indonesia Mesti Serius Diselesaikan’, dikatakan bahwa Kemkominfo secara khusus telah membentuk *Digital Economy Working Group* (DEWG) dengan tiga pilar digital, yaitu infrastruktur konektivitas digital,

kecakapan atau literasi digital, serta arus data lintas batas negara.

Dengan adanya pondasi awal dari Kemkominfo untuk praktisi Humas Pemerintah, membuat ini menarik dan keharusannya *mengupgrade* kemampuan juga *skill* di dunia digitalisasi. *Mindset* para praktisi humas memasuki lingkup perubahan juga berperan penting selain kemampuan, dan jenjang pendidikannya. Faktor-faktor penting tersebut sebagai dasar bagi praktisi humas dalam menyongsong transformasi digital untuk dapat memelihara struktur dan budaya organisasi, mendukung kolaborasi dalam kerja sama, mencapai fleksibilitas dan kecepatan informasi yang *up to date*, *valid*, dan transparan.

Praktisi Humas pemerintah menyebarkan informasi kepada publik baik secara komputerisasi maupun media sosial, dengan adanya digital yang tanpa batas dan jarak. Informasi yang akan disampaikan dapat membantu kehidupan dunia menjadi efisien, begitupun untuk Indonesia. Target yang bisa diraih oleh Indonesia dalam perkembangan digital, yakni menumbuhkan potensi dalam sumber daya manusia (SDM), memudahkan adanya *link and match* dalam mengubah konten secara dramatis mengenai informasi apapun kepada public. Humas juga wajib memiliki kemampuan yang *open minded*, terus berinovasi dan aktif terhadap percepatan kemajuan teknologi.

Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi digital menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang *digital divides*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan transformasi digital yang tengah dilaksanakan harus diarahkan mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi, terutama dalam persiapan menghadapi Presidensi G20.

* * * * *

Humas dan Momentum Presidensi G20 Indonesia

Oleh Syaiful Azhary, SST. Par., M.I.Kom.

Penulis dan seluruh warga negara Indonesia tentu merasa bangga dan senang mengetahui kabar bahwa akhirnya Indonesia terpilih menjadi Presidensi G20. Ruhnya sambutan penyelenggaraan G20 di Indonesia terpampang nyata dalam setiap pemberitaan di media mainstreaming yang sangat masive maupun perbincangan para netizen di dunia maya yang banyak membahas tentang terpilihnya Indonesia.

Momentum ini bisa menjadi langkah awal untuk bersama-sama bangkit dan pulih setelah pandemi Covid-19. Tetapi yang menjadi pertanyaan penulis adalah apakah warga negara Indonesia mengetahui informasi ini ? Atau jangan-jangan informasi ini tidak sampai kepada masyarakat karena tertutup dengan berita riuhnya fenomena minyak goreng yang terjadi akhir - akhir ini ?

Melansir berbagai media, Indonesia telah dipilih menjadi tuan rumah dalam perhelatan KTT G20 sejak 1 Desember 2021 sampai dengan akhir 2022. Dalam momen bersejarah ini ada tiga isu prioritas yang diangkat yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi.

Dikutip dari halaman resmi Kementerian Keuangan, Indonesia juga telah menentukan tiga pilar dalam Presidensi G20 ini yaitu meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan dan stabilitas, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Ketiga pilar ini adalah upaya untuk mencari solusi pemulihan krisis pasca pandemi Covid-19 dengan berfokus pada tiga sektor prioritas yaitu penguatan arsitektur global, transformasi digital, dan transisi energi.

Lalu apa manfaat menjadi Presidensi G20 bagi Indonesia? Manfaat yang bisa diambil dari penyelenggaraan G20 di Indonesia bisa dilihat dari aspek ekonomi, politik luar negeri, dan sosial. Penerimaan devisa negara dengan hadirnya 20 ribu delegasi, terjalinnya kerja sama konkret antar negara yang hadir, maupun potensi investasi di berbagai sektor sebagai bentuk *multiplier effect* yang bisa kita rasakan.

“Recover Together, Recover Stronger” adalah tema Presidensi G20 yang harus bisa diterima dan dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan mengenal dan memahami apa itu Presidensi G20 dan manfaat yang bisa diperoleh oleh Indonesia diharapkan masyarakat Indonesia bisa ikut menyukseskan penyelenggaraan G20 di Indonesia. Di sini penulis melihat peran strategis Humas Pemerintah sebagai corong pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat. Tantangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu dihadapi dengan literasi digital yang mumpuni.

Dalam teori komunikasi disebutkan bahwa melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi untuk mencegah kesalahan persepsi melalui saluran komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik. Penulis melihat Humas Pemerintah memegang peran yang penting sebagai ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah dengan menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk membumikan Presidensi G20 yang saat ini belum sepenuhnya diketahui oleh warga negara Indonesia.

Sumber Informasi Terpercaya

Humas Pemerintah harus bisa menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh publik dan media khususnya dalam menginformasikan

Presidensi G20. Setiap pesan yang disampaikan haruslah sesuai dengan karakteristik publik dan media yang dituju menggunakan bahasa yang bisa diterima dan mudah dimengerti serta disampaikan secara kontinyu dengan memilih saluran yang mudah diakses oleh publik dan media. Humas Pemerintah harus bisa memanfaatkan *website* maupun *platform* media sosial resmi pemerintah sebagai saluran yang terpercaya yang menyajikan informasi *terupdate*, akurat, dan terpercaya yang dikemas dalam konten - konten yang menarik dan mudah dipahami publik maupun media.

Partisipasi publik adalah cerminan kepercayaan publik kepada pemerintah secara digital di setiap platform digital baik itu *website* pemerintah maupun media sosial resmi instansi pemerintah yang kredibel yang bisa dijadikan rujukan informasi publik dan media. Dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi semangat bagi Humas Pemerintah untuk membuat informasi publik agar lebih terbuka, cepat, tepat, tidak berbelit belit, mudah diakses dan dapat mengakselerasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut Humas Pemerintah untuk melakukan optimalisasi peran dalam komunikasi publik khususnya dalam mendiseminasikan informasi publik dengan cara menciptakan konten- konten kreatif berbasis digital. Konten - konten kreatif ini haruslah menjangkau dan bisa diterima oleh berbagai demografi generasi baik itu generasi *baby boomers*, generasi milenial, generasi Z, maupun *post* generasi Z. Saat ini kita dihadapkan pada disrupsi informasi sehingga tugas berat Humas Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan informasi masyarakat dengan informasi yang aktual dan faktual kepada publik dan media.

Ruang- ruang komunikasi publik dari berbagai *platform* media sosial harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi maupun menjawab pertanyaan publik dan media secara *real time* dan akurat. Humas Pemerintah bisa membuka ruang diskusi ataupun tanya jawab yang terbuka dan bisa diakses oleh publik maupun media. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan ruang yang lebih luas bagi Humas Pemerintah untuk

bisa bersinergi dengan netizen maupun wartawan dari berbagai media massa khususnya dalam ruang media sosial resmi instansi pemerintah untuk mencegah beredarnya hoaks di masyarakat.

* * * * *

Saatnya UMKM Bergeser ke Mode Digital

Oleh: Wahyu Setyo Budi, A.Md.Ds.

Masyarakat dunia berharap pandemi segera berakhir. Namun, masa depan perekonomian Indonesia tidak ditentukan oleh pandemi, tetapi respon masyarakat dalam menanggapi dampak virus. Pilihan yang diambil saat kondisi krisis akan menentukan bagaimana kondisi setelah pandemi.

Pandemi Covid-19 telah membolak-balikan keadaan sektor industri sedemikian rupa. Terlihat ada beberapa sektor yang naik, dan sebagian lainnya turun. Sektor yang keukeuh bertahan dengan strategi konvensional banyak yang akhirnya terlambat beradaptasi dan terjerembab dalam kegagalan. Sebaliknya, sektor yang dari awal memang sudah beradaptasi dengan iklim digital menjadi terakselerasi oleh pandemi.

Pada 2019 diprediksi bahwa sektor pariwisata, transportasi, otomotif, konstruksi, manufaktur, pendidikan, dan minyak bumi akan mendapat tekanan hebat. Sedangkan pertanian, perdagangan digital, teknologi informasi, makanan, dan kesehatan berpotensi naik. Namun ternyata hasilnya agak berbeda, sektor otomotif menunjukkan performa yang baik dengan hadirnya mobil listrik, juga sektor perbankan dengan berkembangnya bank digital. Sebaliknya pertanian menunjukkan performa yang kurang (*Dcode Economic & Financial Consulting*, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menyelamatkan sejumlah sektor saat

terjadi krisis.

Pandemi yang telah mengakibatkan guncangan secara ekonomi di banyak sektor akhirnya memaksa untuk melaksanakan dua agenda, bertahan atau berinovasi secara radikal. Sektor yang memilih untuk bertahan biasanya akan menggaungkan efisiensi dan berharap kondisi akan membaik ketika pandemi berakhir. Namun apakah iya kondisi akan membaik, atau malah posisinya akan tergantikan oleh pemain baru yang sejak lahir sudah digital?

Dr. Indrawan Nugroho pernah berpendapat bahwa inovasi paling radikal saat ini salah satunya dilakukan oleh pengusaha mobil listrik terkenal dunia, Elon Musk. Mulai dari bisnis PayPal, Tesla, hingga SpaceX, semuanya melibatkan unsur transformasi digital. Dan terlepas dari beragam kontroversi yang beredar di masyarakat, yang paling radikal adalah Neuralink yang mengembangkan antarmuka digital untuk menghubungkan otak manusia dengan mesin.

Perilaku baru

Banyak peluang inovasi yang ternyata sudah dilakukan oleh masyarakat selama pandemi. Konsultasi dan pelatihan sudah beralih ke *platform* digital. Pemesanan barang dan klaim asuransi sudah dilakukan menggunakan aplikasi. Jadi apa salahnya jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sejak awal sudah digital menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Data yang unik menunjukkan bahwa di Asia, sektor yang berhubungan dengan interaksi dengan pelanggan dan penawaran produk mendapat kenaikan akselerasi digital paling signifikan (*McKinsey*, 2020). Tentu saja dengan peralihan media komunikasi menjadi digital.

Sebuah kasus sederhana dapat diangkat dari fenomena ini. Pada 2021 hingga 2022 banyak pemberitaan mengenai naiknya harga bahan baku bakso sapi, dan turunnya jumlah pelanggan. Hingga banyak pedagang yang akhirnya mencoba cara unik dan lucu untuk tetap bertahan. Namun kurangnya kemampuan pemasaran secara digital baik dari segi pengemasan atau cara pemesanan, berakibat keunikan itu hanya sekedar menjadi pembahasan sejenak lalu hilang.

Berganti ke skenario selanjutnya, bagaimana jika para anak muda

turun ke akar rumput. Di mana anak muda yang lebih cepat dalam hal adaptasi digital didorong untuk menerapkan rencana bisnis yang modern. Misalnya bakso tidak perlu lagi memberatkan pada bahan baku daging sapi, tetapi menyesuaikan dengan variasi protein yang menjadi unggulan daerah seperti ayam, udang, kambing, ikan, atau telur. Semua disatukan dalam satu *platform* peta lokasi *outlet* bakso se-Indonesia. Bisa datang langsung ke lokasi atau pesan antar.

Tentu akan banyak model skenario kreatif lainnya yang patut dicoba untuk meningkatkan transformasi digital dan usaha kecil di Indonesia. Apalagi masih banyak yang harus dibenahi, dalam hal ini transformasi digital di Indonesia masih bisa lebih didorong lagi dengan meningkatkan budaya kolaborasi digital. Pembagian pekerjaan di otomatisasi oleh mesin, dan tidak perlu lagi ada pelaporan secara manual. Sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien.

Patut kita syukuri bahwa salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia akan berfokus pada *Digital Financial Inclusion* dan *SME Finance*. Fokus tersebut yang berdasarkan pada *Financial Inclusion Action Plan (FIAP) G20 2020*, mendukung tema Presidensi G20 Indonesia “*Recover Together, Recover Stronger*”. Tentu ini menjadi peluang besar bagi anak muda yang akan terjun di dunia usaha berbasis digital. Karena akan dibahas secara khusus mengenai pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, stabilitas, dan inklusivitas ekonomi untuk UMKM yang dimiliki perempuan dan kaum muda hingga perdagangan lintas negara.

Selain itu juga akan dibahas mengenai persiapan penerbitan mata uang digital bank sentral. Dalam hal ini Bank Indonesia berencana untuk menerbitkan mata uang “Rupiah Digital” yang nantinya bisa menjadi alat pembayaran yang sah dan berlaku secara internasional sesuai dengan kerjasama antar negara. Tentu hal ini akan memudahkan UMKM untuk bertransaksi lintas negara.

Sudah banyak keberpihakan pemerintah untuk transformasi digital. Oleh karena itu, mari UMKM Indonesia yang kuat, maju, dan penghasil produk bermutu tinggi untuk meningkatkan pemasaran melalui transformasi digital.

* * * * *

Inovasi *Smart Farming* dan Digitalisasi Pertanian Antisipasi Perubahan Iklim

Oleh Yeniarta Margi Mulya

Pertanian merupakan sektor yang tetap tumbuh positif di tengah hantaman COVID-19. Nilai ekspor Indonesia pada sektor nonmigas bidang pertanian periode Januari-November Tahun 2021 mencapai US\$ 3,83 miliar. Pada kuartal kedua tahun 2022, sektor pertanian bahkan berkontribusi 12,98 % atau 1,37 %, dari total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44 % (data BPS, Agustus 2022). Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan, mengingat kondisi saat ini Indonesia juga tengah mengantisipasi krisis pangan dan penataan perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Dalam presidensi kelompok negara-negara 20 atau G20 yang tahun ini diselenggarakan di Indonesia, Kementerian Pertanian (Kementan) memimpin pada Kelompok Kerja Sektor Pertanian (*Agriculture Working Group*). Isu prioritas yang diusung oleh Kementan adalah membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh. Pada 2045, Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia. Isu kedua, mempromosikan perdagangan terbuka sebagai langkah untuk menjamin keamanan pangan dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya, isu yang ketiga adalah mendorong kewirausahaan di bidang pertanian melalui transformasi digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Negara Indonesia harus dapat menjamin kebutuhan pangan dan gizi bagi 273 juta jiwa penduduk di Indonesia. Untuk mewujudkannya

bukanlah hal mudah, terlebih saat ini banyak dampak merugikan karena perubahan iklim yang ekstrem. Namun menjadi lebih mudah jika sistem pertanian lebih tangguh terhadap perubahan iklim (*climate change*), serta menjaga jaminan keamanan stok pangan.

Perubahan iklim merupakan hal yang sangat mengganggu dalam dunia pertanian. Hal ini tidak bisa dihindari lagi akibat pemanasan global (*global warming*), dan dampak yang dirasakan di dunia pertanian sangat serius. Risiko yang dihadapi petani dari dampak perubahan iklim adalah ledakan hama dan penyakit tanaman karena kekeringan dan banjir, sehingga produksi pertaniannya menurun, gagal panen, dan berakibat kepada krisis pangan. Jika tidak segera diantisipasi dampak perubahan iklim berakibat fatal bagi sektor pertanian.

Minimnya sumber daya manusia (SDM) tentang pengetahuan dalam mengantisipasi perubahan iklim terus mendorong inovasi di bidang pertanian agar pelaku usaha tani mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Salah satu upaya peningkatan akan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelatihan, permagangan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang iklim yang bisa melahirkan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan adaptasi dan mitigasi iklim.

Menuju era *society 5.0*, elemen penting dalam penerapan cara-cara baru seperti penggunaan digitalisasi pertanian dan *smart farming* merupakan terobosan yang sangat diperlukan dalam kemajuan inovasi di bidang pertanian. Untuk mengimplementasikannya, Kementan bersama berbagai unit pelaksana teknis (UPT) dibawahnya terus bersinergi melakukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, sekolah lapang tentang dampak perubahan iklim dan cara antisipasinya.

***Smart Farming* dan Digitalisasi Pertanian**

Salah satu implementasi digitalisasi pertanian dan *smart farming* adalah menggunakan *Internet of Things (IoT)* yang bermanfaat tinggi untuk mendongkrak produktivitas pertanian, kualitas hasil panen dan produksi, dan efisiensi yang cukup tinggi. Para petani atau pelaku usahatani bisa leluasa dan mudah untuk mengontrol terhadap proses usaha taninya, melalui berbagai pengelolaan budidaya tanaman dan

hewan ternak dengan baik dan efisien.

Digitalisasi pertanian dan pemahaman adaptasi terhadap *climate change* harus terus disosialisasikan dan diajarkan terhadap petani atau pelaku usahatani yang masih sangat minim informasi. Kementan juga melahirkan inovasi pertanian cerdas iklim atau *Climate Smart Agriculture* (CSA) yang diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas tanaman padi serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani terutama di lahan sawah jaringan irigasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan, bahwa semua pelaku usaha di bidang pertanian harus siap menghadapi *climate change*. Karena pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, kualitas hasil, intensitas pertanaman, serta budidaya pertanian menggunakan teknik yang ramah lingkungan. Petani atau pelaku usaha bidang pertanian di Indonesia harus menggunakan inovasi teknologi dan mekanisasi yang telah tersedia untuk pertanian yang maju dan modern. Semakin majunya peradaban, inovasi dan teknologi akan terus dipacu dan diperbarui demi kemajuan pertanian di Indonesia.

Adanya *smart farming* dan digitalisasi dalam dunia pertanian tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa langsung diterima petani atau pelaku usahatani. Oleh karena itu pentingnya regenerasi petani muda terus dipacu secara berkelanjutan mengikuti dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendampingan mulai dari pelatihan, dan pasca pelatihan. Hal ini untuk memastikan implementasi tercapainya tujuan utama dalam mendongkrak produktivitas, kualitas, dan efisiensi pertanian modern berbasis *smart farming*.

Usaha mewujudkan ketahanan pangan melalui pertanian yang maju, mandiri dan modern, telah dilakukan secara massif melalui berbagai kolaborasi dari seluruh insan pertanian. Sebagai garda terdepan dalam pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan, petani, penyuluh, petugas pertanian lainnya harus terus bersinergi terutama dalam mengantisipasi perubahan iklim demi mengantisipasi krisis pangan dan mewujudkan lumbung pangan dunia 2045.

* * * * *

Jejaring dan Kolaborasi

1

Informasi Geospasial, *Game Changer* untuk Hadapi Isu Global

Oleh: Achmad Faisal Nurghani, S.I.Kom

Perkembangan teknologi dan pembangunan di berbagai sektor telah memberi banyak kemudahan bagi umat manusia. Namun, laju pertumbuhan yang pesat dibayang-bayangi oleh tantangan dan ancaman seperti krisis iklim, kemiskinan, dan kelaparan. Ibarat permainan catur yang memasuki babak akhir. Ancaman-ancaman tersebut telah menempatkan peradaban saat ini, pada sebuah titik di mana kita tak bisa lagi salah melangkah. Peran data dalam penyusunan kebijakan publik akan semakin krusial, termasuk data dan informasi geospasial.

Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, dan karakteristik objek alami atau buatan baik di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial menyediakan wahana untuk memahami posisi dan relasi antar objek melalui sistem koordinat keruangan.

Dengan mengintegrasikan berbagai data lainnya, informasi geospasial membantu melihat permasalahan melalui perspektif spasial. Data yang terintegrasi membantu pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran. Hal tersebut menjadikan informasi geospasial sangat potensial untuk berperan sebagai *game changer* dalam menghadapi ancaman global.

Kesadaran spasial di Indonesia memang terbilang masih muda. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

dapat dikatakan sebagai tonggak bersejarah dimulainya kesadaran geospasial bangsa ini.

Peraturan yang terbit pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut lahir dari kegelisahan yang muncul akibat timbulnya perbedaan data di berbagai kementerian/lembaga akibat penggunaan peta yang beragam. Melalui UU tersebut, penyelenggaraan peta dasar menjadi kewenangan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pada 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk mengatasi masalah tumpang tindih perizinan dan konflik penggunaan lahan. Pendekatan perencanaan pembangunan pun mulai mengadopsi konsep spasial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) menekankan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut tercermin pada pengembangan wilayah yang dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan, yang berorientasi pada pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi nasional dan koridor pemerataan. Orientasinya pada pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata.

BIG yang semula menjalankan tugas dan fungsinya melalui koordinasi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) beralih dikoordinasikan oleh Bappenas. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan informasi geospasial nasional, BIG memahami kolaborasi sebagai jalan terbaik dalam meningkatkan *awareness* seluruh pemangku kepentingan terhadap informasi geospasial.

Kerja Sama Geospasial

Pada sektor pertanian, BIG sedang menjajaki kerja sama dengan *Telkomsel Digital Food Ecosystem* untuk mengembangkan purwarupa *precision farming*. Upaya ini sebagai jawaban atas ancaman krisis pangan. Langkah tersebut menjadi relevan mengingat 28,79% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Namun,

sektor tersebut baru bisa menyumbang 13.70% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sementara itu, dalam usaha mencapai target penurunan angka stunting hingga di bawah 14% pada 2024, BIG berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi mengembangkan Dashboard Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting. Dashboard tersebut mengakomodasi 12 indikator yang bersumber dari Pendataan Keluarga Tahun 2021.

Hasil spasialisasi data statistik tersebut memperlihatkan informasi lokasi dan sebaran penduduk yang menjadi sasaran penurunan angka stunting. Data detail *by name by address* membantu analisis BKKBN untuk menerjunkan tim pendampingan keluarga dengan lebih efektif dan efisien untuk melakukan pencegahan stunting.

Kebijakan Satu Peta mengisyaratkan penggunaan satu geoportal nasional yang dikelola oleh BIG sebagai *platform* untuk berbagi pakai data geospasial. Hingga akhir 2021, dari total 618 entitas yang terdiri dari kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, sebanyak 262 (42,3%) telah terhubung sebagai simpul jaringan. Meski demikian, baru 22 entitas yang masuk dalam kategori simpul jaringan unggul yang memiliki kualitas data spasial yang baik, kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM) yang menunjang operasionalisasi simpul jaringan tersebut.

Kendala SDM

SDM masih menjadi hambatan besar dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Jumlah SDM teknis pengelola informasi geospasial yang andal masih kurang. Berdasarkan kajian BIG, jumlah ideal yang dibutuhkan Indonesia dalam mengelola informasi geospasial dengan berbagai spesialisasinya adalah sebanyak 31.249. Tetapi tenaga kerja yang siap baru mencapai angka 8.584 (27.5%) di seluruh sektor. Sementara itu, kapasitas pemenuhan dari jenjang pendidikan vokasi dan perguruan tinggi baru sebatas 1.500 lulusan per tahun.

Di sisi lain, Indonesia telah menyepakati *mutual recognition agreement* (MRA) pada jasa surveyor dalam Masyarakat Ekonomi

Asean. Bila kebutuhan SDM dalam negeri belum dapat terpenuhi, tenaga kerja asing akan membanjiri pasar dalam negeri.

Dilihat dari kacamata ekonomi, informasi geospasial masih menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan. Dalam kajian yang dilakukan BIG dan Bank Indonesia, pemanfaatan informasi geospasial diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak positif terhadap makro ekonomi. Dalam jangka pendek (setahun setelah pemanfaatan) informasi geospasial mampu meningkatkan PDB senilai 49 triliun rupiah (0.8 % dari total PDB Indonesia). Sementara dalam jangka panjang, PDB akan meningkat sebanyak Rp92 triliun (1.4%).

Kemampuan sekaligus potensi yang dimiliki informasi geospasial berkelindan dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” yang diusung Indonesia sebagai Presidensi G20. Pemanfaatan informasi geospasial sebagai input data akan memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memandang masalah, terutama untuk mendukung tiga prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi berbasis Digital, dan Transisi Energi. Di sisi lain, Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi momentum untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap informasi geospasial. Mari dukung Indonesia untuk kemandirian geospasial.

* * * * *

2

Kemampuan Melobi Kuatkan Indonesia di Presidensi G20

Oleh: Mayrianti Annisa Anwar, SP., M.Si.

Penunjukan Indonesia untuk melaksanakan Presidensi G20 pada tahun 2021 sungguh membanggakan. Sebuah anugerah bagi Indonesia dapat memperlihatkan kepada dunia semangat *Recover Together, Recover Stronger*. Kita semua berharap rakyat Indonesia semakin kuat dan turut serta untuk pulih bersama pascapandemi. Tentunya, hal ini tidaklah mudah dapat langsung diterima oleh semua kalangan.

Berbagai kegiatan telah dan akan dilakukan dalam rangka Presidensi G20 ini sesuai dengan agenda yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri. Agenda yang disusun ini mengandung pilar dan prioritas dengan isu yang menarik seperti *productivity, resilience stability, sustainable inclusive growth, collective global leadership, enabling environment and partnership*. Agenda tersebut sangat bermanfaat bagi Indonesia agar dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, memajukan pariwisata nasional dan pemulihan ekonomi, meningkatkan kemajuan pembangunan Indonesia, menarik investasi asing untuk pembangunan ekonomi hijau, serta meningkatkan kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Isu-isu yang menarik ini dapat mengangkat Indonesia dengan kekuatan jejaring dan kolaborasi pada semua kalangan menjadi kegiatan prioritas. Banyak yang dapat dilakukan terutama dalam melakukan kesepakatan atau kerja sama.

Kerangka *Unity in Diversity* menguatkan Indonesia dalam menghadapi tantangan global secara bersama-sama. Kerja sama yang dapat dilakukan di antaranya melakukan *showcasing* kemajuan dan dampak Indonesia di kancah global. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan meeting (*deputies, ministerial, summit*), kampanye keindonesiaan dan universalisme berbasis tiga isu prioritas, telah di glorifikasi agar G20 menggugah kebanggaan dan *sense of belonging* masyarakat Indonesia selaku tuan rumah.

Salah satu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah *G20 Research and Higher Education & the 1st G20 Research Ministers Meeting* (the 1st G20 RMM). Kegiatan ini menekankan kepada konsep kerja sama kolaborasi riset. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan BRIN dalam menguatkan posisi Indonesia untuk melakukan manuver yang kuat.

The 1st G20 RMM mengadopsi *Declaration of G20 Ministers on Leveraging Research, Higher Education and Digitalization for a Strong, Sustainable, Resilient and Inclusive Recovery*. Selain itu, ada pula kegiatan lainnya yang saling terkait, yaitu *G20 Collaborative Research Scheme*, *G20 Research and Innovation Informal Gathering* (G20 RIIG), *G20 Science 20 (S20)*, *G20 Research & Innovation Expo*, dan *the 3rd G20 Space Economy Leader*.

Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas merupakan terobosan baru dalam bidang riset. Langkah ini sangat tepat dilakukan mengingat BRIN adalah lembaga yang mempunyai sumber daya, sarana, dan kekuatan riset dasar sampai lanjutan serta pendanaan yang akan mendongkrak Indonesia dalam kancah dunia untuk pemulihan ekonomi.

Rangkaian kegiatan tersebut mengangkat *Digital, Green, Blue Economy* dengan tujuan pencapaian dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di negara-negara anggota G20. Diharapkan pencapaian ini nantinya menjadi pendorong utama untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan kontemporer seperti krisis energi, pangan, masalah lingkungan, kesehatan manusia, pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Dengan

demikian, kegiatan ini dapat berujung memperkuat kolaborasi penelitian negara-negara anggota G20.

Oleh karena itu, kemampuan *lobbying* sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dalam melakukan kerja sama. Sebagai salah satu contoh, dalam rangka menguatkan jejaring dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Swasta/Industri/BUMN/ Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi teknik ini sangat berguna untuk menggali lebih potensi yang dimiliki agar tercapainya tujuan. Di sinilah dibutuhkan kekuatan seorang pranata humas dalam menyampaikan informasi dengan menggunakan metode melobi.

Kemampuan melobi diperlukan agar mitra memahami program yang menjadi prioritas. Pemahaman bersama idealnya dilakukan terlebih dahulu dengan menentukan kepentingan kedua belah pihak. Setelah tahap pemahaman, berikutnya adalah mewujudkan kesepakatan dalam suatu kegiatan.

Untuk itu setiap pembahasan bisa menekankan kepada program Presidensi G20 Indonesia. Salah satunya, *Global Collaborative Research*. Platform sebuah program yang mendukung prinsip-prinsip *digital, green, blue economy*. Program ini menguatkan pemanfaatan riset dan inovasi yang dimiliki Indonesia dalam melakukan penelitian.

Kedua, penguatan sumber daya manusia dalam *Researchers Mobility Program* seperti *Visiting professor, visiting researchers, Postdoctoral fellowship, Degree by Research* yang bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal dan internasional juga menjadi isu dalam Ketiga, meningkatkan potensi yang dimiliki mitra dalam tema *Biodiversity research and its utilization; Effort to cope with the Covid-19 pandemic and its surveillance; Alternative technology for disaster management/ mitigation; Encouraging open data and knowledge without border; dan Research on digital life and artificial intelligence*.

Jejaring dan kolaborasi menjadi modal yang selayaknya dimiliki para pelobi. Agar lobi yang dilakukan berjalan baik, maka informasi, data, mental, dan kekuatan hukum menjadi syarat yang harus disiapkan sejak awal. Dengan demikian, kerja sama bidang yang dijadikan prioritas dapat mendukung tercapainya tujuan Presidensi G20 Indonesia.

Presidensi G20, Juleha Bisa Unjuk Gigi

Oleh: Haji Arif Arofah, S.Sos.

Indonesia pada 2021 berada pada peringkat keempat produsen halal terbesar dunia. Pada 2024, Indonesia ditargetkan jadi pusat industri halal dunia. Jika terwujud, banyak pihak yang memiliki kesempatan unjuk gigi, tak terkecuali juleha. Salah satu kunci keberhasilannya tampak di depan mata: Presidensi G20.

Presidensi G20, Kesempatan Langka

Presidensi G20 adalah peranan yang diemban oleh anggota G20 secara bergilir, hanya datang 20 tahun sekali. Bisa dikatakan peran ini amat strategis namun langka. Pada 2022, Indonesia menyandang peran Presidensi G20 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” atau “Pulih Bersama”.

Tiga isu prioritas akan dibahas, yakni pengembangan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Melalui ketiga isu tersebut, Indonesia dapat mengorkestrasi topik pembahasan apa saja untuk menggenjot perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia sendiri.

Kepala Biro Humas Kemensetneg RI Eddy Cahyono Sugiarto menyebutkan bahwa, “ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% pada triwulan II tahun 2021 dan nilai ekspor tumbuh 37,7%.” (dirilis setneg.go.id tanggal 8 November 2021 dengan judul “Presidensi G20 Pemulihan Ekonomi dan Indonesia Maju”). Ini sinyal bahwa pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik.

Sebagai negara berkembang yang tengah menuju negara maju, Indonesia dapat memanfaatkan dan menunjukkan (*showcasing*) berbagai kemajuan yang dicapai melalui Presidensi G20. Kemajuan ini tidak semata berkenaan dengan transformasi digital yang tengah digenjut, tapi juga sektor ekonomi yang bisa menjadi kekuatan besar perekonomian Indonesia melalui UMKM, yakni produk makanan halal.

Indonesia Menuju Pusat Halal Dunia

Sektor industri halal sebenarnya dilirik oleh banyak negara, lantaran bernilai *competitive advantage*. Pada acara “Kick Off Indonesia Industry Halal Awards 2021” tahun lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Indonesia berada pada urutan keempat produsen produk halal terbesar dunia di bawah Malaysia, Arab Saudi (UEA) dan Turki. Kendati demikian, pada pembukaan Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021, Presiden Joko Widodo menyatakan optimismenya Indonesia mampu menjadi pusat industri halal dunia pada 2024.

Secara matematis, target ini masuk akal mengingat Indonesia memiliki keunggulan yang tak dimiliki negara lain, yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI menyebut bahwa, “pangsa pasar *halal food* berada di kisaran Rp2.300 triliun, *Islamic fashion* mempunyai potensi hingga Rp190 triliun, pariwisata halal diperkirakan Rp135 triliun. Jadi, hanya bermain pada *local market* saja, sebenarnya cukup bagi Indonesia untuk memenangkan persaingan industri halal dunia.” (dirilis halal.go.id dengan judul “Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal”)

Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UMKM berbasis produk halal di-*upgrade* sistemnya, guna membangun ekosistem yang lebih baik.

Ada tiga aktor yang terlibat dalam proses jaminan produk halal, yakni [1] BPJPH selaku lembaga yang menetapkan aturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk, dan menerbitkan sertifikasi

halal; [2] lembaga pemeriksa halal (LPH) selaku pemeriksa/penguji kehalalan produk; dan [3] Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketiganya bersinergi saling melengkapi dalam menjamin kehalalan produk.

Level sertifikasi yang diterbitkan pun meningkat. Jika sebelumnya sertifikasi bersifat *voluntary* (sukarela), kini memiliki nilai *mandatory* dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Cakupan subyek yang disertifikasi pun tak sebatas produk makanan, melainkan juga obat, kosmetik, barang gunaan, jasa, gelatin, parfum, dan rumah potong hewan/jasa sembelihan.

Pelaksanaan kebijakan sebenarnya tak hanya melibatkan ketiga aktor. Ada 11 kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam konteks sinergi atau kolaborasi, yakni Kemenag, Kemenkes, Kementan, Kemenlu, Kemenristek Dikti, Kemenkeu, Kemenkominfo, Polri, BPOM, dan BSN. Pada 16 Oktober 2019, ke-11 K/L ditambah MUI menandatangani MoU Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Para pihak memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam menciptakan ekosistem berbasis sertifikasi halal. Salah satu upaya diwujudkan dalam pelaksanaan sosialisasi tentang urgensi sertifikasi halal bagi pemulihan ekonomi.

Di sinilah pranata humas tiap-tiap K/L menjalankan perannya nan vital. Pranata humas mengartikulasikan urgensi dengan bahasa sesuai dengan karakter K/L dan audiensnya masing-masing.

Juleha pun Bisa Unjuk Gigi

Peran serta masyarakat atau organisasi masyarakat pun sesungguhnya penting. Juru Sembelih Halal (Juleha), misalnya. Kehadirannya dalam rumah potong atau jasa sembelihan tersertifikasi halal mendukung terciptanya ekosistem produk halal yang baik.

Juleha menjadi ujung tombak penyediaan produk hewani yang memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). **Aman**, dalam arti tidak mengandung bibit penyakit; **sehat**, dalam arti memenuhi kebutuhan nutrisi; **utuh**, dalam arti tidak bercampur

dengan bagian dari hewan lain; dan **halal**, dalam arti sesuai syariat Islam.

Kehadiran juleha, yang kompetensi SDM-nya dikelola oleh Kementerian Pertanian dan tersertifikasi secara profesional oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tentunya mendukung terwujudnya sertifikasi halal rumah potong atau jasa sembelihan oleh BPJPH. Juleha yang kompeten dan profesional turut menentukan terselenggaranya pelayanan rumah potong/jasa penyembelihan berstandar halal BPJPH.

Sinergi apik antar K/L ini menjadi salah satu faktor pencetus semakin nyatanya ikhtiar mewujudkan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Sederhananya, memanfaatkan momentum Presidensi G20, juleha pun bisa unjuk gigi.

* * * * *

4

G20 dan Harapan Daerah Perbatasan

Oleh: Asa Zumara, SS

Salah satu tema dalam perhelatan akbar Presidensi G20 Indonesia adalah *Digital Transformation*. atau transformasi digital. Artinya, penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis yang sudah ada maupun menciptakan bisnis baru.

Menurut Enterprises Project, *digital transformation* menimbulkan perubahan mendasar bagi operasi bisnis dan bagaimana sebuah perusahaan bisa memberikan *value* atau nilai bagi para konsumennya. Transformasi digital merupakan perubahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk merancang ulang proses-proses tradisional sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif.

Jadi, konsep ini tidak hanya sebatas menggunakan teknologi untuk mereplikasi proses atau layanan yang ada menjadi bentuk digital.

Melihat dari sisi daerah perbatasan hal ini sangat penting, mengingat potensi yang tersimpan di bidang ekonomi dan pariwisata. Kalimantan Utara khususnya kabupaten Nunukan memiliki wisata alam dan budaya yang belum terekspos dengan baik. Diantaranya adalah wisata arung jeram dua negara di sungai Pansiangan dan Sedalir, jetski giram dan hiking di kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan, desa wisata Binusan, hutan mangrove dan bekantan.

Namun, jauhnya akses jalan menuju lokasi wisata dan kurang adanya infrastruktur jalan yang memadai, menyebabkan geliat

pariwisata tersebut kurang mendapat respon. Sebagai contoh, masyarakat yang ingin menuju ke kecamatan Lumbis Pansiangan harus menempuh waktu sekitar 12 jam perjalanan darat dan air. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa perahu.

Perhelatan Presidensi G20 Indonesia disambut dengan gegap gempita oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa poin perjanjian hasil G20 diharapkan banyak membawa perubahan di berbagai sektor. Seperti kesehatan, pariwisata, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, pertemuan internasional tersebut mulai berlangsung pada 1 Desember 2021, hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022.

G20 atau *Group of Twenty* adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). Forum ini merupakan gabungan antara negara dengan kelas pendapatan menengah hingga tinggi dan negara berkembang hingga maju.

Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk membangun bangsa Indonesia melalui visi misinya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025 yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Beberapa poin dari misi presiden tersebut sesuai dengan harapan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi di kabupaten Nunukan. Misi yang dimaksud adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Potensi daerah

Menilik data Badan Statistik Provinsi Kalimantan Utara yang dirilis tanggal 2 Februari 2022 dinyatakan bahwa pada bulan Desember 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 31.510 kunjungan atau meningkat sebanyak 7.058 kunjungan dibanding bulan sebelumnya

yang mencapai 24.452 kunjungan.

Secara kumulatif, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Utara pada periode Januari – Desember 2021 mencapai 316.285 kunjungan, sedangkan selama Januari – Desember 2020 mencapai 397.655 kunjungan. Sementara tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 55,07 persen.

Sementara untuk kunjungan wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar (*yacht*) sempat mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya covid dan larangan masuk bagi wisatawan asing.

Tidak dipungkiri bahwa dukungan transportasi yang baik, mudah dan efisien merupakan kunci berjalannya sebuah perekonomian suatu daerah, Kabupaten Nunukan yang terletak di garis batas negara Malaysia baru memiliki 3 bandara perintis, 2 pelabuhan internasional dan banyak pelabuhan tradisional.

Meskipun demikian, Nunukan ditunjuk sebagai salah satu *entry point* untuk wisatawan mancanegara yang menggunakan kapal pesiar (*yacht*). Peluang perputaran ekonomi sangat besar apabila didukung dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung lainnya.

Selama ini masyarakat kabupaten Nunukan hanya melakukan ekspor impor barang dagangan dengan negara tetangga Malaysia dengan cara tradisional. Dengan adanya digitalisasi ekonomi serta kerjasama dengan negara anggota G20, diharapkan pasar ekspor produk lokal masyarakat Nunukan lebih luas, cepat, dan modern.

Terselenggaranya Presidensi G20 di Indonesia menjadikan peluang pariwisata dan ekonomi lainnya yang ada di kabupaten Nunukan dapat terangkat dengan dibangunnya fasilitas transportasi yang memadai seperti bandara Internasional dan akses jalan yang baik menuju lokasi wisata. Dengan adanya pembangunan bandara dan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi Kabupaten Nunukan yang mana sesuai dengan tema besar G20 “*Recover Together, Recover Stronger*”.

* * * * *

EWG G20, Perkuat Dukungan Pemerintah bagi Penyandang Disabilitas

Oleh: Bety Yuliani, SE.

Disabilitas mempunyai keterbatasan dalam menunaikan aktifitas. sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak mereka.

Persepsi negatif tentang penyandang disabilitas pun masih banyak berkembang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak mungkin memiliki peran yang penting dan berkontribusi bagi masyarakat. Padahal penyandang disabilitas sebesar 5% dari penduduk Indonesia (Data BPS,2020).

Memahami kondisi saat ini, pola pikir ini tentunya merupakan sebuah ironi. Di Era society 5.0 ini menuntut manusia untuk berpikir dan bertindak lebih maju dalam menyikapi berbagai dilema kehidupan tidak terkecuali disabilitas. Hidup membaur dengan teknologi dan canggihnya perangkat lunak yang terkoneksi internet merupakan keharusan yang tidak bisa dielakkan. Sehingga bisa dikatakan kecanggihan teknologi sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia.

Di sisi yang sama peluang besar bagi seluruh masyarakat untuk berkontribusi positif terhadap kemajuan teknologi. Begitu pula

penyandang disabilitas, dibalik keterbatasan fisiknya, tentunya banyak sekali kelebihan yang bisa dilakukan oleh mereka. Dengan bakat dan keterampilan yang mereka miliki dan kembangkan membuat mereka mempunyai potensi dan peluang yang sama di era digital. Kemampuan yang mereka miliki inilah menjadi sebuah peluang kerja maupun peluang kewirausahaan. Sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh dalam dunia kerja.

Dukungan Pemerintah untuk Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mendukung pemberdayaan disabilitas negara menjamin dan memberikan fasilitasi kepada para penyandang disabilitas. Siapa yang dimaksud disabilitas? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengatakan, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui berbagai hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sedangkan bagaimana fasilitasi negara yang seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan? Pada Pasal 45 UU Nomor 8 tahun 2016, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Kemudian, pada Pasal 46 ditambahkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta. Adapun Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Dukungan dari pihak pemerintah kepada penyandang disabilitas diperkuat dengan hadirnya Presidensi G20. Pada pertemuan pertama Employment Working Group (EWG) atau Kelompok Kerja Bidang

Ketenagakerjaan G20, isu utama yang diangkat adalah pasar kerja inklusif dan penyandang disabilitas. Sebagaimana dikutip dari www.jpnn.com (10/3/2022) Sekjen Kemnaker mengharapkan akan ada semacam kerja sama dan langkah bagaimana setiap negara mendorong keterlibatan, mendorong akses pasar kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian, pelaksanaan EWG dapat menghasilkan output kesepakatan bersama dalam menciptakan pasar kerja inklusif, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi mereka

Sebagaimana dilansir nasional.tempo.co, selain perhatian utama dan keberpihakan bagi kelompok penyandang disabilitas di dalam pasar kerja dapat dipastikan, perlindungan jaminan sosial juga menjadi prioritas.

Komitmen pemerintah melalui Presidensi G20 ini membuka peluang pemberdayaan penyandang disabilitas. Seiring dengan masifnya upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui dinas yang menangani ketenagakerjaan. Dalam dua tahun terakhir, unit tersebut telah memfasilitasi pelatihan vokasi yang mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Dengan sertifikasi kompetensi, mereka akan lebih besar punya kesempatan untuk berkompetisi di pasar kerja inklusif. Selain itu pelatihan ketrampilan lain yang juga marak digelar sebagai bentuk fasilitasi peningkatan skill penyandang disabilitas. Bahkan dorongan pemerintah dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan makin banyak terealisasi. Tidak hanya fasilitasi peningkatan skill namun pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas juga menjadi perhatian.

Seiring dengan itu, Pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terus didorong untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Amanah pasal 53 UU no. 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah

pegawai atau pekerja. Selanjutnya Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Presidensi G20 melalui EWG adalah harapan besar bagi penyandang disabilitas. Berawal dari isu yang diusung menjadi sebuah komitmen bersama, yang selanjutnya menjadi sebuah kebijakan makro untuk penyandang disabilitas seluruh dunia. Harapannya, mereka bisa menggunakan haknya dalam mendapatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan dukungan penuh dari negara.

* * * * *

Persiapkan KTT G20, Belitung pun Bersolek

Oleh: Budi Setyo Wicaksono, S.I.Kom.

Pulau Belitung terus berbenah jelang gelaran event bertaraf internasional, yakni sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri atau Development Working Group Government (DWG) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) pada 7-9 September 2022.

Selama ini, Belitung yang dijuluki Negeri Laskar Pelangi dikenal sebagai pemilik pantai yang indah dan eksotis, dengan pasirnya berwarna putih, lautan biru yang jernih serta berhias bebatuan granit raksasa. Tak hanya pantai, masih banyak ragam wisata di pulau yang terletak di wilayah timur Sumatera itu, sehingga kini menjadi salah satu tujuan liburan favorit untuk para wisatawan.

Ragam wisata tersebut tak pelak membuat Pemerintah Pusat mengamanahkan Belitung untuk menjadi salah satu tuan rumah pada KTT G20 mendatang. Kepercayaan itu tentunya tidak ingin disia-siakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) selaku perwakilan pusat di daerah.

Berbagai persiapan terus dimatangkan, terutama keterlibatan ekonomi kreatif lokal, khususnya pada subsektor di bidang kuliner, fesyen, kriya agar bisa jadi pemain utama di gelaran tersebut, bukan penonton. Hal itu penting, karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan instrumen kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19,

sesuai tema G20, yakni “*Recover Together, Recover Stronger*”.

Pemprov Babel sedang mempersiapkan dan menyeleksi produk-produk berkualitas untuk dipajang pada area *showcase*. Area pertemuan tersebut yang akan dikunjungi oleh para delegasi. Selain itu, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif itu akan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing guna memudahkan berkomunikasi dengan para delegasi, ditambah untuk memudahkan transaksi secara non tunai, pembayaran melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sudah disiapkan melalui platform UMKM Pacak Digital atau dalam bahasa indonesia UMKM bisa digital.

Tak hanya itu, infrastruktur di Pulau Belitung akan tampak cantik ketika dilintasi para tamu negara pada September 2022 mendatang. Sebab, Gubernur Erzaldi Rosman sudah menginstruksikan jajarannya agar setiap jalan yang dilewati delegasi untuk ditata dengan tanaman penghijauan dan pembuatan taman dengan hiasan ornamen lampu G20, hingga pemeliharaan jalan yang dilengkapi marka jalan dan APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) di sepanjang jalan.

Potensi kunjungan wisata delegasi, yakni Pulau Lengkuas, Pulau Mendanau, Pulau Kepayang, Pulau Langer, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang juga akan dilakukan peningkatan infrastruktur, mulai dari perahu, keamanan, *signage*, sanitasi dan kebersihan, hingga fasilitas umum lainnya. Bahkan pedagang yang saat ini semrawut di Kawasan Pantai Tanjung Tinggi nantinya akan direlokasi ke beberapa titik yang telah disiapkan agar lebih tertata.

Pemprov Babel juga berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk menyukseskan *event* ini, mulai dari TNI Angkatan Laut yang siap melabuhkan Kapal Bantu Rumah Sakit selama perhelatan berlangsung. Kapal karya PT PAL Indonesia itu memiliki kemampuan setara Rumah Sakit Tipe C, dikutip dari www.pal.co.id berbagai fasilitas kesehatan yang dimiliki, mulai dari sejumlah peralatan medis seperti CT Scan dan X-Ray, hingga Ruang Isolasi yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan wabah menular seperti Covid-19.

Kolaborasi lainnya, pihak Angkasa Pura 2 telah menganggarkan dana untuk peningkatan infrastruktur Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Belitung, mulai dari peningkatan *overweight* landasan hingga mempercantik bandara tersebut dengan berbagai ornamen. Dari segi

pariwisata dan akomodasi, mercusuar peninggalan belanda di Pulau Lengkuas dan pembangunan dermaga apung akan dibenahi oleh Kementerian Perhubungan.

Sejalan dengan itu, harus diakui menjadi pemimpin pertemuan KTT G20 merupakan panggung besar buat Indonesia, ini merupakan torehan sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20, namun tak lantas gelaran tersebut menjadikan rakyat hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Rangkaian kegiatan para delegasi harus bisa kita dimanfaatkan, karena berpotensi memberi manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional, mulai dari menggaet investor asing, keterlibatan sektor jasa, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor-sektor lainnya untuk memberi akses pasar yang lebih luas.

Untuk itu, momentum G20 dapat kita jadikan sebagai paradigma dunia internasional untuk lebih meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia. Langkah ini tentu membutuhkan komitmen seluruh pihak untuk saling bersinergi dan berkolaborasi.

* * * * *

Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Berbenah Menyambut Presidensi G20

Oleh: Dewi Indah Ayu Diantiningrum, S.Sos.

Indonesia terpilih menjadi Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, terhitung sejak 1 Desember 2021 hingga digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 30 November 2022.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI), G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. Ini merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global.

Sejak lahirnya pada tahun 1999, G20 bertujuan untuk menyelamatkan dunia keluar dari krisis ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan.

G20 sebagai kelompok ekonomi utama dunia dengan kekuatan politik dan ekonomi, berupaya mendorong pemulihan dunia yang kini mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Mengingat hal tersebut, Indonesia mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” sebagai semangat untuk pulih bersama.

Untuk menyambut penyelenggaraan KTT G20 tersebut, seluruh kementerian/lembaga bersiap tanpa kecuali Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Unit ini memiliki Bayt Al-Qur'an

dan Museum Istiqlal (BQMI) yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Menurut Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana, TMII sebagai satu-satunya kawasan wisata miniatur Indonesia akan merevitalisasi dan merenovasi infrastruktur di dalamnya, termasuk Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

“Kita sedang memperbaiki Taman Mini ini. Nanti ketika acara (G20) ada presiden, siapa tahu tiba-tiba presiden mau mampir. Jangan sampai nanti ‘wah, ini kok kurang bagus’ atau lainnya. Apalagi posisi Bayt Al-Qur'an ini ada di depan,” ujar Ngurah Sedana dikutip dari lajnah.co.id.

BQMI merupakan museum yang berada di pintu terdepan TMII, posisi ini akan menjadi bagian dari wajah utama TMII. Selain itu, museum ini berpotensi banyak dikunjungi, sehingga BQMI disarankan untuk mempercantik areanya.

Untuk tujuan tersebut, telah dilaksanakan rapat koordinasi beberapa pihak terkait, antara lain Taman Wisata Candi (TWC) sebagai pengelola TMII, Kementerian Sekretariat Negara RI, Direktur Eksekutif TMII, Manager Museum Kawasan TMII, dan BQMI.

Pada kesempatan itu, Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abu Rokhmad mengatakan BQMI adalah museum yang hidup, jadi tidak perlu re-aktivasi. Hanya membutuhkan penataan yang bisa menunjang perbaikan untuk menyambut dan melayani pengunjung.

Rencana desain eksterior BQMI akan difokuskan pada perbaikan lanskap “Taman Al-Qur'an”. Ide ini diselaraskan dengan tren TMII yang 70% direncanakan sebagai area hijau.

Desain eksterior ini secara umum meliputi rencana desain gerbang utama, pagar depan dan samping, ikon, kafetaria, museum *shop*, panggung hiburan, lanskap tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan dalam Al-Qur'an, serta plang nama lembaga. Termasuk Galeri Harmoni yang saat ini ditampilkan di ruang pameran Museum Istiqlal.

Khusus Galeri Harmoni akan mendapatkan perhatian khusus,

sebab puncak acara Tahun Toleransi yang dicanangkan pada tahun 2022 akan berlangsung di sana.

Proses pekerjaan dilakukan sejak awal tahun dan ditargetkan selesai bulan Agustus. Adapun akses ke Bayt Al-Qur'an yang terjepit oleh proyek renovasi akan dibuatkan akses masuk bagi pengunjung reguler BQMI.

Terkait hal ini, Ngurah Sedana berjanji akan membuatkan akses sendiri untuk menuju Bayt Al-Qur'an dan Museum Olahraga. Sebab selama ini banyak yang melawan arah untuk masuk ke BQMI.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pelayanan TWC Hetty Rahmawati memberikan apresiasi setelah menyimak paparan terkait rencana desain lanskap Taman Al-Qur'an dan desain interior Bayt Al-Qur'an. Menurut Hetty rencana desain tersebut memiliki ciri khas yang sangat potensial untuk dipasarkan. Ide lanskap ini dinilai sangat cerdas.

Museum harus menjadi pusat atraksi dengan membuat program-program *bundling* bersama, dimana setiap program harus terkoneksi dengan semua unit yang ada di area TMII.

Dalam rancangannya, BQMI dan Museum Olah Raga Nasional nanti akan makin mudah aksesnya. Pengunjung tidak perlu bayar tiket masuk TMII, namun hanya dikenakan tiket parkir kendaraan saja.

Semua pihak berharap revitalisasi museum dapat segera terealisasi dan menjadi destinasi andalan menyambut gelaran Konferensi Tingkat Tinggi G20. Kamu siap berkunjung ke Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal?

* * * * *

Berikan Pemahaman G20 Secara Masif, Humas Pemerintah Manfaatkan Teknologi Digital

Oleh: Diah Eka Palupi, S.Sos., M.Si

Padatnya aktivitas masyarakat yang menyebabkan mobilitas terbatas, kerap menjadi penyebab munculnya kebutuhan terhadap teknologi digital. Kehadirannya diyakini dapat mempermudah komunikasi dan juga transaksi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seorang ibu bekerja yang harus bepergian ke kantor namun kesulitan berangkat karena tidak memiliki moda transportasi pribadi misalnya, dapat memesan moda transportasi ojek *online* (Ojol) melalui telepon genggam. Pada kondisi normal, hanya dalam hitungan menit driver Ojol sudah menjemput dan siap mengantarkan ke tempat tujuan. Solutif!

Kemudahan yang ditawarkan aplikasi digital menjadi daya pikat bagi masyarakat dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penggunaan TIK di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Dalam Buku Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 yang diterbitkan BPS disebutkan perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 78,18 persen.

Kondisi tersebut juga terpotret dalam hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Dalam riset berjudul “Dampak Ekosistem Gojek terhadap

Perekonomian Indonesia 2021: Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, disebutkan bahwa masyarakat Indonesia atau lebih dari 80% konsumen, konsisten menggunakan aplikasi Gojek. Dari data itu, tampak penggunaan teknologi digital bagi berbagai aktivitas di masyarakat benar-benar sudah menjadi kebutuhan publik.

Aksesibilitas yang begitu mudah melalui telepon genggam mereka, membuat kebutuhan terhadap layanan ekonomi berbasis digital menjadi begitu tinggi. Terkait ini, Pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat perlu melakukan strategi bagaimana mengoptimalkan ketersediaan media berbasis digital yang berkontribusi memenuhi kebutuhan masyarakat

Optimalisasi Teknologi Digital

Saat ini Indonesia sedang menjalani amanah dari dunia internasional, yakni memegang keketuaan dalam G20 atau Presidensi G20. G20 yang merupakan kependekan dari Group of Twenty adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa. G20 memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan. G20 penting untuk memastikan semua negara di dunia dapat segera pulih dan bangkit. Tak hanya dari efek pandemi Covid-19 namun juga dari ketegangan geopolitik belakangan ini.

Presiden Joko Widodo mengarahkan salah satu fokus penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia yakni optimalisasi teknologi digital untuk mendorong transformasi ekonomi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Optimalisasi teknologi digital ini terutama digunakan untuk meningkatkan *financial inclusion* dan pemberdayaan UMKM, yang melibatkan masyarakat. G20 dapat menjadi salah satu pintu masuk investasi yang dapat semakin memperkuat digital ekonomi Indonesia.

Sebegitu besarnya potensi keuntungan yang dapat diraih Indonesia dalam keaktifan pada ajang G20 ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat, khususnya dalam membuktikan profesionalitas Indonesia dalam menjalankan peran Presidensi G20. Diperlukan pemahaman masif dari semua unsur masyarakat

hingga level terkecil termasuk para sopir Ojol sebagai pihak yang memiliki kiprah mendasar pada pergerakan ekonomi mengantarkan masyarakat melakukan mobilitas. Untuk dapat memberikan dukungan penuh terhadap keketuaan Indonesia dalam G20, masyarakat perlu dipahamkan apa keuntungan Indonesia memegang peran tersebut.

Pemberian Pemahaman secara Masif

Dalam upaya mewujudkan pemahaman masyarakat tentang G20, salah satu upaya konkret yang bisa ditempuh adalah menguatkan kolaborasi para pihak. Mereka adalah para pihak yang melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah, salah satunya Government Public Relations (GPR). GPR perlu andal dalam membangun jejaring menyusun penjelasan mengenai Presidensi G20 ini dan mengglorifikasikannya kepada publik atas tujuan dari program yang disusun pemerintah.

Saat ini, jabatan Pranata Humas Pemerintah ada pada hampir semua instansi pemerintah baik lingkup pusat maupun daerah. Dari situ saja terlihat adanya peluang masyarakat Indonesia di berbagai wilayah ibu pertiwi tersosialisasikan dan dipahamkan dengan baik tentang keketuaan Indonesia dalam G20. Kolaborasi sesama GPR begitu penting agar bertukar ide dan masukan tentang bagaimana mengemas isu keketuaan Indonesia dalam G20, melalui kemasan yang mudah dipahami publik.

Saat ini bahasan G20 pada berbagai level sudah semakin marak. Upaya masif dalam memberikan pemahaman G20 tidak hanya melalui pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pendekatan kultur. Pengemasan isu G20 dalam konten informasi yang mudah dicerna menjadi tantangan kolaborasi GPR selanjutnya sehingga obrolan-obrolan G20 dapat masuk ke warung makan ataupun dalam kelakaran sopir Ojol yang sedang duduk santai sambil menunggu penumpang.

Semoga dengan dukungan penuh dari masyarakat, keketuaan Indonesia dalam G20 dapat berjalan lancar sehingga makin menguatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sebagai negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik.

Kepercayaan itu tentu akan membuka peluang Indonesia menjadi target investasi termasuk pada pengembangan aplikasi digital.

* * * * *

Melalui RIIG. Indonesia Perkuat Ekosistem Riset dan Inovasi di Tingkat Internasional

Oleh: Dian Komara, SE., M.Hum

Bentuk konkret untuk penguatan ekosistem riset dan inovasi Indonesia yaitu kolaborasi antara negara-negara G20. Kolaborasi melalui sharing fasilitas infrastruktur dan anggaran, serta memperkuat kolaborasi riset dan inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati darat dan laut.

Indonesia memiliki wadah riset dan inovasi dalam bentuk organisasi pemerintah bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN secara garis besar bertujuan meningkatkan kapabilitas Iptek, budaya riset, dan penciptaan inovasi, penguatan transformasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan berlandaskan budaya Iptek untuk peningkatan daya saing.

G20 atau *Group of twenty* merupakan kegiatan kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Kelompok negara tersebut yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brasil, China, Indonesia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Turki dan Uni Eropa. Setiap tahun secara bergiliran negara tersebut menjadi tuan rumah Presidensi G20. Saat ini Indonesia mendapatkan giliran sebagai tuan rumah setelah Italia, dengan mengusung tema *Recover Together Recover Stronger* yang

dapat dimaknai semangat pulih dan bangkit bersama.

Forum yang berdiri sejak 1999 ini tidak mempunyai sekretariat secara permanen, namun G20 mempunyai rumah tahunan yang disebut dengan presidensi dan troika. Troika yaitu semacam sekretariat yang menjaga kesinambungan penyelenggaraan G20 dan biasanya terdiri dari tiga negara. Negara yang menjabat keketuaan tahun itu, negara yang menjadi tuan rumah sebelumnya dan negara yang akan menjadi keketuaan berikutnya.

Riset dan Inovasi Indonesia

Indonesia mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 melalui berbagai kerja sama riset dan inovasi. Kepala BRIN, Dr. Laksana Tri Handoko pada wawancara Radio PRO 3 RRI program Indonesia Menyapa pada Rabu (2/3/2022), menyampaikan bahwa kondisi kompetensi riset Indonesia masih jauh dibanding negara-negara G20. Secara umum negara-negara tersebut adalah negara maju dan lainnya juga maju. BRIN ingin memanfaatkan kemajuan negara-negara tersebut untuk mendorong mempercepat perbaikan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi. Beliau memanfaatkannya lebih kepada ‘menjual’ serta meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara anggota tersebut.

Upaya negara Indonesia sesuai dengan kelanjutan inisiatif negara Italia yang merupakan Presidensi G20 tahun sebelumnya, yaitu menyelenggarakan *Riset Innovation Initiative Gathering* (RIIG) sebagai bentuk konkrit untuk penguatan ekosistem riset dan inovasi. Inti dari penyelenggaraan tersebut akan fokus pada dua hal: pertama, meningkatkan kolaborasi riset dan inovasi antar G20 melalui *sharing* fasilitas. Kedua, memperkuat kolaborasi riset pemanfaatan keanekaragaman hayati darat dan laut. Fasilitas tersebut yaitu berbagi sumber baik infrastruktur maupun anggaran. RIIG akan memperkuat kolaborasi riset dalam bidang ilmu kelautan, mempertajam fokus pada energi baru terbarukan, serta menawarkan upaya yang lebih terarah pada sumber energi terbarukan tertentu.

Keanekaragaman hayati, keanekaragaman geografis dan keanekaragaman seni budaya juga terkait dengan pengembangan

antarkisa, adalah beberapa topik yang dibahas dalam RIIG. Banyak yang berpendapat bahwa tingkat keberhasilan riset itu rendah di semua negara. Namun, dengan kolaborasi berbagai sumber daya dapat menjadi kapasitas yang lebih besar. Kolaborasi riset dan inovasi ternyata tidak sebatas dilakukan oleh lembaga atau badan pemerintah, siapapun yang berkompeten untuk dapat melakukan riset bisa berkolaborasi.

Melalui perhelatan Presidensi G20, diharapkan RIIG mampu meminimalisir *gap* tersebut. Kesetaraan dengan mekanisme kolaborasi yang cocok dan menyenangkan merupakan hal penting dalam kolaborasi riset.

Kolaborasi riset dan inovasi intern/nasional baru-baru ini misalnya kerja sama BRIN dengan mitra swasta CV. Kokoffie Tekno Inovasi. Di samping pemanfaatan teknologi peralatan semacam mesin sangrai kopi hasil invensi, kolaborasi juga akan berlanjut untuk mengembangkan teknologi-teknologi peralatan dan proses pengolahan kopi. Contoh lainnya, kerja sama BRIN melalui Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir - Organisasi Riset Tenaga Nuklir dengan Pasca Sarjana Ilmu dan Rekayasa Nuklir ITB. Melalui Diskusi Kelompok Terarah *Deep Talk of Radiation Detection and nuclear Analysis Research Technology*, kedua pihak berupaya saling menjajaki untuk membangun kolaborasi riset.

Dari keterangan dan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan riset dan inovasi yang rendah dapat diupayakan dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan riset dan inovasi baik nasional maupun internasional menjadi salah satu fokus dan hal penting bagi keberhasilan riset dan inovasi Indonesia terutama pada perhelatan Presidensi G20.

* * * * *

Menebar Optimisme G20 kepada Publik 3T, Sinergi Pemerintah di Layar Kaca

Oleh: Dimas Aditya Nugraha, M.Si

Presidensi Indonesia pada *Group of Twenty* (G20) memiliki pesan kuat tentang optimisme. Setidaknya, hal ini dapat dilihat pada tiga poin. Pertama, presidensi Indonesia membuktikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam pengelolaan pandemi COVID-19. Indonesia dipercaya menyelenggarakan *event* internasional dalam suasana pandemi. Di mana, ribuan delegasi dari Negara-negara anggota G20 akan melakukan serangkaian pertemuan sepanjang tahun di sejumlah kota di Indonesia, yang puncaknya akan berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua Bali pada November 2022.

Kedua, presidensi Indonesia pada G20 menunjukkan peran strategis Indonesia dalam pemulihan global pasca pandemi COVID-19. Pesan optimisme ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan presidensi G20 Indonesia, 1 Desember 2021. Presiden menyatakan: “Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Ketiga, presidensi Indonesia pada G20 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” mengindikasikan optimisme dunia

untuk segera melewati krisis dan menyongsong pemulihan global melalui kolaborasi yang produktif dan konstruktif. Di mana pada presidensi G20 ini, Indonesia mengusung tiga pilar utama, yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi. Isu-isu strategis tersebut menggambarkan optimisme global, khususnya anggota G20 yang merepresentasikan 85% perekonomian dunia, 79% perdagangan global, dan 65% penduduk dunia.

Pesan-pesan optimisme presidensi Indonesia pada G20 tersebut, dalam perspektif kehumasan, merupakan poin-poin kunci yang perlu ditindaklanjuti dan diartikulasikan melalui berbagai strategi dan program komunikasi. Tujuannya, agar optimisme perhelatan G20 yang akan membawa Indonesia dan dunia ke arah yang lebih baik dapat dikomunikasikan kepada publik Indonesia. Di antara publik yang memiliki posisi strategis sebagai target audiens komunikasi tentang optimisme G20 ini adalah masyarakat daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).

Posisi Strategis Daerah 3T

Setidaknya ada tiga alasan mendasar yang menjadikan masyarakat di daerah 3T memiliki posisi strategis sebagai salah satu target audiens komunikasi optimisme G20. Pertama, langkah ini selaras dengan semangat pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang Indonesia sentris, merata ke seluruh wilayah, yang secara eksplisit termuat dalam Nawacita pada prase membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Hal ini penting untuk memastikan terpenuhinya hak seluruh warga Negara, termasuk yang berada di daerah 3T, untuk memperoleh informasi terkait berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia di kancah dunia.

Kedua, ada urgensi untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman pertahanan informasi pada masyarakat di daerah 3T, terutama daerah perbatasan, yang lebih mudah mengakses media dari negara-negara tetangga dibandingkan media dalam negeri. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat

terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme.

Ketiga, isu kesenjangan digital yang di antaranya terkait dengan daerah 3T, akan menjadi salah satu agenda Indonesia pada pertemuan G20. Langkah pemerintah membawa isu tersebut ke forum internasional penting untuk dikomunikasikan kepada publik di daerah 3T, sehingga mereka mengetahui dan memahami keseriusan pemerintah untuk menjalankan komitmen pembangunan yang merata, ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

GPR TV dan Optimisme Membangun 3T

Kendala geografis menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan komunikasi publik di daerah 3T. Selain sulit diakses, daerah 3T juga memiliki banyak area *blank spot* sehingga media berbasis penyiaran terestrial dan internet belum efektif sebagai saluran komunikasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan dan program di bidang komunikasi dan informatika. Salah satunya dengan meluncurkan Government Public Relation Televisi (GPRTV), rintisan TV satelit pemerintah dengan target audiens utama masyarakat di daerah 3T, pada akhir tahun 2018.

GPRTV merupakan televisi *aggregator* konten audio visual pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi siaran GPRTV diambil dari kanal Youtube Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) yang dikemas dalam berbagai program seperti berita, wawancara, dokumenter, film, dan kesenian tradisional. Sampai Februari 2022, GPRTV telah menayangkan 14.259 konten yang diambil dari 724 akun Youtube milik 319 instansi pemerintah pusat dan daerah dengan total durasi tayang 9.675 jam.

Selain melalui TV satelit atau menonton dengan perangkat parabola, GPRTV juga dapat diakses melalui streaming Youtube dan Facebook, aplikasi Kugo, serta beberapa TV kabel lokal, yang memungkinkan GPRTV menjangkau audiens yang lebih luas. Berdasarkan Survei GPRTV tahun 2019, 2020, dan 2021,

pemirsa GPRTV tersebar di 310 Kabupaten/Kota di Indonesia. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 98% pemirsa GPRTV mendapatkan informasi terkait program prioritas pemerintah, bahkan 84% diantaranya membagikan kembali konten tersebut kepada kerabat dan koleganya.

Tak hanya dalam bentuk media televisi “konvensional” semisal di atas. Ribuan jam konten hasil agregasi yang diproduksi oleh instansi pemerintah tersebut juga dapat “dipasarkan” dalam bentuk layanan satu pintu *video on demand (vod)* dengan menyatukannya dalam platform layaknya over the top (OTT) semisal netflix, iflix, dan lainnya. Ini bisa menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan konten audio visual yang diproduksi atau berisikan informasi serta kebijakan pemerintah.

Data-data tersebut menunjukkan besarnya potensi kolaborasi pemerintah di layar kaca untuk menyebarkan optimisme perhelatan G20 kepada publik di daerah 3T. Setiap instansi pemerintah dapat berkontribusi dengan memproduksi konten audio visual terkait optimisme G20 untuk didiseminasikan di setiap kanalnya masing-masing sekaligus menjadi materi siaran GPRTV.

Melalui sinergi dan kolaborasi ini, optimisme G20 diharapkan dapat tersebar seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk publik di daerah 3T, sehingga tercipta pemahaman dan sikap yang sama dalam memandang perhelatan G20, yakni dengan optimisme.

* * * * *

Presidensi G20 Momentum Pemulihan Ekonomi Global

Oleh: Dodi Rosadi, SE., M.M.

Indonesia secara resmi ditunjuk menjadi tuan rumah G20 pada 22 November 2020. Forum ini merupakan momentum yang tepat dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memimpin negara-negara besar di dunia. Forum G20 ini merupakan kerja sama multilateral yang beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). Setelah sebelumnya forum G20 ini dilaksanakan di Italia.

Forum G20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri pada dunia, seperti seni, budaya, ekonomi dan berbagai produk unggulan yang ada. Tentunya ini semua bisa kita sampaikan kepada delegasi para tamu yang datang ke Indonesia. Dalam PRESIDENSI G20 tahun 2022, Indonesia mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger* (Bersama-sama Pulih, menjadi Lebih Kuat)

Dilansir dari laman sherpag20indonesia.ekon.go.id, pada Rabu (13/4) anggota PRESIDENSI G20 terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Afrika, South Korea, Turkey, United Kingdom, United State, European Union (EU).

Pemulihan Ekonomi Global

Presidensi G20 atau *Group of Twenty* ini dipimpin oleh salah satu negara anggota secara bergantian setiap tahunnya. Terpilihnya

Indonesia di masa pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang memiliki nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Forum ini kita harus memanfaatkan bagi pemulihan perekonomian Indonesia dan pemulihan ekonomi global.

Salah satu tantangan terbesar dalam perekonomian global saat ini adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda di berbagai negara termasuk Indonesia. Persoalan yang terjadi antara lain di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan keuangan.

Ajang MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) 2022 yang sukses digelar pada Minggu (20/3) merupakan salah satu momentum membangun kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia.

Hingga saat ini terjadinya pandemi Covid-19 memberi dampak yang luar biasa di berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya Presidensi G20 ini, kita bisa bekerja sama bersama negara negara maju dan berkembang untuk pulih bersama dan bangkit mengatasi pandemi ini. Kesempatan ini merupakan ajang pembuktian bahwa Indonesia di masa pandemi ini memiliki berbagai kemajuan yang sudah dicapai kepada dunia, terutama mengatasi Covid-19. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi global adalah program vaksinasi yang dijalankan oleh Indonesia secara gratis.

Dilansir kemenkeu.go.id (2022) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi global. Diantaranya, kecepatan vaksinasi, dukungan fiskal dan moneter, hingga gangguan pasokan dan kenaikan harga energi yang memperumit tantangan pemulihan di banyak negara berkembang. Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi, mulai vaksinasi pertama, vaksinasi kedua dan booster. Dimana kegiatan vaksinasi ini sangat berguna untuk memutus mata rantai penularan Covid 19.

Dilansir dari laman <https://www.kominfo.go.id>, pada Rabu (13/4) Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang makin kuat dan berkelanjutan, maka Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di

Jalur Keuangan.

Pertama, adalah bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Kedua, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (*Central Bank Digital Currency*). Keempat bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman.

Selanjutnya, kelima, bagaimana mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (*sustainable finance*), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital.

Semoga apa yang Indonesia rencanakan, untuk mendorong pemulihan ekonomi secara global seperti yang telah disampaikan oleh Perry Warjiyo bisa terwujud. Harapan kita bersama bahwa kegiatan Presidensi G20 ini bisa berjalan dengan lancar. Agar kegiatan tersebut berjalan lancar, dibutuhkan kerja sama, kolaborasi bersama negara-negara maju untuk terus mendukung, memberikan solusi kepada negara berkembang, seperti pemulihan ekonomi secara global, ekonomi dan kesehatan dunia.

Semoga dari hasil yang disepakati dari pertemuan Presidensi G20 yang diselenggarakan di Indonesia. Bisa memberikan manfaat bagi anggota khususnya dan negara-negara lain di dunia.

* * * * *

Percepatan Penurunan Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupan

Oleh: Duly Apika Sari, S.Sos., M.Ed.

Anak stunting ditengarai menjadi sumber dari menurunnya kualitas seseorang dalam perkembangan otak dan tubuhnya. Program stunting ini telah lama digiatkan oleh Pemerintah Indonesia dan terus di gemakan agar mencapai target 14% di tahun 2024 dimana data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih di angka 24,4%.

Sebagai bangsa yang besar dan desentralistik, partisipasi aktif semua mitra kerja menjadi kunci dari suksesnya program stunting. Kerja ini tidak terlepas dari peran serta seluruh sektor pemerintah, non-pemerintah, dan swasta. Ketiga sektor tersebut bergabung dalam satu visi besar nawa cita Presiden Joko Widodo yaitu Membangun manusia Indonesia berkualitas. Bahkan, dukungan internasional terhadap kasus ini sangat dibutuhkan. Presidensi G20 Indonesia menjadi momen yang tepat untuk menyuarakan agar tercipta kolaborasi untuk penurunan stunting.

Strategi penanganan stunting saat ini diarahkan pada intervensi stunting dari hulu yaitu pencegahan stunting pada perempuan sebelum berkeluarga, kehamilan, dan pasca kelahiran. Oleh karenanya, penunjukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan dengan *core business* pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi Ketua Pelaksana Stunting sejak Januari 2021 membutuhkan konvergensi

lintas sektor yang kuat, bersinergi, dan kompak dalam percepatan penurunan stunting.

1000 Hari Pertama Kehidupan atau dikenal dengan 1000 HPK adalah momen emas bagi menciptakan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Strategi memanfaatkan masa emas di 1000 Hari Pertama Kehidupan digerakan bersama 1000 mitra kerja dalam penanganan stunting. Isu kesehatan terutama kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga merupakan investasi jangka panjang bagi suatu bangsa dalam mewujudkan kualitas manusia.

Berawal dari Keluarga

Pembangunan manusia mengatasi stunting dilakukan melalui penanaman nilai-nilai yang menumbuhkan kesadaran masyarakat. Semua dimulai dari keluarga. Merencanakan keluarga yang berkualitas digaungkan mulai keluarga yang memiliki dari remaja, termasuk remaja itu sendiri. Upaya itu dilakukan melalui Bina Keluarga Remaja di masyarakat dan Pusat Informasi Konseling dan sejenisnya di sekolah-sekolah. Wadah ini dimanfaatkan untuk mengkolaborasikan program-program dengan mitra setempat, supaya remaja tidak menikah muda dan siap secara fisik dan mental.

Ada alasan mengapa remaja menjadi target intervensi penurunan stunting. Pasalnya, penanganan stunting ternyata dimulai dari fase sebelum menikah. Tiga bulan sebelum menikah pasangan calon pengantin dengan menyiapkan gizi yang cukup bagi pengantin perempuan untuk tidak anemia. Calon pengantin juga harus mengurangi rokok (bagi yang merokok), agar ketika ingin hamil menghasilkan sperma yang berkualitas. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya stunting pada janin.

Strategi percepatan penurunan stunting bagi remaja yang akan menikah dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama untuk konseling calon pengantin. Selain itu, pengukuran kelayakan menikah yang diukur dari lingkaran lengan calon pengantin wanita. Kementerian Agama juga menginformasikan pentingnya kesadaran bahaya rokok bagi calon janin terutama bagi calon pengantin pria.

Selain remaja, intervensi di posyandu dan puskesmas dipastikan

terpapar akan pengetahuan tentang pentingnya gizi ibu hamil dan balita. Tidak hanya itu, terapi gizi sampai dengan pemberian peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi, dalam hal program Kementerian Kesehatan telah disinergikan. Selain kerja sama dengan mitra kerja pemerintah, percepatan penurunan stunting juga dilakukan dengan lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, sampai dengan organisasi Internasional.

Tanoto Foundation, PT. Nestle, PT. Astra Internasional, PT. Danone dan 1000 Days Fund serta banyak lagi lainnya telah bekerjasama dalam rangka percepatan penurunan stunting. Para mitra kerja memberikan kontribusi dan peran serta aktif minimal 6 bulan. Kontribusi tersebut di antaranya berupa pemberian makanan bergizi dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat untuk peduli akan pentingnya mencegah stunting

Lebih dari itu, Tenaga Pendamping Keluarga yang dicanangkan BKKBN berkonvergensi dengan sektor lain di daerah adalah tim di tingkat *grassroot*. Mereka siap mendata dan mendampingi para remaja yang akan menikah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka memastikan golongan berisiko stunting ini menjadi tahu dan menjalankan hidup sehat tercukupi gizi untuk mencegah stunting.

Pemerintah telah menganggarkan para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ditargetkan 1 TPK 1 desa untuk menggerakkan secara masif dan kontinu bagi keluarga berisiko stunting. Stunting juga erat kaitannya dengan penanganan isu kemiskinan ekstrim dan faktor lingkungan yang bersih. Jejaring kemitraan yang kuat dengan sektor sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur, menyumbangkan perannya dalam percepatan penurunan stunting.

Daerah melakukan pemetaan yang dilakukan oleh TPK tidak hanya mempertimbangkan faktor gizi bagi remaja, ibu hamil, ibu menyusui namun juga lingkungan yang mendukung mereka. Sebagai contoh, data kemiskinan ekstrim diambil dari pendataan keluarga dicocokkan dengan kolaborasi BKKBN, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data tersebut dapat digunakan bagi pemerintah daerah yang kemudian dieksekusikan oleh TPK dalam melakukan pendampingan keluarga

berisiko stunting.

Penguatan jejaring kemitraan dan kerjasama yang kuat antar sektor pemerintah, swasta, dan internasional diharapkan menjadi cerminan kolaborasi 1000 mitra 1000 HPK untuk mencapai penurunan stunting 14% demi mewujudkan kualitas manusia yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

* * * * *

Bangkitkan Minat Wirausaha Berbasis UKM Digital

Oleh: Dwi Onikencanawati, S.H.

“Menjadi seorang wirausaha di masa pandemi Covid-19 adalah pilihan yang paling tepat, karena banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Bahkan, ada yang sudah melakukan PHK. Rasio kewirausahaan Indonesia baru sekitar 3,47%. Ini cukup rendah bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Singapura yang mencapai 8,76%, Thailand 4,26% serta Malaysia 4,74%,” tutur Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Teten Masduki, yang dirilis Bisnis.com, 21 Oktober 2020.

Munculnya pelaku usaha pemula (*startup*), salah satunya sebagai dampak pemutusan hubungan kerja karyawan. Dalam membangun *startup* diperlukan inovasi produk agar produknya dapat bersaing dan laku di pasaran.

Menyadari tumbuhnya pelaku usaha baru ini, pemerintah dan swasta mengajak pelaku usaha pemula memperkuat diri. Dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan, mutu produk, pembiayaan dan pemasaran. Ini merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

UKM Digital

Mulai dari kopi, jamu, kudapan, bibit anggrek, pupuk organik, keju mozarella, kerajinan tangan, batik, perkebunan jambu delhi, hingga peternakan ayam bangkok, semua ada dalam OPOP (*One*

Pesantren One Product). Aplikasi yang dikenal dengan nama Eko-tren OPOP Jatim merupakan katalog produk yang memuat lebih dari 175 produk UKM. Produk UKM tersebut ada yang sudah dipasarkan melalui media sosial dan ada yang belum.

Eko-tren OPOP Jatim merupakan salah satu Program Gubernur Jawa Timur – Khofifah Indar Parawansa yang diawali tahun 2019. Merupakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren melalui *One Pesantren One Product*. Tiga Pilar OPOP Jatim, yaitu: *Santripreneur* – Pengembangan sumber daya santri dalam berwirausaha; *Pesantrenpreneur* – Penguatan kelembagaan pesantren sebagai kekuatan ekonomi produk halal, berkualitas dan *Sosiopreneur* – Sinergi alumni pesantren dengan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi & sosial.

Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur tidak hanya melaksanakan Program OPOP Jawa Timur tapi juga memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah lainnya (yang bukan anggota OPOP Jatim) agar dapat memasarkan produknya dengan memanfaatkan teknologi informasi bekerjasama dengan *market place* serta berbagai pihak.

Sinergi mengembangkan UKM telah dilakukan secara “*rembug nyekrup*” di antara OPD – Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Jatim, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ada juga *International Council for Small Business* (ICSB) Jawa Timur, Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, OJK, Bank Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, OPOP Training Center Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, serta lembaga lainnya yang ikut terlibat dalam diskusi.

Telah difasilitasi pula untuk UKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, merek dan paten. Demikian juga terdapat program *Millenial Job Center* (MJC)- mengembangkan UKM melalui pendampingan Mentor–Ahli, *Client* – UKM dan Talent (pemuda bertalenta).

Dukungan SDM

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik

Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu dan kompeten mewujudkan wirausaha baru. Strategi yang dilakukan adalah merencanakan adanya Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan. saat tulisan ini diterbitkan, jabatan tersebut masih dalam proses pembentukan. Jabatan tersebut dibutuhkan sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan angka prosentase rasio kewirausahaan di Indonesia.

Dalam rangka uji beban kerja Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan yang dilaksanakan di Jawa Timur, terdapat beberapa tugas penting. Tugas-tugas tersebut antara lain menyusun pemetaan potensi kewirausahaan, data profil wirausaha, analisis usaha, konsultasi bisnis, layanan pendampingan dalam mengakses sumber pembiayaan, komunikasi, dan negosiasi dalam rangka kemitraan, pengembangan teknologi informasi usaha, dan inkubasi wirausaha.

Selain itu, tugas lainnya adalah menyusun informasi atau literasi pembiayaan alternatif, pengembangan ekosistem bisnis melalui peran dunia usaha dan industri, menyempurnakan kurikulum kewirausahaan, membuat rumusan kebijakan kriteria kegiatan ekonomi. Rumusan kebijakan yang dimaksud dikhususkan untuk koperasi atau kemitraan dengan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Tugas pejabat fungsional pengembang kewirausahaan juga termasuk merancang penyelenggaraan tempat promosi pada infrastruktur publik, serta memastikan pengadaan barang/ jasa untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Rincian tugas ini mencerminkan keberpihakan pemerintah melibatkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tatanan perekonomian dan dunia usaha yang lebih luas. Dukungan Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, BUMN/BUMD, swasta, perguruan tinggi, dan media dalam memberdayakan KUKM menjadi komitmen bersama memajukan KUKM.

Peran swasta, salah satunya *marketplace* telah turut serta memberdayakan dan mendampingi UKM dan *startup* agar dapat berbisnis melalui *online shop*. Hal ini dikarenakan saat ini digitalisasi menjadi tuntutan agar layanan informasi dapat dengan mudah

diakses konsumen.

Jabatan Fungsional Pranata Humas telah jauh lebih dulu terbentuk dibandingkan Pengembang Kewirausahaan. Salah satu agenda Presidensi G20 di Indonesia adalah memberdayakan UKM Indonesia. Dalam rangka menyuksekkannya, maka perlu dukungan peran Humas Pemerintah (Pranata Hubungan Masyarakat). Pranata Humas siap berkolaborasi mendukung promosi dan publikasi UKM melalui media sosial, website lembaga, video, film, dan platform media lainnya.

Dukungan Pranata Humas setidaknya untuk mengenalkan dan meningkatkan minat masyarakat membangun *startup*. Dengan adanya informasi terpercaya, layanan publik yang baik, niscaya kemandirian SDM berwirausaha akan terwujud. Indonesia sejahtera.

* * * * *

Jurnalisme Berkualitas untuk Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Dyah R. Sugiyanto

Pranata Humas Ahli Madya BRIN

Perhelatan Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum yang baik bagi kita untuk lebih kompak mencitrakan Indonesia di tingkat global. Menitikberatkan pada sektor ekonomi inklusif, berbagai aspek pun menjadi otomatis termasuk di dalamnya, termasuk bidang kesehatan, energi, dan digitalisasi.

Tentu sebagai tuan rumah sekaligus mengampu tugas keketuaan ini tidak akan kita sia-siakan. Pelayanan dan kenyamanan para tamu negara sudah barang tentu menjadi prioritas. Industri media menjadi pilar penting dalam menyukseskan ‘hajatan’ besar internasional ini.

Alan B. Albarran (2004: 297) dalam buku yang sama menyatakan, ada empat kekuatan eksternal terus mendorong perubahan di seluruh industri media. Keempat kekuatan yang dimaksud, terdiri dari teknologi, regulasi, globalisasi, dan perkembangan sosial budaya. Presidensi G20 membutuhkan empat kekuatan tersebut.

Kekuatan teknologi, terlepas dari kondisi pandemi atau tidak, jaman menuntut kita untuk dalam era teknologi digital. Mau tidak mau, industri media harus menyesuaikan. Tantangan ini sudah dijawab dengan munculnya konsep konvergensi media.

Konten-konten seputar persiapan G20 Indonesia mulai tayang di berbagai kanal media. Teknologi membuatnya semakin mudah diketahui publik. Kanal media massa *online* menjadi pilihan favorit publik saat ini.

Kecenderungan publik memilih media massa online sangat beralasan. Kreativitas publik membuat media sendiri juga cukup beralasan. Inilah kekuatan kedua yang mendorong perubahan industri media, dari konvensional menjadi digital. Tantangan memunculkan kekuatan teknologi sementara sudah terjawab, namun muncul problematika baru tentang regulasi.

Regulasi yang seharusnya menjadi kekuatan kedua yang mendorong perubahan industri media, sayangnya belum terpenuhi seutuhnya. Peraturan hukum yang tidak jauh membahas hubungan antara media mainstream dan media sosial belum ada. Sederhananya, bagaimana aturan hukum terhadap konten media mainstream tayang di media sosial (atau sebaliknya)? Apakah ada sanksinya?

Publik begitu mudah membuat akun media sosialnya menjadi kanal pemberitaan, dan media mainstream ‘latah’ menyiarkannya. Platform media sosial dengan akun perseorangan dikonstruksi sedemikian rupa agar sah dianggap sebagai sebuah media (massa). Walaupun tak selalu ditayangkan oleh media *mainstream*, konten-konten media sosial kerap sukses dirujuk publik, bahkan media massa.

Meskipun demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah berdasarkan pengukuran indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mencapai 84%. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga tinggi, yaitu 74.6. Tentu ini menjadi modal yang menunjukkan bahwa mayoritas publik mendukung kebijakan dan regulasi pemerintah. Meskipun, pro kontra juga kita jumpai dalam pemberitaan media.

Bukan berarti media tidak boleh mengkritisi kebijakan lembaga, namun proses dan informasi sebelum sampai ke publik idealnya harus terverifikasi. Media bahkan seyogianya senantiasa hadir membantu mewujudkan kebijakan pemerintah, agar dapat dipahami dan dijalankan publik. Bahkan, dalam penggalan essay yang pernah ditulis oleh PK Ojong (1966) tertulis bahwa tugas utama dari pers ialah mengontrol pemerintah.

Kekuatanglobalisasi danperkembangan sosial budaya merupakan kekuatan ke tiga dan ke empat yang mendorong perubahan industri media. Keduanya bagai kutub magnet yang berlainan. Pengaruh

globalisasi terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia harus mendapat porsi khusus dari berbagai pihak.

Dalam kaitannya dengan keketuaan G20, Indonesia tengah berkesempatan tampil sebagai negara berkembang dan menjadi satu-satunya negara di Asia yang terlibat. Penyelenggaraan acara bergengsi ini memerlukan narasi-narasi yang kuat, yang meyakinkan publik internasional, bahwa Indonesia maju dan mandiri.

Ekosistem Jurnalisme Berkualitas

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk secara sistematis dan berjangka panjang merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital.

Komunitas media massa di Indonesia mesti secara bersama-sama mempertimbangkan inisiatif-inisiatif kolaborasi antar media. Kolaborasi ini sangat penting untuk mereservasi jurnalisme berkualitas di era epidemi disinformasi, serta untuk bersama-sama membangun model bermedia yang berkelanjutan.

Jurnalisme baik, sebuah terminologi yang relevan dengan situasi yang diperlukan saat ini. 'Baik', dimaknai sebagai suatu kondisi yang kondusif dan cenderung menenangkan. Sudah banyak yang harus dihadapi publik sepanjang pandemi, akan lebih baik jika tidak ditambah hoaks yang viral, membingungkan dan menyesatkan.

Clifford Christians dalam *The SAGE Handbook of Media Studies* (2004) menyatakan bahwa jurnalis terbaik akan memastikan berita yang ditulisnya lebih dalam dengan memahami sikap, budaya, bahasa, orang, dan peristiwa yang mereka laporkan.

Dalam sebuah pemberitaan media, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tegas mendukung adanya peraturan hukum yang mendorong terciptanya ekosistem jurnalisme berkualitas. Mengutip pemberitaan media tersebut, tertulis bahwa bagaimanapun juga industri media massa harus ikut menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Meskipun demikian, industri media massa harus tetap mempertahankan jurnalisme yang berkualitas.

Hingga saat ini, media masih menjadi pilar kuat dalam pembangunan dan pembentuk karakter bangsa. Jika prinsip yang dikemukakan Clifford Christian terus dipertahankan, barangkali berita benar dan berkualitas akan lebih banyak diterima publik, ketimbang hoaks.

Media memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi seseorang. Tidak hanya itu, media bahkan mampu memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk opini politik.

Media disebut-sebut sebagai fasilitator opini dan tindakan menghubungkan individu dan masyarakat. Media sering dikonseptualisasikan sebagai hubungan utama antara individu dan masyarakat. Dalam konteks media online, warganet sebagai konsumen berita dan informasi, serta sebagai anggota komunitas. Informasi yang diterimanya tak bisa terpisahkan dengan pengalaman pribadinya yang selanjutnya memengaruhi opini dan tindakan mereka.

Untuk urusan G20, semoga tidak ada *bad news is good news*, sebuah prinsip pemberitaan media yang sudah lama tertanam di benak publik. Meskipun, tidak sedikit pula media-media yang memberitakan kabar yang baik dan informasi yang mengedukasi publik. Di masa pandemi ini, platform media digital semakin semarak. Ragam warna pemberitaan pun tak jarang mengejutkan pembaca, padahal baru membaca judulnya saja.

Dengan demikian, kembali kepada khittah jurnalisme berkualitas bukan hanya soal idealisme pers, tetapi juga soal bagaimana menyelamatkan diri dari gelombang disrupsi.

Keempatnya tidak bisa dipisahkan, alias terhubung satu sama lain. Jurnalisme, tidak cukup hanya baik saja. Jurnalisme harus berkualitas. Presidensi G20 Indonesia mutlak didukung karya-karya jurnalistik yang baik dan berkualitas.

* * * * *

Kolaborasi dengan Media, Ini 3 Hal yang Perlu Dipahami Humas Pemerintah

Oleh: Endah Heliana, S.Sos., M.Si.

Presidensi Indonesia pada G20 merupakan momen 20 tahun sekali bagi masing-masing negara dan memiliki arti sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia, sekaligus menjadi satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Indonesia menjadi anggota G20 sejak forum internasional tersebut dibentuk pada tahun 1999. Saat itu, Indonesia ada dalam tahap pemulihan setelah krisis ekonomi dan dinilai sebagai *emerging economy* yang mempunyai ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia.

Pada 2022, situasi seolah mengulang di 1998-1999 yang lalu, saat Indonesia mengalami krisis moneter. Saat ini Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi terjeratan krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19.

Asian Development Bank (ADB) menilai perekonomian Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan Indeks Ketahanan Nasional, kondisi ketahanan nasional Indonesia pada Juli 2020 kembali pada kondisi Indonesia di tahun 2015. Akibat krisis, pembangunan yang dilakukan selama 5 tahun sirna tersapu Covid-19 dalam waktu 6 bulan (Lemhannas RI, 2020).

Meski demikian, menurut ADB, kinerja ekonomi Indonesia

masih lebih baik dari negara-negara di kawasan Asia. Keanggotaan di G20 memegang amanah yang besar, sebab Indonesia hadir mewakili kelompok negara berkembang, satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara. Sepanjang krisis akibat pandemi, negara-negara berfokus untuk menyelamatkan negaranya dari krisis. Kondisi ini semakin sulit bagi negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini tidak menginvestasikan pada aspek riset dan kesehatan.

Kendala Humas Mendiseminasikan Informasi

Dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, momen ini merupakan kesempatan bagi negara-negara anggota dan dunia untuk bisa gotong royong, bekerja sama, berkolaborasi, serta melihat peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan global.

Prinsip kolaborasi telah menjadi salah satu nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kolaborasi serta saling membantu dengan sesama anggota G20 juga masyarakat dunia adalah sebuah keniscayaan.

Government Public Relations (GPR) atau humas pemerintah Indonesia memegang peranan yang penting. Peran humas pemerintah berkolaborasi dalam mendukung Presidensi Indonesia G20.

Tugas Humas antara lain meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan membangun citra dan reputasi positif. Ini sesuai dengan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan kebijakan dan program, serta membangun citra dan reputasi positif pemerintah. Ada beberapa kendala yang dihadapi Humas Pemerintah dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat.

Pertama, tidak adanya strategi komunikasi. Kendala kedua adalah pesan pemerintah yang sulit dipahami oleh masyarakat, seperti penggunaan jargon atau istilah yang mispersepsi. Salah satu contoh jargon ekonomi seperti istilah “New Normal” yang malah dimaknai sebagai situasi normal.

Kendala ketiga, terdistorsinya pesan utama pemerintah oleh pemberitaan pejabat yang “salah bicara” di media massa. Hal ini seringkali mengaburkan pesan utama yang telah disampaikan oleh humas pemerintah melalui berbagai medium komunikasi. Berita baik seketika terkubur oleh dramatisme dan bombastis pemberitaan untuk mencari *click-bait*.

Tidak kalah penting, pejabat pemerintahan perlu dibekali kemampuan berbicara di depan publik (*public speaking*) yang baik. Perlu ada pembekalan kemampuan kehumasan mendasar pada semua pejabat pemerintahan dan pranata humas. Kemampuan kehumasan ini mencakup kemampuan menulis, berbicara di depan publik, mengelola sosial media, dan kemampuan manajemen pemberitaan. Kemampuan tersebut adalah syarat mendasar bagi Humas Pemerintah, yang berujung pada terciptanya pemberitaan dan citra Presidensi G20 Indonesia yang positif.

Pranata Humas bertugas untuk mendengarkan aspirasi publik agar terakomodasi dalam kebijakan. Tidak hanya itu, Pranata Humas memastikan publik memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu negara demokrasi ditambah dengan kemudahan akses sosial media, pekerjaan Pranata Humas tentu tidak mudah. Dengan pemahaman mendasar tersebut, harapan besar dari keketuaan Indonesia di G20 untuk menciptakan berbagai peluang dan kerja sama demi kesejahteraan bersama.

Kolaborasi Humas dan Media

Membangun citra dan reputasi yang baik antara lain dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan media massa. Upaya ini untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemerintah dengan media massa. Langkah ini perlu ditunjang dengan Humas Pemerintah yang memiliki pemahaman media massa yang baik.

Ada tiga hal yang perlu dipahami oleh Humas Pemerintah dalam menjalin kolaborasi dengan media massa. Pertama, Humas Pemerintah dan media selalu memiliki agenda setting masing-masing dan selalu ada proses *gatekeeping* dalam dapur redaksi. Kedua, relasi

antara media dan Humas Pemerintah harus berkelanjutan, tidak bisa transaksional. Ketiga, Pranata Humas perlu dibekali kemampuan perlu *public speaking*, manajemen pemberitaan dan media massa sebagai kemampuan paling mendasar.

Humas berperan dalam menginformasikan berbagai tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Misalnya, menjalankan tugas sebagai pengelola sumber daya, regulator, juga penjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi *agenda setting* pemerintah dalam informasi yang dibagikan kepada media massa.

Media massa juga tak terlepas dari kepemilikan dan badan bisnis. Sebagai sebuah badan bisnis, dalam media juga terjadi proses *gatekeeping*. *Gatekeeping* adalah proses seleksi arus informasi yang masuk. *Gatekeeper* (bisa jurnalis, redaktur, pemimpin redaksi, atau pimpinan media) adalah orang yang dapat mengontrol apa yang akan dirilis ke publik.

Dalam hal ini, upaya yang bisa dilakukan adalah membagikan perspektif yang sama. Misalnya, Humas Lemhannas RI mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional kepada media massa dalam setiap pertemuan G20.

Hubungan transaksional antara praktisi Humas dan media (jurnalis) seringkali bersifat transaksional. Keduanya hanya bertemu saat ada kegiatan, konferensi pers misalnya. Padahal dengan terbangunnya relasi emosional dapat menjadi investasi sosial yang bisa mereduksi kesenjangan jarak antara media dan pemerintah. Dengan adanya kolaborasi Humas dan media, maka kendala dalam mendiseminasikan informasi G20 kepada masyarakat, bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan lagi.

* * * * *

Menggeliatkan Ekonomi Desa untuk Indonesia Pulih Bersama

Oleh: Eny Sri Widiyaningsih, S.Sos.

Presidensi G20 menjadi agenda besar bagi bangsa Indonesia dalam mengukir sejarah dunia internasional. Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga November 2022 menjadi nilai strategis. Kesempatan emas bangsa kita untuk unjuk diri, sebagai bangsa yang mampu, mandiri dan berkedaulatan penuh. Momentum ini membawa dua manfaat sekaligus.

Manfaat pertama, bangsa kita mendapat kepercayaan dari 19 negara yang tergabung dalam G20 untuk menjadi role model dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. Perkembangan yang signifikan dan luar biasa dimana dunia mulai menatap Indonesia sebagai negara penuh potensi dan patut diperhitungkan kedudukannya di mata dunia. Kepercayaan dunia mulai tumbuh untuk negara kita.

Kedua, percepatan pemulihan ekonomi bangsa dengan menggerakkan semua sektor pembangunan. Berbagai program dilaksanakan mulai dari desa hingga pemerintah pusat dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi termasuk salah satunya yang menjadi prioritas adalah pertumbuhan ekonomi mikro. Ini adalah agenda besar yang digelorakan Presiden Joko Widodo ini menghimbau keterlibatan semua elemen masyarakat. Ideologi bangsa kita sebagai salah satu support system dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang terkandung didalamnya, mampu menjadi cambuk untuk

bangkit kembali mempercepat proses pembangunan di semua sektor.

Salah satu motor penggerak untuk mensukseskan presidensi G20 adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku *leading sector* penggerak pembangunan di level bawah secara otomatis pasti akan menjadi supporting utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Hal - hal yang menjadi kebijakan pusat pasti sebagai eksekutornya adalah pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/ kota hingga tingkat desa.

Seperti halnya salah satu program Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, pada saat ini lagi gencar – gencarnya menggali dan mengembangkan muatan lokal. Penggalan potensi muatan lokal ini diprioritaskan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana BUMDes yang dikembangkan berbasis muatan lokal dibawah naungan pemerintah desa. Harapan besar dari pengembangan BUMDes ini mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selain BUMDes yang berbasis muatan lokal, ada juga ekonomi kreatif UMKM yang juga dikembangkan di daerah.

BUMDes, UMKM, dan industri ini merupakan komponen penting pembangunan perekonomian di daerah. Ketiganya mempunyai segmen pasar yang berbeda, tetapi dalam kinerjanya bisa saling berkonsolidasi dan berkolaborasi satu sama lain, guna mendukung program pembangunan.

Pembangunan yang digaungkan pemerintah melalui pengembangan ekonomi kreatif diantaranya BUMDes dan UMKM, demi pemulihan perekonomian daerah. Untuk Cakupannya, pengembangan BUMDes lebih luas dibanding UMKM. Kalau UMKM lebih pada perkembangan usaha kecil, sedangkan BUMDes mulai dari pengembangan UMKM hingga ke sektor pariwisata dan penggalan potensi di wilayahnya.

Seperti halnya Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, merupakan Kabupaten dengan memiliki luas wilayah terkecil se-Jawa Timur 127,27 Km² dengan kepadatan penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.916 jiwa per Km² (data BPS Sidoarjo). Wilayah sidoarjo terbagi dalam 18 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 322

desa. Dari total jumlah desa tersebut yang termasuk desa mandiri sebanyak 33 Desa, dan 157 termasuk desa dengan kategori desa maju.

Kemandirian desa tidak lepas dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Ketiga indikator itu menjadi acuan dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya percepatan desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo terus didorong dengan kebijakan - kebijakan yang mendukung program pengembangan usaha desa.

Kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan ekonomi desa adalah Undang - undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Guna kemandirian program yang harus dijalankan oleh desa dalam undang - undang tersebut, pemerintah mempertegas dengan Peraturan Bupati Sidoarjo no. 4 tahun 2019. Peraturan itu berisi tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Di dalamnya mendukung penyusunan rancangan pembentukan dan pembinaan BUMDes.

Pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Sidoarjo terus mendorong BUMDes yang dimiliki oleh desa - desa di Kabupaten Sidoarjo ini memiliki legalitas. Target kedepan Kabupaten Sidoarjo masing - masing desa harus memiliki BUMDes, mengingat potensi unggulan di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak dan belum tergali dengan maksimal. Kalau potensi ini bisa terekspose dengan baik maka akan berdampak positif karena akan menjadi sumber peningkatan PAD Desa. Peningkatan PAD Desa ini secara otomatis akan menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes kedepannya akan menjadi primadona dalam upaya menggeliatkan perekonomian, apalagi di tengah keterpurukan pandemi covid 19. BUMDes ini menjadi upaya yang strategis karena bukan hanya kemanafaatannya secara ekonomi, namun juga memiliki manfaat sosial. Manfaat nyata dari berdirinya BUMDes ini adalah adanya pengembangan usaha masyarakat (UKM), ketersediaan lapangan kerja (di beberapa desa ada yang mengembangkan wisata buatan dan kuliner), penurunan kemiskinan, dan lain sebagainya.

Semua program kerja dari pemerintah pusat, pemerintah daerah mengarah ke desa, karena memang potensi pengembangan terutama

untuk sumber daya alam ini berada di wilayah desa.

Mengangkat lokal wisdom yang menjadi kompetensi unggulan. BUMDes ini benar - benar menjadi lembaga untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian terutama kemandirian ekonomi.

* * * * *

Bisnis Hijau UMKM Mendukung Ekonomi Hijau

Oleh: Dra. Esti Wisnawati

Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan harapan ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru (*green jobs*) dan juga peluang investasi baru (*green investment*). (www.indonesia.go.id, 28 Januari 2022)

Menjadi ‘hijau’ dan berkelanjutan ternyata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Hal itu telah dibuktikan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya.

Indonesia memiliki potensi sangat besar menumbuhkan ekonomi hijau. Sehingga penting bagi UMKM mengenal ekonomi hijau. UMKM harus memperhatikan dampak lingkungan dengan mulai menerapkan bisnis hijau (*green business*) sebagai cara mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa praktik mencari keuntungan namun merusak lingkungan harus ditinggalkan. Kegiatan ekonomi termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi harus memprioritaskan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam jangka Panjang

Menurut survey Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 menyebutkan, sebanyak 95 persen pelaku UMKM mengaku berminat menjalankan usaha ramah lingkungan, 90% tertarik melakukan

praktik usaha inklusif. UMKM milik perempuan pun menunjukkan dukungan besar praktik usaha ramah lingkungan dan inklusif, yang akan berpotensi menyerap tenaga kerja.

UMKM harus menghasilkan produk sesuai prinsip ekonomi hijau. UMKM yang menerapkan ekonomi hijau memiliki nilai lebih karena ramah lingkungan sehingga membuka akses lebih terhadap pasar. Untuk menerapkan ekonomi hijau perlu dukungan banyak pihak, kolaborasi dan sinergi, kreativitas, sentuhan teknologi, dukungan pembiayaan, kemitraan yang luas dan pelatihan yang mencakup inovasi, kualitas produk, gesit dan sigap berdasarkan prinsip inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Menjadi UMKM dengan karakteristik seperti ini tidak mudah.

Pembahasan UMKM dalam Agenda G20

Kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini sudah mengarah pada ekonomi hijau, ini tak lepas dari fokus agenda Presidensi G20. Negara perlu mengakui adanya saling ketergantungan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan sosial.

Pada April 2022, pertemuan filantropi dunia di Bali membahas berbagai isu. Salah satunya membahas UMKM sampai tuntas. Kegiatan ini momentum tepat Indonesia mengakselerasi UMKM unggul, dan mendunia.

Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, hendaknya dapat dimanfaatkan Pemerintah Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Forum ini turut mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat landasan pelaku UMKM.

Perhelatan Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM, sembari mengenalkan *green economy* (ekonomi hijau) pada UMKM agar dapat meningkatkan peluang kerja baru (*green jobs*) dan peluang investasi baru (*green investment*).

Mengutip laman kemenkeu.go.id (27/9) dari data Kementerian Koperasi dan UKM pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai

64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. 37 juta usaha diantaranya dikelola perempuan dengan proporsi lebih besar pada usaha kecil dan mikro yaitu 50,6 persen dari usaha kecil, dan 52,9 persen dari usaha mikro. UMKM mampu menampung 97 persen dari total tenaga kerja, dan mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi.

Hingga kini UMKM masih kesulitan mendapatkan bantuan biaya untuk usahanya. Namun demikian, informasi di media menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah untuk mengatasi masalah pembiayaan UMKM dalam menjalankan usaha ekonomi hijau.

* * * * *

***City Branding* dalam Gaung Semangat Kolaborasi G20**

Oleh: Ied Sabilla, S.Sos., M.Si.

Kota Jakarta mendapat kehormatan besar menghelat upacara pembukaan bagi Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20 yang nantinya akan diselenggarakan di Bali pada bulan November. Bersama Jakarta, kota-kota lain di Indonesia juga akan memegang peran penting melalui agenda *side events* G20. Kesempatan ini tentunya tidak boleh lewat begitu saja dan dapat berpeluang mengangkat kearifan lokal ke level internasional.

Harus diakui, kesiapan kota bervariasi untuk dapat menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Meski demikian, membungkus promosi dengan satu nama Indonesia yang memiliki ragam budaya dan keindahan alam tentunya akan menarik. Melalui kegiatan/*side events* dalam bentuk seminar, forum kerja sama ekonomi, gelar budaya, promosi dagang, pameran, *kick off meeting*, hingga tinjauan lapangan tentu dapat memberikan dampak luar biasa terutama dalam tataran promosi wisata dan pergerakan ekonomi.

Sebuah survei literatur mengungkapkan terdapat tiga pendekatan utama untuk mempromosikan kota yaitu melalui acara mega budaya, restorasi dan promosi peninggalan bersejarah, serta konstruksi bangunan ikonik (Hankinson, 2006, p.240; Kavaratzis, 2005, p.1). Di antara pendekatan tersebut, selain forum G20 sebagai acara mega budaya, konstruksi bangunan ikonik telah banyak dimanfaatkan oleh banyak kota untuk mendapatkan perhatian dan daya tarik. Motif

utama di balik upaya ini adalah untuk menciptakan citra yang dapat dikenali.

Kota Jakarta sebagai contoh. Pada pertengahan 2020, diluncurkan *city branding* atau penjenamaan kota baru yaitu +Jakarta (dibaca: Plus Jakarta) Kota Kolaborasi. Jenama ini mulai hadir perlahan-lahan ke ruang publik. Belum berupa bangunan ikonik, namun jika kita menilik lokasi upacara pembukaan Presidensi G20 di Lapangan Banteng, kita akan menemukan sebuah instalasi berwarna putih besar bertuliskan +Jakarta (dibaca: Plus Jakarta) Kota Kolaborasi. Pun begitu ketika kita melintas di kolong *flyover* Jalan Sudirman atau tak sengaja melihat mural berwarna-warni di berbagai sudut kota. Inilah semangat yang dibawa +Jakarta yaitu kolaborasi untuk bekerja sama, maju, dan berkembang.

Penjenamaan kota bukan sekadar bicara soal bangunan atau promosi besar-besaran lewat media sosial dan cendera mata. Lebih jauh, ini melibatkan rasa. Jika kita cukup jeli melihat, saat ini kota-kota tengah giat mempromosikan diri secara masif melalui beragam kanal promosi.

Hal ini dilatarbelakangi perubahan teknologi dan pergeseran lingkungan dari skala lokal menjadi global sehingga membuat kota-kota bersaing satu sama lain untuk menjadi tujuan wisata yang menarik, tujuan tempat kerja, hingga promosi sebagai tempat yang kaya akan budaya dan banyak lagi (Kotler, 2002). Hal ini dapat dinilai sebagai suatu semangat positif. Kota-kota menjadi lebih semarak dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan warganya dapat menjadi lebih cair karena dalam penjenamaan kota melibatkan interaksi.

Menurut Andrews (2001) persaingan kota amat terkait dengan konsep kualitas hidup. Kualitas hidup dapat diartikan sebagai merasa sejahtera, cukup, dan puas menjadi bagian dari penduduk atau pengunjung suatu tempat. Dapat dikatakan bahwa ketika kota dapat menarik orang untuk datang dan berkunjung akan pula meningkatkan kualitas hidup karena dapat meningkatkan aktivitas perekonomian kota. Akan sangat baik jika kota-kota tumbuh bersama terutama dalam konteks bangkit dari pandemi.

Seperti di Jakarta, Kota Kolaborasi bukan sekadar slogan. Inilah pemantik semangat seluruh elemen kota untuk bangkit pulih bersama di tengah pandemi. Oleh karenanya, kolaborasi banyak diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat.

***City Branding* melalui Aksi Kolaborasi Sosial Berskala Besar**

Adalah Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), sebuah program yang awalnya menjadi panggilan terbuka untuk bersatu melawan Covid-19 di Jakarta dengan mempertemukan masyarakat yang ingin memberi dan masyarakat yang membutuhkan. KSBB ditujukan untuk membantu masyarakat Jakarta dengan ekonomi rentan.

Banyak pihak menyambut panggilan kolaborasi ini. Untuk Covid-19 kolaborasi diwujudkan melalui penanganan kesehatan dengan pemenuhan kebutuhan cepat logistik, pemenuhan sumber daya manusia dalam bentuk relawan *tracer* atau tenaga kesehatan profesional tambahan serta laboratorium dan teknologi yang bekerja sama dengan 30 kolaborator pengelola 110 laboratorium. Selain itu, kolaborasi dalam hal vaksinasi diwujudkan melalui penyelenggaraan sentra vaksin dan mobil vaksin serta kampanye vaksinasi.

Terkait dengan penanggulangan dampak sosial ekonomi, dimulai dengan KSBB Pangan kepada unit / lembaga di lokasi prioritas potensial. KSBB kini makin meluas dan beragam dengan hadirnya KSBB UMKM, KSBB Pendidikan, KSBB Permukiman, KSBB Persampahan, KSBB Ketenagakerjaan, KSBB Drainase Vertikal hingga kolaborasi Gerebek Lumpur dengan lebih dari 350 perusahaan, LSM, dan instansi yang bergabung menjadi kolaborator.

Tidak hanya yang sifatnya membantu langsung, bentuk-bentuk kolaborasi lain pun diakomodir. Festival Kolaborasi Jakarta mengakomodir ragam kolaborasi antar komunitas. Mulai dari aktivasi *online* di beragam media sosial dan bincang komunitas dengan beragam isu kota, kolaborasi kegiatan *offline* dengan komunitas kreatif, seni, dan pendidikan hingga diskusi internasional dan pemberian penghargaan. Semua kegiatan diramu dengan tujuan utama menguatkan dan memberi harapan bagi kota dan warganya

serta memberikan masukan berharga sampai ke level nasional dan bahkan kolaborasi tingkat internasional.

Maka, sejalan dengan semangat G20, sebagai bagian dari aktivitas penjenamaan, kota-kota dapat menyambut, meneruskan dan menguatkan semangat kolaborasi dengan kota-kota lain dan saling membantu promosi. Kolaborasi adalah kunci nyata bangkit dari pandemi. Mengajak warga bergerak sesuai kapasitas, dan pada akhirnya menyebarkan semangat berjejaring dan saling menguatkan hingga terbentuk pertemanan baru yang positif dan konstruktif terhadap penyelesaian isu di tengah masyarakat.

* * * * *

Jalur Alternatif Mengenalkan Presidensi G20 Versi Kementerian Keuangan

Oleh: Irfandika Pratama

Dalam Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat tema ‘Pemulihan Bersama, Memulihkan Lebih Kuat’, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi perwakilan Indonesia dalam membahas isu *finance track*, yaitu jalur yang secara khusus membahas sejumlah agenda yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20 akan berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu di jalur keuangan, yang akan dibahas pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT). Topik yang dibahas dalam lagu ini berfokus pada ekonomi dan keuangan, termasuk Kebijakan Fiskal dan Moneter, Ekonomi Global, Sektor Keuangan, Investasi Infrastruktur, Inklusi Keuangan dan Perpajakan Internasional.

Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi agar Pemerintah baik pusat maupun daerah, kementerian maupun lembaga seluruhnya untuk memperkuat komunikasi publik penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Dengan cara terus melakukan sosialisasi dan promosi secara optimal untuk membantu masyarakat mengikuti perkembangan rangkaian dinamika pertemuan dan substansi agenda Presidensi G20 Indonesia, di mana komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang digunakan ketika seorang individu atau kelompok mengumpulkan informasi dan mengkomunikasikannya

kepada kelompok untuk menyampaikan pesan tentang topik tertentu.

Komunikasi publik yang ideal terkadang juga membutuhkan sentuhan humor karena humor dapat membuat komunikasi lebih tertarik terhadap apa yang komunikator sampaikan. Humor juga mendorong informasi, membuatnya lebih mudah diakses oleh semua orang. Seringkali ada tabu yang sulit dilanggar, tetapi Anda dapat mengkomunikasikannya dengan lebih lancar melalui humor. Humor bisa menjadi suara di balik banyak gejolak masyarakat. Selain itu, hanya humor yang dapat dengan mudah mempengaruhi massa. Salah satu praktik luar biasa dari humor ini dapat dilihat melalui peran para komedian yang membawakan materi stand-up comedy.

Stand-up comedy adalah gaya humor yang sedang berkembang di Indonesia. Seni komedi ini adalah salah satu genre dari profesi komedi di mana pemain atau yang biasa disebut komika, secara khusus membawa materi ke panggung melalui monolog tentang suatu tema tertentu. Humor juga dapat menciptakan emosi positif, sehingga bahan humor dapat melekat pada massa. Selain itu, peran humor adalah untuk menemukan atau menyederhanakan isu-isu yang belum diketahui dan mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, seperti G20, agar masyarakat umum dapat lebih memahaminya. Namun, penggunaan humor tetap harus diutamakan daripada etika. Yang penting, didasarkan pada materi lucu yang disajikan secara faktual dan tidak menampilkan konten yang mengandung SARA.

Kementerian Keuangan sendiri sebagai salah satu perwakilan pembahasan isu finance track G20, memiliki komunitas pegawai yang memiliki kecintaan pada kesenian *Stand Up Comedy*. Komunitas ini kemudian dinamakan Standupindo Kemenkeu, komunitas *stand up comedy* khusus Aparatur Sipil Negara pertama di Indonesia yang diakui oleh Standupindo. Standupindo sendiri adalah komunitas yang dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dan sama-sama ingin belajar tentang *stand up comedy*, yang pada dasarnya mengumpulkan bakat-bakat para pelawak tunggal atau komika di seluruh Indonesia

Standupindo Kemenkeu sendiri memiliki satu tujuan yaitu ingin mengajak para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang idealnya dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan

kehidupan sehari-hari, atau yang biasa disebut *Work-Life Balance*. Namun, Standupindo Kemenkeu biasa menyebutnya dengan ***Work-Laugh Balance yang juga menjadi semboyan komunitas***. Standupindo Kemenkeu sendiri memiliki kegiatan rutin untuk para komika anggotanya melatih materi komedinya atau yang biasa disebut dengan *open mic*. *Open mic* di Standupindo Kemenkeu sendiri diberi brand Rame-Rame Dengerin Komedi atau biasa disingkat dengan RDK.

Dalam rangka memeriahkan dan mengenalkan Presidensi G20 melalui jalur komunikasi publik yang mengedepankan humor, Standupindo Kemenkeu menggelar acara Rame-rame Dengerin Komedi RDK Spesial Presidensi G20. Acara ini digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Kamis, 3 Maret 2022 mulai pukul 19.00 WIB dan diikuti sebanyak 11 peserta komika yang mencoba membawakan materi dengan tema G20 secara lebih ringan dan ditonton oleh lebih dari 50 partisipan. Menarik menyaksikan bagaimana para komika mengungkapkan pendapat dengan gaya canda yang memancing gelak tawa. RDK Spesial G20 ini, selain bertujuan untuk lebih mengenalkan Presidensi G20 Indonesia 2022 kepada masyarakat sebagai pendorong penyampaian informasi agar mudah diterima semua kalangan, juga sebagai sarana mengimplementasikan arahan pimpinan menyukseskan penyelenggaraan kegiatan KTT G20 di Indonesia.

RDK kali ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju acara puncak di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau biasa disebut *Road to KTT G20*, dimana *Road to KTT G20* sendiri adalah rangkaian *event supporting* di luar acara utama untuk mendukung amplifikasi pesan dan sebagai dukungan *main event* KTT G20 terutama yang ditujukan untuk masyarakat umum. Standupindo Kemenkeu mencoba membangun kepedulian dan meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Dengan pengenalan G20 melalui humor yang dibawakan para komika, diharapkan Presidensi G20 tahun ini bisa menjadi populer. Memang isu G20 ini masih terasa berat ataupun memerlukan penjelasan lebih mendalam bagi masyarakat awam. Sehingga harapannya lewat RDK ini dimana penjelasan ataupun sosialisasi

mengenai Presidensi G20 dikemas secara ringan, menarik dan menghibur dapat lebih mudah dipahami bagi masyarakat. Ya, seperti yang sedang berusaha dilakukan oleh teman-teman dari Standupindo Kemenkeu dalam rangka turut serta mensosialisasikan Presidensi G20 Indonesia.

* * * * *

Presidensi G20 Indonesia, Humas Kemenag Suksesi Amplifikasi ‘Tahun Toleransi’

Oleh: Kartika Irmawati, S.Pd.

Tuhan ciptakan beragam beda. Takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama. Agamamu agamaku, kita hidup bersama (Agamaku Agamamu, Tompi feat Glenn Fredly).

Adalah Indonesia. Sebuah hamparan warna-warni keragaman beragama. Ada islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu, buddha, dan konghucu hidup berdampingan menciptakan harmoni kerukunan. Namun, tak jarang timbul gesekan yang muncul dari mereka yang belum paham makna perbedaan. Sebut saja konflik umat beragama di beberapa daerah seperti Poso, Tanjung Balai, Sampang, Papua dan Aceh. Baru-baru ini terdengar kabar penendangan sesajen di kawasan erupsi Semeru, cerita tentang susahny membangun gereja karena ditentang oleh masyarakat sekitar, hingga tokoh-tokoh agama yang menarasikan ujaran kebencian pada penganut agama berbeda.

Ini semua menunjukkan bahwa toleransi masih harus terus digaungkan. Karena dengan yang seagama, kita adalah saudara seiman. Sedangkan dengan yang berbeda agama, kita adalah saudara dalam kemanusiaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama mencanangkan 2022 sebagai Tahun Toleransi yang menjadi salah satu sejarah perjalanan

menuju Indonesia toleran dimana masyarakatnya memegang teguh nilai-nilai agama dan menjadikannya motivasi untuk terus menebarkan kebaikan.

“Saya meyakini Indonesia mampu sebab karakter dasar masyarakatnya adalah sangat toleran dan sangat menghargai perbedaan. Berawal dari pencanangan Tahun Toleransi di 2022, kita ingin menjadikan Indonesia barometer kehidupan yang rukun dan harmoni dalam keberagaman dunia” ungkap Gus Yaquut seperti yang dilansir dari media online Kemenag RI.

Sudah saatnya umat beragama bersama-sama merawat kerukunan karena perdamaian adalah pesan universal seluruh agama. Tak hanya peran pemerintah sebagai pemegang otoritas, melalui Tahun Toleransi, umat beragama diharapkan dapat mengupayakan pengamalan nilai-nilai toleransi di masyarakat.

Tahun ini Indonesia akan menggelar perhelatan akbar di Pulau Dewata. Pada 22 November 2020 lalu, Indonesia secara resmi didaulat untuk menjadi tuan rumah presidensi G20. Ini merupakan sejarah penting dimana Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya sejak G20 dibentuk pada tahun 1999. Presidensi ini dimulai pada 26 Januari hingga November 2022 mendatang. Presidensi G20 mengusung Tema *“Recover Together, Recover Stronger”* yang bermakna “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”. Tema tersebut merupakan representasi semangat untuk pulih dan bangkit bersama memasuki babak baru setelah pandemi.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 adalah sebuah kebanggaan. Hal ini menyiratkan kemampuan Indonesia merawat perdamaian bahkan ketika dilanda pandemi sekalipun sehingga Indonesia layak menerima mandat sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini. Tidak mudah menjadi negara yang sarat akan kemajemukan. Berbagai pihak harus ambil bagian dalam upaya merawat toleransi baik itu toleransi sosial, politik dan agama. Di tengah keberagaman, Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat.

Amplifikasi Tahun Toleransi

Seperti kata Gus Dur “Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan”. Toleransi adalah sebuah keniscayaan bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang beragama. Karena pada hakikatnya perbedaan agama tidak lantas menghilangkan *fitrah* manusia yang saling membutuhkan. Melalui Presidensi G20, dunia akan melihat toleransi beragama sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang masyarakatnya mampu hidup berdampingan dalam perbedaan.

Tahun Toleransi yang bertepatan dengan pagelaran G20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengumandangkan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat dunia. Ini akan menjadi bahasan menarik di mana Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam tiga isu prioritas G20 (arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan) namun juga memberikan sumbangsih sebagai *role model* pembangunan peradaban multi agama yang akan berpengaruh pada tatanan global.

Presidensi G20 Indonesia harus didominasi oleh humas pemerintah dari berbagai instansi dan lembaga sehingga bisa memunculkan narasi G20 dari berbagai sudut pandang. Selain mendekatkan istilah G20 dengan *bahasa bumi* agar lebih bisa dipahami masyarakat, praktisi humas Kementerian Agama dapat ambil bagian dengan mengamplifikasi Tahun Toleransi.

Kampanye Tahun Toleransi di tengah perhelatan akbar ini akan membuncahkan rasa cinta tanah air di masyarakat, memantik semangat nasionalisme dan merangkul masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan toleran. Sedangkan untuk mancanegara, khususnya anggota G20, amplifikasi Tahun Toleransi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu merawat perbedaan sehingga menjadi negara yang aman sebagai penyelenggara G20.

Amplifikasi Tahun Toleransi dan presidensi G20 yang dikemas menjadi kesatuan informasi dapat dilakukan melalui media sosial instansi. Perkembangan zaman membuat ruang informasi bergeser. Saat ini orang sudah berkumpul menjadi komunitas di berbagai media sosial yang ada sehingga akselerasi informasi dapat dilakukan di sana. Humas Kemenag bisa memulai dengan membuat postingan

khusus di media sosial bernama ruang toleransi yang berisi pesan kedamaian dan menjadi manusia toleran. Amplifikasi juga bisa dilakukan dengan mengajak publik berpartisipasi melalui kegiatan ngobrol bareng yang dikemas dalam bentuk *live instagram*, *live facebook* ataupun *podcast* dengan mengangkat isu-isu keberagaman yang kemudian dikaitkan dengan Tahun Toleransi dan peran masyarakat untuk menyukseskan presidensi G20.

* * * * *

Presidensi G20 Indonesia, Kesempatan Indonesia Tunjukkan Pengembangan Infrastruktur di Mata Dunia

Oleh: Kristinawati Pratiwi Hadi, S.IP., M.Si.

Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah beberapa ajang Internasional. Setelah beberapa waktu lalu Indonesia telah berhasil menggelar motor GP untuk pertama kalinya yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, maka satu ajang lagi tengah menanti yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 di Bali bulan Oktober 2022. Sebuah kebanggaan tersendiri, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dari pertemuan 20 negara dengan perekonomian kuat di dunia dan memiliki posisi strategis. Indonesia sekaligus sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk di dalamnya.

Tentunya momen yang sangat sayang untuk dilewatkan ini harus dimaksimalkan oleh bangsa Indonesia, mengingat saat ini Indonesia tengah bangkit dari pandemi covid-19. Hal ini tentunya selaras dengan tema besar Presidensi Indonesia yaitu *'Recover Together, Recover Stronger'*.

Dari sisi kehumasan, ajang G20 juga harus mampu disampaikan kepada publik, baik internal maupun eksternal apa saja manfaatnya. Presiden RI Joko Widodo pun menaruh perhatian akan pentingnya komunikasi dan publikasi akan hal ini, yang terlihat pada pernyataannya saat memimpin Rapat Internal G20 (9/11/2021),

“Komunikasi harus dilakukan masif di dalam dan luar negeri untuk membangun trust pada Indonesia”.

Arahan Presiden untuk melakukan komunikasi yang intensif kepada publik internal dan eksternal tersebut, dapat kita sebut sebagai kegiatan promosi. Menurut Heri D.J Maulana (2007), promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik produk, merek, atau jasa kepada masyarakat, dengan tujuan supaya produk, jasa, atau merk tersebut dapat dikenal masyarakat sekaligus mempengaruhi masyarakat agar membeli atau memakainya. Promosi seyogyanya memadukan unsur-unsur pemasaran yaitu tempat, harga, dan produk untuk membangun citra atau *branding* yang sejalan dengan citra diri konsumen.

Menurut Gelder (2005), Strategi merek (*brand strategy*) mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu merek (brand) dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa untuk sukses dalam mempromosikan suatu merek, produk, atau jasa maka kita harus mengerti apa yang dibutuhkan konsumen bahkan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi konsumen.

Jika teori ini kita terapkan pada Presidensi Indonesia pada ajang KTT G20, maka seharusnya promosi yang dilakukan adalah memahami dan memberikan penekanan akan manfaat dari adanya Presidensi G20 Indonesia kepada konsumen dalam hal ini masyarakat.

Salah satu contoh tema promosi atau publikasi yang dapat diangkat adalah mengenai manfaat Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi. Mengingat isu ini masih sangat diminati baik oleh publik dalam maupun luar negeri. Mengutip pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Webinar Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia: *Investing and Trading Summit*, Jumat (18/02/2022), disampaikan bahwa Pemerintah akan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 melalui Pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur secara masif akan dilakukan melalui pembelanjaan infrastruktur nasional baik belanja infrastruktur

fisik maupun belajar infrastruktur digital yang dilakukan juga oleh Kementerian Kominfo,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sedang gencar melaksanakan percepatan pembangunan atau renovasi berbagai infrastruktur dan fasilitas di Provinsi Bali dalam rangka persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. “Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 akan dibuat lebih ramah lingkungan melalui kegiatan pembenahan infrastruktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Infrastruktur pendukung KTT G20 yang disiapkan oleh Kementerian PUPR diantaranya rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua dan pembangunan Embung Sanur di Denpasar. Progres rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua saat ini mencapai 12,33%, sedangkan pembangunan Embung Sanur mencapai 2,27%. Kementerian PUPR juga menata Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai yang berada di sekitar kawasan Waduk Muara Nusa Dua untuk digunakan sebagai showcase mangrove. Progres pekerjaannya saat ini mencapai 9,28%.

Lingkup pekerjaan penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai antara lain pembangunan gerbang masuk, monumen G20, area plaza, beji, wantilan, jalur tracking mangrove, area persemaian, area penerima (lobby, ticketing, kantor penerima), menara pandang, viewing deck ke arah Teluk Benoa, dan area parkir di sekitar Waduk Muara.

Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan melakukan preservasi jalan dan jembatan sebanyak 9 ruas yang terbagi dalam 2 paket pekerjaan. Paket I terdiri dari preservasi jalan dan jembatan 7 ruas dengan total panjang 22 km. Tujuh ruas tersebut yakni Sp.Pesanggaran-Gerbang Benoa, Sp.Kuta-Sp.Pesanggaran, Sp.Kuta-Tugu Ngurah Rai, Sp.Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai, Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua, Sp. Pesanggaran-Sp.Sanur, dan Jimbaran-Uluwatu (GWK), dan Sp. Pesanggaran – Sp. Sanur (Sarangan).

Sedangkan paket II adalah peningkatan jalan Sp. Siligita – Kempinski dan showcase mangrove sepanjang 6,5 km. Untuk

meningkatkan kualitas dan estetika, pekerjaan preservasi jalan dan jembatan disertai dengan beautifikasi atau penghijauan. Progres paket I saat ini telah mencapai 7,30%, sedangkan paket II mencapai 7,79%.

Semua kegiatan dukungan infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada September 2022. Namun lebih jauh dari itu, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan infrastruktur tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investor. Hal ini menjadi promosi baik bahwa bangsa Indonesia memang layak disebut bangsa besar di kanvas Internasional.

* * * * *

Presidensi Indonesia di G20 dan Strategi *Word of Mouth*

Oleh: Lizzatul Farhatiningsih, S.I.kom., M.Si.

Indonesia menjadi satu-satunya negara berkembang di Asia Tenggara yang masuk dalam G20. PRESIDENSI G20 Indonesia sendiri membawa angin segar pascapandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Hal ini diharapkan dapat benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Namun sebelumnya, kita perlu mengukur seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ini. Sebab, lagi-lagi ini bukanlah acara para elite belaka, tetapi merupakan hajat seluruh rakyat Indonesia. Beberapa istilah dalam G20 seperti *working group*, *sherpa track*, dan *finance track* sebaiknya memang perlu diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari agar dapat dipastikan sampai ke akar rumput dan masyarakat.

Memakai bahasa yang mudah dimengerti masyarakat kita, khususnya bahasa yang dapat dipakai dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Tetapi, hal itu juga harus disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat untuk meminimalkan kesimpangsiuran yang terjadi.

Masyarakat kita sangat terbuka dengan informasi. Sejak dahulu, budaya dari mulut ke mulut pun lekat dengan keseharian, hingga memunculkan istilah “bisik-bisik tetangga”. Informasi di kalangan masyarakat dapat cepat menyebar berdasarkan cerita-cerita juru bicara (*spokesperson*) yang dalam hal ini adalah orang yang

dipandang memiliki daya persuasif tinggi.

Bisik-bisik tetangga atau dari mulut ke mulut dapat juga disebut dengan istilah *word of mouth* (WOM). WOM di kalangan masyarakat dapat dengan singkat membuat suatu kabar berita tersiar hingga ke penjuru daerah.

Pada 1967, Johan Arndt mendefinisikan WOM sebagai komunikasi lisan yang bersifat pribadi tentang suatu hal, baik positif maupun negatif terkait merek, produk, layanan, atau organisasi. Hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk komunikasi nonkomersial. Definisi tersebut juga dipertegas Barreto pada 2014 yang menyebutkan WOM sebagai proses komunikasi lisan atau tertulis antar pengirim pesan dan individu, atau sekelompok penerima pesan untuk berbagi dan memperoleh informasi dasar secara informal. Hal itu terlepas dari apakah mereka dalam kesehariannya ada dalam jaringan sosial yang sama atau tidak.

Munculnya web 2.0 dan saluran media baru membuat WOM berkembang menjadi eWOM atau *electronic*-WOM. Ini berkaitan dengan adanya media sosial sebagai media baru yang memberikan ruang dua arah dengan memanfaatkan internet. Kolom obrolan dan komentar di media sosial memungkinkan masyarakat memperoleh dan berbagi informasi dengan mudah dan cukup bebas. Fenomena itulah yang kemudian memunculkan istilah “netizen” atau warga net.

Selain media sosial, menurut Indonesia Millennial Report 2019 yang dilansir dari IDN Times mengungkapkan, masyarakat Indonesia khususnya kaum millennial masih menjadikan *influencer* media sosial sebagai sumber informasi. Tentu saja hal tersebut dapat dimanfaatkan. Para *influencer* yang membawakan *brand* atau informasi tertentu dapat dengan mudah mengunggah aktivitas berbalut konten di media sosial mereka. Kolom komentar dari unggahan mereka biasanya akan ramai menjadi forum diskusi netizen. Hal ini kemudian akan menjadikan informasi tersebut berkembang dengan adanya komunikan-komunikator yang turut serta saling bertukar informasi.

Pemerintah dapat memaksimalkan WOM dan eWOM untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang G20. Sebagai awal, pemerintah dan masyarakat perlu membangun rasa bangga

terhadap NKRI yang pada kesempatan ini memegang tanggung jawab presidensi. Bangga karena Indonesia dapat turut mengangkat isu-isu global dan berperan terhadap penyelesaiannya. Selain itu, ini menjadi semangat untuk kita pulih bersama pascapandemi Covid-19.

Kemudian, pemerintah dapat menggandeng para pakar dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadikan G20 lebih familiar di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan menyusun narasi yang bersifat humanis. Kita perlu menilik kembali pada definisi awal, bahwa WOM merupakan percakapan informal yang bersifat nonkomersial. Sehingga, para influencer dalam hal ini para pakar dan tokoh masyarakat dapat membawanya dalam percakapan ringan keseharian.

Di era 4.0, hal senada juga dapat dilakukan di media sosial. Namun, tetap diperlukan adanya pemantauan berkala, mengingat siapa pun dapat ikut memberikan komentar dalam media tersebut. Selain itu, para *influencer* yang ditunjuk juga diharapkan dapat menjadi garis terdepan dalam penggiringan opini dan penyaringan informasi.

WOM dan eWOM sama-sama memiliki signifikansi dalam penyebaran informasi. Terkadang, keduanya dibedakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kredibilitas. Hal ini menjadi catatan penting untuk benar-benar menunjuk *spokesperson* atau *influencer* yang tepat dan dapat diterima masyarakat.

* * * * *

Mengedukasi dan Memotivasi Masyarakat, Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Dra. Loida Dasuha

Perumpamaan spion pada mobil sangatlah tepat memberi gambaran keberadaan GPR untuk perhelatan G20 di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.

Serah terima presidensi dari Italia kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Sebagaimana kita ketahui, Italia mengemban tugas keketuaan G20 tahun lalu. Betapa G20 sesuatu hal yang mendunia melibatkan negara-negara besar. Namun sejauh mana masyarakat Indonesia paham hal ini. Pemahaman ini penting karena dengan paham akan mudah untuk diajak menyukseskan perhelatan ini.

Humas atau yang lebih dikenal dengan *public relations* (PR) tentu sangat krusial bagi sebuah organisasi. PR memiliki peran dalam menciptakan citra positif organisasi dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien, ataupun para investor.

PR juga bertugas mengedukasikan kepada khalayak serta memperkenalkan kelebihan serta keunggulan dari organisasinya. Demikian juga dengan Government PR (GPR), seperti Humas di

lingkungan PUPR. Kementerian ini mempunyai tugas membangun infrastruktur yang bersifat pekerjaan umum (jalan, jembatan, bendungan, ke sumber daya air, perumahan, permukiman, dan bangunan strategis lainnya).

Secara umum kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR sangat mendukung terhadap perhelatan G20. Pembangunan Infrastruktur dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia.

Maka, secara tidak langsung masyarakat umum yang ikut membangun infrastruktur telah melibatkan diri berkontribusi untuk kesuksesan G20 ini. Selanjutnya, sebagai Humas peran apa yang dilakukan untuk ikut terlibat menyukseskan G20?

Edukasi Masyarakat

Langkah yang dapat dilakukan seorang humas adalah mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi mengenai G20. Jika hal ini telah tersampaikan dilanjutkan dengan mengajak untuk ikut berpartisipasi aktif dari individu sesuai dengan kegiatan ataupun pekerjaannya.

Saat Humas berkomunikasi tatap muka maupun melalui media cetak atau kanal lainnya, hendaknya menyelipkan pesan tentang G20. Tidak perlu mendetail. Minimal sampaikan bahwa G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa.

Pada 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh. Artinya, Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Kita sebagai masyarakat dapat ikut menyukseskan perhelatan ini. siapa pun dari kita. Karena G20 kaitannya dengan perekonomian, berarti berbagai sektor mempunyai hubungan dengan hal ini.

Informasi ini dapat kita sampaikan secara langsung ke masyarakat ataupun dengan mitra kerja kita, misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. Mereka adalah para kontraktor, konsultan, pemerintah daerah setempat, dan tokoh masyarakat. Penyampaian informasi

tentang G20 tidak selalu harus formil maupun tertulis, tetapi dapat juga dilakukan secara informal atau lisan di berbagai pertemuan.

Setelah adanya pemahaman dari masyarakat akan mudah mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan G20. Saat menyampaikan informasi perlu ditekankan manfaat apa yang mereka dapatkan jika mereka ikut berpartisipasi. Kita harus sampaikan bahwa dengan suksesnya G20 di Indonesia yang pada gilirannya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai contoh seorang PNS yang bekerja di sebuah kantor kecamatan, ia telah mendapatkan dan memahami info tentang G20. Ia pun bercerita kepada masyarakat di lingkungannya, yang mempunyai pekerjaan yang beragam, pedagang, petani, wiraswasta, guru, pengusaha kuliner, dan lain sebagainya.

PNS ini menyampaikan, jika G20 ini sukses dan dapat membangkitkan perekonomian kita dan akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, selain menginformasikan G20, kita juga mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk semangat melipatgandakan produktivitas.

Apa yang dilakukan PNS tersebut layak dicontoh oleh para Pranata Humas Indonesia. Mengedukasi agar masyarakat memaknai G20 sangatlah penting. Tak kalah penting, memotivasi masyarakat untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia.

* * * * *

Strategi *Gastrodiplomacy*, Indonesia Sajikan Menu Perikanan di Ajang G20

Oleh: M. Himawan Hidayanto, SE., MM.

Gelaran akbar pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 secara resmi menunjuk Indonesia sebagai Presidensi *Group of Twenty* (G20) selama setahun. Hal ini setelah menerima amanah Presidensi dari Italia pada 31 Oktober 2021 di Roma Italia. Mengusung tema besar “*Recover Together, Recover Stronger*” yang bermakna bersama-sama melakukan pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan setelah sebelumnya dunia dilanda pandemi Covid 19 dan bencana alam lainnya.

Forum G20 dipandang cukup berpengaruh di dunia, tercatat sekitar 75 % dari perdagangan global dan mencakup 80 % dari sumber produk domestik bruto (PDB) dunia adalah dari negara negara anggota G20. Momentum Indonesia sebagai Presidensi G20 ini dipandang sangat strategis dan kesempatan emas untuk mempopulerkan pariwisata, budaya, investasi dan produk unggulan lokal karena berbagai hal pada event ini diorkestrasikan oleh Indonesia

Sebelum acara puncak yang akan dilaksanakan di Bali pada 30 – 31 Oktober 2020 direncanakan dihadiri oleh Kepala Negara dari 19 anggota G20 dan Uni Eropa, terdapat sekitar 150 rangkaian pertemuan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia secara paralel yang berkaitan dengan tema tertentu. Rangkaian pertemuan itu bertingkat tergantung tema dan pejabat yang menghadiri seperti

Konferensi Tingkat Menteri (KTM/Ministerial Meeting), *Sherpa Meetings, Finance and Central Bank Deputies Meeting, Working Group Meetings, Engagements Groups meeting, hingga Side Events.*

Strategi Diplomasi Gastro

Suatu jenis kuliner tentu memiliki sejarah panjang rangkaian cerita, sejarah, budaya, filosofi dan kebanggaan lokal suatu daerah, hingga akhirnya terhidang di meja makan, hal inilah yang menjadi runtutan adonan menu sehingga menjadi sebuah ilmu tersendiri yang disebut gastronomi, ilmu yang mengulas makanan yang mewarnai berjuta cerita di belakangnya. Ketika ragam seni dan budaya kuliner disajikan di meja perundingan untuk berdiplomasi mencapai sebuah tujuan, dan sebagai *soft power diplomacy* disebut sebagai Strategi Diplomasi Gastro atau *gastrodiplomacy*.

Paul Rockpower, salah satu pakar diplomasi gastro mengungkapkan bahwa upaya membangun citra dan posisi suatu bangsa demi terciptanya ‘reputasi’ tertentu (*nation brand*) melalui makanan dan setiap negara berupaya mengkoneksikan makanan khasnya dengan ‘identitas nasional’ masing-masing (*national identity*) yang merujuk pada karakter bangsa, tradisi, budaya dan filosofinya, strategi itu disebut sebagai diplomasi gastro.

Sejarah mencatat, Presiden Soekarno menerbitkan buku ‘Mustika Rasa: Resep Masakan Indonesia Warisan Sukarno’ yang diterbitkan tahun 1967, buku ini sangat lengkap memuat 1.600 resep tradisional, kandungan gizi dan kalori, tata letak dapur, ragam bahan dasar, lipatan ketupat dll. Dari buku ini Presiden Soekarno ingin menegaskan jati diri dan budaya bangsa lewat kuliner dan cerminan politik pangan di tanah air.

Tampilan keindahan kuliner sebagai etalase penyelenggaraan event G20 menjadi momentum istimewa untuk berdiplomasi publik dan budaya melalui sajian kuliner di meja perundingan, diantaranya melalui kuliner berbahan dasar komoditas perikanan. Beragam menu ikan khas Indonesia siap dihidangkan seperti Sate Bandeng Khas Banten, Ikan Gabus Pucung dari Jakarta/Betawi, Ikan Asam Padeh dari Padang, Cakalang Fufu dari Manado, Ikan Lempah Kuning dari Belitung, Ikan Mangut dari Jawa Tengah, Sate Lilit Khas Bali dan

masih banyak menu ikan dengan selera yang sangat menggugah khas daerah asli Indonesia.

Menu Ikan untuk Tamu Negara

Sebagai buah tangan tamu negara, produk perikanan dalam kemasan seperti ikan kaleng tuna berbagai rasa, abon ikan, sambal ikan teri, kerupuk ikan, sarden ikan, minyak ikan dan air laut dalam, perlu disajikan. Tentunya dengan kemasan premium menarik dan jaminan mutu sesuai standar nasional dan internasional. Pengenalan produk perikanan kepada tamu negara tentu sebagai promosi pengenalan produk inovatif hasil dari UMKM perikanan, sehingga diharapkan adanya peningkatan permintaan produk dan akan mendukung sektor ekonomi masyarakat.

Implementasi strategi *gastrodiplomacy* dengan menu berbahan dasar perikanan diharapkan mempunyai dampak positif bagi Indonesia. Pertama, hal ini mengafirmasi Indonesia sebagai negara maritim dengan luas total wilayah 7,81 km² dan seluas 3,25 juta km² adalah lautan, dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kedua, strategi ini sebagai kampanye inovatif *branding* kuliner ikan. Menu berbahan dasar ikan dari berbagai daerah yang mempunyai kaya rasa, sejarah panjang, filosofis, dan budaya pada menu ikan tersebut. Selain *branding* kuliner Indonesia, terbuka pula kesempatan meningkatkan *national branding* dengan menu ikan, setelah rendang dan sate dinobatkan sebagai kuliner terlezat di seluruh dunia.

Ketiga, ini adalah strategi sekaligus *soft power* diplomasi dagang bahwa Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar produksi perikanan dunia. Terlebih, Indonesia sudah menerapkan mutu dan standar keamanan pangan untuk perikanan, sehingga mempunyai citra positif dalam dunia perdagangan.

Potensi perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mencatat produksi perikanan tangkap 7,7 juta ton, untuk perikanan budidaya sebesar 15,37 juta ton pada tahun 2020. Untuk realisasi ekspor sampai dengan November 2021 tercatat 5,15

miliar dollar AS, untuk komoditas andalan udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Negara tujuan utama ekspor ke Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa.

* * * * *

Presidensi G20 Indonesia, Momen Komunikasi Kolaboratif Humas Pemerintah

Oleh: Marroli J. Indarto, M.Si.

Presidensi *Group of Twenty* (G20) menjadi momentum penting bagi Indonesia dan negara anggotanya agar berperan aktif bagi tata Kelola global. Kondisi kini, beberapa negara anggota G20 masih diselimuti konflik, misal perang dagang atau perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19.

Dalam konteks konsolidasi antar negara, inisiatif ini tentunya bukan yang pertama kali. Sejarah mencatat Indonesia menjadi salah satu penggagas Gerakan Negara Non-Blok Tahun 1955 di Bandung karena momentum Perang Dingin.

Pemerintah optimis mengutilisasi momentum PRESIDENSI G20 Indonesia agar maksimal bermanfaat nyata untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Namun, dukungan berbagai pihak, termasuk komunikator pemerintah seperti Pranata Humas, menjadi mutlak agar visi PRESIDENSI G20 Indonesia berjalan baik.

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Anggota G20 merepresentasikan perekonomian dunia, menguasai 85% *Gross Domestic Product* (GDP) global, 75% perdagangan internasional, 2/3 penduduk dunia (www.kemenkeu.go.id).

G20 muncul sejak tahun 1999 untuk merespon guncangan

ekonomi global, hadir sebagai “Forum Utama untuk Kerjasama ekonomi internasional”. Pada beberapa memn resesi, G20 *finance track* mengkoordinasikan rencana mitigasi untukantisipasi dampak langsung gejala ekonomi, serta memperbaiki kekurangan struktur ekonomi.

Tahun 2008, G20 menjadi *High Level Forum* karena atas perannya merespon krisis finansial global. Upaya memperkuat peran global, disusunlah G20 Sherpa Track yang fokus membicarakan isu non finansial, seperti perubahan iklim, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain sebagainya.

Keunikan G20 ada dalam struktur organisasinya, forum ini tidak memiliki sekretariat atau kantor tetap. Konsep organisasinya adalah Troika, bentuk kepemimpinan organisasi atau sidang yang dijabat oleh tiga pihak dengan peran sama. Presidensi G20 kali ini, negara yang sedang menjabat Presidensi (Indonesia), negara yang menjabat presidensi tahun sebelumnya (Italia), serta negara yang akan menjadi presidensi selanjutnya (India).

Indonesia dan dunia masih harus belajar menghadapi Pandemi Covid-19. Selain menimbulkan kepanikan masalah kesehatan, pandemi ini mengguncang perekonomian global. Kini, salah satu jalan solusinya adalah kolaborasi multi pihak terutama anggota G20. Mulai dari pertukaran informasi dan data, penyediaan vaksin dan kebutuhan logistik di masa pandemi.

Presidensi G20 Indonesia mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Ada tiga fokus yaitu: Penanganan kesehatan yang inklusif, Transformasi berbasis digital, dan Transisi menuju energi berkelanjutan. Presidensi G20 dibagi dua jalur yaitu *financial track* dan *sherpa track*. Pada sherpa track ada 11 Working Group (WG), 1 inisiatif dan 10 Engagement Group (EG). Dampak nyata penyelenggaraan event diharapkan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp7 Triliun dan menyerap 30.000 tenaga kerja.

Momen Kolaborasi

Momen Presidensi G20 Indonesia harus dimanfaatkan maksimal dalam mengkolaborasikan seluruh sumber daya. Belajar dari pandemi

Covid-19, dunia harus menyadari pentingnya penguatan koordinasi dan kerja sama global dalam menghadapi pandemi.

Momentum Presidensi G20 kali ini harus lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan pendekatan komunikasi kolaboratif. Pemerintah melalui aktor komunikasi publik, misal Pranata Humas, mengedepankan dialog partisipatif. Hubungan komunikasi yang saling menghargai, berbasis empati dan menguntungkan baik sisi pemerintah maupun masyarakat, melalui representatifnya.

Makanya G20 menyediakan banyak partisipasi publik melalui The Bussines 20 (B20) atau komunitas bisnis internasional, Civil 20 (C20) untuk wadah organisasi sipil, Labour 20 (L20) terkait kepentingan tenaga kerja dan bagi peneliti adalah forum Science 20 (S20). Bagi Think Tank ada Think20 (T20), Urban 20 (U20) untuk forum isu masalah perkotaan, Women20 (W20) tentang isu terkait perempuan dan bagi anak muda ada Youth 20 (Y20).

Dialog partisipatif hanya akan terjadi bila pemangku kepentingan berpartisipasi dan duduk bersama untuk memecahkan permasalahan. Partisipasi muncul jika mereka memiliki kepentingan dan kesempatan menyuarakan kepentingannya. Sementara, partisipasi terjadi jika ada saling ketergantungan dan kepercayaan. Kerjasama melalui dialog dan partisipasi diarahkan pada pembentukan konsensus (Woltjer, 2000; Innes, 1996).

Dialog berorientasi konsensus membutuhkan prasyarat, antara lain Pertama, partisipasi pemangku kepentingan dengan prinsip demokrasi. Kedua, dialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan saling menghormati. Terakhir, aktor yang terlibat harus kompeten, terutama kecakapan berkomunikasi.

Pranata Humas dapat menerjemahkan konsep diatas dalam konteks komunikasi konseptual yang membangun pemahaman dan komitmen menumbuhkan kepercayaan publik kalau Presidensi G20 Indonesia berjalan baik dengan dukungan masyarakat.

Konsepsi inklusif menekankan kebijakan yang diambil anggota G20 mengakomodir publik di luar pemerintah agar masuk dalam kebijakan secara global, termasuk Indonesia. Sebut saja salah satu pembahasan jalur finansial, yaitu inklusi keuangan global.

Narasi pemerintah mendorong produktivitas, kapasitas dan akses keuangan. Untuk masyarakat dalam komunikasi publik dapat fokus inklusi keuangan bernilai manfaat bagi keluarga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), atau milenial agar bisa memperbaiki kehidupan.

Terkait isu jalur Sherpa, transisi energi misalnya. Kebijakan pemerintah pengurangan emisi karbon untuk transformasi ke energi hijau atau energi terbarukan, tentunya untuk penyediaan energi yang berkelanjutan. Pada sisi masyarakat, Pranata Humas, dapat menurunkan dalam narasi misalkan komitmen emisi karbon dengan mensosialisasikan masyarakat lebih sering mengakses transportasi publik, bersepeda atau berkebun dengan memanfaatkan ruang kosong di rumah.

Melihat manfaat G20, tidak hanya terkait ekonomi, kata kunci kolaborasi adalah langkah awal bagi tata kelola peradaban dunia. Targetnya, mendorong kesejahteraan yang adil untuk dunia, terutama Indonesia sebagai bentuk perwujudan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

* * * * *

Daftar Pustaka

- Bronn, Carl & von Kutzschenbach. 2006. *Communicating sustainable development initiatives : Applying co-orientation to forest management certification*. Bingley. Emerald Group Publishing Limited
- Johnston, Injy. 2006. *The G20, climate change and COVID-19: critical juncture or critical wound?*. Bingley. Emerald Group Publishing Limited
- Bath, Mohammad Younus, dkk 2022. *Domino-effect of energy consumption and economic growth on environmental quality: role of green energy in G20 countries*. Bingley. Emerald Group Publishing Limited

Mengulik Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Presidensi G20 Indonesia

Oleh Mas Aryo Kristiyanto, S.Ikom.

Mengawasi dan mengobservasi hukum adalah salah satu tugas DPD RI dalam proses Presidensi G20. Indonesia tentu juga akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang dapat memberi kontribusi dengan lebih seimbang pada tata kelola dunia, sehingga membuat G20 menjadi lebih adaptif akan krisis, tidak hanya itu saja namun di forum global juga dapat memperjuangkan kepentingan nasional. Sehingga DPD RI sebagai bagian dari legislatif tetap bisa berperan semaksimal mungkin baik dalam menjadi representasi daerah maupun fungsi pengawasan kerja sama antar lembaga/parlemen.

Tentu berbagai pihak termasuk DPD RI sebagai legislatif dapat memaksimalkan langkah strategisnya dalam mendukung pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Beberapa hal yang bisa diperhatikan antara lain digitalisasi, investasi, maupun perekonomian masyarakat. Terkait digitalisasi, DPD RI bisa mendorong mengenai *roadmap* milik pemerintah dan mendorong pembangunan infrastruktur digitalisasi. Dengan adanya perkembangan pada teknologi tersebut, maka akan dapat mengatasi terjadinya kesenjangan digital.

Terdapat di lain sisi, DPD RI juga dapat mendorong inklusi keuangan dengan adanya *fintech* dan digitalisasi, khususnya dalam pembuatan *regulatory sandbox*. Tujuan dari pembuatan hal tersebut

yakni teruntuk melindungi berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan Indonesia ini berguna dalam melaksanakan hilirisasi yang mendorong terciptanya nilai tambah dalam melengkapi *Global Value Chain*, contohnya Indonesia mendorong adanya *sustainable palm oil*. Adanya dorongan tersebut harapannya Indonesia menjadi komoditas ekspor andalan. Hal ini juga yang menjadi fokus DPD RI agar diskusi terfokus kepada pembahasan perekonomian serta digitalisasi bagi tanah air mendatang.

Selama setahun penuh secara resmi Indonesia melaksanakan Presidensi Group of Twenty (G20) yang akan dilaksanakan hingga agenda di November mendatang. Presidensi G20 mengangkat tema “*Recovery Together, Recovery Stronger*”. Dengan adanya tema tersebut, Indonesia turut mengajak seluruh dunia untuk bersamaan dalam menggapai pemulihan yang lebih kuat dan secara berkelanjutan. Perekonomian global yang semakin terintegrasi, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan berlangsung lama jika diikuti dengan keberhasilan yang sama di antara negara-negara lainnya. Melalui forum G20 ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk mendorong dunia secara kolektif melaksanakan kebijakan untuk mempercepat laju pemulihan ekonomi global secara inklusif.

DPD RI dapat mendorong segala eksistensi pelaksanaan secara ketatanegaraan maupun ekonomi. Manfaat KTT G20 adalah menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju serta negara berkembang. KTT G20 juga diikuti dengan memperkuat sektor kunci ekonomi dilaksanakan dengan melalui negosiasi forum G20 pada bidang perdagangan, investasi, dan lainnya.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 yang berisi mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang berfokus kepada utusan daerah. DPD konsisten dalam melakukan penyusunan program legislasi nasional yang berhubungan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA),

serta sumber daya ekonomi. Hal itu selaras dengan tujuan KTT G20 yang menghasilkan berbagai manfaat secara legislasi maupun *true economic impact* bagi Indonesia ke depan.

Maka dari itu, memahami tantangan dan kebutuhan akan aksi kolektif, Indonesia akan memfokuskan terhadap tiga pilar utama teruntuk Kepresidenan G20 2022. Tiga pilar utama tersebut yakni Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan serta Transformasi Digital. Dengan adanya ketiga pilar tersebut, Indonesia akan terus memimpin untuk memastikan akses yang berjalan adil akan vaksinasi COVID-19, mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan ikut serta eksistensi UMKM dan ekonomi digital.

DPD RI Maksimalkan Komunikasi Strategis Nasional dan Daerah

Selain itu, DPD RI juga harus bisa sejalan serta berperan ketika melihat perspektif yang tersebar di seluruh masyarakat. Di saat situasi global yang terus mengalami ketidakpastian dalam ketersediaan energi, DPD RI mempunyai seluruh langkah guna memperoleh dukungan komunikasi, pembangunan, pembiayaan serta investasi. Selama dilaksanakannya pendekatan diplomasi dan negosiasi yang berjalan efektif. Hal ini juga yang bisa berujung pada investasi berbagai sektor termasuk sektor perekonomian dan UMKM. Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian yang besar untuk memajukannya.

DPD RI dapat memaksimalkan perkembangan komunikasi sinergitas antara nasional maupun daerah, sehingga apa yang diharapkan bagi perwakilan-perwakilan daerah dapat tercapai. Pengakuan terhadap pentingnya tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif yang terjadi di antara berbagai negara maju dan berkembang yang ada di seluruh penjuru dunia selalu menjadikan tujuan dari inti pelaksanaan G20, dari posisi tersebut maka lembaga Dewan Perwakilan Daerah bisa menggerakkan fokus presidensi tanpa harus meninggalkan apa itu nilai-nilai daerah yang ada di Indonesia. Saat ini, dunia membutuhkan arti kerja sama dan solidaritas yang lebih dari sebelumnya. Pandemi global telah memberi pengaruh pada tiap

aspek masyarakat, yang dimulai dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga aspek perdagangan internasional.

DPD RI juga dapat mendorong segala eksistensi pelaksanaan secara ketatanegaraan maupun ekonomi dan inilah letak dari manfaat pelaksanaan KTT G20 teruntuk menyeimbangkan kepentingan dan prioritas negara maju dan negara berkembang dan juga berupaya dalam memperkuat sektor kunci ekonomi dengan cara pelaksanaan negosiasi forum G20 dalam perdagangan, investasi dan lainnya. Terakhir, DPD RI sebagai bagian dari lembaga legislatif dan pada HUT ke-17 tanggal 1 Oktober 2021 meluncurkan *tagline* ‘Dari Daerah, untuk Indonesia’ tetap bisa berperan semaksimal mungkin baik dalam menjadi representasi daerah maupun fungsi pengawasan kerja sama antar lembaga/parlemen tanpa harus meninggalkan tugas kenegaraan dalam agenda Presidensi G20 mendatang.

* * * * *

Geliat Suara Muda Pada Ajang G20

Oleh: Niniek Andriani

*Masa depan Indonesia bukan berada pada para anak muda utopis. Tapi ada pada genggamannya pemuda pemudi yang kritis pada permasalahan yang ada dan bekerja nyata untuk menyelesaikannya
- dr. Gamal Albinsaid*

Pemerintah secara resmi mengumumkan Maudy Ayunda sebagai juru bicara untuk Presidensi G20 Indonesia. Terpilihnya Maudy sebagai sosok yang mewakili tokoh anak muda menunjukkan bahwa perhelatan G20 memberikan porsi penting bagi tampilnya generasi muda untuk berkontribusi menyampaikan gagasan, ide dan inovasi bagi tatanan dunia yang lebih baik.

Dalam G20 sendiri terdapat Forum khusus bagi Pemuda yaitu Youth 20. Melansir dari situs <https://y20-indonesia.org>, Youth 20 adalah wadah bagi para pemimpin muda masa depan dari seluruh negara anggota G20 untuk berdiskusi, berargumen, dan bertukar ide, hingga mencapai kesepakatan bersama terkait agenda Presidensi G20.

Lebih dari 80 delegasi muda internasional akan ambil bagian dalam acara tersebut. Terdapat 4 isu utama forum Youth G20 (Y20) yakni Ketenagakerjaan Pemuda, Transformasi Digital, Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni serta Keberagaman dan Inklusi.

Amplifikasi Pesan G20 pada Kalangan Muda

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan

Badan Pusat Statistik, jumlah usia muda Indonesia (Generasi Z dan Millennial) bila dijumlahkan mencapai 53,81% dari total penduduk. Struktur umur penduduk usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif menempatkan Indonesia pada kondisi bonus demografi atau *windows of opportunity*. Hal ini akan mempengaruhi tatanan ekonomi maupun sosial masyarakat.

Dengan tingginya angkatan usia produktif dapat membuka peluang menciptakan pertumbuhan dan perkembangan negara pada segala aspek, memicu pertumbuhan ekonomi dan menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB). Bonus demografi akan benar-benar terwujud menjadi ‘bonus’ apabila dimanfaatkan dengan baik, namun bila tidak justru akan berdampak sebaliknya.

Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, keputusan pemerintah memilih Maudy Ayunda sebagai Juru Bicara bukan tak beralasan. Kredibilitas yang dimiliki sebagai sosok muda, cerdas, menarik, dan multi talenta diprediksi mampu menarik atensi kalangan muda untuk berkontribusi dalam menyuarakan isu penting agenda G20. Kredibilitas akan berpengaruh terhadap proses penerimaan informasi pada khalayak dan berujung pada persepsi dan citra yang terbangun.

Menurut Silih Agung Wasesa, seorang tokoh PR yang menggeluti dunia branding dalam buku yang ditulisnya bersama Jim Macnamara dari University of Technology Sydney berjudul “Strategi Public Relations” (2010: 358), ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membangun kredibilitas antara lain juru bicara adalah sumber potensial yang memiliki dukungan dari media massa, memiliki kepercayaan diri dan mampu mengadopsi informasi secara cepat, baik perkembangan ataupun sumber-sumber informasinya. Forum G20 yang terkesan eksklusif, tentunya diharapkan akan lebih diterima kalangan muda dengan kehadiran sosok Maudy.

Kekuatan Muda bagi Kebaikan Dunia

Kekuatan suara golongan muda tidak bisa dianggap enteng. Jika dimaksimalkan dengan baik maka akan menjadi kekuatan potensial dalam mencapai target-target yang diagendakan dalam

forum G20. Implementasi pemahaman, pengetahuan informasi yang baik dapat mendorong ke arah transformasi perilaku untuk bertindak sesuai pesan yang tersampaikan. Pesan G20 yang membangkitkan semangat solidaritas untuk bangkit dan pulih dari pandemi tentu penting tersampaikan pula pada kalangan muda untuk memberikan motivasi memainkan peran dalam masyarakat.

Banyak contoh gerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berisi keterlibatan kalangan muda. Ambil contoh gerakan **‘Pejuang Muda’**, program besutan Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek serta Kementerian Agama. Pejuang Muda berisi sekelompok mahasiswa dari berbagai daerah dan disiplin ilmu yang telah lolos seleksi. Jumlah mahasiswa yang tergabung dalam ‘Pejuang Muda’ berjumlah 5.140 orang.

Terdapat 4 bidang yang dapat dipilih untuk diterapkan ketika terjun dalam masyarakat yaitu Bidang Pengembangan Program Bantuan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Lansia, Pengembangan Program Kesehatan Lingkungan serta Pembangunan Fasilitas untuk Kepentingan Umum.

Rumpun kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan pemetaan kondisi masalah yang dihadapi masyarakat, mengidentifikasi alternatif solusi termasuk melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Sosial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini kerap menjadi polemik di tengah masyarakat.

Kondisi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat menjadi laboratorium sosial nyata bagi para mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberikan solusi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berbagai persoalan sosial optimis untuk dapat tertangani para Pejuang Muda yang memaksimalkan kekuatan kreativitas, inovasi, dan idealisme mereka, dalam menyokong kebangkitan dan pulihnya kehidupan bangsa.

* * * * *

Hybrid University, Jawaban Unpad untuk Education Working Group G20

Oleh: Nurhaeni, S.Sos., M.M.

Recover Together, Recover Stronger, menjadi tema Presidensi G20 yang sering didengungkan, dan dapat diartikan Indonesia mengajak negara-negara lain untuk pulih bersama, saling bahu-membahu, bersama menjadi lebih kuat, mendukung untuk pulih bersama. Saat ini pandemi covid-19 telah menjadi *trigger*/daya dorong berubahnya tatanan kehidupan sosial termasuk pada dunia Pendidikan, seperti di perguruan tinggi.

Daya dorong terhadap penyesuaian sistem pembelajaran di masa pandemi covid-19 begitu kuat bagi perguruan tinggi untuk melakukan transformasi digital. Universitas Padjadjaran sebagai satu satu perguruan tinggi yang terdampak telah bertransformasi menuju *Hybrid University* mulai *concern* melakukan pembelajaran secara *online* dan *on campus*.

Pembelajaran *e-learning* yang telah dirintis Unpad bertahap dipersiapkan menjadi pembelajaran *online* secara *massive*, dan Unpad pun tengah merintis program *Massive Open Online Courses (MOOC)* dimana pembelajaran dilakukan jarak jauh, sehingga siapapun dapat mengakses dan mendaftarkan diri secara gratis, menjangkau lebih luas, dan berpeluang mendapatkan banyak peserta didik.

Tahapan awal Unpad menuju *Hybrid University* disinergikan oleh 3 organ Unpad, yaitu Majelis Wali Amanat, Rektor dan Senat

Akademik). Bentuk arahan dan dukungan terhadap transformasi digital, disampaikan bahwa transformasi digital sebuah keniscayaan. Pada buku *Digital Vortex* (pusaran digital) dikatakan bahwa industri Pendidikan menjadi salah satu industri yang akan terdisrupsi digital, sehingga jika Unpad tidak melakukan transformasi digital, maka akan didisrupsi oleh para *startup*.

Lalu bagaimana Unpad melakukan tahapan transformasi digital? Unpad menjadikan kolaborasi sebagai solusi terbaik. *Platform* digital maupun infrastruktur teknologi informasi dikolaborasikan dengan provider *platform* digital kelas dunia *Amazon Web Service* (AWS) serta dengan Telkom untuk infrastrukturnya.

Kolaborasi sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai, di tahun 2021 dilakukan Unpad diinisiasi melalui program *Quick Wins*. *Quick Wins Hybrid University* hasil kolaborasi dengan Provider; *Quick Wins* Komersialisasi Hasil Riset sebagai hasil kolaborasi riset dengan Industri; serta *Quick Wins* Kampus Merdeka berkolaborasi dengan institusi lain untuk delapan aspek Kampus Merdeka. Salah satunya program magang, termasuk dengan Espin Multimedia Australia untuk ‘*Career Skill Matching*’ melalui program rintisan *Virtual Internship* bagi mahasiswa Unpad.

Mengutip pernyataan Menteri pendidikan Nadiem pada *Kick Off G20 On Education and Culture*, tentang empat tujuan prioritas *EdWG Presidensi G20*. Disebutkannya, 4 tujuan tersebut adalah pendidikan universal yang berkualitas, Teknologi dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca covid-19.

Maka apa yang dilakukan Unpad selama masa pandemi ini dapat dikatakan selaras dengan tujuan prioritas *EdWG* Presidensi G20 Indonesia. Unpad mengakselerasi digitalisasi pembelajaran dan kolaborasi untuk kerja sama kemitraan dengan negara lain dan industri, serta menginisiasi terbukanya dunia kerja pasca covid-19 bagi mahasiswa Unpad dalam berkarir internasional melalui program *Virtual Internship* dengan perusahaan di Australia.

Semangat *EdWG Presidensi G20* Indonesia dalam empat tujuan prioritasnya tersebut merupakan representasi dari apa yang tengah dilakukan para perguruan tinggi, salah satunya Unpad. Unpad

bergegas memacu potensi sumber daya yang ada dengan bergerak bersama menghadapi tantangan yang semakin kompleks, serta pemulihan dari situasi covid-19.

Membangun jejaring kemitraan dan berkolaborasi yang dilakukan Unpad dalam mendorong hilirisasi/komersialisasi hasil riset. Memproduksi alat Rapid Tes Antigen (CePAD) dan Bio Saliva (CayPAD) dengan perusahaan Bio Farma, menjadi bukti selarasnya dengan tujuan prioritas solidaritas dan kemitraan. Selain itu, kemitraan dengan perusahaan -perusahaan lain yang berpeluang kolaborasi dijalin dalam rangka mewujudkan hilirisasi hasil riset para peneliti.

Masa pandemi telah mendorong berubahnya paradigma belajar dan bekerja selalu di belakang meja kantor/di kampus. Liniernya belajar/bekerja dari rumah dengan digitalisasi telah terlihat menjadi keseharian aktivitas tersebut, sehingga pola kultur mahasiswa generasi saat ini dalam berkarir setelah studi pun akan bergeser pada gaya bekerja yang *virtual*.

Melihat hal ini, unpad yang telah mencanangkan diri menuju *Hybrid University*, berupaya mempersiapkan bekal karir bagi mahasiswa dan *fresh graduate*-nya. Rintisan *Virtual Internship* sebagai ‘*Career Skill Matching*’ kolaborasi bermitra dengan perusahaan-perusahaan di sana, menjadi keselarasan juga dengan tujuan prioritas *EdWG Presidensi G20*, yaitu masa depan dunia kerja pasca pandemi Covid-19. Hal lain yang diusung Unpad dengan kolaborasi persiapan karir internasional bagi mahasiswa dan alumni, adalah untuk *Employer Reputation* Unpad, sebagai salah satu indikator Perangkingan Perguruan Tinggi dalam *World University Ranking (WUR)*.

Gambaran keselarasan berbagai aktivitas Unpad dengan apa yang diusung pada tujuan prioritas *EdWG Presidensi G20 Indonesia* menjadi barometer yang tidak akan jauh berbeda dengan perguruan tinggi lain, dalam mensukseskan Program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi menuju kualitas pendidikan untuk semua.

Aktivitas Unpad di masa pandemi Covid-19 itu juga, menunjukkan upaya untuk pulih bersama, bersama saling membahu, tumbuh bersama untuk lebih kuat, guna mendukung dunia Pendidikan Indonesia pulih dari kondisi saat ini.

* * * * *

Memulihkan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19, Apa yang Bisa Kita lakukan?

Oleh: Nurjaman, S.TP, M.M.

Tantangan pemulihan ekonomi menjadi isu utama yang digulirkan dalam momentum pertemuan Presidensi G20. Seluruh dunia, tidak terkecuali bagi negeri-negara yang tergabung dalam G20 hingga saat ini berjuang mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mengutip harian Bisnis Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa melalui momentum pertemuan G20, Indonesia mengajak para pemimpin dunia untuk mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi Covid-19. Sejumlah pembahasan akan bergulir dalam pertemuan sepanjang 2022 itu.

Ada enam tantangan global yang perlu dibahas dan ditangani dalam pertemuan, antara lain berkaitan dengan penanganan krisis yang muncul akibat Covid-19. Negara-negara G20 akan fokus membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi dan sejumlah inisiatif.

Pemulihan ekonomi tidak bisa menjadi beban sendiri, namun layak untuk ditanggulangi bersama oleh semua komponen bangsa. Jargon '*Recover Together – Recover Stronger*' sangat layak menjadi penyemangat semua komponen bangsa untuk saling bahu membahu menanggulangi krisis. Lalu apa yang bisa kita lakukan?

3 Kekuatan Pemulihan Ekonomi

Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengeksplorasi sumber daya yang kita miliki dan kemudian mengelolanya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya pikir, maupun daya alam yang sangat melimpah. Ketiga faktor tersebut bisa menjadi kekuatan dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi covid-19.

Ide dan daya pikir manusia yang kemudian diimplementasikan dalam aktivitas riset semestinya menghasilkan teknologi inovatif sesuai dengan kebutuhan semua *stakeholders* atau memecahkan permasalahan di lapangan. Kementerian Pertanian, selama bertahun-tahun telah menghasilkan beragam teknologi inovatif yang dapat mencapai “critical mass” sesuai kebutuhan industri.

Rendahnya ‘critical mass’ riset yang dihasilkan saat ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Karena itu memperkuat implementasi ‘*bridging innovation from research to market*’, melalui momentum presidensi G20 menjadi hal yang sangat tepat. Menjadi sangat relevan di tengah isu perbaikan ekonomi secara global akibat pandemi Covid-19 dengan menumbuhkan geliat bisnis baik bagi usaha baru maupun yang sedang berkembang.

Upaya dunia usaha dalam membuat dan memperkenalkan produk baru ke pasar, membutuhkan *effort* yang cukup besar. Penggunaan teknologi berbasis riset yang dihasilkan lembaga penelitian memudahkan industri mengenalkan produknya ke pasar sehingga *market share* akan mudah tercipta. Proses *bridging* ini akan terlaksana dengan baik dengan dukungan dan kolaborasi antara *stakeholders* terkait dalam lingkungan A-B-C-G-M (*Academic-Business-Community-Government-Media*) yang dapat dikolaborasikan dengan fungsinya masing-masing.

Secara umum model *bridging innovation from research to market* yang sudah dilaksanakan dan terbukti efektif adalah melalui proses alih teknologi dengan kerja sama lisensi. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, selama 14 tahun terakhir telah menerapkan tata kelola alih teknologi dengan model kerja sama lisensi ini. Saat ini aturan alih teknologi mengacu pada Undang-Undang nomor 11/2019

tentang sistem nasional Iptek dan aturan yang diacu juga berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 7/2018. Dalam Permentan 7/2018 ini diatur secara jelas mulai dari proses permohonan kerja sama lisensi sampai dengan proses alih teknologi dari teknologi yang dikerjasamakan.

Model kerja sama ini memberikan pengakuan kepada peneliti atas hasil karyanya dan imbalan royalti atas penjualan dari hasil kerja sama yang dilaksanakan. Pengaturan imbalan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

Selain apresiasi kepada peneliti, royalti yang dihasilkan juga menjadi stimulus pendanaan mandiri untuk pengembangan riset yang dihasilkan. Tak kalah penting juga dari pendapatan melalui royalti ini adalah pendapatan negara pajak (PNBP) yang diterima pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 769/2017 tentang persetujuan penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dimana PNBP yang disetorkan dapat dimanfaatkan paling tinggi sebesar 88.11%. Sampai dengan 2022 total royalti sebagai PNBP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sudah mencapai lebih dari 30 milyar rupiah.

PNBP yang dihasilkan ini tentu saja memberikan kontribusi dalam pendapatan negara, yang bisa jadi sebagai bentuk penanganan krisis yang melanda. *'Recovery Together, Recovery Stronger'* yang terimplementasi dari proses kerja sama lisensi ini adalah bentuk kolaborasi dan pemanfaatan jejaring lintas organisasi dalam upaya pemulihan krisis akibat pandemic-19 yang dirasakan secara global, dan tentu hal ini pula sebagai bukti tumbuh kembangnya industri yang memanfaatkan teknologi berbasis dari hasil riset dari lembaga penelitian.

* * * * *

G20, Etalase Moderasi Beragama untuk Dunia

Oleh: Nurul Badruttamam, S.Ag., M.A.

Moderasi beragama merupakan proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. secara substantif moderasi beragama sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa kita.

Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi fondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa. sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling

memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita.

Moderasi beragama memiliki peran strategis dalam mewujudkan keharmonisan berbangsa dan bernegara, hal ini bahkan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut terdapat empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan ramah tradisi. Tahun 2020 menjadi salah satu momentum untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Melalui program prioritas Kementerian Agama, tahun 2022 dicanangkan menjadi tahun toleransi, tentu ini menjadi tonggak komitmen untuk menjaga persatuan bangsa.

Bersamaan dengan pencahangan tahun toleransi ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terpilih memimpin Presidensi G20 untuk satu tahun ke depan (2021-2022). Sejak Desember 2021, Indonesia terpilih untuk memimpin kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu. Sebuah momentum untuk untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Secara langsung kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara akan berdampak kepada pengembangan pembangunan manusia dan infrastruktur.

G20 Momentum Membumikan Moderasi Beragama

Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan momentum membumikan moderasi beragama. Kepercayaan ini juga menjadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia tentang *Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)* dan telah mengakar kuat pada ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam mengelola keberagaman dan mengharmonisasikan cara beragama sekaligus bernegara dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia.

Toleransi dan keberagaman sudah menjadi nafas Indonesia dan Amanah konstitusi, “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjadi bukti peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dr. Katherine Marshal, wakil Presiden Forum Lintas Agama G20 mengemukakan bahwa Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menggaungkan keragaman lintas agama ke dalam diskusi global sehingga momentum G20 menjadi istimewa. Hal ini disampaikan pada webinar yang diselenggarakan Institut Leimena bersama The Sanneh Institute pada Februari 2022. Sudah selayaknya Indonesia menjadi laboratorium perwujudan toleransi antar umat beragama.

Lebih lanjut, pemulihan pasca pandemi covid-19 yang jadi bahasan utama pada forum G20 sejatinya tidak hanya membicarakan tema-tema merekonstruksi ekonomi global semata, kemanusiaan tentunya juga menjadi pembahasan termasuk upaya untuk memulihkan trauma pasca pandemic dalam konteks keberagamaan.

Toleransi Membangun Iklim Ekonomi yang Kondusif

Toleransi kerukunan umat beragama sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Ihwal ini dapat menjadi modal untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya.

Toleransi dapat menjadi strategi untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi yang berkorelasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan peluang bagi penanaman modal, toleransi menjadi hal yang penting dan mutlak untuk mendukung investasi.

Keamanan dan ketertiban umum menjadi variabel penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, sebagaimana yang disebutkan dalam perspektif suprastruktur. Dalam hal ini dijelaskan bahwa konflik berdampak kontraproduktif terhadap investasi. Tentu saja, investor akan menarik mundur investasinya jika negara tujuan investasinya berkonflik dan tidak menerapkan moderasi dalam keberagaman. Sedangkan upaya untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pemerintah saat ini sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengejar laju

pertumbuhan ekonomi pascacovid.

Dengan mengusung tema, “*Recover Together, Recover Stronger*” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”, Presidensi G20 Indonesia mendorong upaya bersama untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dengan memanfaatkan momentum G20 sebagai etalase moderasi beragama.

* * * * *

Presidensi G20 Indonesia, Membuka Peluang Investor Bidang Infrastruktur

Oleh: Putri Puspita Agustine, SH., MH.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidaklah murah, tak heran bila dengan pembangunan infrastruktur yang masif saat ini menyebabkan beban keuangan negara menjadi tinggi. Beberapa tahun belakangan, sebagian besar porsi APBN Indonesia dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata untuk menghadirkan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia tapi bagaimana dalam pembangunan infrastruktur itu juga hadir potensi yang meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kenyataannya dalam pembangunan infrastruktur, bila Indonesia masih mengandalkan belanja publik atau APBN, pastinya tidak akan mencukupi. Pemerintah harus ‘memutar otak’ untuk mencari solusi atas ketersediaan dana bagi pembangunan infrastruktur. Mobilisasi pembiayaan dari sektor swasta menjadi jembatan untuk mengurangi beban pemerintah tersebut.

Kolaborasi dengan sektor swasta sebenarnya telah lama dimulai. Pada sektor pembangunan jalan tol misalnya, Pemerintah menggandeng Badan Usaha Jalan Tol untuk terlibat dalam pembangunan dan operasionalisasi jalan tol dengan skema investasi *Build Operate Transfer* (BOT). Mekanisme ini sudah berjalan semenjak tol pertama di Indonesia dibangun, yaitu Tol Jagorawi

dan saat ini hampir seluruh jalan tol menggunakan mekanisme pendanaan tersebut. Secara ekonomi, mekanisme pendanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan sektor swasta harus yang menguntungkan dan dihitung *value* bisnisnya.

Perhelatan G20 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membuka pintu peluang keterlibatan Negara G20 dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Beberapa ekonom mengatakan, infrastruktur merupakan pondasi bagi perekonomian negara berkembang. Negara bisa berkembang secara ekonomi tentunya ditunjang oleh infrastruktur yang andal. Contohnya, konektivitas jalan yang mantap akan mempermudah jalur distribusi barang sehingga secara ekonomi keuntungan yang akan diperoleh semakin besar.

Kesenjangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Pemerintah telah membuka peluang keikutsertaan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dibuka melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*.

KPBU menjadi skema pembiayaan yang dapat mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam sektor infrastruktur, dengan melibatkan pihak swasta pada proyek yang memang memiliki profitabilitas yang tinggi. KPBU tidak hanya dikhususkan bagi pengusaha lokal, tetapi juga investor asing pun dapat ikut serta dalam KPBU. Relaksasi yang diterapkan pemerintah untuk investasi dari investor luar negeri, menjadi pendorong semakin meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan dengan mekanisme KPBU.

Infrastruktur PUPR memang tidak terkait langsung dengan tiga topik pembahasan utama G20 yaitu *Architecture*, *Digital Economy Transformation* dan *Energy Transition*. Namun, Presidensi Indonesia pada G20 merupakan momen tepat untuk menunjukkan kepada negara yang tergabung G20 tentang komitmen Indonesia dalam pembangunan infrastruktur PUPR.

Pada pertemuan KTT G20 di Glasgow Italia, perkembangan infrastruktur Indonesia merupakan salah satu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin negara. Dikatakan Presiden Jokowi bahwa infrastruktur di Indonesia mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal (SDGs)*. Selain itu,

Indonesia berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berfokus pada manusia, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam Presidensi G20, Indonesia menawarkan beberapa proyek infrastruktur yang memiliki potensi profitabilitas tinggi kepada investor-investor yang berasal dari Negara G20. Negara G20 merupakan negara berkembang yang masing-masing memiliki kekuatan perekonomian.

Berangkat dari hal itu, diharapkan bisa membangun kemitraan global salah satunya dalam pembangunan infrastruktur PUPR, tentunya dengan mekanisme pembiayaan KPBU. Mengacu kepada Perpres 67/2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, mendefinisikan beberapa jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.

Jenis tersebut meliputi transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak, dan gas bumi. Oleh sebab itu pada Presidensi G20, proyek yang akan ditawarkan terkait jalan, pengairan, dan manajemen air minum dan air limbah.

Penawaran investasi pada sektor infrastruktur harus dilakukan dengan strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Bentuk penawarannya bukan sesuatu yang nampak, melainkan peluang keuntungannya sangat besar. Menurut Bult-Spiering & Dewulf, ada empat elemen utama dalam KPBU yaitu (1) *actors*; (2) *networking*; (3) *project* dan (4) *relationship*. *Actors* atau pelaku utama KPBU adalah sektor publik (Pemerintah) dan sektor privat (swasta), di mana masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

Untuk menciptakan hubungan kerja sama yang sukses tentunya sangat penting untuk memahami tujuan dan kepentingan masing-masing pelaku tersebut. G20 akan menjadi ajang membangun *networking* dan kolaborasi untuk menciptakan peluang investasi sektor infrastruktur.

Pada tingkat awal, Kementerian PUPR akan menginformasikan profil dari infrastruktur, potensi bisnis dan profitabilitas dari investasi tersebut pada Negara G20. Diharapkan proyek tersebut dapat menarik para pemimpin negara yang kemudian membuka peluang kerjasama dengan sektor privat asing.

Tentunya penawaran investasi ini tidak bisa dilakukan secara instan, namun butuh beberapa tahapan penjajakan. Namun bila telah terbangun *networking* yang kuat dan perlahan muncul *willingness* dan *trust* dari para pemimpin negara G20 ini, diharapkan peluang investasi infrastruktur di Indonesia akan diminati oleh sektor privat Negara G20.

* * * * *

Meramu Pantun, Membuka Peluang Diplomasi di G20

Oleh: Revina Riyanika, S.IP., M.I.Kom.

Perhelatan akbar G20 yang diselenggarakan di Indonesia kali ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Pantun harus ambil bagian! Pantun dapat menjadi media komunikasi dalam mengampanyekan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Nilai-nilai atau filosofi yang ingin disampaikan sebagaimana tujuan pelaksanaan G20 sangat bisa dituangkan dalam bait demi bait pantun. Bisa jadi tujuan ini menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat sekaligus juga mudah untuk dipahami. Terlebih bagi masyarakat awam, masyarakat pesisir, masyarakat perbatasan, yang terbiasa dengan bahasa keseharian.

Jika media sosial menjadi sasaran kampanye untuk kaum milenial, pantun tentu sangat bisa menjadi pilihan kontennya. Pantun bukanlah sesuatu yang asing bagi generasi “jaman now” mengingat pantun sering digunakan dalam dialog-dialog komedi atau hiburan di televisi. Platform-platform digital memberikan ruang yang sangat luas untuk mengembangkan kreativitas.

Pantun dapat dikemas sedemikian rupa baik dalam bentuk lisan, tulisan, audio, video, maupun audio visual. Mengemas pantun layaknya seperti menyajikan makanan. Kita perlu meramu bumbunya – yakni bagian sampiran pada dua baris pertama serta bagian isi pada dua baris terakhir. Lalu kita akan menghidangkannya dengan tampilan yang menarik – yakni menyajikan pantun dengan tutur yang indah dan berkesan.

Pantun sebagai Media Diplomasi

Diplomasi membutuhkan seni karena terkait dengan relasi. Sementara pantun biasanya hadir dalam relasi muda-mudi, antara yang tua dengan yang muda, orangtua dengan anak, dsb. Lalu mengapa tidak kita coba menghadirkan pantun dalam relasi antar negara?

Secara formal, pantun selalu menjadi “Salam Pembuka” dan “Salam Penutup” pada setiap pidato atau sekapur sirih, mulai tingkat negara hingga ke desa/kelurahan. Sementara secara informal, pantun senantiasa digunakan dalam rangkaian acara-acara adat seperti bertunang, meminang, ataupun pernikahan.

Ucapan “Selamat Datang” kepada para tamu kenegaraan tentu akan menjadi sedikit berbeda jika dibalut dengan pantun, begitupun saat perhelatan usai. Pantun digunakan tidak hanya untuk menyambut tetapi juga menghantar. Sebagaimana peribahasa “*Datang nampak muka, pergi nampak punggung*”. Jangan hanya saat datang kita ber-euforia, tetapi saat tetamu pulang pun kita wajib mengantarkan sampai pintu depan. Begitulah tunjuk ajar orang melayu dalam memuliakan tamu yang diramu dalam keindahan bahasa pantun. Pantun selalu dibuat untuk membuka dan menutup.

Lalu bagaimana meramu pantun untuk membuka peluang diplomasi? Orang Melayu yang biasa menggunakan pantun, akan menyesuaikan situasi dan kondisi di sekitarnya untuk digunakan dalam bahasa pantun. Contohnya menggunakan nama tempat, budaya khas setempat, atau hal yang menonjol di tempat tersebut untuk disebutkan dalam sampiran.

*Kalau Tuan ke Pulau Bintang
Sekapur Sirih kami sajikan
Kalau Tuan memang berkenan
Investasi di Indonesia sangat menjanjikan*

Mengingat perhelatan ini diselenggarakan di Pulau Bali, sampiran pantun dapat pula disesuaikan:

*Negeri bergelar Pulau Dewata
Tari Kecak indah langgamnya
Jangan sampai silang sengketa
Ekonomi dunia jadi perhatian kita Bersama*

Banyak hal yang bisa disampaikan melalui pantun. Banyak pula tujuan yang bisa dicapai melalui pantun. Jika diplomasi bertujuan untuk menjalin kerjasama, pantun dapat menjadi perekatnya. Namun, jika diplomasi bertujuan untuk bernegosiasi, pantun dapat menjadi alatnya.

Sampaikanlah pantun disertai dengan tutur dan laku yang indah. Gunakanlah pantun untuk tujuan yang berfaedah. Ibarat pepatah mengatakan bahwa ‘bahasa mencerminkan bangsa’. Bangsa Indonesia memang sangat indah dengan keragaman budayanya.

Pantun sudah selayaknya viral dan mendunia. Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020 lalu di Paris, Prancis ini juga menjadi kekayaan sastra Indonesia yang terukir dalam sejarah melayu. Namun, pantun kini tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Melayu tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Jika kita umpamakan suatu saat ada tamu yang datang berkunjung, mereka mungkin akan terkesan dengan keindahan dan suasana rumah kita atau kelezatan masakan kita. Tapi percayalah, sekembalinya mereka ke rumahnya, yang paling mereka ingat adalah keindahan tutur bahasa kita sehingga suatu saat mereka ingin kembali mengunjungi kita.

*Arus tenang di Selat Karimata
Kapal berlabuh menjelang senja
Perhelatan G20 sudah di depan mata
Sukseskan bersama demi nama INDONESIA*

* * * * *

Program Sejuta Rumah, Indonesia Masih Butuh Modal Investasi

Oleh: Ristyan Mega Putra, S.Sos, M.Si

Ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah dan memegang keketuaan atau Presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga akhir 2022 menjadi sebuah kebanggaan. Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 sebisa mungkin dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan pembangunan nasional.

Pembangunan dan investasi di sektor infrastruktur perumahan sangat erat dengan 3 isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan G20, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan. Adanya rumah yang layak huni bukan hanya menjadi aset dari setiap pribadi, melainkan menjadi tempat berlindung dan mendidik generasi muda Indonesia agar memiliki kualitas dan daya saing tinggi.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh masyarakat dunia menyadarkan semua pihak akan pentingnya arti rumah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi semua aktivitas manusia lebih banyak dilaksanakan di rumah. Rumah tak hanya berfungsi menjadi tempat tinggal saja, tapi juga memiliki fungsi lain sebagai tempat bekerja bagi orang dewasa, tempat belajar untuk anak-anak, serta tempat beribadah untuk mensyukuri nikmat Tuhan.

Penyediaan rumah yang layak huni juga dilakukan di setiap negara sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Penyediaan rumah layak huni juga menjadi aset yang bisa menunjang perekonomian suatu negara.

Rumah layak huni sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Rumah yang di desain dengan baik bisa mengubah pemanfaatan energi hijau untuk kegiatan sehari-hari.

Indonesia dalam Presidensi G20 tidak hanya menjalin kerjasama antar negara, tapi juga mempelajari bagaimana negara-negara maju membangun papan bagi rakyatnya serta menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk sektor perumahan di tanah air.

Sektor perumahan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur hingga saat ini masih bisa bertahan di masa pandemi. Boleh dikatakan bahwa program pembangunan perumahan bisa menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Program ini bisa menggerakkan 174 industri untuk menyerap tenaga kerja serta mendorong investasi dalam negeri.

Adanya digitalisasi pengusulan bantuan perumahan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) akan mewujudkan satu data perumahan sekaligus meningkatkan perekonomian dengan terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Mengutip situs www.sherpag20indonesia.ekon.go.id, pemerintah Indonesia bisa menarik manfaat ekonomi berupa investasi untuk berbagai sektor termasuk properti dari negara G20. Masih tersedianya lahan untuk pembangunan perumahan dan kemudahan perizinan dari pemerintah, menarik investor asing juga bisa menanamkan modalnya untuk berinvestasi.

Program Sejuta Rumah

Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mencanangkan Program Sejuta Rumah (PSR). Program ini diluncurkan pada 29 April 2015 di Jawa Tengah. PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan

hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Target PSR adalah membangun rumah untuk masyarakat sebanyak satu juta unit rumah per tahun. Targetnya terbagi 2, yakni 75 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 25 persen untuk rumah non MBR.

Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, dinyatakan dalam arah kebijakan pembangunan perumahan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah ingin meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,51 persen menjadi 70 persen. Ditargetkan sebanyak 11 juta rumah tangga Indonesia bisa memiliki dan menghuni rumah layak.

Angka tersebut menunjukkan bahwa investasi perumahan di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Selain itu, PSR juga menjadi salah satu upaya mengurangi kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia.

Sejak dicanangkan mulai tahun 2015 hingga saat ini, jumlah hasil pembangunan rumah di Indonesia terus meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat angka capaian PSR pada 2015 sebanyak 699.700 unit, 2016 sebanyak 805.169 unit, dan pada 2017 sebanyak 904.758 unit.

Selanjutnya pada 2018, PSR mencapai 1.132.621 unit, 2019 sebanyak 1.257.852 unit dan pada 2020 lalu saat pandemi Covid-19 melanda, jumlahnya menurun menjadi 965.217 unit. Pada 2021, PSR kembali menembus angka 1.105.707 unit.

Pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat tidak hanya memulihkan sektor ekonomi Indonesia yang terimbas efek pandemi, tapi juga membuat masyarakat lebih kuat karena lingkungan yang sehat menjaga imunitas para penghuninya.

* * * * *

Momentum G20, Saatnya Jadikan Destinasi Wisata Bogor Berkelas Dunia

Oleh: Sandy Wisnu Aji, S.T.

Gaung G20 sudah menggema sejak Pemerintah Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan perhelatan forum multilateral tersebut. Terlihat dari banyaknya kampanye G20 bertebaran di hampir semua kanal media milik pemerintah.

G20 tahun 2022 mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Untuk kali pertama Indonesia menjadi presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 lalu. Tak hanya Bali, G20 juga akan digelar di Jakarta, Bogor, Bandung, Lombok, Surabaya, Sorong, Labuan Bajo, Danau Toba, Manado, Malang, serta wilayah lainnya dengan jumlah total 19 kota.

Dikutip dari kementerian Komunikasi dan informatika RI, diperkirakan, manfaat langsung dari aspek ekonomi yang dapat dicapai adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun. Selain itu, ada penambahan Produk domestik bruto (PDB) nasional hingga Rp7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu orang di berbagai sektor.

Saatnya menunjukan potensi daerah

Walaupun genderang kampanye G20 sudah ditabuh, namun ada kondisi lain yang dirasakan oleh daerah yang tidak termasuk dalam jajaran *venue*. Sepertinya perhelatan tersebut dianggap hal yang

biasa-biasa saja. Untuk itu, meskipun digelar di 19 titik kota, namun ajang ini penting. G20 idealnya dijadikan sebagai momentum untuk memantik lebih besar lagi dampak ekonomi yang mungkin tercipta, setelah hantaman badai Covid-19.

Di Kabupaten Bogor misalnya. Wilayahnya mempunyai luas wilayah 298.838 Ha, terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. Jumlah penduduk menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021 sebanyak 5.4 juta jiwa. Tahun 2020 setidaknya ada 3 (tiga) indikator makro daerah yang terdampak pandemi yaitu, laju pertumbuhan ekonomi mengalami minus 1,77%, tingkat kemiskinan 7,6 %, dan tingkat pengangguran mencapai 14,29%.

Sektor pariwisata adalah sektor unggulan Kabupaten Bogor. Letaknya berdekatan dengan ibu kota negara dan berbatasan langsung dengan 10 Kab/Kota dan 1 provinsi sehingga dikelilingi oleh kurang lebih 70 juta populasi, menjadikan Kabupaten Bogor destinasi wisata favorit warga Jabodetabek.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bogor sebelum pandemi tahun 2019 sekitar 9,7 juta pengunjung. Tahun 2020 yang berjumlah 5.117.889 orang yang terdiri dari: 60.552 wisatawan mancanegara dan 5.057.335 wisatawan domestik. Sedangkan tahun 2021 berjumlah 6.455.954 orang terdiri dari 2.609 wisatawan mancanegara dan 6.453.345 wisatawan domestik. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar 7,61% dari total PAD tahun 2021.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bogor 2020-2025, selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011, tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010 – 2025, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPPARPROV). Visi Kabupaten Bogor adalah terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai destinasi pariwisata yang maju, berbudaya, berwawasan lingkungan, berkelas dunia dan berkelanjutan.

Kabupaten Bogor memiliki 42 desa wisata dan 17. Jangan lupa, di antaranya terdapat di kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Puncak-Lido. KSPD Puncak-Lido, mengusung tema utama wisata alam, pegunungan dan rekreasi.

Daerah cakupan KSPD Puncak-Lido mencapai delapan kecamatan yaitu, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Taman sari dan Ciomas. Jumlah sebaran daya tarik wisata berdasarkan jenis wisata, 50 wisata alam, 27 wisata buatan dan 14 wisata budaya.

Pengelolaan destinasi wisata yang dikelola Pemprov Jawa Barat sebanyak 1 destinasi, Pemda Kabupaten Bogor 2 destinasi, desa ada 8 destinasi, Badan usaha milik Desa (BUMDES) 8 destinasi, Perhutani 9 destinasi, Badan usaha milik negara (BUMN) 2 destinasi, Badan usaha milik daerah (BUMD) 1 destinasi, taman nasional 14 destinasi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam 1 destinasi dan swasta ada 45 destinasi.

Sebaran fasilitas pariwisata dan penunjang ada 913 unit yang terdiri dari, akomodasi berupa villa/penginapan 468 unit, kesehatan 24 unit, pemerintahan 63 unit, perdagangan 3 unit, peribadatan 120 unit, restoran 40 unit, supermarket 90 unit dan fasilitas umum ada 105 unit.

Usulan Solusi Permanen

Bicara Bogor yang langsung diingat kebanyakan orang adalah Puncak. Padahal, Kabupaten Bogor masih memiliki potensi wisata lain, seperti berbagai situ (danau). Jumlahnya kurang lebih ada 96 situ, hutan kota, geopark, sungai, 101 wisata curug yang tersebar di 18 kecamatan, sentul forestry, kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, 11 lapangan golf berskala internasional, dan masih banyak lagi.

Namun, Puncak sampai saat ini masih sangat seksi untuk dikunjungi. Daya magnetnya sangat kuat. Terbukti saat libur akhir pekan dan hari besar kemacetan tersiar ke mana-mana. Setidaknya begitulah yang banyak menjadi suguhan beberapa media yang menjadikannya berita utama.

Fenomena itu menjadi lumrah, tanpa menafikkan peran Gustaf Willem Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-27 tersebut menyatukan 9 kelompok pemukiman menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 1745.

Sejak dahulu kala seperti banyak dikisahkan di berbagai literatur, sudah menjadi tradisi yang dilakukan warga Belanda dan orang-orang kaya. Mereka memilih berakhir pekan di Bogor agar bisa lari dari kesumpekan Kota Batavia saat itu.

Banyak solusi yang ditawarkan untuk menangani masalah kemacetan di Puncak. Mulai dari penataan simpang Ciawi, Rencana kajian kereta wisata ringan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), hingga penyediaan bus warawiri, dan sebagainya.

Namun ada hal berbeda dengan usulan solusi yang dirumuskan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kabupaten Cianjur pada (18/09/2021) lalu, yaitu pembangunan jalur Puncak II.

Pembangunan jalur Puncak II merupakan solusi kemacetan di jalan raya puncak yang berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, melalui Pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT).

Hal ini sesuai dengan kajian Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, bahwa jalur puncak II mampu mengurangi beban kemacetan pada jalur Ciawi – Gadog secara signifikan sebesar 50%. Data dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menyatakan, 33.000 - 40.000 unit kendaraan roda empat keluar *gate* tol Ciawi saat akhir pekan.

PTT direncanakan akan menghubungkan antara Sirkuit Sentul dan Istana Cipanas dengan Panjang total 35,7 km, dimana 29,7 km di wilayah Kabupaten Bogor dan 6 km di wilayah Kabupaten Cianjur. Secara regional, sebanyak 10,57% masyarakat atau lebih dari 550.000 orang warga Kabupaten Bogor akan mendapatkan pengaruh dan manfaat dari pembangunan jalur puncak II.

Pembangunan PTT bukan hanya ditujukan untuk mengatasi kemacetan kawasan puncak, melainkan mempermudah akses tiga Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. PPT juga menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, serta berpotensi meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Belajar dari Bali

Selain masalah akses, masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai destinasi wisata kelas dunia. Apa yang membedakan Bali dalam mengelola pariwisata, sehingga lebih sukses dibandingkan dengan daerah-daerah pariwisata lain di Indonesia? Mengapa pelancong mancanegara rela menjelajahi belahan bumi lain sampai ke Bali, untuk menghabiskan banyak uang dan tenaga? Masih banyak pertanyaan lain yang harus dikaji sebagai bahan penentu kebijakan.

Hampir semua dari para pelancong mancanegara ingin melihat budaya baru. Bali memberikan akses pariwisata budaya dengan sangat mudah. Tak perlu jauh-jauh ke pusat kesenian, tak perlu repot-repot membeli tiket pentas pertunjukan, budaya yang unik itu bisa kita lihat di setiap jengkal tanah Bali. Kenapa? Karena setiap nafas kehidupan di Bali adalah budaya.

Dapat kita disimpulkan, kesuksesan pariwisata adalah hasil kerjasama semua pihak. Butuh tekad bersama pemerintah, swasta, dan yang paling utama adalah masyarakat. Paduan keindahan alam, adat istiadat dan keramahtamahan merupakan suguhan yang eksotik dan memikat. Perencanaan pengembangan yang tepat, sektor pariwisata dapat menyerap banyak tenaga kerja, mendongkrak pendapatan daerah dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

* * * * *

35

Moderasi Beragama Dorong Kesuksesan G20

Oleh: Shofatus Shodiqoh, S.Sos.

Indonesia mempersembahkan logo khusus pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang bakal digelar pada akhir tahun 2022. Logo kawung dan siluet gunung, adalah logo mirip wayang yang menjadi kebudayaan khas Indonesia. Motif ini bermakna perpindahan babak menuju pemulihan ekonomi dunia lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berbicara tentang inklusi, tak hanya berkaitan dengan ekonomi. Tapi cara pandang hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang akan mendukung keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara pandang yang inklusif, tentu akan mendorong terciptanya stabilitas nasional, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Terkait inklusi ini, ada satu hal yang sangat layak ditawarkan dalam KTT G20. Yaitu program pemerintah untuk mewujudkan moderasi beragama. Program ini dimotori oleh Kementerian Agama dan telah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Mengapa Moderasi Beragama?

Sikap moderasi beragama sangat penting untuk diwujudkan di Indonesia, karena masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik

suku, agama, ras, golongan, bahasa dan lainnya. Indonesia yang terdiri atas 17.508 pulau ini memiliki jumlah penduduk 270,20 juta jiwa (Sensus penduduk 2020). Sementara jumlah etnis/suku bangsa adalah 1.340 macam (Sensus BPS 2010), dan enam agama resmi (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu). Adapun jumlah Bahasa yaitu sekitar 700 bahasa.

Berdasarkan buku saku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

Moderasi beragama adalah sikap inklusif seorang pemeluk agama yang menghargai perbedaan. Seseorang tidak perlu memandang ‘salah’ terhadap pendapat orang lain yang berbeda dengan pemikirannya. Sikap menghargai inilah yang harus diimplementasikan pada masyarakat yang multikultural dan multiagama, seperti di Indonesia, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan Moderasi Beragama

Sejak Kemerdekaan RI tahun 1945, perjalanan bangsa ini tentu tidak lepas dari berbagai peristiwa yang merongrong keutuhan NKRI. Namun segala macam peristiwa itu belum mampu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa hingga terjadi perang saudara, etnis, dan suku yang memporak-porandakan bangsa, seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Eropa.

Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tak lepas dari potensi-potensi konflik. Di tengah era globalisasi dunia yang kian menyempit, bahkan hanya seluas jari-jari tangan ini, bukan tak mungkin Indonesia akan bernasib sama seperti beberapa negara di Timur Tengah dan Eropa tersebut.

Faktanya, sebagian pemeluk agama memang terbatas dan sempit dalam memahami agama. Sempitnya pemahaman ajaran agama ini akan memunculkan berbagai sikap-sikap yang berpotensi

mengancam keutuhan NKRI. Berbagai ujaran kebencian di media sosial yang berpotensi untuk memecah belah umat telah banyak kita jumpai. Ini bukanlah persoalan sepele.

Berdasarkan pendapat Blumler dalam Littlejohn (2009:28), terpaan media (media exposure) adalah perilaku seseorang dalam menggunakan media massa seperti kegiatan mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media. Artinya, media massa, dalam hal sekarang ini media sosial dan sejenisnya mempunyai terpaan dan pengaruh yang luar biasa dalam menentukan sikap netizen. Atas terpaan media sosial ini lah, sebagian masyarakat dengan mudahnya membenarkan tindakan radikalisme, ekstremisme, dan bahkan menjadi bagiannya.

Apabila sempitnya pandangan beragama mereka ini tidak segera ditangani oleh pemerintah, maka akan bisa turut serta merusak tatanan masyarakat, baik sosial, agama, budaya, politik dan ekonomi. Kondisi psikologi masyarakat yang tidak stabil, akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan ekonomi, bukan hanya dalam negeri, bahkan bisa saja luar negeri.

Guna mencegah hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama membuat program prioritas “Moderasi Beragama”. Moderasi beragama sudah dicanangkan sejak tahun 2020 oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin. Moderasi Beragama digaungkan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Moderasi beragama bertujuan untuk mewujudkan praktik beragama yang moderat dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dukung G20

Moderasi beragama diharapkan menciptakan stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia yang terbebas dari konflik agama, sosial, budaya, bahkan politik hingga ekonomi. Apabila kehidupan masyarakat Indonesia harmonis, maka Indonesia akan mudah untuk berpartisipasi mewujudkan tujuan G20 sebagaimana yang tertera dalam tema “*Recover Together, Recover Stronger*”.

Dengan stabilitas negara yang kondusif, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak. Investor akan beramai-ramai mengembangkan usahanya di negara khatulistiwa ini, karena ada kepastian dan jaminan keamanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Haryo Limanseto, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam jangka panjang, branding Indonesia di mata dunia akan meningkatkan *confidence* dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Indonesia dapat menjadi *central stage* di dunia. Forum G20 ini juga diharapkan dapat mendorong komitmen investasi dari anggota G20 dan organisasi internasional.

Mengingat pentingnya moderasi beragama untuk mendorong terciptanya kondusifitas negara, Kementerian Agama terus berupaya mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Humas pun turut andil dalam proses edukasi ini.

* * * * *

Informasi yang Renyah, Mudahkan Khalayak Mendukung Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto

G20 merupakan kekuatan dunia. Perannya sangat strategis karena memegang 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dan 60% populasi dunia. Fenomena ini seperti teori pareto optimum, di mana 20% atas bagian populasi namun menyumbangkan pengaruh 80% (sumber: Kemenkeu).

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020 sebesar 1,058 triliun USD, jauh lebih tinggi dari Singapura (340 miliar USD) dan Malaysia (336,7 miliar USD). Kita patut berbangga bahwa Indonesia merupakan salah satu di dalamnya. Peringkat PDB Indonesia di dunia yakni berada di angka 16 dan 5 di asia.

Diharapkan, Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 memberikan pengaruh yang baik khususnya bagi Indonesia. Pengaruh ini tidak hanya soal reputasi sebagai penyelenggara event internasional, tetapi juga KTT G20 harus dapat menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek dan menarik investasi dalam jangka Panjang.

Lebih dari itu, KTT G20 diharapkan mempermudah Indonesia mengakses kerja sama internasional untuk kepentingan dalam negeri. Dengan demikian, menyelenggarakan event besar seperti G20 merupakan investasi. Namun itu semua harus didukung oleh

seluruh pemangku kepentingan dari berbagai lapisan.

Bagi insan kehumasan khususnya Humas Pemerintah, ini menjadi tantangan besar. Mempromosikan G20 tidak semudah mempromosikan event-event olahraga. KTT G20 dianggap sebagai event elit karena tidak semua khalayak khususnya arus bawah memahami substansi yang dibahas pada konferensi tersebut. Insan kehumasan perlu melakukan *social engineering communication* dalam membuat strategi komunikasi agar khalayak tidak hanya aware tapi juga mendukung.

Merenyahkan informasi

Sama seperti MotoGP yang pekan lalu sukses terselenggara di Mandalika. Indonesia sudah lama dipercaya menjadi tuan rumah event internasional. Tahun 2018 pun Indonesia sukses menyelenggarakan ASIAN GAMES. Kita juga pernah menyelenggarakan Annual Meeting IMF WBG di tahun yang sama. Event MotoGP yang sukses tersebut salah satunya disebabkan dukungan publik. Dukungan seperti fasilitas akomodasi, rasa aman, produk yang berkualitas, dan tentu saja stabilitas, termasuk di dunia maya.

Edukasi publik mengenai pentingnya G20 perlu dilakukan dengan cara *out of the box*. Strategi yang dapat dilakukan yakni memecah substansi pembahasan melalui media social. Event KTT G20 tentu tidak seperti event olahraga yang disukai semua kalangan.

Pertunjukan olahraga level internasional merupakan hiburan tanpa memandang strata ekonomi. Namun KTT G20 menjadi penting karena para pemimpin negara berpengaruh di dunia memikirkan cara untuk pulih bersama. Pandemi tidak hanya masalah sebuah negara.

Seperti halnya pandemi, perang antar dua negara menjadi masalah bagi negara-negara yang lain. Ekonomi global yang muncul akibat adanya teknologi informasi dan sistem logistik membuat mayoritas negara di dunia terikat. Pasar uang, pasar saham, sistem pembayaran, perdagangan antar negara, semua saling bergantung dan memengaruhi.

Selain itu, kanal-kanal media pemerintah tidak bisa sendirian. Harus ada kolaborasi dengan berbagai asosiasi dan komunitas.

Banyak kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan akan adanya G20, seperti UMKM, pariwisata, ekonomi digital, Kesehatan, pengarusutamaan gender dan sebagainya.

Komunitas tersebut selain diajak melakukan edukasi kepada publik, juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi melalui side event-side event. Sangat terbuka kemungkinan aspirasi-aspirasi yang muncul menjadi solusi atas permasalahan yang sedang atau akan dibahas.

Masyarakat mengakses media untuk mencari informasi dan hiburan. Untuk media social yang saat ini semakin menjadi pilihan, tujuan hiburan semakin mendominasi. Perlu pengemasan informasi dalam bentuk komik, meme, parodi, standup comedy dsb agar informasi mengenai KTT G20 semakin membumi.

KTT G20 saat ini semakin penting karena muncul masalah yang tidak terpicirkan sebelumnya yakni invasi Rusia atas Ukraina. Dengan demikian, masalah dunia saat ini tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga geopolitik. KTT G20 memiliki tujuan mulia agar antar anggota dapat bekerjasama menyelesaikan masalah bersama.

Isu yang kelihatannya level atas ternyata dapat membawa dampak ke level akar rumput. Inflasi energi dan pangan akan menjadi imported inflation. Pada isu kesehatan, ketersediaan vaksin dan obat untuk mengatasi pandemi covid maupun pandemi lain membutuhkan kerja sama antar negara. Selain itu ekonomi digital menjadi bagian pembahasan pada KTT tersebut.

Keberhasilan MotoGP mandalika menjadi bukti bahwa Indonesia dapat menyelenggarakan event Internasional di masa covid-19. Perluasan vaksinasi dan kesiapan sistem kesehatan membuat Indonesia percaya diri bahwa event tersebut dapat menggerakkan sektor riil. Kita berharap G20 pun demikian, seiring menuju endemi, diharapkan delegasi dapat menggerakkan sektor MICE dan pariwisata. Lebih dari itu KTT G20 menjadi ajang *showcase* bahwa Indonesia dapat segera pulih dan menjadi tempat menjanjikan untuk berinvestasi.

G20 memberikan ruang bagi Indonesia menjadi negara berpengaruh dengan prinsip bebas aktif. Indonesia diproyeksikan

menjadi negara maju pada 2035 dengan bonus demografi. Untuk mengakselerasi itu perlu dibangun kerjasama dengan negara-negara lain dengan prinsip saling menguntungkan. Setiap negara tentu memiliki keunggulan kompetitif masing-masing. Sinergi saling mengisi perlu menjadi semangat bersama. G20 akan membuka akses kerja sama bagi Indonesia agar rakyatnya sejahtera.

Dukungan publik dapat dilakukan dengan ikut terlibat memasyarakatkan narasi pemerintah. narasi yang dibutuhkan berisi informasi yang renyah. Publik juga diharapkan ikut memberikan aspirasi dan masukan positif agar kesepakatan yang dihasilkan nanti merupakan keputusan terbaik.

Selain itu, stabilitas di media sosial perlu dijaga terutama dari hoax dan disinformasi atas perhelatan KTT tersebut. Diharapkan, KTT G20 memberikan kesan yang baik dan kesepakatan terbaik untuk mewujudkan dunia yang lebih baik untuk pulih bersama.

* * * * *

Mengusung Narasi Keindonesiaan Melalui Fesyen dan Kuliner di Ajang G20

Oleh: Suzan Lesmana, M.Si.

Indonesia resmi menjadi tuan rumah perhelatan *Group of Twenty* (G20) terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Membanggakan? O, sudah pasti. Namun, tak cukup hanya menjadi sebuah kebanggaan, dukungan pelaksanaan dan suksesnya acara oleh semua pihak termasuk oleh para punggawa pranata humas kementerian/lembaga di seluruh Indonesia sangatlah berarti.

Kita pahami bahwa pranata humas kementerian/lembaga atau lazim disebut *Government Public Relation* (GPR) adalah garda terdepan agen diseminasi informasi pesan atau kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Otomatis pesan atau narasi tunggal G20 akan semakin mudah didiseminasikan melalui para GPR.

Adapun narasi tunggal G20 adalah “*Recover Together, Recover Stronger*”. Peran GPR dalam mengusung narasi tunggal adalah mengglorifikasi dan mengamplifikasi perhelatan G20 dengan berbagai produk kehumasan yang menjadi tuis rutinnya seperti berita, poster, e-flyer, medsos, video atau webinar-webinar terkait G20.

Selain mengusung narasi tunggal G20, saya pikir pertemuan G20 dapat menjadi ajang pranata humas Indonesia berkolaborasi memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui narasi

keindonesiaan seperti yang disosialisasikan Panitia Pelaksana G20. Narasi keindonesiaan yang dimaksud adalah memperkenalkan dan mengemas produk-produk khas Indonesia seperti produk seni, budaya, hiburan, kuliner, atau produk kerajinan khas Indonesia dalam setiap aspek penyelenggaraan G20.

Bagaimana caranya? Ada sekitar 150 pertemuan tingkat pimpinan, menteri, deputi, hingga working group sebelum mencapai puncak acara, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali, pada akhir Oktober 2022. Nah, ini adalah peluang untuk mengangkat narasi keindonesiaan di aras G20. Bisa saja dari mulai kedatangan negara-negara G20 ke Indonesia, tamu disambut dengan tradisi Palang Pintu Betawi, misalnya. Atau bisa juga persembahan tarian adat khas Indonesia seperti Tari Pendet - Bali menjadi pilihan.

Semuanya seremonial tadi dipandu pengantar dan buku panduan penyerta kisah tentang Palang Pintu dan Tari Pendet. Itu baru seremonial kedatangan. Belum lagi kuliner yang disajikan atau pernak-pernik souvenir acara G20 khas Indonesia. Ini adalah peluang bagus mengenalkan dan meningkatkan literasi tentang G20 yang dikemas dalam atmosfer narasi keindonesiaan.

Lantas apa saja bidang-bidang yang dapat diangkat dan menjadi bagian narasi keindonesiaan hingga mewujudkan jadi demam Indonesia di ajang G20? Dua bidang di antaranya adalah fesyen dan kuliner dalam tulisan ini.

Dalam bidang fesyen, seni batik dapat dikemas menjadi souvenir para peserta G20. Sebagai informasi, pebisnis global sejak lama mengenal produk seperti batik. Jangan lupa ada merek “Erigo Apparel Indonesia” yang telah mengusung batik dengan model casual menyasar konsumen anak muda berpenampilan masa kini dan modis serta stylish. Nah, variasi batik seperti ini bisa jadi alternatif dijadikan pakaian resmi G20.

Untuk kain tradisional, merk “Major Minor” pernah mengusung produk fesyen asli Indonesia dalam pameran tingkat internasional seperti *Paris Fashion Week* dan *Tokyo Fashion Week*. Belum lagi produk jamur yang telah disulap menjadi produk fesyen dan akhirnya mengantarkan start up Indonesia MYCL menuai kesuksesan berkolaborasi dengan enam *global fashion brand*, masih di ajang

Paris Fashion Week.

Sedangkan untuk kerajinan kayu, brand asli Indonesia “Matoa” telah mengusung jam tangan berbahan kayu jati, sonokeling, dan maple. Menurut saya produk unik ini akan menarik perhatian para tamu G20.

Selanjutnya kuliner. Nah, variasi kuliner Indonesia layak disajikan dalam berbagai sesi sarapan atau makan siang dan malam ajang G20. Nasi Padang menjadi kuliner lezat khas Indonesia yang wajib disajikan dengan rendangnya. Berikutnya nasi goreng, yang diakui lezatnya oleh Barack Obama.

Jangan lupa sate yang mirip-mirip dengan barbeque dari Barat, lengkap dengan bumbu kacang atau kecap khas Indonesia. Lantas tempe yang pernah dijadikan Chef Korea, Eduard Quad sebagai menu andalannya pada festival kuliner di Jakarta tahun 2012 layak disajikan. Begitu pula gado-gado dengan kuah kacang asli yang sangat khas Indonesia. Tak lupa, aneka jajanan khas Indonesia tak akan kalah untuk menarik perhatian dan menggoda rasa mencicipi para peserta G20.

Saya pikir kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam mengusung narasi keindonesiaan ini menjadi krusial adanya. Sementara GPR berkontribusi sesuai ranahnya di bidang informasi dan komunikasi hingga perhelatan G20 menjadi viral secara massif dan ujungnya adalah kesuksesan sehingga mengangkat nama Indonesia di aras internasional. Semoga.

* * * * *

Transformasi Digital dan Aksesibilitas Informasi Pemerintah

Oleh: Tiara Kharisma, S.I.Kom., M.Si.

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin masif dilaksanakan ketika kondisi pandemi COVID-19 menghantam berbagai negara di belahan dunia. Aparatur pemerintah dituntut beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi agar menjamin penyelenggaraan negara, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat tidak terhambat, meskipun dilakukan secara tidak langsung atau daring. Sebenarnya, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia telah digulirkan sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government.

Meski Inpres telah ditetapkan hampir 19 tahun silam, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia tampaknya masih belum menunjukkan performa yang baik. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE nasional tahun 2021 baru mencapai angka 2,24 dari skala 1-4 (menpan.go.id, 2021). Ini menunjukkan transformasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik masih membutuhkan upaya-upaya masif baik dari lingkungan eksternal maupun internal sistem pemerintahan.

Tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan SPBE sudah

sewajarnya menjadi pekerjaan rumah bersama, agar setiap entitas memikul tanggung jawab yang sama untuk bekerja bersama menyukseskan SPBE. Karena sejatinya, jika dalam suatu organisasi sudah mampu menjalankan suatu sistem elektronik, maka dapat membantu menciptakan struktur jaringan untuk interkoneksi, memberikan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, interaktivitas, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas (Yildiz, 2007).

Aksesibilitas Informasi

Implementasi SPBE juga turut diterapkan pada aspek layanan informasi di instansi pemerintah. Apalagi pada era *society* 5.0, produksi dan konsumsi informasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Benefit yang dapat diperoleh masyarakat atas kesuksesan SPBE pun cukup banyak, diantaranya tumbuhnya kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya karena informasi yang akurat dapat dengan mudah diakses masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, masyarakat pun dapat menikmati layanan publik yang cepat tanpa harus mengetahui prosedur kompleks dan birokratis pada suatu layanan publik (Darmawan, 2011; Praditya, 2014).

Transformasi digital pada penyelenggaraan pemerintahan telah menciptakan harapan di antara masyarakat untuk memperoleh layanan informasi yang lebih baik dari pemerintah. Sebagai aparatur negara yang berperan mengelola layanan informasi dan relasi, praktisi hubungan masyarakat (Humas) juga berkewajiban untuk terampil dan melek terhadap transformasi digital dan berbagai aplikasi SPBE yang wajib diimplementasikan oleh setiap instansi pemerintah. Humas Pemerintah juga dapat berperan menjadi aktor keberhasilan bagaimana penyediaan informasi publik yang dikuasai institusinya dapat diakses dan digunakan publik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam memenuhi orientasi kebutuhan dan ekspektasi publik terhadap aksesibilitas informasi yang dikuasai pemerintah, Praktisi Humas sudah barang tentu tidak mungkin bekerja sendiri. Humas dapat berkolaborasi dengan berbagai sistem yang ada pada organisasi, agar informasi yang dibutuhkan publik dapat diperoleh

dengan mudah dan cepat serta akurat dan terpercaya. Contohnya saja kolaborasi dengan SDM yang memiliki keterampilan dalam hal teknologi informasi, untuk menciptakan interkoneksi digital dan mengaplikasikan sebuah sistem informasi dalam pelayanan informasi publik, maupun dalam koordinasi internal organisasi dalam rangka penyiapan bahan komunikasi dan informasi publik. Praktisi Humas pun dapat bersinergi dengan SDM yang membidangi kearsipan/pendokumentasian kinerja instansi, agar informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar dari sumber yang autentik dan terpercaya.

Transformasi digital menjadi salah satu isu yang fokus dibahas dalam presidensi G20. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik secara digital dari instansi pemerintah serta pemanfaatannya oleh masyarakat, baik dalam kegiatan perekonomian, pengembangan ilmu pengetahuan ataupun kegiatan lain dapat berpotensi menjadi isu menarik yang dapat ditunjukkan, terutama saat puncak helatan Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan. Hal tersebut dapat dikemas dan didiseminasikan dengan menarik oleh para Humas Pemerintah, seiring dengan mendekatnya puncak kampanye isu global dan isu prioritas pada G20. Ini tak lain sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan, bahwa meskipun Indonesia merupakan negara berkembang, namun mampu bersaing dengan negara maju dalam menjamin aksesibilitas informasi kepada warganya.

Isu transformasi digital dalam G20 juga memiliki irisan dengan pelaksanaan SPBE di Indonesia. Ini dapat dijadikan ajang bagi seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk melecut dan mengakselerasi kesuksesan capaian implementasi SPBE. Namun perlu menjadi perhatian bersama bahwa selain proses adaptasi selama implementasi SPBE, kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana, atau infrastruktur. Tetapi juga dibutuhkan jiwa gotong royong seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti halnya berkomitmen dan meluruhkan ego sektoral tiap institusi untuk menggunakan aplikasi umum SPBE yang saat ini telah dirilis.

* * * * *

Menjual Riset dan Inovasi di Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Tri Sundari

Investasi di bidang riset itu mahal. Selain membutuhkan dana yang besar, juga diperlukan ketersediaan periset yang mumpuni serta fasilitas yang lengkap. Itupun tidak ada jaminan riset yang dilakukan akan berhasil. Investasi *high cost* dan *high risk* seperti ini kurang diminati terutama bagi industri di dalam negeri.

Namun jika kita melihat kondisi di beberapa negara maju, situasinya sangat berbeda. Investasi di bidang riset dan inovasi sudah menjadi kebutuhan. Tidak heran jika banyak negara maju yang mengalokasikan anggaran risetnya melebihi yang direkomendasikan oleh UNESCO sebesar 1% dari PDB, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Laporan UNESCO *Institute for Statistics* tentang *Global Investment in R&D* pada Juni 2020 menggambarkan peran swasta di sektor riset di negara-negara tersebut juga sangat dominan. Sebagai contoh, di Tiongkok kontribusi swasta mencapai hampir 80% dari total belanja risetnya. Angka ini menjadi bukti bahwa investasi riset dan inovasi sangat strategis dan menguntungkan.

Riset dan Perhelatan G20

Hadirnya Peraturan Presiden nomor 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi terobosan pemerintah untuk mengatasi permasalahan fundamental dunia riset di Indonesia.

Mulai dari sumberdaya (SDM, anggaran, fasilitas) yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga hingga minimnya hasil riset yang berhasil dikomersialisasikan. Untuk percepatan terciptanya ekosistem riset yang kondusif, BRIN perlu banyak melakukan terobosan termasuk memperbanyak kolaborasi baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.

Melalui ajang G20 dimana Indonesia saat ini menjadi presidensi, terbuka kesempatan yang luas untuk kolaborasi dan menawarkan inisiatif-inisiatif baru kepada anggota G20. Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Presidensi G20 Indonesia setidaknya akan dihelat 150 rangkaian pertemuan yang terdiri dari Pertemuan *Working Groups, Engagement Groups, Deputies/Sherpa, Ministerial*, dan KTT G20, serta *Side Events*.

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di ranah riset dan inovasi di Indonesia, BRIN menempatkan peran strategisnya dengan menyelenggarakan rangkaian acara dengan tajuk “*Research and Innovation Initiative Gathering (RIIG)*”. RIIG masuk dalam kategori *Side Event*. Diawali dengan *preliminary meeting* pada 24 Februari 2022, rangkaian RIIG akan ditutup dengan acara puncak pertemuan di tingkat Menteri yang menggawangi riset dan inovasi pada Oktober 2022.

Sebagai pendatang baru dalam perhelatan besar ini, BRIN dalam tujuan jangka panjangnya mempunyai mimpi menjadikan inisiatif ini menjadi *working group* yang bersifat permanen. Meskipun dipahami untuk dapat mewujudkannya diperlukan perjalanan panjang dan kesiapan substansi yang memadai untuk bisa meyakinkan pentingnya kehadiran *working group* tersebut di G20. Namun hal ini layak untuk diperjuangkan agar keputusan yang disepakati bisa terus dikawal hingga menghasilkan aksi konkrit yang membumi melalui kolaborasi riset dan inovasi yang saling menguntungkan.

Untuk membuktikan bahwa investasi di bidang riset dan inovasi cukup seksi bagi negara G20, Indonesia perlu mematangkan setiap tahapan dan *milestone*-nya. Indonesia melalui BRIN menawarkan dua topik bahasan yang bisa dikategorikan baru di RIIG. Pertama, meningkatkan kolaborasi riset dan inovasi melalui skema berbagi

fasilitas, infrastruktur dan anggaran. Kedua, pemanfaatan biodiversitas untuk mendukung ekonomi hijau dan biru. Usulan ini ibarat “*game changer*” di G20 ataupun pertemuan kerja sama multilateral lainnya. Pertemuan yang biasanya disuguhkan dengan menu di tataran makro, kini lebih membumi.

Pemilihan biodiversitas tentu bukan tanpa alasan. Bidang ini merupakan modal besar yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara dengan megabiodiversitas yang tak hanya berasal dari daratan melainkan juga lautan. Tidak semua negara dianugerahi kekayaan seperti Indonesia. Sehingga, pemilihan bidang ini diyakini dapat menarik minat negara G20 untuk berkolaborasi. Strategi yang menarik sebagai upaya memanfaatkan potensi kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, isu ini juga mendukung tema G20 khususnya di pilar *Ensuring Sustainable and Inclusive Growth*.

Tantangannya adalah bagaimana membuat platform yang berbeda dan bersifat melengkapi platform global yang sudah ada seperti *Global Research Infrastructure*, *European Research Infrastructure* atau *International Distributed Research Infrastructures* – OECD. Tantangan lainnya adalah kesediaan negara anggota untuk mengalokasikan kontribusi dana atau sumber daya lainnya.

Kesempatan presidensi, menjadikan Indonesia berhak membuat inisiatif baru yang mendukung sebesar-besarnya kepentingan nasional. Dengan membuka peluang kolaborasi pemanfaatan biodiversitas melalui skema berbagi infrastruktur dan pendanaan. Selain dapat memperbesar dan mempercepat pemanfaatan potensi biodiversitas yang Indonesia miliki, Indonesia turut mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Selaras dengan semangat tema Presidensi G20 Indonesia “*Recover Together, Recover Stronger*”, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui riset dan inovasi.

* * * * *

Jadikan G20 sebagai Momentum menuju Internasionalisasi Pengembangan Zakat dan Wakaf

Oleh Vethria Rahmi

G20 (*Group of Twenty*) merupakan forum utama kerjasama ekonomi dunia yang anggotanya terdiri dari 19 negara ditambah satu lembaga Uni Eropa. Kebetulan Indonesia diberikan mandat oleh negara-negara yang tingkat perekonomiannya besar itu sebagai presidensi G 20.

Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tersebut, Indonesia menjadi negara asia yang kelima menjadi tuan rumah setelah Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia sendiri dalam sejarahnya baru pertama kali menjadi tuan rumah dalam peristiwa ini.

KTT yang dimulai dari 1 Desember 2021-30 November 2022 berpotensi strategis dan kolektif. Pasalnya KTT tersebut sebagai representasi dari 85% perekonomian internasional dan 80% investasi global serta 75% dari perdagangan dunia. Selain itu juga 60% populasi dunia.

Dengan demikian, Presidensi G20 berguna bagi Indonesia dalam konteks pemanfaatan peluang Indonesia untuk menyelaraskan agenda G20 agar mendukung dalam pemulihan kegiatan perekonomian kita. Presidensi ini juga membuktikan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional. Faktanya Indonesia menjadi satu-satunya di ASEAN yang menjadi anggota G20.

Oleh karena itu, Kementerian Agama RI dapat berkontribusi pada para pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Kementerian Agama RI selayaknya menunjukkan berbagai pencapaiannya pada dunia internasional. Tentu saja hal ini dapat dijadikan starting point dalam pemulihan keyakinan pelaku ekonomi dan keuangan syariah pasca pandemi Covid 19.

G20 dapat dijadikan momentum untuk memperkenalkan keuangan syariah, optimalisasi zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta dunia pariwisata dan produk halalnya. Tentu saja hal ini dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini keuangan syariah telah menjadi diantara sektor yang pertumbuhannya sangat pesat pada industri keuangan global. Menariknya, telah melewati pasar keuangan konvensional.

Berhubung keuangan syariah telah berkontribusi pada proses pemulihan ekonomi bangsa baik dari sisi peningkatan produktivitas dan stabilitas keuangan serta pertumbuhan yang berkesinambungan secara inklusif.

Keuangan syariah merupakan skema yang manage aset dan transaksi yang berkeadilan serta saling ridha. Berdasarkan tata cara pembiayaan risiko yang seimbang dengan pembiayaan syariah serta eksistensi sosial keuangan syariah, misalnya zakat, infaq shadaqah dan wakaf sebagai jaringan yang aman dan stabil pada keuangan UMKM dan sosial ekonomi secara umum.

Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia 2024

Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2024 sehingga tidak hanya terpusat pada penguatan ekosistem nasional Indonesia. Potensi tersebut ditandai dengan semakin tingginya antusias penduduk Indonesia dalam menjalankan ekonomi syariat Islam belakangan ini. Penduduk Indonesia yang mayoritas menganut Islam memiliki potensi zakat dan wakaf yang layak menjadi percontohan umat Islam sedunia. Karena belum ada negara saat ini di dunia ini yang menjadi negara pengembang zakat dan wakaf skala internasional, maka Indonesia diprediksi akan terus berinisiatif untuk mendorong penyusunan standar pengelolaan zakat dan wakaf internasional. Misalnya Zakat Core Principles (ZCP) &

Wakf Core Principles (WCP). ZCP sendiri sudah diluncurkan sejak 2016 dan sudah diterapkan di sejumlah negara. Adapun WCP baru kemudian diluncurkan pada tahun 2018.

Bahkan sejak tahun 2010, Indonesia sudah menjadi negara strategis dalam World Zakat Forum (WZF). WZF sebagai platform gerakan zakat internasional telah mensinergikan pemangku kepentingan zakat dunia dalam konteks peningkatan kesejahteraan umat juga pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah sejak 4-5 desember 2021, pertemuan tahunan WZF dihadiri peserta yang bersepakat untuk mengembangkan keanggotaannya kepada otoritas zakat dan wakaf di seluruh dunia.

Kolaborasi dan sinergi lembaga zakat dan wakaf dunia perlu terus dibangun dalam mengatasi dampak sosial - ekonomi dalam pemulihan pasca pandemi covid 19. Tak terkecuali dalam konteks penguatan teknologi dan inovasinya serta inisiasi proyek percontohan universitas online zakat, wakaf dan bank wakaf di Indonesia. hal ini sebagai penguatan literasi zakat dan wakaf. Selain itu inisiasi pengukuran indikator zakat dunia dan pembekalan indikator wakaf dunia tahun 2022. Inisiasi yang berfungsi memperluas WZWF yang menopang lahirnya standarisasi pengelolaan zakat dan wakaf dunia. WZWF inilah ruang bagi indonesia untuk memimpin optimalisasi perkembangan zakat dan wakaf dunia.

Konsekuensi atas keterlibatan pada kepemimpinan indonesia di kancah dunia dapat memastikan pengelolaan zakat dan wakaf nasional terselenggara dengan tata kelola yang sistematis, progresif, optimal dan sustainable serta terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Perpres tentang pengumpulan zakat penghasilan di kementerian pusat dan daerah dapat menjadi strategi untuk mengembangkan zakat nasional sejumlah 230 triliun/ tahun. Sayangnya hingga 2020 baru terhimpun 10 Triliun. Harapannya gerakan pengumpulan zakat tersebut dapat menyentuh kelompok marginal dalam masyarakat Indonesia.

Untuk itu, tugas seluruh pengelola zakat saat ini adalah membuktikan dan meyakinkan masyarakat tentang berapa banyak masyarakat miskin yang berhasil dituntaskan, tentunya distribusi dan

pendayagunaan zakat harus sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh masyarakat dunia dapat berpartisipasi dalam hal tersebut pada presidensi G20 di Indonesia. Oleh karena itu transparansi akan memungkinkan dunia melihat penyaluran zakat tidak hanya secara konvensional tapi juga dapat tersalurkan pada kegiatan produktif.

Hal ini tidak berlebihan bila dipandang dari sudut laporan terbaru State of Global Islamic Economy 2018/2019 bahwa potensi ekonomi Islam tahun 2023 akan mencapai 3809 milyar dollar Amerika, atau sekitar 500 Triliun. Bahkan kini sudah 549 Badan Amil Zakat Nasional dan 587 lembaga zakat yang akan terus berkembang bila pemerintah dan masyarakat menyatukan kepentingan bersama melalui Humas Pemerintah dan penyuluh yang terlatih secara sistematis.

* * * * *

Sukseskan KTT G20 dengan Sinergi Komunikasi

Oleh: Wiwi Syafarhadiati, S.Sos., MSi.

Era pandemi yang melanda masyarakat internasional, tidak menyurutkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengakselerasi pemulihan stabilitas perekonomian agar visi mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 tetap dapat terwujud.

Berbagai kegiatan akselerasi pembangunan tentu harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, dukungan masyarakat global tentu diperlukan karena hampir tidak mungkin rasanya Indonesia membangun semuanya sendiri. Perlu dikomunikasikan dengan baik juga kepada masyarakat global, bahwa kegiatan pembangunan untuk mengakselerasi stabilitas perekonomian ini harus dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai negara di dunia.

Harapan tersebut merupakan angin segar ketika Indonesia didaulat sebagai tuan rumah gelaran konferensi tingkat internasional atau KTT *Group of Twenty* (G20). Sebagai pemegang Presidensi G20 ini, selain menjadi tuan rumah acara puncak G20 tanggal 15-16 November di Bali, berbagai institusi di Indonesia akan melaksanakan serangkaian pertemuan awal dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara. Hal ini dilaksanakan guna mempersiapkan berbagai topik yang akan dibicarakan pada

pertemuan puncak tersebut diatas.

Seperti disampaikan dalam Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian (19/21), bahwa pada 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi *Group of Twenty* selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021- November 2022. Serah terima Presidensi dari Italia (selaku Presidensi G20 2021) kepada Indonesia sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia.

Presidensi G20 mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Kolaborasi Membumikan Informasi KTT G20

Sebagai tuan rumah KTT G20, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam penyebarluasan informasi, terkait keseluruhan agenda. Artinya, pemerintah harus dapat mengkomunikasikan rangkaian KTT G20 ini kepada masyarakat, baik secara lokal maupun global. Aspek komunikasi, jelas menjadi salah satu poin krusial kesuksesan presidensi KTT G20.

Menilik hal tersebut, Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) dan organisasi serumpun, perlu berkolaborasi dalam orkestrasi komunikasi dan penyampaian pesan-pesan positif. Peran strategis komunikasi dibutuhkan, agar masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, dapat mengerti pentingnya perhelatan akbar KTT G20 di Indonesia. Pengkomunikasian KTT G20 kepada stakeholder di luar negeri dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

Memang bukan perkara gampang, karena selama ini KTT G20 dianggap sebagai pertemuan kelas tinggi, dengan materi yang susah dipahami. Untuk itulah peran Iprahumas menjadi krusial, untuk membumikan informasi terkait rangkaian KTT G20.

Iprahumas dan organisasi serumpun mesti bisa memberikan edukasi positif. Bahkan diharapkan dapat mengajak masyarakat berpartisipasi aktif, sebagai bagian dari tuan rumah KTT G20. Bila berhasil, maka akan tercipta *nation branding* yang ujungnya dapat

menjadi faktor pengungkit, guna pemulihan pada sektor ekonomi dan kesehatan nasional.

Sebuah pekerjaan rumah tentunya, agar Iprahumas mampu berperan dalam menyampaikan issue-issue yang tengah dibahas dalam rangkaian KTT G20. Media komunikasi yang digunakan di antaranya media elektronik, seperti TV/radio, Websites, media sosial dan intermessaging service, media luar ruang, dan media cetak. Informasi bisa berupa berita, opini, dan sebagainya. Bahkan data-data juga bisa disampaikan dalam bentuk infografis.

Ada baiknya ditentukan juga warna-warna yang harus dominan digunakan di media komunikasi seperti infografis ataupun media luar ruang, sehingga terpatritasi di kognitif publik bahwa publikasi dengan warna tertentu adalah informasi tentang KTT G20. Masyarakat diharapkan langsung tertarik untuk membaca informasi tentang kegiatan tersebut.

Media luar ruang berupa baliho/spanduk/videotron berisi informasi KTT 20 tetap masih diperlukan walaupun saat ini sudah era digital. Materi bisa ditempatkan di lokasi yang memiliki kemungkinan untuk banyak dilihat orang, seperti *street furniture* (halte bis, *urban furniture*, *kiosk*, dan pusat perbelanjaan, stasiun bis/kereta api maupun di bandara udara). Media luar ruang lainnya dapat memanfaatkan kendaraan seperti bus, mobil, taksi, kereta api, sebagai media penempatannya.

Sinergi Kuat, Indonesia Hebat

Sounding tentang KTT G20 sudah dimulai, semua instansi pemerintah selalu menyertakan logo KTT G20 di setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun *awareness* bahwa akan ada perhelatan besar dunia di Indonesia. Seperti model/metoda komunikasi AIDA, singkatan dari *Awareness* (Kesadaran/Daya Tarik), *Interest* (Minat), *Desire* (Keinginan), dan *Action* (Aksi). Masyarakat diajak untuk mengetahui/menyadari akan adanya perhelatan internasional di Indonesia.

Banyak hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang KTT G20 melalui media di atas. Perlu disadari, bahwa komunikasi

publik yang dilaksanakan di media elektronik, khususnya website dan media sosial akan dapat dibaca di seluruh dunia. Karena itu, penggunaan berbagai bahasa di media elektronik ini menjadi sangat penting, khususnya bahasa dari negara anggota G20 yang juga menjadi bahasa yang digunakan di PBB.

Penyampiannya tentu perlu pula disesuaikan dengan kaidah-kaidah komunikasi internasional. Dengan demikian, diharapkan kegiatan G20 ini bukan hanya merupakan kegiatan di Indonesia, bukan hanya kegiatan dari negara-negara anggota G20, tapi merupakan kegiatan Global.

Lebih dari itu, diharapkan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan Indonesia, dibicarakan di berbagai pertemuan awal dan berpuncak pada pertemuan tingkat tinggi di Bali. Kita semua juga berharap agar kesuksesan Presidensi G20 Indonesia menjadi *trending topic* dunia. Dengan demikian, secara otomatis mendorong berbagai sektor, di antaranya kuliner dan wisata Indonesia. sinergi dan kolaborasi ini juga akan membuat Indonesia kuat dan hebat.

* * * * *

Semangat Berkolaborasi, Kota Depok Wujudkan UMKM Tangguh di Masa Pandemi

Oleh: Yulia Shoim, S.Ik.

Kota Depok merupakan Kota yang pertama kali disebut di Indonesia sebagai Kota yang warganya terinfeksi Corona. Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Kondisi ini kemudian direspon oleh Pemerintah Kota Depok bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan konferensi pers.

Corona yang kemudian dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya dalam perekonomian masyarakat. Menurut survey dari Bank Indonesia bahwa terdapat 87,5 persen UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) Indonesia terdampak pandemi Covid-19.

Perhatian Pemerintah Kota Depok terhadap keberlangsungan UMKM dibuktikan dengan Surat Edaran Walikota Nomor: 510/378-DKUM tentang Belanja Produk UMKM Kota Depok. Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Depok. Dalam edaran tersebut diminta untuk mengajak Aparatur Sipil Negara di unit kerjanya menyisihkan penghasilan/

berdonasi dengan berbelanja produk Usaha Mikro (UMKM) Kota Depok.

Produk UMKM dapat diperoleh di UMKM Binaan Perangkat Daerah, Komunitas UMKM, Koperasi Depok. Selanjutnya produk UMKM yang dibeli didistribusikan kepada masyarakat atau aparaturnya yang sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Aktivitas tersebut diunggah di media sosial yang dimiliki dengan tag #ASN Depok peduli, #Beli Produk UMKM Depok serta diminta melaporkan kegiatan kepada Walikota.

Selain surat edaran tentang Belanja Produk UMKM Kota Depok Pemerintah Kota Depok mengadakan kegiatan D'Sabr. Kegiatan ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 460/386-Ekonomi tentang Program D'Sabr (Depok Saba Rakyat).

Menurut kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Wahid Suryono dalam situs berita.depok.go.id, D'Sabr bertujuan untuk membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Dengan cara membeli paket produk UMKM di toko atau warung atau outlet UMKM atau koperasi dengan menjalankan mekanisme.

Mekanisme yang dimaksud antara lain selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk kelurahan menggalang donasi dari ASN setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Selanjutnya, paling lambat di hari Jumat, total donasi dibelikan sembako dan produk UMKM dengan nilai minimal Rp. 150.000 per paket.

Selain itu pada kegiatan D'Sabr diharuskan melakukan pendokumentasian kegiatan pembelian paket bantuan di toko/warung/outlet UMKM/koperasi dalam berbagai bentuk dokumentasi, baik foto ataupun video. Lalu, masing-masing Perangkat Daerah mengunggahnya di media sosial masing-masing dengan menggunakan tagar #ASNdepokpeduli dan #beliprodukUMKMdepok.

Sasaran D'Sabr antara lain warga yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman). Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan sasaran warga Isoman di Sukmajaya, (03/09/2021). Dengan bantuan yang diberikan sebanyak 130 paket.

Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika menyerahkan 15

paket sembako Program S'Sabr kepada Wartawan yang tergabung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok. Paket sembako terdiri dari lima kilogram beras, minyak goreng satu liter, garam, gula pasir, dan biskuit. Selain juga terdapat produk makanan ringan dari UMKM.

Di lokasi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong menyalurkan bantuan sebanyak 18 paket. Dengan sasaran penerima anak yatim, pelestari budaya dan guru ngaji,

Berdasarkan Informasi Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Adnan Mahyudin, (JD12, berita.depok.go.id) Capaian program D'SabR selama 14 pekan terkumpul dana sebesar Rp 1.607.694.600. Dana ini berasal dari donasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk kelurahan. Namun saat ini program D'SabR tidak berlanjut. Setiap PD memiliki fokus pada bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI).

Upaya dalam pemulihan ekonomi di Kota Depok dibuktikan juga dengan membuat gerai UMKM. Gerai ini berfungsi untuk memasarkan produk-produk anggota UMKM. Salah satunya Gerai UMKM di Kantor Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos. Setiap harinya pelaku UMKM memasarkan hasil produknya secara bergantian.

Lokasi strategis lainnya disediakan untuk memasarkan produk UMKM adalah di Alun-Alun. Khususnya UMKM dari Kecamatan Cilodong difasilitasi untuk mempromosikan produknya.

Selain itu di pusat-pusat perbelanjaan Pemerintah Kota Depok memberikan secara gratis kios-kios UMKM. Pelaku UMKM bisa mendapatkan kios tersebut dengan datang langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di lantai 7, Gedung Dibaleka II. Terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi formulir. Untuk pemerintah kota menanggung kios, sedangkan biaya di tempat usaha misalnya kebersihan, listrik, air menjadi tanggung jawab pelaku UMKM.

Upaya lain, Pemerintah Kota Depok saat ini telah memiliki website khusus yang menjual oleh-oleh khas Depok yang bernama

olehOleh:depok.go.id. Situs ini diluncurkan pada akhir tahun lalu, 30 Desember 2021. Dengan tujuan memasarkan produk serta meningkatkan daya saing produk pelaku usaha Depok.

Kreativitas Digital

Pandemi membatasi kita dalam beraktivitas, namun hal ini tidak menghambat kreativitas. Kota Depok selama pandemi tetap menjalankan expo untuk UMKM. Pada tahun 2021 diadakan pada tanggal 24 Agustus hingga 05 September 2021.

Dalam virtual expo tahun 2021 bekerja sama dengan e-commerce dalam memasarkan produk yaitu Tokopedia dan Shopee. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 350 UMKM Kota Depok dengan produk beragam. Diantaranya produk kuliner, fashion dan kerajinan.

Tidak hanya memasarkan produk, terdapat juga kegiatan lain yaitu klinik bisnis, dengan menghadirkan mentor yang profesional. Dan juga webinar tentang wirausaha baru dalam mencari pasar, dan bagaimana melegalkan produk UMKM di Depok.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dengan menggerakkan seluruh stakeholder baik dari program D'Sabr, penyediaan gerai UMKM dan dari produk hukum dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan. Dengan hasil akhirnya meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM yang pastinya akan berdampak meningkatkan ekonomi warga masyarakat.

G20 dijadikan sebagai momentum untuk mengangkat ekonomi lokasi dan pelaku UMKM. Hal ini merupakan angin segar, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Depok. Dengan berbagai produk yang dimiliki UMKM, pelaku dapat berperan serta di dalam perhelatan ini.

Namun, yang saat ini yang belum maksimal adalah sosialisasi kepada pelaku UMKM, khususnya di daerah. Semakin banyaknya pelaku UMKM berpartisipasi, kesempatan UMKM tumbuh semakin besar. Semua tentunya untuk wujudkan *“umkm tangguh, indonesia tumbuh.”*

* * * * *

G20 dan Kontribusi untuk Dunia

Oleh: Yuliana, SKM.

Setelah resmi terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara *Group Twenty* (G20) pada pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2021 lalu, secara otomatis Indonesia mendapatkan peluang besar untuk lebih dikenal dunia.

Menjadi penyelenggara G20 merupakan kesempatan Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional serta kesempatan untuk memulihkan ekonomi bangsa. Indonesia mengangkat tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, semangat mengajak seluruh negara untuk pulih lebih cepat dan lebih kuat.

Anggota Forum G20 terdiri dari 19 negara di berbagai benua, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang bergabung dalam G20. Forum ini membahas berbagai bidang, di antaranya ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Forum ini dibentuk guna mewujudkan pertumbuhan dunia yang lebih kuat, seimbang, dan berkelanjutan.

Representasi Forum G20

Melansir dari situs Bank Indonesia, forum ini mewakili lebih dari separuh populasi bumi yaitu sebesar 60%, sedangkan untuk perdagangan dunia sebesar 75%. Sejarah singkat G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. Selain mengajak negara berkembang,

forum G20 juga melibatkan negara maju untuk mengatasi krisis di dunia.

Dalam tema besar Presidensi G20, terdapat tiga topik prioritas yaitu di bidang metode pembangunan sistem kesehatan dunia. Ketiga topik tersebut terkait proses pengumpulan dana dunia, standar kesehatan dunia yang harmonis, dan prioritas mengenai perubahan sistem atau rancangan ekonomi dunia dari manual ke teknologi digital. Topik perubahan energi berkaitan dengan perubahan sistem energi dunia yang lebih bersih dan adil. Topik-topik tersebut tidak lepas dari kondisi saat ini, akibat dari pandemi COVID-19 yang dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia.

Kontribusi G20

Indonesia mengajak negara anggota G20 untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya memulihkan ekonomi dan kesehatan dunia. Bukan hanya mengatasi pandemi seperti saat ini saja, melainkan mempersiapkan dunia untuk mengantisipasi dan cepat tanggap menghadapi krisis kesehatan lainnya. Sebelumnya, salah satu contoh peranan G20 adalah memberikan dukungan dalam mengatasi krisis keuangan dunia yang terjadi di tahun 2008.

Sesuai dengan topik prioritas pertama, salah satu bentuk inisiatif G20 dalam penanganan pandemi adalah memberikan penangguhan waktu pembayaran utang luar negeri bagi negara yang berpenghasilan rendah, kemudian penurunan dan penghapusan bea dan pajak impor barang khususnya untuk cairan hand sanitizer, alat-alat medis yang digunakan untuk swab PCR, cairan desinfektan, vaksin dan obat-obatan. Hal ini sangat membantu proses percepatan penanganan pandemi.

Topik prioritas yang kedua adalah transformasi digital. Topik ini adalah cara untuk menjalankan perekonomian pada saat pandemi. Salah satu contohnya adalah para pedagang/pengusaha dan pembeli masih bisa menjalankan aktivitas berjualan dengan metode *online shop*, jual beli secara *digital* dengan menggunakan teknologi *gadget*. Sehingga laju perekonomian masih bisa berjalan. Hal ini menjadi salah satu cara mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baru, dampak pandemi.

Oleh sebab itu, kesempatan menjadi tuan rumah G20 ini Indonesia akan lebih fokus pada peningkatan pengetahuan teknologi digital dan meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital. Kedua fokus tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan dunia akan perubahan teknologi digital yang nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh negara di dunia.

Selain itu, Indonesia dapat mewujudkan lima dasar kepemimpinan G20 yaitu memperkuat kerja sama dengan berbagai negara, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan bidang ketahanan, keseimbangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kepemimpinan dunia secara bersama yang lebih kuat.

Indonesia juga bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu manfaat kepemimpinan G20 ini merupakan peluang Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan budaya pariwisata yang ada di Nusantara. Indonesia yang mempunyai potensi dan kekayaan budaya yang dapat diperkenalkan kepada dunia internasional.

Perhelatan ini juga diharapkan membuat masyarakat internasional percaya bahwa Indonesia adalah negara dengan perekonomian besar dan berkembang. Dengan begitu masyarakat internasional tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Hal itu juga berdampak meningkatkan perekonomian bagi usaha kecil menengah.

Banyaknya agenda G20 yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, menumbuhkan aktivitas perdagangan. Tentu saja dampaknya terasa pada meningkatnya perekonomian masyarakat setempat dan pendapatan devisa negara.

Pada saat ini berbagai bidang di Indonesia sudah mulai menyiapkan diri menjelang Presidensi G20 ini. Berbagai bidang mulai menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mendukung terlaksananya G20 agar menumbuhkan kepercayaan dunia mendukung ajakan Indonesia untuk bekerja sama. Upaya ini dilakukan agar Indonesia dan dunia pulih bersama, kuat dalam menghadapi dan mengantisipasi segala masalah atau krisis yang akan terjadi.

Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena momentum ini hanya terjadi lebih dari dua dasawarsa sekali. Oleh

karena itu, momen penting ini harus memberi manfaat bagi Indonesia dalam pemulihan aktivitas ekonomi, kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun internasional. Mari semangat mendukung suksesnya Presidensi G20, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Indonesia dipandang oleh negara-negara di dunia.

* * * * *

44

Kemaslahatan untuk Indonesia sebagai Tuan Rumah G20

Oleh: Zaid, S.T.

Hajatan Presidensi G20 menjadi momen penting bagi Indonesia. Sebagai warga bangsa dan tuan rumah harus membangun citra positif kepada tamu yang datang. Hajatan internasional ini diikuti oleh 19 negara utama dan 1 negara Uni Eropa. Adapun beberapa negara yang tergabung, seperti Argentina, Australia, Italia, Inggris, Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Brazil, Turki, Arab Saudi, Meksiko, Kanada, Jerman, Jepang, India, Prancis, Cina, Amerika, Uni Eropa. Keterlibatan Indonesia masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah dengan pengaruh ekonomi secara sistemik.

Mandat ini diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat mengikuti Presidensi G20 di Roma Italia, 31 Oktober 2021 silam. Presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Presidensi G20 kali ini mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*.

G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki pengaruh dan posisi strategis karena mewakili 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan 85 persen perekonomian dunia. Hal ini tentu memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di masa kini dan akan datang.

Dalam forum KTT G20 akan dibahas berbagai isu-isu aktual. Dibagi menjadi dua topik besar, yaitu *finance track* dan *sherpa*

track. *Finance track* khusus membahas ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter. Sedangkan *Sherpa track* membahas isu ekonomi non keuangan, mulai dari energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, sampai ke perubahan iklim.

KTT G20 2022 adalah kesempatan emas bagi Indonesia. Antrian yang gilirannya 20 tahun sekali harus dijadikan momentum bersejarah. Bagaimana Indonesia memainkan peran dan pengaruhnya di kancah Internasional. Pertumbuhan yang inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama Indonesia di forum G20 mendatang. Upaya tersebut dilakukan Indonesia dengan cara luar biasa melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.

Hal yang paling istimewa, Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam kelompok G20 bersama negara maju lainnya. Sejak 1999, Indonesia mulai bergabung pasca krisis moneter 1997-1998 yang melanda kawasan Asia.

Peran G20 dalam perekonomian global sangat luar biasa. Salah satunya adalah penanganan covid-19. Meskipun covid-19 belum berakhir, tapi sudah mulai berangsur menuju ke arah pemulihan. Hal ini tentu berdampak pada pemulihan ekonomi global. Berdasarkan tema yang diusung *Recover Together dan Recover Stronger*, Indonesia mengajak dunia untuk pulih bersama setelah pandemi Covid-19. Ajang ini menjadi penting bagi Indonesia untuk mendapatkan perhatian dunia. Terutama menyangkut kepercayaan investor baik lokal maupun internasional.

Kemaslahatan Tuan Rumah

Ada banyak maslahat yang akan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah. Pertama, soal kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia. Dipastikan, dampak terselenggaranya kegiatan G20 akan menumbuhkan semangat investasi dari investor. Orang luar akan memandang Indonesia sebagai negara yang bisa menjamin investasi mereka dalam jangka panjang karena dipastikan negara dalam keadaan aman dan stabil.

Kedua, terselenggaranya presidensi G20 akan menumbuhkan

iklim investasi yang sehat. Investasi yang sehat tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Anak bangsa yang sudah selesai mengenyam pendidikan memiliki kesempatan untuk bekerja. Tentu dampaknya akan mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketiga, munculnya daya saing. Tentu seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi tantangan dunia kerja akan berubah. Setiap orang dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya masing-masing. Konsekuensinya setiap personal yang ingin maju harus adaptif dan terus belajar. Perguruan tinggi/ lembaga harus turut saling berpacu menyiapkan dan menakutkan publik bahwa mereka mampu mencetak lulusan yang andal.

Masih banyak kemaslahatan lain yang akan diperoleh oleh Indonesia berkat terselenggaranya presidensi G20. Sudah sepatutnya sebagai warga bangsa apalagi sebagai pranata humas, mari kita gaungkan setiap hari. Indonesia dipandang mampu dan layak menjadi tuan rumah pertemuan G20 yang menakutkan dunia.

Sebagai warga negara yang baik, hajatan yang mengandung sejuta kemaslahatan ini harus senantiasa kita doakan. Kita langitkan doa agar keberlangsungan acara bergengsi ini bisa berjalan sukses. Perlu digerakkan kegiatan doa bersama mulai dari tingkatan RT/ RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat.

Seluruh daerah digerakkan untuk menyelenggarakan doa bersama melalui pemimpin di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai momen penting dan berharga ini kehilangan ruh dan semangat nilai-nilai religiusitas. Kekuatan doa akan menjadi energi pendorong dan penambah semangat untuk semua pihak yang terlibat.

Setelah doa kita langitkan, tinggal bagaimana kita membumikan ikhtiar. Pranata Humas di setiap instansi maupun pemangku kepentingan harus bekerja keras mengglorifikasi kegiatan internasional ini. Mulai dari memasang spanduk, baliho di lokasi strategis, serta memasang iklan di berbagai media yang diterbitkan di instansinya masing-masing.

Tanpa adanya ikhtiar yang kuat, mustahil hajatan besar ini akan diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, harus disampaikan kepada

publik tentang nilai manfaat dari presidensi G20 ini. Oleh karena itu, semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi menyatukan langkah dan menyamakan pandangan untuk menyukkseskan Presidensi G20 di Indonesia.

Mari bersama kita langitkan doa dan membumikan ikhtiar, semoga hajatan besar ini memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Recover Together, Recover Stronger.*

* * * * *

KESEHATAN

Kontribusi Strategis Humas Kesehatan Pada Gelaran G20

Oleh: Aji Muhawarman, ST., MKM.

Sejak Presidensi G20 resmi dipercayakan kepada Indonesia pada 1 Desember 2021, Pemerintah memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif dalam mengatasi krisis akibat COVID-19. Untuk itu Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama untuk Presidensi G20 yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital. Melalui pilar-pilar tersebut, Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital.

Selama lebih dari dua tahun, COVID-19 telah memberikan tekanan besar pada sistem kesehatan global dan berdampak pada kehidupan semua orang. Dalam konsep pertemuan G20, salah satu hal penting dari COVID-19 adalah bahwa arsitektur kesehatan global yang ada tidak sigap dalam menangani pandemi saat ini. Selain itu, masih banyak ketidaksiapan publik mencegah keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan. Oleh karenanya kini waktu yang tepat untuk mengubah arsitektur kesehatan global.

Terdapat perbedaan mencolok dalam kapasitas negara dan wilayah di dunia untuk mencegah, mendeteksi dan merespons ancaman penyakit. Untuk dapat pulih bersama dengan lebih kuat (*recover together; recover stronger*), semua negara harus bersatu untuk memastikan akses yang sama ke pelayanan kesehatan dan

kapasitas untuk menangani krisis kesehatan. Kedua puluh negara harus memastikan berbagi pengetahuan yang luas dan tepat waktu untuk mencegah dan menanggapi setiap ancaman kesehatan masyarakat.

Dalam mendukung tema besar Presidensi G20, sektor kesehatan mengusung tiga isu prioritas yakni: 1) Membangun ketahanan sistem kesehatan global; 2) Menyelaraskan standar protokol kesehatan global; dan 3) Mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan G20 sektor kesehatan, dibutuhkan program komunikasi dan edukasi yang dikelola dengan baik agar efektif, efisien dan didukung banyak pihak. Termasuk dalam mengelola potensi krisis komunikasi yang rentan terjadi dan dapat berdampak pada penerimaan publik.

Memahami Substansi isu

Government Public Relation (GPR)/Humas Pemerintah, sebagai pejabat fungsional maupun entitas di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), memiliki peran besar dalam menyampaikan berbagai informasi tentang G20 sektor kesehatan. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau level internasional. Ini untuk memastikan kelancaran program komunikasi G20 sektor kesehatan sepanjang tahun 2022. Terutama pada masa tantangan komunikasi pemerintah semakin tinggi melalui penyebaran informasi yang masif di berbagai *platform* media, serta tuntutan tinggi dari publik yang mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 di Indonesia.

Sebagai pengolah dan penyampai informasi, hal mendasar yang harus dilakukan oleh Humas adalah memahami substansi isu yang diusung oleh setiap kementerian/lembaga. Di Kemenkes, Humas harus bisa memaknai pentingnya penguatan arsitektur kesehatan global sebagai tema utama beserta tiga isu turunannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada penyelenggaraan pertemuan *1st G20 Health Working Group* yang

diadakan di Yogyakarta pada 28-29 Maret 2022, dinamisnya situasi pandemi global telah mendorong berbagai otoritas kesehatan di setiap negara menerapkan protokol kesehatan yang terus berubah dan berbeda satu sama lain. Hal itu meningkatkan biaya, menambah kerumitan, dan menyebabkan ketidaknyamanan pelaku perjalanan. Maka dari itu, dibutuhkan penyelarasan standar protokol kesehatan global yang memudahkan perjalanan antar negara. Kemudahan ini mencakup pemenuhan persyaratan dan hasil pengujian tes PCR, sertifikat vaksinasi serta pengakuan terhadap aplikasi digital kesehatan masing-masing negara.

Pada tahap pertama, kebijakan ini akan diberlakukan bagi negara anggota G20. Selanjutnya secara bertahap diimplementasikan ke negara lainnya. Penyelarasan ini akan mempermudah perjalanan antar negara saat pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Mengharmonisasi standar protokol kesehatan global itu tidak berarti menyamakan protokol kesehatan. Apabila ada negara yang menerapkan prosesnya masing-masing, tetap diperbolehkan dengan catatan prosedurnya harus jelas, terbuka dan bisa diakses seluruh dunia.

Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kominfo pada kesempatan pelantikan Pengurus Pusat Iprahumas periode 2022-2024 mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia merupakan agenda besar nasional yang menjadi fokus komunikasi publik para GPR. Humas harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk membuktikannya, perlu disiapkan strategi komunikasi khusus. Komunikasi publik yang dilakukan Humas Pemerintah tidak hanya untuk mempromosikan aktivitas pemerintah, melainkan juga mampu mengajak partisipasi publik dalam G20. Penyampaian informasi kepada publik bertujuan antara lain untuk menunjukkan bahwa Kemenkes sebagai pemimpin dalam perumusan penguatan arsitektur kesehatan global. Komunikasi yang dilakukan juga ingin membangun kepercayaan dan dukungan terhadap Presidensi G20 sektor kesehatan. Penting juga untuk meyakinkan bahwa Indonesia siap, mampu, aman dan terdepan dalam menjalankan protokol

kesehatan dan pengendalian COVID-19 selama perhelatan G20.

Menggalang Dukungan

Kelompok audiens mulai dari masyarakat umum, pemda, pihak swasta, media hingga para delegasi/peserta pertemuan yang berasal dari 20 negara menjadi khalayak sasaran. Penjangkauan audiens antara lain mulai dari hal sederhana dalam penyusunan narasi di media luar ruang hingga konten media sosial. Saat penyelenggaraan HWG-1 di Yogyakarta, salam selamat datang bagi para peserta dituliskan dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Jawa. Sebuah cara untuk mendekatkan dengan khalayak yang menjadi tuan rumah.

Begitu juga saat menyiapkan rilis pers dalam sejumlah bahasa asing agar memudahkan jurnalis di luar negeri dapat memahami substansi dan bersedia memuatnya dalam media mereka. Hasilnya, rilis HWG-1 dalam waktu satu minggu sejak didistribusikan ke tiga regional dunia, terdapat 1.115 artikel yang dipublikasikan di berbagai media cetak dan online di puluhan negara, tidak hanya negara anggota G20.

Tantangan lainnya adalah bagaimana menyederhanakan istilah atau konsep diskusi yang disiapkan dalam bahasa asing. Hal ini harus dilakukan dengan tepat, agar tidak menghilangkan substansi sekaligus dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan terkait. Relevansi dan benefit apa yang bisa didapat oleh publik juga harus diperhatikan, supaya masyarakat tergugah untuk terlibat dalam Presidensi G20. Perlu juga mengorkestrasi agenda komunikasi publik di Kemenkes dengan kementerian/lembaga lainnya sehingga menjadi agenda nasional, agar visi utama Presidensi G20 di Indonesia untuk pulih bersama lebih kuat dapat tercapai.

Sebagai pamungkas, menggalang dukungan dan partisipasi seluruh *stakeholder* tak boleh dilupakan. Diplomasi dan advokasi yang dilakukan delegasi Indonesia kepada delegasi dari 19 negara lainnya tidak akan berhasil, apabila tidak ada dukungan dari masyarakat di dalam negeri. Contoh konkritnya adalah rencana standarisasi protokol kesehatan global dalam perjalanan internasional lintas negara. Selain komitmen bilateral dan multilateral, Kementerian Perhubungan,

Ditjen Imigrasi dan PT. Angkasa Pura selaku pengelola bandara juga harus menyumbangkan perannya. Dukungan politik dan anggaran juga perlu diberikan oleh lembaga legislatif. Begitu juga pers yang dengan bertanggung jawab membantu pemerintah menggaungkan G20 ke seantero nusantara. Dengan begitu G20 tak hanya sekadar seremonial saja, tetapi memberikan kemaslahatan bagi seluruh komponen bangsa. Misi tersebut mustahil tercapai tanpa komunikasi publik yang baik dari GPR.

* * * * *

Harmonisasi Protokol Kesehatan Global di Presidensi G20 Indonesia

Oleh Andi Rahmawati, SKM., MKM

Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan terdapat tiga isu kesehatan yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. Pertama, bagaimana membangun *resilience* dari sistem kesehatan dunia. Kedua, menetapkan standar protokol kesehatan global dan ketiga tentang alih teknologi.

Presidensi G20 mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*. Pesan ini merupakan ajakan bagi seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022.

Harmonisasi pedoman protokol kesehatan global menjadi hal yang akan diupayakan guna menyamakan standar protokol kesehatan di dunia. Hal ini sangat penting mengingat kondisi pandemi Covid-19 di seluruh dunia masih mengalami ketidakstabilan. Belum satupun negara di dunia ini yang mampu menangkal secara masif penyebaran Covid-19.

Ironisnya, masih terlihat masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan saat aktifitas di luar rumah. Sudah banyak peringatan yang disampaikan melalui berbagai media namun masih tidak diindahkan. Serangan Covid-19 semakin tidak terkendali

apalagi jelang hari raya besar. Varian baru Covid-19 bermunculan walaupun varian lama masih terus menginfeksi manusia.

Integrasi Data Pengawasan Kesehatan Setiap Negara

Salah satu bahasan dalam G20 adalah integrasi data pengawasan kesehatan di setiap negara melalui berbagi pakai data. Aplikasi yang digunakan oleh Indonesia dalam melakukan pengawasan kesehatan adalah aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini akan diintegrasikan dengan aplikasi negara lain. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penggunaannya saat berada di negara lain.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah Indonesia akan menjadi inisiator, mengajak negara-negara lain untuk membuat satu integrasi data mengenai protokol kesehatan di pintu masuk negara.

Rencana tersebut akan bermanfaat menangkal penyebaran Covid-19 melalui informasi data dari setiap perpindahan manusia ke wilayah di seluruh dunia. Selama ini masih sangat sulit mendeteksi rekam jejak setiap pendatang yang berasal dari negara lain. Belum ada fasilitas yang dapat mendukung pengawasan terkait riwayat kesehatan yang bersangkutan.

“Indonesia akan mendorong inisiatif panduan teknis perjalanan internasional berbasis pendekatan risiko bersama WHO, harmonisasi sertifikat vaksin COVID-19 bersama Digital European Union, serta panduan perjalanan udara bersama dengan Internasional Civilization Organization,” tutur Siti Nadia Tarmizi. Ajakan integrasi ini akan bermanfaat dalam memperkuat sistem kesehatan global sebagai tindak lanjut mekanisme pendanaan respons kesiapsiagaan pandemi yang sebelumnya menjadi bagian pembahasan pada presidensi G20 di Itali 2021.

Saat pembahasan harmonisasi protokol kesehatan global, diharapkan negara-negara G20 mendorong proses digitalisasi untuk saling memberi pengakuan vaksinasi dan sertifikat vaksin Covid-19 di pintu masuk di berbagai negara. Perlu dukungan infrastruktur yang memadai bagi negara berkembang dalam menyelaraskan versi

digital dokumen kesehatan.

Mengenai aturan protokol kesehatan di setiap negara tentunya ada perbedaan. Tiap negara perlu diberi kebebasan dalam penerapannya. Namun harus diatur kejelasan prosedurnya seperti apa, harus ada keterbukaan dan mudah diakses seluruh dunia.

PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Aplikasi ini mengandalkan kepedulian serta partisipasi masyarakat untuk saling jaga dan meminimalisir resiko penyebaran COVID-19.

Aplikasi Itu ditujukan untuk melakukan pengawasan lokasi padat dan ramai yang memiliki resiko tinggi. Nantinya bermanfaat dalam menelusuri riwayat Covid-19 (*contact tracing*). Aplikasi akan mengidentifikasi status riwayat kontak atau kasus Covid-19 pengguna serta informasi status vaksinasinya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung program penghentian penyebaran COVID-19 yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Indonesia menggarisbawahi pentingnya kerja sama global untuk mengatasi pandemi saat ini dan mempersiapkannya di masa depan.

Ada 5 aplikasi dari negara lain yang mirip dengan PeduliLindungi, antara lain *Trace Together* milik Singapura, *The Alipay Health Code* milik China, *Aarogya Setu* milik India, *COVIDSafe* milik Australia dan *Tawakkalna* yang dimiliki Arab Saudi. Aplikasi serupa PeduliLindungi ini nantinya diintegrasikan. Adanya harmonisasi standar protokol kesehatan global melalui integrasi data pengawasan kesehatan bernilai penting mendorong mobilitas masyarakat di seluruh dunia hingga kembali dapat menggerakkan roda perekonomian dunia.

Harmonisasi protokol kesehatan (prokes) menjadi sangat penting untuk dibahas karena selama ini banyak terjadi permasalahan yang dialami pelaku perjalanan internasional. Adanya perbedaan peraturan dalam tiap negara menyebabkan kesulitan. Saat ini, belum ada kesepakatan yang dilakukan dalam menyamakan standar prokes.

Selain itu belum ada aplikasi terintegrasi mendukung dan memberikan kemudahan untuk memenuhi persyaratan dalam perjalanan internasional. Pengakuan vaksinasi dan sertifikasi vaksin

dari negara tujuan menjadi hal yang sangat penting untuk kemudahan perjalanan. Kebingungan dalam menggunakan aplikasi negara tujuan dapat pula menjadi kendala.

Perlu disepakati standardisasi protokol kesehatan global yang sederhana, mudah dan sama di seluruh dunia. Momen G20 ini harus dimanfaatkan karena sangat strategis dalam membuat kesepakatan antar negara-negara G20. Hal ini dapat memudahkan pelaku perjalanan internasional, namun tetap aman dan tertib.

Kesepakatan negara-negara G20 terkait harmonisasi standar prokes global diharapkan dapat menjawab masalah tersebut. Hasil pertemuan itu bisa menjadi momentum penataan standar prokes global yang seragam.

* * * * *

Agenda Utama G20, Membangun Arsitektur Kesehatan Global

Oleh: Fachrudin Ali Ahmad, S.Sos., MKM.

2022 masih menjadi tahun perjuangan Indonesia melawan serangan Covid-19. Bukan hanya Indonesia, dunia lakukan hal serupa. Data *World Health Organization* (WHO) 23 Maret 2022 ada 229 negara mengalami pandemi Covid-19 dengan kasus 472.816.516 terkonfirmasi Covid-19 dan meninggal dunia 6.099.380 jiwa. Indonesia hingga 23 Maret 2022 memiliki kasus positif 5.981.022 dan meninggal dunia 154.221.

Tingginya kasus Covid-19 secara global menurut *Representative of C20 Working Group Vaccine Access and Global Health* Lutfiyah Hanim (Bisnis.com, 8 Maret 2022) disebabkan negara maju memiliki capaian vaksinasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Kawasan Eropa dan Amerika Utara memiliki tingkat vaksinasi yang jauh lebih tinggi dari kawasan Afrika. Ini menunjukkan gambaran ketidaksetaraan dalam memperoleh akses kesehatan global.

Uni Eropa memiliki lebih banyak vaksin daripada yang sebenarnya mereka butuhkan. Total stok vaksin Covid-19 di kawasan itu setara dengan 3,5 dosis vaksin bagi setiap orang. Amerika Serikat memiliki stok vaksin setara dengan 3,7 dosis vaksin per orang. Bandingkan di Uni Afrika yang hanya memiliki cakupan 0,2 dosis. Kondisi ini belum dapat menjangkau 1 vaksin untuk 1 orang.

Selain itu, ada kurang lebih 45 negara yang cakupan vaksin dosis pertamanya masih di bawah 30 persen. Beberapa negara bahkan masih di bawah 10 persen.

Ketimpangan akses terhadap vaksin maupun pemenuhan kebutuhan medis bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum menjadi persoalan serius dalam upaya global menangani pandemi Covid-19. Forum Presidensi G20 Indonesia dibutuhkan untuk menjembatani secara struktural berbagai perbedaan.

Indonesia, pada 2022 memegang keketuaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Perhelatan acara internasional ini mengusung tema '*Recover Together, Recover Stronger*'. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Salah satu urgensi pertemuan G20 adalah untuk membahas sektor kesehatan. Agenda utama pembahasan adalah tentang memperkuat arsitektur kesehatan global (*Restructuring the Global Health Architecture*). Tiga sub agenda terdiri dari *building global health system resilience* (membangun ketahanan sistem kesehatan global). Kemudian, *harmonizing global health protocol standards* (menyelaraskan standar protokol kesehatan global) dan *expanding global manufacturing and knowledge hubs for pandemic prevention, preparedness, and response* (mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi).

Permasalahan Global dan Dukungan yang Solutif

Vaksinasi masih menjadi kunci penting menyelesaikan permasalahan kesehatan secara global. Adanya varian baru Covid-19 salah satunya disebabkan belum meratanya vaksinasi di seluruh dunia. Virus selalu bermutasi dan mengembangkan dirinya menjadi lebih ganas dan menyebar ke berbagai belahan dunia.

Pembatasan negara terbukti tidak mampu menghentikan penyebaran virus Covid-19 secara global. Selalu hampir terjadi, varian baru Covid-19 menyebabkan ledakan dan lonjakan kasus di

seluruh dunia. Termasuk kelumpuhan ekonomi dan sosial di sebagian besar negara.

Peran Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 harus dioptimalkan untuk menyuarakan persoalan ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam sistem kesehatan dunia. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan G20 untuk mendukung dan memulihkan aktivitas perekonomian Indonesia dan dunia. Orkestrasi tersebut juga sebuah upaya meningkatkan ketahanan dan keadilan sektor kesehatan global secara resmi.

Dukungan yang solutif pun hadir melalui pertemuan antar negara yang tergabung di G20. Dukungan bagi masyarakat yang mengalami ketimpangan dan kesulitan akses global menjadi sangat diperlukan. Komunikasi lintas negara yang menyuarakan kesetaraan dan akses kesehatan global yang adil perlu dibangun dan dinarasikan secara efektif.

Dukungan Pranata Humas tidak kalah penting, sebagai Humas Pemerintah bergerak bersama yang menyuarakan satu narasi menggelorakan isu ini. Butuh sinergitas dan upaya komunikasi yang serentak dan serempak menyuarakan isu pemerataan kesehatan global.

Bersinergi dengan tujuannya sama, yakni mendukung Indonesia mewujudkan kesetaraan dan keadilan memperoleh akses kesehatan masyarakat. Kondisi ini menumbuhkan harapan mencapai kesejahteraan dan ketahanan dunia. Hal tersebut sesuai amanat dari tujuan pembangunan dunia yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Melalui berbagai pendekatan komunikasi, Pranata Humas dapat mengeksplorasi keunggulan ini sebagai media menyuarakan narasi kesehatan yang menarik perhatian masyarakat dunia. Semisal memanfaatkan seni wayang untuk menceritakan adanya ketidakadilan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan.

Selain lewat keunggulan budaya, suarakan keadilan kesehatan lewat cerita bertutur yang disajikan dalam bahasa dan media yang dimengerti negara-negara di dunia seperti komik atau video yang menyentuh jiwa dan rasa peserta G20.

Ini bukan pekerjaan mudah. Namun bisa diraih dengan kolaborasi insan Pranata Humas Indonesia untuk bersuara lantang dan berkreasi bersama menyuarakan isu kesehatan yang berdampak besar bagi dunia dan Indonesia. Tidak hanya masa kini namun juga untuk masa depan.

* * * * *

4

Menyusun *Agenda Setting* Isu Kesehatan Global

Oleh: Faza Nur Wulandari, S.I.Kom.

Pandemi Covid-19 telah menyerang puluhan negara di dunia. Hingga 7 September 2022, virus SARS-CoV-2 ini telah memakan korban sebanyak 606 juta jiwa positif Covid-19. Virus pun bermutasi terus menerus mulai dari alpha, beta, delta, dan kini omicron. Tak hanya itu, bahkan dunia kini dihampiri berbagai macam wabah penyakit. Seperti cacar monyet, hepatitis akut, dan kini mulai ditemui pneumonia misterius yang terjadi di Argentina.

Menghadapi hal tersebut, negara-negara di dunia yang tergabung dalam G20 bersepakat membangun arsitektur kesehatan global menjadi agenda utama. Dalam Presidensi G20 di Indonesia, kesehatan global merupakan isu kesehatan yang melintasi perbatasan negara atau berdampak global secara politik dan ekonomi. Isu kesejatan juga sering menjadi perhatian utama publik dan memengaruhi sistem kesehatan nasional. Pandemi Covid-19 adalah salah satu contoh nyata pada isu kesehatan global.

Dalam penyelenggaraan G20, ada tiga fokus isu prioritas untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. *Pertama*, membangun sistem kesehatan global. *Kedua*, harmonisasi standar protokol kesehatan global. *Ketiga*, mengembangkan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap risiko kesehatan yang akan datang. Presidensi G20 diharapkan menjadi momentum untuk bisa bangkit lebih kuat pascapandemi Covid-19.

Momentum Presidensi G20 ini harus dimanfaatkan betul dalam menyusun *agenda setting* isu kesehatan global. Sayangnya, isu kesehatan global belum menarik perhatian masyarakat. Hal tersebut diketahui berdasarkan pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Humas Kementerian Kesehatan dalam tiga bulan, yaitu Juni hingga Agustus 2022. Hasil pemantauan media tersebut menunjukkan pemberitaan mengenai isu kesehatan dalam Presidensi G20 hanya terdata sejumlah 175 berita. Hal ini menunjukkan perlunya penyusunan *agenda setting* agar isu lebih marak di masyarakat.

Bernard C. Cohen mendefinisikan teori agenda setting bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran, yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian public pada isu yang dianggap penting oleh media massa (Elfi Yanti Ritonga, 2018).

Pendapat lain dari Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss mengenai teori agenda setting adalah bahwa media membentuk gambaran atau isu penting dalam pikiran, karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Selanjutnya, Littlejohn dan Karen A. Foss mengungkapkan bahwa saluran berita sebagai penjaga gerbang (*gatekeeping*) informasi dapat membuat pilihan tentang apa dan bagaimana yang harus dilaporkan.

Jauh lebih penting lagi proses *agenda setting* juga dapat digunakan untuk mengagendakan kebijakan kesehatan secara global. Menurut Dearing dan Rogers (1996) Proses *agenda setting* dalam kompetisi berkelanjutan antara pendukung isu untuk mendapatkan perhatian professional media, publik, dan elit kebijakan. Dengan begitu banyaknya isu kebijakan, jika tidak masuk dalam agenda pembuat kebijakan, maka isu itu hanya akan menguap begitu saja.

Salah satu isu kesehatan global yang dicanangkan dalam Presidensi G20 adalah disparitas fasilitas kesehatan. Pada masa pandemik Covid-19 ini memperlihatkan kesenjangan fasilitas kesehatan dari negara-negara dalam pemeriksaan *genomic sequencing*. Padahal laboratorium untuk pemeriksaan genom sangat penting untuk mendeteksi dan menemukan varian-varian virus baru. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai di tiap negara

akan meningkatkan ketahanan kesehatan secara global.

Dalam *agenda setting* isu kesehatan global yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan pada *Health Working Group* ketiga terdapat beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah Indonesia ingin mengembangkan Pusat Riset Genomik di Bali.

Pengalaman penyelenggaraan *Health Working Group* ini seolah membuktikan bahwa *agenda setting* bagi suatu institusi merupakan upaya penting untuk memengaruhi publik dengan menentukan media yang ingin digunakan. *Agenda setting* melalui media massa juga dapat digunakan untuk meningkatkan *public awareness*.

Media Monitoring

Setelah menyusun *agenda setting*, Langkah yang perlu dilakukan adalah menjalankan manajemen isu publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan media monitoring. Langkah ini biasa dikenal juga dengan istilah pemantauan media. Media monitoring biasanya berupa pemantauan opini publik baik dari pemberitaan media massa ataupun di media sosial. Melalui media monitoring dapat disusun strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan opini publik mengenai kesehatan global. Tentunya dengan membuat *agenda setting* yang tepat, akan memudahkan memasifkan isu kesehatan global.

Pemberitaan tentang ketiga isu prioritas kesehatan global ini tentunya memerlukan *exposure* di media massa. Untuk itulah sebagai Humas Kesehatan harus antisipatif dan proaktif. Memerlukan kepekaan keadaan yang berkembang, setiap hari monitor berita media konvensional dan media sosial. Salah satu metode yang digunakan *agenda setting* dalam manajemen isu dengan menggunakan media monitoring.

Menurut Aji Muhawarman Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi Kementerian Kesehatan, terdapat enam hal mengapa instansi perlu melakukan media monitoring. Pertama, untuk mendapatkan gambaran isu nasional. Kedua, sebagai masukan bagi prioritas penanganan program. Ketiga, sebagai bahan riset bagi pemangku kepentingan. Keempat, pengelolaan konten media secara harian dan cepat. Kelima, untuk evaluasi efektivitas hubungan dengan media.

Dan keenam, untuk mendukung kebutuhan memengaruhi publik.

Melalui media monitoring kita dapat mendeteksi, melakukan pencegahan, dan merespon suatu isu. Untuk mengetahui pembicaraan kesehatan di media massa, perlu mendapatkan deteksi isu di masyarakat. Pendeteksian isu-isu yang terjadi di masyarakat dapat mencegah agar isu tidak berkembang. Sehingga kita dapat merespons dengan cepat, membuat analisis dan merekomendasikan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi isu yang menjadi krisis.

Penanganan pada isu tidak hanya kontra narasi, namun juga untuk mengedukasi masyarakat. Bila isu negatif menjadi penanda pertama untuk kita. Penanganan isu dimulai dari hulu ke hilir. Hulu, kepada masyarakat untuk mengedukasi. Tengah melakukan kontra narasi. Sedangkan dihilir, yang membuat hoaks dilakukan tindakan tegas pada pelaku.

Upaya ini menunjukkan bahwa tujuan melakukan manajemen isu dapat dilihat secara eksternal dan internal. Bila isu diabaikan yang datangnya eksternal akan ada penurunan reputasi. Begitu pun sisi internal, tentu ada gangguan pelaksanaan organisasi. Dengan adanya media monitoring, isu dapat diatasi lebih dini. Pada akhirnya, diharapkan penyusunan agenda setting isu kesehatan global dapat dilakukan dan terkontrol dengan tepat.

* * * * *

G20 Ajang Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat

Oleh: Fentin Andriyani, SE. MM.

Kesehatan adalah keadaan yang selaras dengan tubuh, pikiran, dan jiwa. Kesehatan merupakan anugerah terbesar dan nikmat utama dalam menjalani kehidupan. Jika kondisi tubuh sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lancar. Kondisi tubuh yang sehat juga akan membuat hati menjadi senang dan bahagia. Peduli kesehatan merupakan tantangan besar dalam hidup.

Masa Pandemi Covid 19 yang melanda dunia lebih kurang dua tahun ini menghasilkan dampak yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Khususnya terhadap kesehatan mental secara global, banyak masyarakat yang panik. Mereka tidak paham dan tidak siap menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi.

Perawatan medis yang tertunda, kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, harus bekerja dari rumah, melakukan isolasi, perubahan rutinitas selama pandemi yang harus patuh mengikuti protokol kesehatan, dan pembatasan aktivitas menjadi faktor penyebab meningkatnya stres, depresi, kecemasan, hingga akhirnya memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan. Berbagai peristiwa tersebut menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk penduduk dunia, khususnya penduduk Indonesia.

Masalah Kesehatan menjadi salah satu dari tiga isu strategis

Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Penanganan kesehatan yang inklusif juga disampaikan oleh Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr.Yudhi Wibowo (2022). Indonesia yang didaulat secara resmi memegang G20 dan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai dari 1 Desember 2021 hingga November 2022, jelas punya peran amat besar, untuk memperkuat peran Indonesia dalam *kesehatan global*, karena pada saat ini tantangan kesehatan menjadi isu prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama bangsa-bangsa di dunia. Momentum terbaik untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang sehat.

Pengalaman dua tahun masa pandemi, mau tidak mau menuntut masyarakat untuk lebih siap dan lebih peduli dengan kesehatannya. Kondisi ini sangat membutuhkan dukungan dan sentuhan langsung dari pemerintah. Semua ini bukan pekerjaan mudah, mengingat masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau dengan latar belakang yang beraneka ragam.

Masyarakat pada umumnya belum tentu tanggap mengenai kesehatan dan tidak akan sama kesempatannya dalam memperoleh kemudahan layanan kesehatan. Terlebih lagi, masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan akan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Bahkan, secara langsung kondisi ini telah berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.

Mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger* atau pulih bersama dan pulih lebih kuat, pertemuan G20 menjadi ajang penting. Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia khususnya masalah kesehatan. Pemerintah Indonesia harus lebih peduli dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan dan meningkatkan layanan kesehatan dengan lebih baik.

Untuk mencapai kesehatan yang maksimal dalam mengantisipasi dampak pandemi berikutnya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Peluang besar Indonesia untuk

mengembangkan inovasi pada dunia kesehatan sudah ada. Antara lain, mengusulkan penambahan fasilitas dan alat-alat kesehatan, didukung tenaga kesehatan profesional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain fasilitas kesehatan, pemerintah dapat menyelenggarakan program-program kesehatan. Tujuannya, peningkatan edukasi kesehatan berkelanjutan kepada masyarakat, antara lain dengan memberikan fasilitas konsultasi kesehatan. Beberapa masalah yang terbuka untuk dikonsultasikan antara lain tentang kesehatan keluarga, pelayanan gizi yang baik, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, wawasan tentang penyakit kronis, jenis penyakit tidak menular dan menular, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menjadi siap dan tanggap terhadap kesehatannya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tentunya akan tercapai kesehatan yang maksimal.

Mengutip kata-kata Menkes “Jika anda ingin melangkah cepat, anda bisa melangkah sendiri. Namun jika anda ingin melangkah jauh maka anda perlu melangkah bersama-sama. *If you want to go fast, you can go alone but if you want to go far then you need to go together.*”

Harapannya, melalui Presidensi G20, berkolaborasi bersama negara-negara anggota lainnya, Indonesia dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia sehat, dengan langkah-langkah serta terobosan yang lebih kuat dan konkret dalam arsitektur kesehatan dunia.

Kepercayaan global untuk Indonesia ini, patut kita syukuri dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dengan harapan menghasilkan rekomendasi, komitmen dan membawa kebaikan bagi Indonesia dan dunia.

* * * * *

Presidensi G20 dan Kebalnya Pertanian Indonesia di Tengah Pandemi

Oleh: Hairil Anwar, SP.

SEKTOR pertanian terbukti menjadi salah satu penyangga ekonomi Indonesia ketika pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Tatkala sektor lain tumbuh melambat bahkan cenderung menurun, namun di saat yang sama sektor pertanian justru menunjukkan kinerja positif. Tak cuma produksi yang meningkat, jumlah ekspor hingga kesejahteraan petani juga ikut terungkit. Capaian kinerja yang luar biasa itu turut memengaruhi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian negeri ini secara signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian berada pada urutan ketiga penyumbang PDB setelah sektor industri dan perdagangan. Sementara sektor pertambangan berada pada posisi keempat. Hingga triwulan kedua 2021 sektor pertanian berkontribusi sebesar 14,27 persen terhadap PDB nasional. Capaian tersebut merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pengolahan, yakni sebesar 19,29 persen. Sementara pada triwulan empat 2021, BPS mencatat PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 2,28 persen secara *year on year* (yoy).

Indonesia resmi menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Group of Twenty* (G20). Berbagai pertemuan tingkat kementerian dan lembaga telah dilakukan sejak Presidensi G20 resmi beralih dari Italia ke Indonesia, 31 Oktober 2021. Setidaknya ada sekitar 150 pertemuan yang akan digelar sepanjang

tahun ini hingga kedatangan para pemimpin negara pada puncak KTT G20 di Bali November 2022.

G20 bukan sekadar tempat berhimpunnya negara–negara tertentu. Forum kerjasama multilateral yang dibentuk tahun 1999 itu merupakan wadah penting dalam menentukan masa depan dunia. Tidak banyak negara yang bisa bergabung di dalamnya. Ada sejumlah hal yang dipersyaratkan suatu negara bisa masuk G20, di antaranya besaran PDB dan sumbangsih PDB negara tersebut terhadap ekonomi dunia. Oleh sebab itu hanya negara tertentu yang dapat menjadi bagian dari G20. Bahkan negara maju sekelas Singapura tidak diperkenankan bergabung karena kontribusi ekonomi negeri singa itu terhadap dunia masih jauh dari yang dipersyaratkan.

Bergabungnya Indonesia di G20 karena telah memenuhi persyaratan. Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi bagian dari G20 bersama Amerika Serikat, Rusia, Perancis dan Jepang. Selain itu ada Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Turki, Tiongkok dan Uni Eropa.

Sejauh ini kerja sektor pertanian tidak pernah minus bahkan terus tumbuh meski pandemi sedang mewabah. Sebagai salah satu penyumbang PDB, sektor pertanian menjadi salah satu andalan penyangga ekonomi bangsa. Ketika sektor lain lesu akibat pandemi, pertanian malah bangkit. Akhir 2021, Kementerian Pertanian bisa melepas ekspor sejumlah komoditas senilai Rp 14,4 triliun ke luar negeri. Ekspor tersebut melibatkan 34 provinsi yang dilakukan serentak dari pelabuhan masing-masing daerah. Komoditas yang diekspor ke berbagai negara tersebut meliputi buah manggis, pisang, kapulaga, kunyit, jagung, dan tapioka. Selain itu ada juga sawit, kelapa bulat, kopi, babi potong, daging, serangga hidup, kacang hijau, dan produk hortikultura lainnya.

Sebelumnya pada Agustus 2021, Kementerian Pertanian mengirim sejumlah produk pertanian ke luar negeri melalui kegiatan Merdeka Ekspor. Presiden Joko Widodo berkesempatan melepas langsung ekspor tersebut. Kegiatan ekspor dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia berjumlah 627.399

ton. Jumlah tersebut meliputi komoditas perkebunan sebesar 564.550 ton, tanaman pangan 4.277 ton, hortikultura 7.230 ton, dan peternakan 4.013 ton. Setidaknya Rp 7,29 triliun devisa negara diperkirakan masuk melalui ekspor tersebut.

Sektor pertanian negeri ini sepertinya terlalu kebal untuk digerogoti wabah pandemi Covid-19. Ketika bangsa lain kesulitan menghadapi serangan virus mematikan ini, petani di Indonesia justru tak bergeming. Pendapatan malah naik. Hal ini tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang terus menanjak setiap bulan. Desember 2021 misalnya, NTP nasional mencapai 108,34 atau naik 1,08 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Teranyar NTP nasional Februari 2022 sebesar 108,83 atau naik 0,15 persen dibanding NTP bulan Januari 2022.

Menurut BPS, kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,26 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,11 persen. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

KTT G20 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk membangun sektor pertanian. Kerja sama dapat dijejaki lewat forum tersebut untuk mendorong investasi di sektor ini. Banyak hal bisa ditawarkan kepada negara yang tergabung dalam forum G20. Selain investasi, kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani juga sangat penting dilakukan untuk mendorong terciptanya kekuatan ketahanan pangan global. Kerja sama itu diharapkan dapat menjadi puncak bagi ketangguhan pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

* * * * *

RSUP Persahabatan, Rumah Sakit Rujukan Presidensi G20

Oleh: Ifa Nurul Utami, S.Sos.

G20 atau *Group of Twenty* merupakan forum kerja sama multilateral yang beranggotakan sembilan belas negara dan satu kawasan Uni Eropa. Forum G20 bakal membahas tiga isu prioritas. Pertama, pembangunan sistem ketahanan kesehatan global. Kedua, harmonisasi standar protokol kesehatan global. Ketiga, pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang.

Indonesia berupaya semua bidang persoalan bisa ada jalan keluarnya dalam kapasitasnya sebagai Presidensi G20. Termasuk dalam bidang kesehatan yang kini menjadi isu penting di saat dunia tengah menghadapi upaya keluar dari pandemi Covid-19.

Sejak 1 Desember 2021, Indonesia berperan sebagai tuan rumah sekaligus keketuaan G20. Tema Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 adalah *Recover Together, Recover Stronger*. Indonesia ingin mengajak seluruh dunia saling bahu-membahu, mendukung untuk pulih bersama, tumbuh lebih kuat, dan berkelanjutan, menghadapi pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negeri.

Kementerian Kesehatan telah melakukan persiapan menyeluruh tidak hanya untuk G20, tetapi juga menangani pandemi COVID-19. Terdapat 150 kegiatan yang akan diselenggarakan di Indonesia sebagai rangkaian kegiatan G20. Di antaranya pertemuan *2nd FCBD (Finance and Central Bank Deputy)* dan *1st FMCBG (Finance*

Minister Central Bank Governor). Kedua pertemuan tersebut berlangsung di Gedung *Jakarta Convention Center* (JCC) dan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Aspek keselamatan para anggota dan delegasi sangat diperhatikan. Kementerian Kesehatan melakukan persiapan protokol kesehatan dengan menunjuk rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan merupakan salah satunya.

Rumah Sakit Rujukan

RSUP Persahabatan yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta ini merupakan rumah sakit pusat respirasi nasional. Fasilitas kesehatan di RSUP Persahabatan lengkap dengan 408 tempat tidur di rawat inap.

Berbagai layanan tersedia, di antaranya gawat darurat dan kamar bedah sentral. Poliklinik rawat jalannya juga lengkap, yaitu mulai dari klinik paru, asma, penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, gangguan tidur, kesehatan anak, gigi dan mulut, kulit dan kelamin, jiwa, hingga Covid-19 saat Covid-19 mewabah di seluruh dunia.

Berbagai alat kesehatan canggih di RSUP Persahabatan dimanfaatkan untuk radiologi, radioterapi, MRI, dan CT simulator. Di instalasi perawatan intensif terdapat alat ECMO dan CRRT.

Instalasi Bedah Sentral di RSUP Persahabatan dapat melakukan tindakan pembedahan baik terencana maupun darurat. Dengan dukungan tenaga terlatih, kompeten, dan berpengalaman, rumah sakit ini memberikan pelayanan prima terhadap pasien delegasi G20 yang dirujuk ke RSUP Persahabatan.

Laboratorium Terpadu RSUP Persahabatan sebagai rumah sakit rujukan respirasi memiliki pemeriksaan GenExpert TB. Berbagai layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit ini juga telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, RSUP Persahabatan seringkali menjadi tempat studi banding.

Beberapa layanan tersedia, yaitu kedokteran okupasi,

pemeriksaan diagnostik terpadu, *one stop service medical checkup*, hemodialisa, kemoterapi, radioterapi, serta penunjang medik dan non medik.

Pada 2019, predikat rumah sakit dengan sertifikasi *Joint Commission International* dan KARS Internasional diraihinya. Pada 2017, RSUP Persahabatan mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015

Maka tidak mengherankan jika Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menunjuk RSUP Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit rujukan, untuk agenda dua pertemuan penting di JCC dan GBK.

RSUP Persahabatan memberikan layanan berupa kesiapan Tim kesehatan. Selain itu pada tanggal 18 Februari 2022. telah bekerja sama dengan Ambulan Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, RSUP Persahabatan mengutus Tim Klinik dan Gawat Darurat G20 yang terdiri dari 2 (dua) dokter spesialis anestesi dan seorang terapi intensif, 2 (dua) dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, 2 (dua) dokter umum, serta 2 (dua) perawat dan seorang supir ambulan.

Selain itu telah disiapkan pula 2 (dua) dokter spesialis penyakit dalam yang bersiaga dan bertugas pada 15-18 Februari 2022, selama 24 jam, dikarenakan RSUP Persahabatan juga ditunjuk sebagai tim dokter *Telemedicine Chat WhatsApp* untuk para delegasi organisasi internasional yang hadir pada acara Presidensi G20 Indonesia dengan total delegasi berjumlah 169 peserta.

RSUP Persahabatan juga menyiapkan alur penerimaan rujukan kasus Covid-19 dan NonCovid-19 untuk kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Sehingga siap apabila ada delegasi G20 yang sewaktu-waktu dirujuk ke RSUP Persahabatan.

Alur penerimaan terbagi dua menjadi alur penerimaan kasus Non Covid-19 dan kasus Covid-19. Alur penerimaan kasus Non Covid-19 dapat dilakukan di Klinik 24 jam, Ruang Edelweiss. Sementara, untuk kasus Covid-19 diterima di Rawat Inap Pinere. Fasilitas penyiapan Ruang Rawat Inap Isolasi Covid-19 disiapkan dengan fasilitas 4 (empat) tempat tidur di *Respiratory Intensive Care*

Unit (RICU).

Selain itu juga disiapkan Ruang Rawat Inap Intensive Covid-19 dengan satu tempat tidur di RICU, dan Ruang Super VIP tersedia 2 (dua) tempat tidur di Griya Puspa. RSUP Persahabatan siap menerima rujukan kasus *Primary Percutaneous Coronary Intervention* di Unit *Cath Lab* Griya Puspa. Persiapan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan para delegasi serta kelancaran rangkaian acara Presidensi G20.

Penunjukkan RSUP Persahabatan sebagai rumah sakit rujukan ini dimaknai sebagai kepercayaan pemerintah pusat sekaligus menjadi suatu kehormatan. Kesempatan ini juga berhasil menyemangati *civitas hospitalia* RSUP Persahabatan yang turut bangga melayani kebutuhan kesehatan para delegasi, sesuai mottonya ‘Melayani secara Bersahabat’.

* * * * *

Membangun Resiliensi terhadap Pandemi Mulai dari Pekarangan

Oleh: Munawar Khalil N.

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kesehatan. Banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif termasuk Indonesia. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Meskipun mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2021 sebesar 3,69%. Hal ini masih di bawah angka pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,02% di tahun 2019.

Perlambatan ekonomi terjadi karena pembatasan sosial dan fisik mengurangi kemampuan individu dan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan. Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 harus melakukan karantina dan berpengaruh pada kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya bagi yang bekerja di sektor informal maupun pelaku usaha yang banyak menutup usahanya atau pekerjaannya dirumahkan.

Hal ini juga merambah sisi psikologis masyarakat. Pandemi menimbulkan kecemasan, kesedihan karena kehilangan keluarga, hingga ekonomi yang melemah memberikan pukulan yang berat. Salah satu survei kesehatan mental masyarakat Indonesia (Kompas 2021) menunjukkan 72% partisipan di 33 provinsi mengalami kecemasan dan 23% mengaku tidak bahagia.

Masyarakat perlu membangun resiliensi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Resiliensi dimaknai sebagai bentuk

daya tahan psikis dalam menghadapi sesuatu yang mengguncang seperti kesulitan, trauma, bencana hingga pandemi.

Pekarangan Rumah Sumber Pangan

Salah satu upaya membangun resiliensi di tengah pandemi dengan mengoptimalkan pekarangan di rumah. Pekarangan merupakan sebidang tanah yang ada di sekitar rumah. Pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan rumah tangga, sumber tanaman obat, dan sarana rekreatif bagi keluarga.

Pekarangan di kawasan perkotaan relatif lebih sempit dibandingkan di perdesaan. Seiring perkembangan teknologi, pertanian di lahan sempit dapat menggunakan berbagai model bertanam yang dapat diterapkan di pekarangan luas maupun sempit. Sebut saja hidroponik, pot, tanaman dinding (*wallgardening*), hingga teknik berkebun memanfaatkan atap rumah (*rooftop gardening*).

Berbagai komoditas pangan dapat ditanam di pekarangan, seperti kangkung, bayam, sawi, pakcoy, dan cabai. Di pekarangan juga dapat ditanami aneka pangan sumber karbohidrat seperti pisang, ubi kayu dan ubi jalar.

Dorongan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan pekarangan sudah dilakukan sejak tahun 2009 melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini menyasar kelompok wanita tani baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menariknya, program ini diterapkan pada daerah miskin atau rentan pangan hingga daerah prioritas *stunting* yang ditetapkan pemerintah. Seiring dengan merebaknya pandemi, Kementan meningkatkan fokus pemanfaatan pekarangan ini melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebagai keberlanjutan KRPL dan Pertanian Keluarga (PK).

Menghasilkan pangan bagi keluarga dari pekarangan memiliki manfaat ganda. Pertama, sumber pangan dari pekarangan memenuhi asupan pangan setiap anggota keluarga. Pangan yang beragam dan bergizi adalah senjata bagi imunitas tubuh. Kedua, pengeluaran rumah tangga untuk membeli pangan dapat dihemat karena tidak

perlu membeli ke pasar.

Berdasarkan data observasi, beberapa kelompok wanita tani di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan telah memanfaatkan pekarangan. Mereka mengakui dapat menghemat pengeluaran rumah tangga 20% - 30%. Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa program pemanfaatan pekarangan ini mampu meningkatkan keragaman konsumsi pangan, mengurangi pengeluaran rumah tangga khususnya untuk sayuran (Suhartini, dkk 2020).

Selain ditanami aneka tanaman pangan, pekarangan seringkali dimanfaatkan sebagai sumber tanaman obat dan rempah atau biasa dikenal Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Banyak yang berusaha meningkatkan imunitas dengan mengonsumsi berbagai herbal atau jamu-jamuan.

Di awal-awal pandemi, harga jahe sempat melambung karena ada informasi tanaman ini bisa menangkal virus Corona. Jika kita memiliki tanaman jahe di pekarangan tentu tidak perlu bersusah payah mengeluarkan uang untuk membeli di pasar.

Adanya apotek hidup dari pekarangan semakin meningkatkan nilai guna lahan untuk menjaga anggota keluarga tetap sehat dan kuat melawan infeksi dan virus. Pemanfaatan pekarangan selain dapat memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi juga menjadi pilihan terbaik dalam menyediakan tanaman herbal yang berkhasiat.

Meningkatkan Resiliensi Sosial

Ada satu hal yang menarik dari hasil kajian Fakultas Pertanian (Faperta) UGM tentang dampak kegiatan P2L tahun 2021. Kajian tersebut menyatakan aktifitas bertanam di pekarangan memiliki manfaat *intangible* yang menguatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Beberapa manfaat *intangible* tersebut yaitu keakraban, gotong royong, saling percaya, kerukunan, dan perluasan jejaring sosial.

Kegiatan menanam bersama di lingkungan rumah menumbuhkan ikatan sosial yang kuat, sehingga kegiatan seperti ini mampu menguatkan resiliensi sosial di tengah pandemi. Meskipun interaksi

yang dilakukan relatif terbatas akibat pandemi, keakraban tetap terjalin karena intensitas pertemuan antar warga memungkinkan pertukaran informasi dan sosialisasi. Aktivitas bertanam bersama di pekarangan akan memberi dampak yang baik dalam resiliensi sosial. Ada kesempatan untuk saling menyemangati, saling memberi dukungan, dan saling bahu membahu di tengah keprihatinan bersama atas dampak pandemi.

Pada tingkat regional ASEAN, inisiatif Indonesia terkait pemanfaatan pekarangan telah memantik perhatian negara-negara ASEAN dan menjadi salah satu poin dalam *Joint Press Statement* pertemuan ke-43 menteri pertanian dan kehutanan ASEAN pada 27 Oktober 2021 lalu. Program mengoptimalkan pekarangan sebagai sumber pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya sektor pertanian bertahan di tengah pandemi. Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang tetap konsisten tumbuh positif di antara sektor lain yang mengalami turbulensi.

Pada momentum G20, Indonesia juga harus menunjukkan bahwa sistem pertanian rumah tangga di Indonesia mampu menginspirasi dunia untuk bertahan menghadapi tantangan. Pemanfaatan pekarangan merupakan bagian dari pembangunan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Praktik-praktik baik mengenai pemanfaatan pekarangan di Indonesia harus mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat dunia untuk meningkatkan resiliensi global serta bersama-sama bangkit dan pulih sesuai tema G20, *recover together; recover stronger*.

* * * * *

G20, Jalan Wujudkan Pemulihan Kesehatan Global

Oleh: Rizka Ufliasari, S.H.

Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang sehat. Hal ini sejalan dengan salah satu isu prioritas yang akan diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia yaitu Arsitektur Kesehatan Global. Tahun 2022 Indonesia terpilih pertama kalinya menjadi tuan rumah Presidensi G20. Ini menjadi ajang pembuktian bangsa Indonesia mampu memimpin konferensi dan mendapatkan kepercayaan di mata dunia.

Mengutip laman resmi <https://g20.org>, G20 merupakan program multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan tingkat perekonomian besar di dunia. Isu Arsitektur Kesehatan Global dipilih menjadi salah satu isu prioritas karena diharapkan mampu membangun dunia yang lebih tangguh terhadap pandemi dan krisis kesehatan lainnya di masa depan.

Jalan menuju pemulihan global membutuhkan kerja sama yang lebih kuat. Melalui konferensi tingkat tinggi, anggota G20 membahas kesetaraan standar kesehatan global. Pemulihan global juga membutuhkan kolaborasi pihak swasta dan industri, khususnya untuk pendanaan sektor kesehatan global.

Dampak pandemi yang dirasakan bersama seharusnya menjadi momentum masyarakat global mulai bergandengan tangan. Melalui forum G20, Indonesia akan mendorong penguatan ketahanan

kesehatan dunia serta membantu mewujudkan sistem kesehatan global lebih inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap krisis.

Tertib Protokol Kesehatan

Menarik untuk dibahas, tentang cara mewujudkan harmonisasi standar protokol kesehatan secara global. Hal tersebut tidaklah mudah dan pastinya membutuhkan kesepakatan bersama secara global agar dapat dilaksanakan secara mudah di seluruh dunia.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini kampanye mendukung protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas terus dilakukan pemerintah Indonesia.

Kampanye ini mendapat berbagai macam respon di masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat memberikan respon positif dengan tertib mematuhi protokol kesehatan 5M secara baik dan disiplin. Namun beberapa masyarakat di daerah memberikan respon negatif terhadap program kampanye protokol kesehatan 5M. Mereka menganggap protokol kesehatan 5M tidak penting dan percaya *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tidak ada. Hal ini yang menyebabkan Indonesia kesulitan memutus rantai penularan *Covid-19*.

Hasil survei Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Jawa Timur dan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga membuktikan angka ketidakpatuhan penggunaan masker di Jawa Timur mencapai 70% hingga pertengahan 2020. Dengan kata lain hanya sepertiga masyarakat di Jawa Timur yang memakai masker saat berinteraksi di ruang publik (Kompas.com).

Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 5M seharusnya menjadi evaluasi bagi praktik komunikasi yang dilakukan pemerintah, khususnya yang dilakukan humas pemerintah. Kehadiran humas pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program kampanye protokol kesehatan.

Humas pemerintah dituntut lebih kreatif dan komunikatif dalam

menyampaikan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Tentunya tidak dengan bahasa yang formal dan kaku khas birokrat, tetapi dengan cara penyampaian pesan kepada masyarakat yang mudah diterima dan dipahami dengan baik.

Humas pemerintah juga dituntut lebih responsif menanggapi pertanyaan atau keluhan mengenai penanganan Covid-19 atau isu kesehatan lainnya yang disampaikan masyarakat melalui berbagai kanal media pemerintah.

Humas pemerintah di seluruh Indonesia harus bersatu padu menyukseskan program kampanye protokol kesehatan dengan cara unik, kreatif dan masif kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat mampu memahami secara benar cara mencegah dan mengendalikan Covid-19 serta bersedia menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Jika harmonisasi standar protokol kesehatan global telah berhasil disepakati dalam forum Presidensi G20, tidaklah sulit bagi humas pemerintah untuk menyampaikan dan mengedukasi masyarakat untuk menjalankan standar protokol kesehatan global, demi memutus rantai penularan Covid-19 dan membangkitkan perekonomian nasional.

* * * * *

Membangun Resiliensi Kesehatan Masyarakat dalam Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Silvany Dianita Sitorus, M.Psi., Psikolog.

Presidensi G20 Tahun 2022 dengan tema “*Recovery Together, Recovery Stronger*” merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan peran Indonesia di mata dunia. Terlebih Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang memiliki kesempatan dapat membawa perubahan di dalam negeri dan berdampak internasional.

Prioritas utama dalam perhelatan itu dengan memfokuskan pemulihan sistem kesehatan dunia, memulihkan ekonomi dunia melalui transformasi digital, dan melakukan transisi energi. Ketiga fokus utama ini dapat memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal yang menjadi pemikiran yaitu mendukung pemulihan kesehatan dunia. Sektor ini memberi dampak luas terhadap kondisi kesehatan mental masyarakat sebagai bagian peningkatan kapasitas yang optimal dalam pengembangan dirinya di masyarakat maupun bernegara.

Lantas, bagaimana hubungan peran humas pemerintah dalam mendukung perhelatan bergengsi ini dalam membangun resiliensi kesehatan masyarakat? Ini menarik dibahas karena humas pemerintah memiliki kontribusi penting. Salah satunya melalui strategi komunikasi dalam menyampaikan pesan yang baik kepada masyarakat.

Resiliensi, Empati, dan Promosi Kesehatan Mental Masyarakat

Kesempatan Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 menjadi penguatan untuk mengajak seluruh dunia mewujudkan pemulihan ekonomi global. Pertemuan ini menyikapi pentingnya kesehatan masyarakat sebagai kunci menjaga aspek ketahanan dan stabilitas untuk pemulihan ekonomi, sosial, perdagangan, dan sebagainya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Kesehatan masyarakat merupakan kunci menjalankan semua produktivitas yang dibutuhkan dalam mendukung pilar negara.

Ada sebuah kalimat usang namun masih relevan, *mens sana in corpore sano*. Kalimat berbahasa latin yang berarti dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bila kondisi kesehatan fisik dan mental menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, maka produktivitas sebagai daya gerak bisa tercapai.

Peran resiliensi adalah kemampuan untuk dapat beradaptasi di dalam kondisi penguatan kesehatan secara tidak langsung. Hal ini dapat membantu pemerintah agar tidak bersikap arogan dalam pemulihan setiap aspek kehidupan. Utamanya, dalam menangani pemulihan kesehatan dan kestabilan ekonomi sebagai roda penggerak kesejahteraan masyarakat.

Humas pemerintah merupakan salah satu jabatan fungsional strategis. Pemangku jabatan ini perlu memahami keterampilan resiliensi sendiri untuk mendorong masyarakat, sekaligus menyikapi, menghadapi, dan meminimalisir kondisi yang tidak menyenangkan. Tujuannya, mewujudkan Indonesia pulih dan bangkit.

Kemampuan resiliensi ditunjukkan dengan tetap menjalankan setiap fungsi melaksanakan pelayanan publik dan implementasi kebijakan pemerintah di dalamnya. Humas pemerintah perlu mengedepankan respon yang tepat untuk memahami situasi kondisi. Ini perlu dilakukan agar pengambilan keputusan dapat menekan dampak negatif yang lebih luas.

Humas pemerintah dalam posisi ini perlu menguatkan kebijakan pemerintah melalui kemampuan resiliensi dan mempromosikan kesehatan mental di masyarakat. Ada beberapa cara diantaranya

melatih diri dan masyarakat membangun konsepsi *mental set* yang positif.

Mungkin hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang sumir, namun tantangan Humas pemerintah adalah mengajak masyarakat untuk melihat sudut pandang yang lain di tengah kondisi yang mencemaskan sekalipun. Berikutnya, mengajak masyarakat membangun solidaritas sosial. Hal tersebut penting karena kondisi saat ini seringkali membawa interkonektivitas antar manusia. Solidaritas yang dibangun dapat menanamkan sikap dan kesadaran masyarakat saat saling terhubung satu dengan yang lain.

Selanjutnya, menumbuhkan empati adalah salah satu bagian dari resiliensi psikologis yang harus diupayakan setiap individu. Resiliensi melalui empati memberikan arti seseorang mampu membawa peranan yang sangat besar bukan hanya kepada diri sendiri namun kepada orang lain. Rendahnya rasa empati yang dimiliki seseorang jelas menimbulkan dampak yang merugikan seperti munculnya kejahatan, kekerasan, perundungan, sikap apatisme, mudah tersinggung, serta ketidakstabilan emosi. Dampaknya dalam pemerintahan adalah kurangnya kepekaan aparatur sipil negara terhadap kondisi yang memprihatinkan masyarakat.

Momentum Presidensi G20 bisa menjadi loncatan dalam peningkatan kualitas kesehatan mental masyarakat. Humas pemerintah perlu memiliki sudut pandang yang sepaham. Hal itu disebabkan Humas Pemerintah sebagai wajah birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Tidak hanya itu, Humas Pemerintah juga mempromosikan koherensi kebijakan pembangunan berkelanjutan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, resiliensi, empati, dan promosi adalah 3 hal untuk mewujudkan kesuksesan perhelatan Presidensi G20, melalui cara yang secara ringan dan mudah diimplementasikan. Salam sehat untuk pembaca!

* * * * *

Geliat Laut Sehat Untuk Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Sinta Nurwijayanti, SPi, MSE, MA.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Berdasarkan Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2018, luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km² dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 km dan jumlah pulau kurang lebih 17.504. Luasnya wilayah lautan ini memberikan harapan terhadap dukungan laut untuk kesejahteraan dan perekonomian negara.

Dalam pembukaan *Our Ocean Conference* di Nusa Dua, Bali 2018 silam, Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa sudah saatnya kita menghadap laut dan memandang laut sebagai masa depan bangsa, mengingat peran laut sangat besar dalam distribusi ekonomi dan perdagangan. Menurut Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL pada GEOICON 2019, lebih dari 80% perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut dan 40% diantaranya melalui perairan Indonesia. Laut juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut baik hayati maupun non hayati serta penciptaan lapangan kerja dimana lautan telah menopang ratusan juta mata pencaharian bagi masyarakat terutama yang hidup di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun industri maritim.

Mengingat besarnya peran lautan, maka kita tidak boleh abai

terhadap kesehatan laut. Beberapa negara di dunia telah memiliki komitmen untuk memanfaatkan laut secara lestari sesuai amanat SDG 14, *life below water*. Negara-negara yang tergabung dalam G20 juga telah mendeklarasikan komitmen untuk melindungi 30% laut dunia di tahun 2030 pada *G20 Leaders Declaration di Roma*, Italia, Oktober 2021 dengan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 pada KTT G20 ke-15. Kehormatan ini hendaknya dapat dimanfaatkan Indonesia untuk berkiprah di dunia internasional utamanya dalam upaya pemulihan ekonomi dunia yang dipayungi dengan pemilihan tema besar “*Recover together, recover stronger*”. Tema ini diharapkan dapat mendorong seluruh anggota G20 untuk bergandeng tangan menumbuhkan ekonomi yang inklusif, *people-centered* serta pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung Presidensi G20 dengan berpartisipasi dalam segmen *Environment and Climate Sustainability Working Group* (ECSWG). Isu yang dibahas adalah tentang lingkungan. Melalui segmen ini, Indonesia akan fokus pada tiga prioritas yakni *sustainable recovery, land and sea-based actions* serta *resource mobilization*, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Dari tiga isu tersebut, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yakni keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan *Post 2020 Global Biodiversity Framework*, pemulihan lingkungan dari *land degradation* dan *deforestation*, perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan *IUU Fishing, Marine Protected Area di Antartika*, dan *Osaka Blue Ocean Vision*. Isu turunan selanjutnya adalah sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta *G20 Water Dialogue*.

Dukungan KKP dapat diperluas melalui tema “*Blue Economy: Towards Global Recovery*” yang didukung dua pilar yakni meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi

perubahan iklim, pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, pemberantasan IUU Fishing serta memerangi sampah laut.

Semangat presidensi ini sejalan dengan fokus KKP untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi dan ekonomi. Kekayaan alam dan *biodiversity* laut yang melimpah harus dimanfaatkan secara bijak guna mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Pemanfaatan laut dengan menggunakan konsep ekonomi biru diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap angka lapangan kerja dan memberikan peluang untuk bisnis di masa mendatang dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

Mengingat besarnya peran laut bagi kehidupan manusia maka KKP akan mengakselerasi terwujudnya “Laut yang sehat, yaitu laut yang bisa mensejahterakan”. Upaya yang akan dilakukan dengan mentransformasi ekonomi kelautan dengan menguasai ilmu pengetahuan dan budaya laut (*ocean science and culture*) untuk menjaga kesehatan laut dan mencapai kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Salah satu kunci untuk mewujudkannya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KKP memiliki program terobosan untuk mewujudkan laut sehat melalui kebijakan penangkapan ikan terukur di mana targetnya adalah untuk memerangi praktik *illegal fishing*, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir untuk pengentasan kemiskinan sehingga dapat menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) utamanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian ekologi dan kepentingan ekonomi.

Pada saat pembukaan Presidensi G20, 1 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menekankan agar presidensi Indonesia tidak sebatas seremonial namun harus menjadi aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar. Untuk itu semangat implementasi Presidensi G20 ini, jangan hanya berhenti pada slogan-slogan, poster dan banner,

namun harus diiringi dengan langkah pasti dari setiap unit kerja untuk merintis dan melaksanakan kegiatan yang mendukung Presidensi G20 ini. Langkah nyata KKP dalam mengupayakan laut sehat dan lestari untuk generasi kini dan mendatang dengan berbagai kebijakan, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, marilah bersama bergandeng tangan menjaga kesehatan laut dengan semangat, bersama kita bisa, *recover together, recover stronger*.

* * * * *

Isu Hak atas Kesehatan Mental Penting Dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Siska Rannywati Purba S.I.P.

Tahun 2020, Indonesia memegang presidensi *Group of Twenty* (G20). Ini kali pertama sejak dibentuk tahun 1999. Pelaksanaan KTT G20 menjadi kesempatan menunjukkan kemampuan Indonesia dalam pengendalian pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Selain itu, untuk menampilkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia, termasuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20.

Selama masa presidensial saat tulisan ini dibuat, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Peran ini menjadi kesempatan bagi pemerintah mengusung agenda kesehatan mental.

Kesehatan adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan menjadi dasar diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional dan juga seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Jaminan hak atas kesehatan diatur Pasal

28 H ayat (1) UUD 1945. Aturan internasional juga mengaturnya sebagaimana terdapat di Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* serta di Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI). Pada konvensi ini ditegaskan negara peserta kovenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Indonesia menjadi negara yang telah melakukan pemenuhan hak atas kesehatan fisik dan mental warga negaranya. Hal ini sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah, termasuk hak atas kesehatan mental.

Pemenuhan hak atas kesehatan mental menjadi semakin penting pada kondisi pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik saja, namun juga berdampak terhadap kesehatan jiwa masyarakat, baik yang terpapar langsung oleh virus maupun pada orang yang tidak terpapar.

Di satu sisi masyarakat masih berjuang mengendalikan penyebaran virus COVID-19, tetapi disisi lain mereka memiliki dan menyebar perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial, ketidakpastian ekonomi dan lainnya. Hal ini berdampak terhadap terjadinya peningkatan masalah dan gangguan kesehatan jiwa di masyarakat.

Hasil Riset

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2018), lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif.

Sementara kondisi kesehatan mental di Asia pada masa pandemi berdasarkan survei tahun 2020 di salah satu situs dokter spesialis jiwa (*journals.sagepub.com*) dengan melibatkan 5661 partisipan menghasilkan temuan sebagian besar partisipan mengalami depresi, sebanyak 32% mengalami masalah psikologis dan 67,4% memiliki gejala cemas. Data dikumpulkan dengan menganalisis semua media *online* yang memuat berita kesehatan mental akibat Covid19 selama 1 tahun dari April 2020 hingga Mei 2021.

Masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental ini sebagian besar berumur kurang dari 30 tahun dan produktif. 48% dari yang mengalami depresi berpikir untuk bunuh diri atau ingin melukai diri dan orang lain. Sebagian yang bermasalah tersebut juga mengalami trauma psikologis.

Media massa *online* di Indonesia dalam 1 tahun terakhir banyak menggambarkan kenaikan kasus kesehatan mental selama pandemi Covid19. Berbagai persoalan kesehatan mental ini memengaruhi produktivitas. Padahal usia ini merupakan tulang punggung Indonesia untuk mencapai bonus demografi yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada tahun 2021-2022 sesuai Proyeksi Penduduk 2015-2045 atau 2028-2031 sesuai Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Presidensi G20, menjadi forum yang tepat untuk membahas isu kesehatan mental. Isu ini dialami seluruh dunia. Selain sebagai bentuk atensi juga mencari solusi bersama untuk menangani isu ini. Di forum Presidensi G20 dapat dikupas sektor-sektor yang sangat potensial terkena isu mental, cara penanggulangannya melalui kebijakan, kerjasama, dan lainnya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan atas HAM, penerapan integrasi kebijakan penanggulangan COVID-19 dapat mengurangi potensi kerugian negara pascapandemi. Integrasi layanan kesehatan mental ke layanan masyarakat menjadi cara memastikan jangkauan layanan kesehatan mental. Hal ini bisa pula dilakukan dengan pengadaptasian usaha-usaha yang telah dilakukan negara-negara di dunia pada forum Presidensi G20 atau pertukaran sumbangsih teknis lainnya. Boleh jadi, malah menemukan gagasan baru untuk mengatasinya.

Di samping meringankan biaya penanganan isu mental, mempermudah jangkauan layanan kesehatan mental, pemberian edukasi dan sosialisasi cara mengatasi isu mental dan memelihara kesehatan mental sejak dini dapat di gencarkan kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi menjadi hal yang paling dasar yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif di masyarakat.

* * * * *

Keterlibatan Penyuluh Perikanan Jadikan Masyarakat Berdaya

Oleh: Suwindi Pratama, S.St.Pi.

Lagu lama berjudul ‘Nenek moyangku seorang pelaut’ menjadi gambaran tepat untuk julukan Negara Indonesia. Dianugerahi hamparan lautan yang membentang dari timur ke barat, menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan biodiversitas karena luas lautannya lebih besar dibanding daratan.

Bila menilik potensi besar dalam pemanfaatan ruang laut yang dimiliki, Indonesia harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai ekonomi dengan ekologi. Konsep ekonomi biru atau *blue economy* menjadi terobosan yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi kedua tantangan tersebut. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru artinya harus dilakukan penataan ruang laut yang baik. Hal ini bertujuan agar pembangunan pesisir dan laut bisa secara seimbang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, namun mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Konsep ekonomi biru sejalan dengan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam segmen *Environment and Climate Sustainability Working Group* (ECSWG) yang mengupas isu tentang lingkungan dalam perhelatan internasional G20. ECSWG di bawah Presidensi Indonesia akan fokus pada prioritas *sustainable recovery*, *land and sea-based actions* serta *resource mobilization*, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui tema “*Blue Economy*:

Towards Global Recovery”. Upaya meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut melalui beberapa gebrakan program prioritas yang diusung diharapkan dapat mengurangi kerusakan ekosistem, mengurangi kelangkaan ekologi, meningkatkan inklusi sosial, meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Konsep Ekonomi Biru

Dalam melaksanakan ekonomi biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan terintegrasi untuk pengelolaan kegiatan ekonomi di ruang laut dan di daratan pesisir. Untuk menjaga kesehatan laut, Kementerian KP memiliki 3 program prioritas pembangunan yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan, pengembangan perikanan budidaya berbasis ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Kebijakan yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa, disamping mendorong peningkatan PNBPN melalui kebijakan penangkapan terukur dari sumber daya alam perikanan tangkap. Ke depan, hasil dari PNBPN akan dikembalikan untuk kesejahteraan atau perlindungan nelayan melalui asuransi dan jaminan hari tua, serta pembangunan sarana prasarana bagi kepentingan nelayan, seperti tempat pendaratan ikan yang higienis. Melalui kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut juga memiliki target dalam memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah perikanan untuk pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.

Sedangkan, pada program pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dengan empat komoditas unggulan di pasar global yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Dalam hal ini dilakukan revitalisasi tambak-tambak rakyat. Pemerintah hadir membangun infrastruktur pertambakan sehingga produktivitasnya meningkat. Di samping itu pembangunan kawasan budidaya tambak udang skala besar sebagai percontohan/*modelling* yang merupakan kegiatan budidaya terintegrasi, mulai dari pembenihan, pabrik pakan,

pembesaran, instalasi pengolahan air limbah, hingga manajemen kawasan terpadu ramah lingkungan sedang digenjut pengerjaannya.

Kemudian, untuk mendukung pemulihan pasca pandemi dan ketahanan pangan dilakukan pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan masyarakat, serta menjaga komoditas bernilai ekonomis penting yang terancam punah.

Keterlibatan Penyuluh Perikanan

Dalam dua tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mewujudkan keseimbangan ekologi dan ekonomi serta inovasi teknologi dengan menerapkan konsep ekonomi biru. Program-program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana tanpa adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, baik itu antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah level provinsi hingga kabupaten/kota, perbankan bahkan penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun peran penting Penyuluh Perikanan di lapangan diantaranya memiliki fungsi sebagai *Enlightening*, *Enrichment*, dan *Empowerment*. *Enlightening* yaitu kemampuan Penyuluh memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tolak ukurnya adalah keberhasilan Penyuluh Perikanan memberikan pencerahan kepada pelaku utama atau masyarakat perikanan. *Enlightening* sendiri diartikan sebagai upaya Penyuluh merubah perilaku dan sikap pelaku utama atau masyarakat perikanan dari tidak mau menjadi mau.

Enrichment, setiap Penyuluh harus dapat memperkaya pelaku utama/usaha dengan informasi dan teknologi, sehingga penyuluh lah sumber pengetahuan. *Enrichment* diartikan sebagai upaya Penyuluh merubah perilaku dan sikap pelaku utama atau masyarakat perikanan dari tidak tahu menjadi tahu. Sumber informasi dan pengetahuan yang diperoleh penyuluh bersumber dari riset. Sinergi riset dan Penyuluh harus menghasilkan desa inovasi.

Sedangkan *empowerment* mencerminkan kemampuan Penyuluh dalam memberdayakan masyarakat dan menginisiasi untuk

menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah hidup pelaku utama dan pelaku usaha. *Empowerment* diartikan sebagai upaya Penyuluh untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha.

Dampak Konsep Ekonomi Biru Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan

Konsep Ekonomi Biru serta program-program prioritas yang telah dijalankan nyatanya menunjukkan data yang melegakan. Selama dua tahun terakhir, Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) yang merupakan indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) di Indonesia berdasarkan dimensi sosial dan dimensi ekonomi menunjukkan sebesar 84,72% terealisasi dari jumlah yang ditargetkan.

Terdapat beragam indikator sukses pengukur keberhasilan mulai dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha dibidang perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat pengawasan, jumlah pelaku utama yang meningkat kelasnya, nilai tukar nelayan, volume ekspor dan impor produk perikanan hingga angka konsumsi ikan. Hingga periode Maret 2022, data Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menunjukan bahwa jumlah total panen ikan berhasil dilaksanakan sebanyak 57,07ton dengan nilai total panen ikan Rp1.365.309.200.

Data produksi pokdakan binaan penyuluh perikanan tersebut merupakan data kecil dari total panen dari kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan oleh pelaku utama atau masyarakat perikanan. Hal tersebut terbukti dan menunjukkan bahwa program prioritas yang telah dijalankan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

* * * * *

Tujuan Mulia Dibalik Mengabaikan Perjanjian TRIPS

Oleh: Uly Adhie Mulyani

Indonesia boleh bangga dengan keketuaannya di G20 tahun ini. Dengan jargon “*Recover Together, Recover Stronger*” Indonesia mesti sukses untuk memimpin dunia dalam penguatan arsitektur kesehatan global. Satu dari tiga sub agenda yang diusung Indonesia adalah redistribusi pusat manufaktur dan pusat penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi.

Di seluruh dunia, terjadi kesenjangan akses vaksinasi. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena di awal 2022, Indonesia menjadi negara keempat dengan cakupan kebutuhan vaksin tertinggi di dunia. Akses vaksin di Indonesia cukup mudah. Hal ini tidak dirasakan bahkan oleh negara tetangga Indonesia. Kesenjangan akses vaksin ini menjadi dilema negara-negara di dunia.

Melalui keketuaan Indonesia pada G20, Presiden Jokowi mengajak seluruh negara untuk memperkuat arsitektur global yang bersifat inklusif, berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. G20 menjadi bagian penting dari solusi kemudahan akses teknologi kesehatan, mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, serta obat dan alat kesehatan esensial.

Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global, serta penguatan *global supply chain* vaksin, termasuk menghilangkan hambatan ekspor

dan hambatan bahan baku vaksin, peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin di negara berkembang; merupakan isu yang dianggap dapat menjembatani akses dan kesetaraan vaksin di negara berkembang. Namun penghalang terbesarnya adalah TRIPS *agreement*. TRIPS merupakan perjanjian dagang yang berlaku diantara negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini mencakup standar minimal aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI). Kekayaan intelektual yang dimaksud meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hak cipta dan perlindungan varietas tanaman. Negara-negara berkembang yang meratifikasi TRIPS *agreement*, artinya negara tersebut akan membuat aturan nasional mengenai hak atas kekayaan intelektual.

Perjanjian TRIPS merupakan salah satu penyebab tingginya harga-harga obat, vaksin dan alat kesehatan di dunia internasional, dan memberikan hak eksklusif kepada manufaktur untuk memonopoli pasar. Perjanjian TRIPS dianggap sebagai penghalang bagi pengembangan produk kesehatan esensial, universal dan terjangkau. Pada masa pandemi ini, negara berkembang menginginkan kesetaraan akses dan kemudahan untuk mendapatkan vaksin. Karena vaksin telah ditetapkan sebagai salah satu intervensi utama pencegahan penyebaran Covid-19.

Pengabaian terhadap TRIPS (TRIPS *waiver*) merupakan upaya untuk menghilangkan hambatan ekspor vaksin, bahan bakunya serta peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin di negara berkembang. Sehingga negara berkembang dapat memproduksi dan menjual vaksin dengan harga yang lebih kompetitif. Sehingga meningkatkan akses, ketersediaan dan kesetaraan untuk mendapatkan vaksin di negara berkembang yang berpendapatan rendah hingga menengah.

Proposal TRIPS *waiver* pertama diusulkan oleh India dan Afrika Selatan pada 2 Oktober 2020. Tujuannya mendesak negara-negara anggota WTO untuk mengabaikan kewajiban untuk melindungi HKI pada obat, vaksin, dan alat kesehatan yang digunakan untuk penanganan pandemi.

Mengabaikan Perjanjian, Menghadapi Pertentangan

Maka India dan Afrika Selatan memimpin dengan mengusulkan proposal agar WTO mengabaikan perjanjian TRIPS. Momen ini memanfaatkan dukungan kepemimpinan Direktur Jenderal WTO, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, wanita berkebangsaan Afrika. Di sinilah para negara berkembang, berpendapatan rendah menengah, mencoba melawat negara-negara kaya yang ingin tetap mempertahankan ketentuan TRIPS.

Tujuan mulia negara berkembang, delegasi G20, adalah untuk memastikan bahwa selama pandemi ini, hak kekayaan intelektual tidak dapat menjadi penghalang bagi akses dan pengembangan produk kesehatan esensial, universal, dan terjangkau.

Produk esensial yang dimaksud, salah satunya adalah vaksin untuk memerangi Covid- 19. Lebih dari 100 negara mendukung pengabaian *TRIPS agreement*. Alasannya, langkah ini akan membantu menyelamatkan banyak nyawa. WTO didesak agar mengizinkan negara-negara berkembang untuk memproduksi vaksin COVID-19 mereka sendiri dengan biaya rendah.

Usulan mengabaikan *TRIPS waiver* tentunya ditentang oleh para negara ‘kaya’, diantaranya Australia, Singapura, Swiss, Kanada, Chili, dan Meksiko. Para ‘raksasa jalut’ itu dengan sengaja tetap mempertahankan dan mendukung perusahaan farmasi besar untuk memonopoli pengetahuan, produksi, dan harga vaksin, serta obat-obatan covid19 melalui aturan perlindungan HKI.

Kepemimpinan Indonesia di G20 tahun ini menjadi strategis bagi negara-negara pendukung TRIPS waiver. Indonesia menjadi harapan untuk dapat memimpin isu ini. Presiden RI Joko Widodo pernah menegaskan, Indonesia mendorong inisiatif pengabaian HAKI vaksin COVID-19 melalui forum-forum internasional.

Hingga saat ini, pantauan media massa tidak terjadi eskalasi isu terkait TRIPS *waiver*. Isu ini pun tidak diangkat pada pertemuan *Health Working Group* G20 yang pertama di Yogyakarta tanggal 28-30 Maret 2022. Media pun seperti enggan mengangkat isu terkait *TRIPS waiver*.

Kurangnya maraknya isu terkait *positioning* Indonesia terhadap

TRIPS waiver, bisa menjadi salah satu penyebab isu ini belum diagendakan dalam kebijakan keketuaan Indonesia. Agenda setting dan manajemen isu dapat dilakukan oleh Pranata Humas.

Isu *TRIPS waiver* dapat dijadikan fenomena terpusat dengan bantuan media untuk membentuk opini publik. Strategi komunikasi terpusat dan terulang ini dilakukan melalui 3 tahap: *agenda setting*, *priming*, dan *framing*.

Pranata Humas dapat berperan untuk menggiring opini publik yang menggugah peran penting dan strategisnya isu ini untuk dibahas dalam agenda-agenda pertemuan G20. Tentunya peran ini perlu didukung oleh data dan informasi akurat. Hal itu penting agar Pranata Humas dapat menyampaikan informasi dan komunikasi dengan lebih lengkap dan jelas.

Agenda-setting dimulai dengan asumsi bahwa media massa memiliki kendali penuh atas berita-berita yang ingin disajikan sesuai dengan intensi dari media tersebut. Dalam hal ini Pranata Humas harus melakukan komunikasi persuasif kepada media agar mau mengangkat isu *TRIPS waiver*.

Selanjutnya diikuti dengan proses di mana media menyajikan berita yang hanya berfokus pada isu *TRIPS waiver* sehingga mampu mengubah standar evaluasi yang kerap dipakai publik dalam menilai realitas sosial yang ada di hadapannya.

Keberhasilan proses *priming* bergantung pada bagaimana media dapat dengan cermat mengetahui karakteristik sikap, cara pikir, dan pandangan mayoritas audiensnya terkait isu *TRIPS waiver*.

Setelah kedua tahap itu terlampaui, maka publik akan memahami pesan *TRIPS waiver* yang disampaikan oleh media. Tahap selanjutnya, *framing*, menjadi tahap kritis. Di tahap ini publik akan tergerak untuk bertindak dan melakukan upaya-upaya agar terjadi perubahan.

Ketiga tahap tersebut merupakan upaya manajemen isu Pranata Humas menggiring opini publik. Upaya ini perlu dilandasi bukti kajian ilmiah agar Pranata Humas dapat menyusun berbagai strategi komunikasi yang tepat. Tiga tahapan di atas sebagai dasar komunikasi kebijakan yang disampaikan dapat menjadi tepat sasaran.

* * * * *

UMKM dan Peluangnya dalam Presidensi G20

Oleh: Yetty Lestriani, S.I.Kom.

Indonesia memegang kendali Presidensi *Group of Twenty* atau G20. Dalam rentang waktu satu tahun, pertemuan ini akan berlangsung dan memberi dampak signifikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Indonesia mendapat kesempatan strategis memperkenalkan potensi produk unggulan dengan ciri khas keindonesiaan. Semua terlihat dari produk dan elemen yang disuguhkan dengan menghadirkan nuansa dan ciri khas Indonesia di setiap sudutnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dunia pada Indonesia yang berujung peningkatan perekonomian bangsa.

Salah satu sektor krusial yang merasakan dampak positif dari perhelatan G20 yakni UMKM yang memberi pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia di Maret 2020 berakibat terganggunya produktivitas.

Sejak 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022, Indonesia resmi menjadi tuan rumah G20. Mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk pulih bersama, lebih kuat dan berkelanjutan menghadapi kondisi pandemi dan eskalasi perekonomian dunia yang menurun.

Keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara harus mendapat dukungan dari negara lain supaya pulih bersama. Sinergi dan kolaborasi menjadi bagian penting untuk kembali pulih dan forum G20 menjadi momen tepat untuk mendapatkan solusi.

G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis secara kolektif yang mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Menuai Peluang

Setelah dua tahun mengalami fluktuatif usaha karena pandemi Covid-19, saatnya UMKM bangkit dan menuai peluang dengan menampilkan produk dan hasil karya di kancah internasional dalam pertemuan G20. Banyak peluang yang dapat dicapai dalam forum G20 ini antara lain membuka lapangan pekerjaan, investasi, serta membuka akses untuk melakukan ekspor produk-produk UMKM ke berbagai negara di dunia.

Menurut Naisbit (1994:3), perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Negara yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan di pasar global.

Melihat pernyataan tersebut, peran UMKM sangat besar dan kuat untuk merubah perekonomian nasional. Perkembangan UMKM perlu menjadi perhatian suatu negara karena UMKM memiliki kolaborasi dan konektivitas yang luas dan terbukti kuat serta mampu menghadapi perubahan dan persaingan yang terus bergerak dinamis.

Sebuah peluang yang tak biasa, UMKM dapat memanfaatkan kedatangan negara-negara dari seluruh dunia. UMKM Indonesia berkesempatan mengajak industri kecil dari berbagai negara bekerja sama. Momen ini juga menjadi kesempatan Indonesia mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara global dan inklusif.

Presidensi G20 Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal.

Indonesia belum tentu menjadi tuan rumah kembali pada periode berikutnya. Harapannya hal ini membawa dampak positif kepada pasar digital dalam negeri yang kini banyak dimanfaatkan pelaku UMKM.

Lewat pertemuan ini, UMKM akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memasarkan produknya. Terbuka banyak kesepakatan dalam berbagai sektor yang memudahkan pelaku UMKM dalam memanfaatkan pasar digital. Di samping itu, pada perhelatan ini akan ada kunjungan ke tempat wisata dan pameran produk UMKM setempat. Ini akan menjadi ajang promosi Indonesia ke mata dunia dan memberi dampak perekonomian yang bisa membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Perhelatan Presidensi G20 akan meningkatkan konsumsi domestik. Hal ini lebih banyak dirasakan para pelaku UMKM. Sebuah anugerah bagi para pelaku UMKM di tanah air dan menjadi kesempatan pembuktian diri dan eksistensi produk UMKM untuk bersaing dan layak di pasar dalam dan luar negeri.

Presidensi G20 dapat menjadi instrumen dalam pemulihan ekonomi serta kesehatan. Untuk itu, penting bagi kita mendukung pertemuan ini. Kita tentu berharap pandemi Covid-19 dan perekonomian dunia segera kembali normal, sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia.

* * * * *

Pranata Humas Berkelas Dunia

.

1

Belajar dari Mandalika, Nation Branding Tak Sekadar Jargon

Oleh: Adha Anggraini, S.Pd

DERU keseruan perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat masih menyisakan keramaian di jagad media. Bukan hanya tentang Mbak Rara, si pawang hujan yang menjadi bintang dunia karena dianggap berhasil menghentikan hujan dan mendapat apresiasi dari media lokal maupun media asing. Tetapi menyoal budget triliunan rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk memfasilitasi ajang balap bergengsi ini.

Alih-alih mendukung upaya pemerintah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi pandemi, warga twitterland justru membandingkan anggaran Rp.2,5 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk Mandalika setara dengan 200.000 beasiswa untuk mahasiswa. Begitukah?

Rasanya memang tidak sepadan membicarakan MotoGP Mandalika sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun nation branding dengan program beasiswa. Faktanya, program pendidikan dengan anggaran yang cukup signifikan sejauh ini terus dikuatkan pemerintah, salah satunya beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang awalnya hanya Rp.1,3 triliun mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp.2,5 triliun. Adapun tujuan beasiswa ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas pada masyarakat tidak mampu. Itu diwujudkan sebagaimana amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Presidensi G20

Sebagai humas pemerintah isu tersebut tentu saja menarik untuk kita ulas. Mengingat keberadaan humas sebagai corong informasi dibutuhkan di situasi seperti ini. Bukan berarti humas hanya hadir sebagai pemadam kebakaran, tetapi menghadirkan kerja untuk melakukan upaya mitigasi ketika terjadi mispersepsi di masyarakat.

Sejak Desember 2021, negara kita memegang presidensi kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar sedunia yang dikenal sebagai G20. Puncaknya adalah akan diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan dihadiri oleh kedua puluh kepala pemerintahan di Bali pada November mendatang.

Gelaran MotoGP di Mandalika seperti menjadi jalur masuk pertunjukan kompetensi dan keunggulan Indonesia di mata dunia, yang kemudian dilanjutkan ke forum *The Group of Twenty (G20)* yang mana Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kegiatan internasional tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional, salah satunya karena ada peningkatan kunjungan wisatawan asing. Sektor usaha yang akan menerima manfaat mencakup penginapan, penerbangan, rumah makan, dan kerajinan UMKM. Tentu saja perhelatan akbar ini diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sebuah pembuktian bahwa Indonesia mampu handle event berkelas Internasional.

5 Kategori Keunggulan Indonesia

Berdasarkan rilis dari Anholt-Ipsos Nation Brand Index 2021, Indonesia berada pada peringkat 43 dari 60 negara. Terdapat lima kategori yang menjadi keunggulan Indonesia, yakni *Open for Business* (keterbukaan bisnis) di peringkat 22, Memiliki kekayaan budaya, sejarah, kuliner di peringkat 26, Pertumbuhan pendapatan perkapita yang kian membaik di peringkat 27, *Adventure* (petualangan) di peringkat 32, dan *Quality of Life* (hidup berkualitas) di peringkat 35.

Merupakan tugas kita sebagai humas pemerintah untuk mengampanyekan lima keunggulan yang menjadi kekuatan Indonesia yang diakui internasional. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor pariwisata yang dampaknya dapat kita

rasakan pada kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Hal ini tentu saja tidak cukup untuk dibangun hanya dengan jargon dan narasi semata. Humas pemerintah harus mampu berpikir strategis dalam menetapkan strategi komunikasi yang efektif. Mengingat keberadaan humas sebagai corong informasi pemerintah dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat bahkan dunia. Ke depan kerja-kerja kehumasan bukan lagi hadir sebagai pemadam kebakaran, tetapi sebagai upaya edukasi dan sosialisasi serta harus antisipatif dengan kemungkinan-kemungkinan respons yang akan muncul. Humas harus menguasai data untuk menguatkan literasi digital pada masyarakat sebagaimana respons perbandingan anggaran pada Mandalika dengan beasiswa KIP-K.

Nation branding, a means to build and maintain a country's strategic advantage with the purpose of economic growth. In the same light, nation branding is understood as the process of employing publicity and marketing to promote selected images of a geographical location (Gold & Ward, 1994).

Melihat definisi tersebut, totalitas pemerintah memberikan dukungan MotoGP Mandalika merupakan sebuah cara untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu dan memiliki keunggulan, sehingga secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini nation branding merupakan sebuah upaya *recovery* untuk meningkatkan kepercayaan dunia, bukan sekadar jargon.

Public Relations Begins at home demikian yang dikemukakan oleh Bapak Public Relations, Ivy Lee. Hal ini dapat dipahami sebagai keserasian antara apa yang dikatakan dan perbuatan. Sebagai humas pemerintah tugas kita untuk mengkomunikasikan perhelatan MotoGP Mandalika sebagai awal titik balik bangkit dari keterpurukan pasca pandemi menuju perhelatan akbar G20.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, menyampaikan pentingnya narasi nation branding dari humas untuk membangun identitas negara Indonesia, dan membangun sektor pariwisata melalui forum Presidensi G20 Indonesia. Menurutnya, nation branding memegang peran penting untuk menciptakan nilai lebih Indonesia dibanding negara lain.

Kolaborasi antar humas pemerintah menjadi kata kunci penting lainnya. Dengan kata lain kerja-kerja kehumasan tidak dapat dilakukan sendirian. Humas pemerintah harus mampu menghapus ego sektoral karena tugas humas adalah kerja kolosal. Semua pihak harus bergerak dan berkomunikasi termasuk mengajak masyarakat sebagai mitra strategis humas pemerintah.

Dengan mengusung tema, “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa”, tugas humas pemerintah saat ini adalah terus membumikan narasi presidensi G20 dengan menyuarakan kebaikan Indonesia di mata dunia. Sehingga kampanye tentang kesiapan Presidensi G20 dapat dikomunikasikan dan mendapat perhatian masyarakat global. Akhirnya, dari humas pemerintah, kita pulih bersama!

* * * * *

Menarik Perhatian Publik terhadap Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Ahmad Sirajudin, S.E.

Indonesia resmi menjadi tuan rumah dalam perhelatan Presidensi G20 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di dua tempat atau daerah terpisah, yaitu Bali dan Belitung. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia demi suksesnya event berskala internasional tersebut, mulai dari infrastruktur seperti penyiapan standar layanan acara, protokol, konsuler, akomodasi logistik, transportasi, *venue* rangkaian presidensi termasuk KTT, pertemuan tingkat menteri, tingkat deputi, *Working Group*, hingga penyiapan sistem aplikasi untuk *track and trace* guna mengontrol penyebaran Covid-19.

Selain itu, informasi mengenai Presidensi G20 Indonesia oleh Pemerintah telah di publish ke berbagai media, termasuk media massa seperti televisi, radio, media cetak Koran, Majalah dan sejenisnya, termasuk media sosial. Hal itu dilakukan agar event tersebut berjalan lancar dan sukses.

Tema Presidensi G20 tahun 2022 adalah “*Recover Together Recover Stronger*” dan mengangkat tiga isu prioritas utama yang memerlukan tindakan kolektif secara global, yaitu berkenaan dengan arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, transformasi digital dan ekonomi. Mengutip bisnis.com 14 September 2021 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebutkan bahwa panitia nasional akan menggelar

sejumlah side event berupa pameran, gelar budaya, promosi produk dalam negeri dan sejenisnya selama rangkaian Presidensi dan KTT G20 di beberapa lokasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mengingat saat ini masih dalam suasana Pandemi Covid-19.

Begitu pula dengan prosedur keamanan akan merujuk ke SOP, karena menyangkut keamanan para kepala negara, menyangkut martabat negara, tetapi tetap ramah. Bahkan dua lokasi dengan pulau terpisah juga telah dilakukan peninjauan oleh panitia nasional dan daerah yang ditunjuk. Kemudian menggelar pertemuan-pertemuan guna memastikan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tidak mengalami hambatan.

Seiring berjalannya waktu sejak didapuk menjadi tuan rumah beberapa waktu lalu, hingga sekarang nuansa tuan rumah Presidensi G20 Indonesia terlihat masih belum membumi dan memasyarakat. Contohnya di Bangka Belitung yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan G20 tahun 2022, masyarakatnya bisa dibilang masih adem ayem dan seolah-olah tidak ada perhelatan dunia yang bakal digelar. Kalaupun ada, masih sebatas aparat pemerintah daerah setempat. Tak bisa dipungkiri, sikap masyarakat itu lebih kepada persoalan sosial dan ekonomi yang disebabkan saat ini dalam suasana Pandemi Covid-19, di mana aktivitas masyarakat dibatasi. Di samping itu, faktor lainnya di waktu bersamaan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng menjadi isu yang lebih viral, walaupun perlahan-lahan persoalan ini sudah bisa diatasi Pemerintah.

Berkaca dari apa yang dipaparkan secara singkat di atas, saatnya *Government Public Relations* (GPR) atau yang biasa dikenal dengan praktisi Humas Pemerintah harus kreatif. GPR wajib memainkan perannya untuk mengajak masyarakat ikut peduli dan terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 tersebut.

Kreativitas GPR adalah hal yang sangat dinanti-nantikan bagaimana membangun citra positif baik di mata publik di dalam negeri maupun luar negeri. Praktisi Humas harus menjadi penyambung lidah dan gerak Pemerintah, khususnya berkenaan dengan Presidensi G20 Indonesia 2022. Didalam studilmu.com menjelaskan bahwa

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, benar-benar hal baru atau suatu ide baru diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada, dan menjadikannya hal baru.

Clark Moustakas seorang ahli dalam buku yang ditulis oleh Munandar terbitan tahun 1995, sebagaimana dikutip melalui hot.liputan6.com menjelaskan Kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain.

Namun disini, Kreativitas GPR yang dimaksudkan yaitu langkah jitu seorang Praktisi Humas Pemerintah dalam menyampaikan informasi dan membangun perhatian publik terhadap Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, kepada masyarakat dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, misalnya Apa itu Presidensi G20? Negara mana aja yang terlibat di dalamnya? Apa tujuan dan manfaatnya? Seberapa pentingkah keterlibatan masyarakat?

Sedangkan ke masyarakat di luar negeri, apa hal positif yang kita sampaikan, misalnya kuliner Indonesia, sumber daya alamnya yang masih asri, masyarakatnya yang ramah, terbuka bagi setiap pelancong, sangat toleran, dan hal-hal menarik lainnya. event ini sebagai momentum menjadikan Pranata Humas Berkelas Dunia.

Informasi yang mendukung Presidensi G20 Indonesia itu bisa dikemas dalam berbagai macam media yang ada, mulai dari media sosial pribadi Praktisi Humas Pemerintah, media sosial instansi pemerintah dimana Humas Pemerintah bertugas seperti IG, Fb, Tweeter, Youtube, Tiktok, Website internal Pemerintah, maupun Media Massa yang ada, apakah itu televisi, radio, media online, Media Cetak (Koran/Majalah/Buletin), spanduk, baliho, pamphlet, selebaran online, dan media-media lainnya.

Tidak sekadar itu, seorang GPR bisa menjadi fasilitator melalui forum formal maupun non formal melalui berbagai event, yang tujuannya menyampaikan informasi-informasi positif terkait Presiden G20 Indonesia yang akan berlangsung pada akhir tahun 2022 mendatang. Informasi tersebut oleh GPR harus disampaikan melalui beraneka macam media seperti yang disebutkan di atas,

secara berkelanjutan dan konsisten. Bahkan perlu dibuatkan *content calendar* di media sosial berkenaan dengan brand image Presidensi G20 Indonesia. Yuk! Kita dukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

* * * * *

Pranata Humas dan Narasi Keindonesiaan dalam Presidensi G20

Oleh: Dewi Yuliyanti, S.Sos.

Untuk kesekian kalinya, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sebuah pertemuan berskala internasional. Kali ini, tak tanggung-tanggung Indonesia resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama satu tahun penuh. Proses serah terima Presidensi G20 dari Italia selaku tuan rumah G20 tahun 2021 telah berlangsung pada 31 Oktober 2021 di Italia. Sejak 1 Desember 2021 Indonesia telah memulai kiprahnya sebagai tuan rumah hingga puncaknya nanti pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.

Tahun ini tema yang diangkat *“Recover Together, Recover Stronger”*. Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh dunia bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Adakah terbersit perasaan lain saat membaca tema besar G20 ini? Pulih bersama, Pulih Lebih Kuat Bersama. Ini sangat Indonesia bukan? Ya, inilah salah satu semangat keindonesiaan yang menjiwai tema tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah

memainkan peran penting diplomasinya dalam G20. Selayaknya orang bertetangga, Indonesia selalu mengambil peran protagonis. Indonesia berusaha menghadirkan perdamaian dan semangat “*guyub rukun*” dalam komunitas regional maupun internasional. Sehingga kehadiran Indonesia membawa makna khusus bagi negara anggota lainnya. Rasanya baru kali ini tema yang mengajak pulih bersama dan bangkit bersama.

Di tengah situasi pandemi yang belum berakhir akibat virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia, lagi-lagi Indonesia membaca situasi ini dengan bijaksana. Tentu sebagai negara, kita punya kepentingan nasional yang harus diperjuangkan di tengah kepentingan internasional. Namun demikian semangat keindonesiaan tidak pernah lepas dalam perjuangan tersebut, Indonesia tampaknya tahu bagaimana cara menembus komunitas “*crazy rich*” internasional tanpa melupakan kepentingan kawasan dalam hal ini Asean dan sekitarnya mewakili negara-negara yang masih berkembang. Bagaimana Indonesia mampu meyakinkan anggota G20 dan dipercaya memegang Presidensi G20, ini tentu tidak lepas dari semangat gotong royong, guyub rukun yang ditawarkan. Keunikan yang terbesit di dalamnya seakan membuat negara lain tertarik untuk berkata “*Why not Indonesia?*”

Presidensi G20 merupakan sebuah pembuktian bahwa kepemimpinan Indonesia mampu memberi dampak bagi warga dunia. Indonesia telah dinilai mampu menjadi tuan rumah perhelatan ini sebagaimana negara maju lainnya. G20 menjadi ajang menjamu tamu sekaligus mengetengahkan keindonesiaan kita yaitu “*way of life*” Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Way of life ini ditampilkan dalam ciri khas, budaya, adat istiadat dan manifestasi budaya lainnya seperti musik, sastra, tari, dll. Suguhan ragam budaya beserta filosofi-filosofi di balik itu diharapkan mampu menciptakan *international impressions* atau kesan yang melekat bagi para delegasi anggota G20 dan warga dunia secara umum.

Keindonesiaan ini merupakan salah satu kekuatan *soft diplomacy* Indonesia yang akan diusung menuju pagelaran G20 hingga pada puncak KTT pada November mendatang. Dari semangat

keindonesiaan tersebut, kita ingin menarasikan bahwa dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama. Di sini Indonesia mengajak seluruh warga dan pemimpin dunia bergandengan tangan dan fokus pada kerjasama untuk terlibat dalam pemulihan diri dari pandemi serta bersama membangun dunia secara berkelanjutan. Indonesia melibatkan diri dalam upaya pemulihan dunia tidak hanya secara fisik tetapi juga jiwa, *Indonesia is a healing place for all*. Di samping itu, *side event* G20 yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia menarasikan Indonesia sebagai tempat yang aman, sehat dan terbuka.

Narasi keindonesiaan harus menjiwai seluruh kegiatan di mana rangkaian event G20 digelar. Pada setiap suguhan budaya, delegasi diperkenalkan dengan nilai-nilai adiluhung Indonesia, sehingga peserta dapat menggali nilai bersama. Dengan demikian para delegasi mengambil *lesson learned* yang positif dari setiap aktivitas yang diikutinya selain tentu saja impressi keunikan budaya Indonesia itu sendiri.

Menarasikan keindonesiaan juga merupakan cara untuk menumbuhkan partisipasi aktif publik dalam rangka kegiatan G20 dan menimbulkan rasa bangga masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan berpartisipasi secara sukarela turut menyebarkan berita baik dan informasi positif tentang G20 melalui kegiatan-kegiatan yang bernuansa Indonesia seperti lomba-lomba permainan tradisional, lomba layangan, lomba memancing yang menggunakan **keywords** atau kata kunci di berbagai ruang publik, misalnya Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, Kerjasama dan Pulih Bersama.

Dengan demikian, Indonesia memainkan peran penting untuk menumbuhkan *trust* dan impresi tidak hanya bagi delegasi internasional G20 namun juga masyarakat Indonesia. *Event* G20 harus menjadi sebuah monumen kebanggaan bagi dunia dan juga masyarakat Indonesia. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton, namun juga mampu berpartisipasi aktif menjadi bagian kepanitiaan besar ini. Sebagaimana kebanggaan kita terhadap keberhasilan *event* internasional sebelumnya seperti *Asian Games* tahun 2018, begitu pula dengan G20 ini. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat luas dengan menggunakan logo

dan *keywords* keindonesiaan secara massif diharapkan mampu menimbulkan demam G20.

Pranata Humas sebagai bagian dari manajemen komunikasi pemerintah, merupakan garda terdepan yang diharapkan mampu ikut serta membumiharaskan keindonesiaan dan menciptakan demam event G20 ini. Peran serta yang paling praktis dapat diambil alih oleh pranata humas di instansi masing-masing baik pusat maupun daerah antara lain melalui pengolahan konten rubrikasi di media sosial, sosialisasi event G20 hingga ke tingkat masyarakat lokal bisa dalam bentuk *story telling* berbahasa lokal sehingga dapat dipahami, menyuguhkan agenda konten ringan berupa sosok inspiratif yang mengangkat narasi keindonesiaan. Untuk menarik perhatian, konten dan rubrikasi media sosial dapat menyuguhkan quiz terkait G20, isu trivia atau *fun fact* pertemuan G20. Selain itu, dapat pula ditampilkan kegiatan budaya Nusantara yang dihubungkan dengan nilai-nilai adiluhung.

Pranata Humas memiliki tugas penting yaitu menciptakan narasi keindonesiaan dalam semua media *engagement* melalui logo dan kata kunci “Bhinneka Tunggal Ika”, gotong royong, kerjasama, pulih bersama. Kata-kata tersebut harus selalu digaungkan sehingga publik mendapat kesan yang melekat tentang G20 ini. Dapat dikatakan agenda komunikasi publik ini merupakan pekerjaan rumah selama setahun hingga pertemuan puncak KTT G20 di Bali nanti. Peran humas adalah memastikan bahwa pesan seputar G20 tersebut tidak hanya *sent*, melainkan *delivered*. Pesan tidak hanya diterima melainkan mampu dipahami dan dirasakan masyarakat yang menerimanya. Masyarakat ikut merasa memiliki *event* ini dan bangga akan keindonesiaannya. Ini merupakan peran Pranata Humas dalam membangkitkan partisipasi publik dan menciptakan kesadaran masyarakat.

Pada saat yang sama, Pranata Humas dituntut untuk menghadapi terpaan *hoax* di tengah perkembangan media yang pesat saat ini. Humas harus mampu bekerjasama dengan para pihak untuk memastikan *hoax* seputar G20 dapat ditangani dengan cepat dan mampu menciptakan kepercayaan publik.

Event G20 ini akan membawa serta seluruh pemangku

kepentingan dalam atmosfer keindonesiaan, adat istiadat, *way of life* Indonesia melalui pengalaman dan kesan yang ditimbulkan. Pranata Humas sebagai mitra strategis di lingkaran pemerintah memainkan peran penting dalam diseminasi informasi dan membumikan narasi keindonesiaan sehingga bermuara pada terciptanya rasa bangga publik dan rasa memiliki event ini. Sementara itu keberhasilan event G20 ini akan menciptakan kepercayaan internasional yang merupakan modal utama dalam meneruskan diplomasi di kancah dunia, demi kepentingan nasional dan kawasan. *Let's Recover Together, Recover Stronger!*

* * * * *

Menu Spesial Presidensi G20 Indonesia: Covid-19, Pemulihan Ekonomi, dan Geopolitik

Oleh: Edri Susilo

Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah atau keketuan/presidensi G20 pada tahun 2022. Secara resmi Presidensi G20 Indonesia dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga berakhir di bulan november 2022 mendatang. Presidensi G20 diemban Indonesia di tengah kondisi dunia yang tidak biasa dan kondisi yang tidak normal atau bisa dikatakan dalam kondisi dunia yang tidak baik-baik saja. Selama dua tahun terakhir, dunia berjibaku melawan pandemi covid-19 yang telah merenggut nyawa lebih dari enam juta jiwa. Tidak sampai disitu, efek pandemi menjalar hingga memporak-porandakan tatanan sosial dan ekonomi global. Ditengah upaya semua negara untuk bangkit dari pandemi, sekali lagi dunia digegerkan konflik Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan kondisi geopolitik bergejolak, yang tentunya akan merembet ke sektor yang lain.

Dihadapkan pada situasi permasalahan global dengan skala yang begitu luas, banyak kepentingan, serta permasalahan yang kompleks, Presidensi G20 Indonesia tentunya menyajikan menu pembahasan yang cukup spesial. Pembahasan yang membuat kerja G20 makin berat untuk merumuskan solusi atas segala sajian masalah yang sedang dihadapi dunia saat ini. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 untuk mengorkestrasi agenda pembahasan G20 menuju arah solusi yang diharapkan. Di Sisi

yang lain, penunjukan Indonesia sebagai Presidensi G20 merupakan bentuk kepercayaan global atas kepemimpinan Indonesia di kancah internasional dan sekaligus menandai Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang memimpin pelaksanaan presidensi G20.

Sebelum mengupas lebih jauh, sebagai informasi G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Perlu diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.

Dengan mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*, Indonesia mengajak seluruh anggota G20 dan negara-negara di seluruh dunia untuk bersama-sama saling mendukung agar dapat pulih bersama serta tumbuh ke arah lebih kuat dan lebih baik. Pentingnya tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif di antara negara-negara maju utama dan ekonomi berkembang di seluruh dunia menjadi harapan bagi dunia untuk memecahkan berbagai macam persoalan dunia saat ini. Semangat kebersamaan ini akan dibawa Indonesia dalam memimpin dan mengorkestrasi forum-forum diskusi dan pembahasan di pertemuan G20.

Adapun isu atau agenda prioritas yang akan dibahas dalam presidensi Indonesia meliputi berbagai aspek. Berdasarkan laman resmi G20, Indonesia akan fokus pada tiga pilar utama untuk Presidensi G20 yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital. Prioritas ini sebagai respon Presidensi G20 Indonesia untuk menjawab atas kondisi dan tantangan permasalahan global yang saat ini melanda dunia yaitu pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi untuk keluar dari krisis.

Selain hal tersebut, kondisi geopolitik Ukraina-Rusia yang pecah sejak februari lalu akan semakin mewarnai dan mempengaruhi peta diskusi di Forum G20. Dengan Konflik tersebut akan menimbulkan polarisasi kepentingan khususnya Amerika dengan sekutunya dan Rusia. Apalagi kondisi geopolitik tersebut sudah mulai merembet

ke sektor sektor yang lain khususnya sektor ekonomi. Tentu permasalahan geopolitik Rusia Ukraina mau tidak mau akan menjadi menu wajib dalam pembahasan di pertemuan-pertemuan G20 bersama dengan menu pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi global.

Terdapat kesamaan antara permasalahan covid-19 dengan kondisi geopolitik Ukraina-Rusia yaitu sama-sama langsung berdampak dan menghantam sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 sebagaimana diketahui telah melumpuhkan roda perekonomian global mengacak-acak tatanan normal ekonomi. Yang lebih rumit pandemi covid melahirkan ketidakpastian, yang mana tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Pun demikian, konflik Ukraina-Rusia juga berdampak cukup langsung kepada perekonomian global. Meskipun saat ini belum separah dampak covid-19, namun tidak menutup kemungkinan perekonomian akan terdampak lebih dalam. Banyak negara memberikan sanksi dalam bentuk sanksi ekonomi kepada Rusia. Hal ini tentu dengan konsekuensi akan menimbulkan gejala baru bagi perekonomian karena Rusia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Paling tidak yang telah dirasakan adalah naiknya harga minyak dunia yang sehingga berdampak pada naiknya harga beberapa komoditas.

Karena G20 merupakan perkumpulan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tentu kesepakatan yang dirumuskan forum G20 akan sangat berdampak kepada arah perekonomian dunia. Hal ini mengakibatkan semua negara memiliki kepentingan dalam forum G20 karena permasalahan utama dunia saat ini selalu terpaut kepada sektor ekonomi. Apabila menilik dari sejarah terbentuknya G20 dalam laman resmi G20, awal terbentuknya G20 pada tahun 1999 bertujuan untuk membahas kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional. forum ini dibentuk sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999. Jadi peran G20 memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dunia saat ini.

Lalu sebagai tuan rumah, pemegang presidensi G20, bagaimana Indonesia akan menjawab tantangan untuk merumuskan solusi dan

mencapai tujuan besar yang ingin dicapai dalam bagi dunia saat ini?

Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonom Global

Covid-19 menjadi pukulan telak untuk masyarakat dan negara di seluruh dunia. Berawal dari sektor kesehatan covid-19 merembet ke sektor ekonomi dan sosial yang menjadikan dunia porak-poranda. Disatu sisi aktivitas publik harus dibatasi bahkan beberapa sampai dilakukan *lockdown* untuk menghentikan penularan covid-19. Secara langsung hal tersebut membuat perekonomian menjadi down dan berhenti berputar yang menimbulkan kerugian cukup besar. Seperti keterangan resmi Kementerian Keuangan bahwa Covid-19 telah menelan biaya hingga USD 12 triliun dan lima juta jiwa meninggal per oktober 2021.

Pada akhirnya, para menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 pun sepakat untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi. Mekanisme meliputi kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan antar negara begitu terjadi outbreak pandemi, dan bagaimana pendanaannya. Untuk itulah negara G20 sepakat membentuk satuan kerja yang disebut joint finance health task force (JFHTF) yang merupakan satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response (PPR) dari pandemi. Task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia.

Dalam hal ini Indonesia selaku pemimpin JFHTF di Forum G20 harus meyakinkan seluruh anggota bahwa permasalahan pandemi merupakan masalah bersama untuk itu solusinya pun harus dikerjakan bersama-sama. Semua negara harus bekerjasama dan saling mendukung untuk keluar dari pandemi. Negara maju harus membantu negara berkembang dan negara miskin. Misalnya dalam hal pengadaan vaksin obat-obatan harus ada bantuan untuk saudara kita yang belum bisa memenuhi kebutuhan vaksin. Bantuan juga sangat diperlukan dalam hal dukungan financial, bagaimanapun untuk penanggulangan pandemi dibutuhkan biaya dan hal tersebut sangat tergantung dari kemampuan keuangan di setiap negara.

Geopolitik Ukraina-Rusia

Mengutip dari beberapa media massa yang menyatakan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan menghadiri KTT/Summit G20 di Indonesia yang mana sangat ditentang oleh Amerika Serikat dengan sekutunya. Bahkan Amerika menyatakan tidak akan datang ke forum G20 apabila ada Rusia. Namun, sebaliknya China mendukung Presiden Rusia menghadiri KTT G20. China juga menyebut bahwa Rusia anggota G20 yang penting dan tidak bisa diusir oleh negara lain.

Sadar menjadi medan tarik-menarik antara Rusia dengan Amerika dan sekutunya, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Sebagai Presidensi G20 tentunya, dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya, adalah mengundang semua anggota G20. Sikap Indonesia ini menunjukkan kedewasaan Indonesia dalam forum Internasional yang tidak ingin menjadi Sandra Tarik menarik antara negara yang sedang berkonflik. Tentunya tidak hanya selesai sampai disitu, karena untuk menjamin suksesnya Presidensi G20, Indonesia harus bisa memastikan tercapainya visi dan agenda prioritas yang mana membutuhkan partisipasi dari negara anggota G20 baik kubu Rusia maupun Kubu Amerika dan sekutunya.

Dengan kekuatan ekonomi dan segala keunggulannya, tentu baik kubu Rusia maupun kubu Amerika memiliki peranan sangat penting untuk mensukseskan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia. Untuk itu cara paling ideal adalah dengan mendamaikan mereka. Mungkin bukan sesuatu yang tidak mungkin apabila berkaca dengan pada sejarah kepemimpinan dalam forum internasional. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kelebihan sebagai negara yang netral sehingga ideal untuk menjadi mediator untuk mendamaikan kedua kubu yang berseteru. Selain itu hubungan baik Indonesia dengan Amerika maupun dengan Rusia dapat digunakan untuk melakukan diplomasi karena tidak dipungkiri konflik hanya akan menimbulkan kerugian. Sehingga bukan sesuatu yang tidak mungkin apabila kedua negara Rusia dan Amerika dapat duduk berdampingan dalam KTT/Summit G20 november mendatang.

Pada Dasarnya semua negara menyadari bahwa berbagai

permasalahan yang ada di dunia ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara. Kemajuan teknologi, mobilitasi yang makin tinggi, perdagangan global semakin menyadarkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri semua saling membutuhkan. Untuk itu Semua negara seharusnya sepakat untuk bersama-sama, saling mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan umat manusia. Presidensi G20 Indonesia *Recover Together, Recover Stronger*.

* * * * *

Mengaktifkan Humas di Tengah Kerumunan

Oleh: Erlinda Puspita Ningrum, S.Sos., M.Commun.

Hubungan Masyarakat (Humas) belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dunia, sehingga masih terjadi multitafsir tentang praktiknya secara global. Hal ini disebabkan humas sebagai pengetahuan masih terhitung baru, sekitar 100 tahunan, jika dibandingkan ilmu lainnya. Oleh karena itu, akademisi maupun praktisi bidang kehumasan masih mencari format yang paling cocok sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misi pencarian ini kemudian diwarnai oleh globalisasi dan digitalisasi, yang memungkinkan konektivitas dapat berubah-ubah dan multi-arah, sehingga membuat diskusi kehumasan semakin kompleks, terutama dalam memahami publik.

Menurut penelitian Johanna Fawkes di tahun 2018, setidaknya ada empat pendekatan terhadap praktik kehumasan di dunia, yaitu *Excellence*, *Advocacy*, *Dialogue*, serta *Critical and Cultural Approaches*. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki fokus yang berbeda. Pendekatan *Excellence* menjadikan organisasi sebagai pusatnya, dimana humas secara normatif menghubungkan organisasi dan publik agar simetri. Berbanding terbalik, pendekatan *Advocacy* justru menitikberatkan pada komunikasi asimetri organisasi, sebagai upaya persuasi dari humas. Adapun pendekatan *Dialogue* fokusnya adalah publik, dimana humas memfasilitasi kesempatan yang sama untuk saling berkomunikasi. Terakhir, *Critical and*

Cultural Approaches mendorong humas bersikap skeptis terhadap perannya di masyarakat, sehingga perlu mencari realitas sosial untuk menjustifikasi nilai positifnya.

Apapun pendekatan yang dipakai, memahami publik sangat penting bagi efektivitas kegiatan humas. Dengan mengenali karakteristik dan mengidentifikasi jalur yang tepat untuk mencapai publik, humas mampu membuat pesan yang disampaikan menjadi kesepahaman bersama secara sukarela. Namun, globalisasi telah mengubah konsep publik dan masyarakat menjadi tidak terbatas lokasi dan tidak permanen. Untuk itu, humas perlu menerapkan pendekatan alternatif dengan menciptakan publik buatan manusia yang lebih memfokuskan pada apa yang mereka lakukan, bukan pada siapa mereka (Dittenhofer & Valentini, 2015).

Pendekatan Alternatif Humas

Presidensi G20 Indonesia melalui pedoman Narasi Tunggal yang dibuat oleh Kantor Staf Presiden telah menetapkan target audiens, yaitu internasional, delegasi & elite domestik, serta domestik akar rumput. Audiens internasional meliputi deputi, menteri, dan pimpinan puncak. Sementara, delegasi dan elite domestik meliputi perwakilan 19 negara serta tokoh penting dalam negeri. Sedangkan domestik akar rumput mengarah kepada masyarakat kecil Indonesia selaku tuan rumah. Adapun narasi tunggal yang ingin disampaikan yaitu ‘Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama’. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penentuan target audiens dan narasi tunggal menggambarkan pendekatan *Advocacy* bahwa pemerintah pusat menentukan pembicara, pendengar, dan pemilihan pesan sebagai upaya persuasi.

Upaya tersebut patut diapresiasi humas Pemerintah Daerah karena telah menyederhanakan masyarakat dunia yang luas sebagai publik sasaran. Namun, upaya tersebut tidak mampu mengindikasikan kondisi aktual masyarakat modern yang kompleks. Faktanya, selalu ada masyarakat yang memilih untuk independen dan menolak digolongkan ke dalam kategorisasi publik tersebut. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang masuk ke lebih dari satu kategori. Untuk itu, penentuan kelompok publik dalam strategi humas menjadi sia-sia.

Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian dan Lembaga bertugas untuk menciptakan demam G20 dengan narasi yang menimbulkan kebanggaan dan *sense of belonging* masyarakat Indonesia selaku tuan rumah. Caranya dengan mengorkestrasikan narasi melalui kampanye kinetik, seperti lomba layangan, lomba memancing, dan sebagainya. Terkait ini, alih-alih menetapkan pecinta layangan dan memancing sebagai target audiens, humas sebaiknya melakukan *social listening* mencari kerumunan berdasarkan pola perilaku masyarakat terhadap isu presidensi G20. Misalnya, humas menganalisis perbincangan seputar tagar #g20indonesia di platform media sosial, kelompok mana yang mendukung, kelompok mana yang menolak, tema besar apa yang muncul dari dukungan dan penolakan, kelompok mana yang menyebarkan hoaks, dan seterusnya.

Hasil *social listening* ini yang kemudian menjadi dasar strategi komunikasi humas. Keuntungannya, kerumunan yang teridentifikasi memang secara aktual terlibat dalam isu G20, terlepas dari siapa maupun asal budaya mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik untuk meramalkan narasi secara sukarela menuju demam G20.

Sebagai upaya alternatif, humas Pemerintah Daerah dapat memantau apa yang sebenarnya dilakukan masyarakat lokal dalam keseharian yang berhubungan dengan presidensi G20 untuk kemudian mengidentifikasi kesamaan pola atau tema. Tema inilah yang kemudian disebut “swarm” atau kerumunan oleh beberapa akademisi. Dittenhofer & Valentini (2015) mengilustrasikan kerumunan sebagai pola kebiasaan yang tidak teratur, tidak merata dan berpindah ke berbagai arah, kemudian menjadi awal yang potensial bagi praktik dan penelitian humas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerumunan adalah kumpulan orang dan sebagainya yang tidak teratur dan bersifat sementara. Jadi kerumunan bukan kelompok masyarakat yang permanen. Itulah sebabnya kerumunan tidak sama dengan publik.

Untuk itu, humas perlu mengkritisi persepsinya sendiri terkait publik. Dengan mencari kerumunan, humas bisa mempelajari bagaimana sebenarnya komunikasi terorganisir di masyarakat, dan bukannya mencoba mengorganisasi komunikasi masyarakat.

Mempelajari kerumunan berarti mengidentifikasi kebiasaan, ritual, tren yang berubah-ubah di masyarakat lokal, ketimbang budaya asal masyarakat itu sendiri. Kelebihannya adalah humas dapat mengenali pola komunikasi yang aktual. Dari sini, humas perlu berada di jajaran manajerial untuk mensinkronkan strategi komunikasinya dengan kerumunan lokal yang terjadi. Dengan memastikan hal tersebut, kesenjangan antara organisasi, humas, dan publiknya akan memudar yang lambat laun mewujudkan humas global.

* * * * *

Dari Humas untuk Dunia

Oleh: Fajar Herlambang, SE., MM.

Seluruh rakyat Indonesia merasa bangga, tahun ini menjadi tuan rumah dalam Presidensi G20. Perhelatan ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia layak disamakan oleh negara maju di dunia.

Sejak 1 Desember 2021 Indonesia secara resmi menjadi tuan rumah Presidensi G20, usai Presidensi 2021 yang dilaksanakan di Roma-Italia hingga serah terima Presidensi berikutnya. Kali ini, Indonesia mengusung tema, *Recovery Together, Recovery Stronger* yang mempunyai arti pulih bersama, lebih kuat. Melalui tema tersebut diharapkan akan mendorong seluruh negara anggota untuk pemulihan yang merata, lebih kuat dan pertumbuhan berkelanjutan.

Melalui perhelatan akbar ini, Indonesia akan mendapatkan pundi - pundi dari para delegasi yang akan hadir. Sesuai data G20 Pedia, perhelatan akbar ini akan menciptakan kontribusi US\$ 533 juta atau sekitar Rp.7,4 Triliun terhadap PDB Indonesia serta adanya peningkatan konsumsi domestik hingga Rp.1,7 Triliun.

Selain itu pula, pemulihan perekonomian di dunia maupun domestik menjadi isu terkini, guna meningkatkan konsumsi masyarakat, investasi dan kegiatan ekspor – impor yang tumbuh pesat. Sehingga Indonesia akan menerima pajak pertumbuhan lebih dari 18 persen dan penerimaan PNPB mengalami peningkatan senilai 23 persen. Selain membahas terkait Finance Track, Group Twenty juga membahas terkait bidang – bidang yang lebih luas selain permasalahan keuangan. Namanya Sherpa Track, dimana salah satu

pertemuan itu terkait dengan Pariwisata.

Pertemuan bidang pariwisata akan menjadi faktor yang membanggakan Indonesia untuk memamerkan keindahan budaya unggulan yang ada di Indonesia, juga memperlihatkan estetis keindahan pulau di belahan Indonesia. Seperti, pesona Labuan Bajo, elok Pulau Bali maupun ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau yang dikenal dengan ajang MotoGP yang akan dilaksanakan di Mandalika, Lombok.

Selanjutnya, peran UMKM yang ada di Indonesia juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Perusahaan kecil ini mampu mendorong kemajuan Indonesia serta mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat.

Menuju Humas Berkelas Dunia

Perhelatan tahunan ini, Humas pemerintah akan mengambil peran yang strategis guna menyukseskan kegiatan tahunan dengan cara memasifkan kegiatan G20, salah satunya melalui saluran media sosial pada seluruh Kementerian/Badan/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Tujuannya akan tercipta narasi yang positif di masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat Internasional.

Langkah awalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan surat terkait imbauan diseminasi informasi terkait Indonesia sebagai Presidensi G20. Surat itu menyebutkan bahwa Pranata Humas akan berkontribusi dalam menyosialisasikan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, melalui media sosial maupun pesan singkat dengan konten - konten yang kreatif.

Selanjutnya, Pranata Humas dianjurkan membuat konten untuk mengedukasi masyarakat, memviralkan terkait pelaksanaan Presidensi G20, serta meluruskan kabar hoaks yang beredar dan mengacu pada sumber resmi lainnya.

Untuk memeriahkan perhelatan akbar ini, setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah juga diharapkan memasang baliho atau spanduk agar penyelenggaraan ini terlihat semarak. Selain itu, pemakaian logo resmi G20 akan terpasang pada setiap konten media sosial maupun kegiatan yang ada di Kementerian/Lembaga.

Guna mewujudkan langkah ini, dibutuhkan sinergitas, komitmen, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Memang tidak ada salahnya, Humas pemerintah seyogyanya dibekali suatu pemahaman terkait rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada G20.

Terdapat sekitar 157 pertemuan yang akan dilaksanakan. Selain di Bali, forum delegasi akan digelar di 19 kota di Indonesia. Humas Pemerintah tertantang untuk membuat suatu konten yang positif, menjelaskan dan memberikan pemahaman sehingga dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional.

Dulunya memang peran Humas Pemerintah sangat terbatas. Kini humas harus terdepan serta mempunyai keterampilan yang melampaui kemampuan humas sebenarnya. Bahkan bisa beradaptasi dan melakukan pekerjaan selain pekerjaannya. Selain menjadi “guide” pada setiap pertemuan, humas juga harus mempunyai kompetensi untuk mengikuti isu-isu yang menjadi pembicaraan dalam Group Twenty ini.

Jaman digitalisasi ini, peran humas pemerintah harus mampu mengkomunikasikan pada masyarakat terkait kegiatan maupun hasil G20 Indonesia dengan konten yang kreatif. Semua hal ini dilakukan guna memberikan keyakinan dan perhatian dunia Internasional.

“Mari kita sukseskan Presidensi G20, Dengan Sinergitas, Kreativitas dan Kolaborasi Humas Pemerintah menuju Indonesia Maju”

* * * * *

SAI20 Kawal Pemulihan Ekonomi Global

Oleh Fitri Yuliantri P.

Sudah dua setengah tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia. World Health Organization (WHO) mengumumkan secara resmi Covid-19 sebagai pandemi global pada 9 Maret 2020. Pengumuman itu seperti alarm peringatan. Setiap negara diminta untuk memperhatikan dan menetapkan kebijakan serius dalam menghadapinya.

Hingga akhir September 2022, WHO belum mencabut status pandemi covid-19. Berdasarkan data ourworldindata.org, jumlah orang yang terinfeksi covid-19 di seluruh dunia sampai dengan 8 April 2022, tercatat 618 juta jiwa.

Pengalaman baru dalam menghadapi pandemi mendorong hampir semua negara menetapkan kebijakan pembatasan wilayah. Oleh karena itu, pandemi tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan tetapi juga berdampak pada krisis ekonomi. Tidak ada negara yang tidak terdampak pandemi. Perekonomian global sangat terpengaruh. Ancaman resesi dan depresi menjadi perhatian semua negara.

Di Indonesia pada tahun pertama pandemi, mengutip katadata.co.id pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat minus 2,07%. Sedangkan pada tahun sebelumnya PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Pada tahun 2021, situasi sudah mulai membaik. Akan tetapi, besaran PDB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010,

ekonomi Indonesia tumbuh 3,69%. Nilai tersebut masih di bawah pertumbuhan sebelum terjadi pandemi. Ini memperlihatkan bahwa situasi masih belum pulih sepenuhnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi selama pandemi diikuti dengan dampak ekonomi lainnya. Terjadi penurunan penerimaan pajak, penurunan ekspor migas dan nonmigas, peningkatan jumlah pengangguran, dan penurunan jumlah wisatawan luar negeri dan dalam negeri yang sangat berpengaruh pada berbagai sektor, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Setelah dua tahun lebih terpuruk karena pandemi, saatnya semua negara bangkit. Keterpurukan akibat pandemi tidak boleh berlarut. Semangat kerja sama dan kolaborasi antarnegara perlu ditingkatkan melalui berbagai inisiatif bersama. Dunia harus segera pulih dari pandemi. Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, mendorong negara-negara G20 agar saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat.

Semangat Pulih Bersama

Semangat *'Recover Together, Recover Stronger'* digaungkan Indonesia melalui kelompok G20. Ada tiga prioritas utama yang diusung melalui Presidensi G20 ini, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut dalam inisiasi pemulihan ekonomi di Indonesia. BPK merespons cepat dalam menghadapi pandemi dan mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), guna menjaga tata kelola keuangan negara. Efektivitas, transparansi, kepatuhan pengelolaan, dan akuntabilitas keuangan negara harus tetap ditegakkan walaupun dalam keadaan darurat pandemi Covid-19.

Meningkatkan perannya di dunia internasional, BPK berinisiatif membentuk SAI20. Diketahui, *Supreme Audit Institution* (SAI) bertugas mengawal penggunaan dana publik oleh pemerintah. Dalam situasi pandemi, SAI berperan dalam mengawasi penggunaan dana publik dalam mengatasi krisis, sehingga kekayaan negara yang berasal dari masyarakat melalui pajak dapat digunakan dengan

transparans dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang demokratis dan dipercayai oleh masyarakat, sejalan dengan tujuan global SAI, yaitu memainkan peran strategis demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks kerja sama G20, lembaga pemeriksa atau SAI di masing-masing negara harus berperan sebagai mitra pemerintah. Selain itu, SAI20 juga harus dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik, serta menaikkan efektivitas program kebijakan di masing-masing negara.

Semua peran ini dilaksanakan dalam kerangka SAI20 sebagai *engagement group* (EG) terdepan di negara-negara anggota G20 dalam menciptakan pendekatan tata kelola keuangan pasca-Covid19.

Pembentukan SAI20 ini sangat penting bagi setiap SAI dari negara-negara G20. Melalui SAI20, mereka dapat berbagi pengalaman dalam penanganan Covid-19. Mereka dapat mempromosikan nilai dan manfaat dari pemeriksaan keuangan negara untuk demokrasi dan akuntabilitas pada yurisdiksi masing-masing. Hal tersebut dapat terlaksana walaupun SAI di setiap negara beroperasi di bawah mandat dan model yang berbeda.

Melalui forum ini, peluang untuk mendorong keterbukaan serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan demi peningkatan kualitas dan kedalaman pemeriksaan, serta meningkatkan ketahanan tata kelola keuangan diharapkan dapat tercapai.

Percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) adalah dua isu penting yang didorong melalui SAI20 dalam perhelatan negara-negara G20.

Mengenai isu percepatan pemulihan ekonomi, SAI20 berusaha meningkatkan kolaborasi multi-stakeholder dalam mencapai upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19. Dalam forum ini pula, SAI dari masing-masing negara berbagi strategi dalam melakukan audit di masa krisis yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempersiapkan arsitektur kesehatan global. Harapan lainnya,

SAI dapat berperan aktif dalam mendorong pemerintah untuk berpartisipasi dalam kerja sama kesehatan global.

Sedangkan dalam upayanya mendukung SDGs, SAI20 berusaha mencari tindakan kolaboratif dan memastikan tidak ada negara anggota G20 yang tertinggal, serta memastikan pemerintah di masing-masing negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ekonomi yang inklusif.

Sejatinya, tata kelola keuangan yang dikawal oleh SAI20, termasuk BPK di Indonesia, menunjukkan keseriusan negara-negara G20 dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia.

Inisiatif BPK dalam membentuk SAI20 merupakan upaya dalam menyukseskan Indonesia sebagai Presidensi G-20 dan meningkatkan peran Indonesia di panggung dunia.

Melalui Presidensi G20, saatnya Indonesia menunjukkan peran sebagai inisiator kelas dunia dalam berbagai bidang, termasuk peningkatan tata kelola keuangan negara melalui audit yang profesional.

* * * * *

5 Modal *Nation Branding* Indonesia Melalui G20

Oleh: Fitria Rizki Wijaya, S.Sos., M.I.Kom

Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah dalam *Presidensi Group of Twenty* (G20). Tahun ini G20 mengusung tema *Recover Together, Recover Stronger*. G20 sendiri merupakan kelompok informal yang beranggotakan Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, India, Australia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Rusia, Perancis, Turki, Afrika Selatan dan Uni Eropa. Selain itu G20 dihadiri juga oleh perwakilan dari negara-negara lain, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, IMF dan Bank Dunia.

Momentum G20 adalah waktu yang tepat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk *nation branding* Indonesia, mengingat banyaknya perwakilan dari banyak negara akan menghadirinya. Menurut Reibstein dan Bedi dalam www.usnews.com (2018) *nation branding* dapat memiliki dampak besar pada produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonominya. Mengembangkan dan meningkatkan reputasi suatu negara dalam skala global merupakan bagian penting dari pengelolaan suatu negara, seperti halnya mengembangkan dan mempertahankan merek perusahaan yang positif dan kuat merupakan bagian penting dari pengelolaan perusahaan. Merek ada di mana-mana, tetapi merek terbesar di dunia adalah negara. Merek negara yang baik dapat berarti kemakmuran yang besar bagi warganya dan masa depannya.

Belajar dari Korea Selatan

Puncak acara G20 diselenggarakan di Bali pada Oktober sampai November 2022. Sebelum acara puncak rangkaian acara G20 telah dilaksanakan, begitu juga dengan *nation branding*. *Nation branding* ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

Momentum G20 ini dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo dalam *nation branding* terkait politik. Ia lawatan ke beberapa negara dalam misi perdamaian bertemu Presiden Ukraina dan Presiden Rusia maupun menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara lainnya, salah satunya dengan Korea Selatan dalam rangka *Recover Together, Recover Stronger* setelah era pandemi Covid yang membuat ekonomi dunia terpuruk.

Mari belajar dari Korea Selatan, negara yang saat ini dapat dikatakan berhasil dalam *nation branding*. Presiden Korea Selatan, Lee Myuk Bak mendirikan *Nation Branding Council* pada 2009. Dewan ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan status global Korea Selatan dengan cara meningkatkan kredibilitas negara dan disukai di dunia internasional. Korea Selatan kini aktif dalam dunia internasional tidak hanya sebagai negara yang menguasai teknologi tinggi tetapi berperan dalam dunia hiburan global.

Dilihat dari keberhasilan Korea Selatan dalam *nation branding* bahwa memerlukan konsep yang jelas dan dilaksanakan secara terencana serta berkelanjutan. Korea Selatan menghasilkan hallyu atau Korean Wave sebagai *nation branding*nya. Hallyu atau Korean Wave yang merupakan budaya inilah yang membawa Korea Selatan dikenal dunia dan berimbas dengan semakin majunya perekonomian negaranya.

Nation branding lebih mengedepankan penggunaan *soft power* yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggul yang dimiliki Indonesia kepada dunia internasional. Setidaknya ada 5 modal yang kita miliki untuk membangun *nation branding* Indonesia via momentum G20.

Pertama, pariwisata Pulau Bali selama ini memang sudah banyak diminati untuk dikunjungi wisatawan mancanegara dan

bisa dijadikan sebagai sarana untuk *nation branding* Indonesia. Pelaku pariwisata tentu saja terlibat dalam perhelatan G20 dengan menyajikan *hospitality* yang terbaik kepada delegasi yang datang di acara G20 terutama untuk pelayanan hotel dan akomodasi. Kesempatan pelaku pariwisata untuk memulihkan sektor ekonomi Pulau Bali di bidang pariwisata.

Kedua, *Wonderful* Indonesia bisa kita tunjukkan ke dunia internasional melalui keragaman budaya yang bisa ditampilkan dalam atraksi budaya dan obyek wisata yang cantik dan beragam. Sebagai contohnya tari-tarian Bali yang sudah diakui oleh UNESCO dapat kita kenalkan sehingga semakin memantapkan *nation branding* Indonesia. Warisan budaya juga dapat dikenalkan salah satunya batik yang sudah dikenal oleh dunia. Batik bisa digunakan oleh delegasi Indonesia selama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Ketiga, kuliner Indonesia juga dapat dijadikan keunggulan dalam momentum G20 dengan mempromosikannya. Salah satunya rendang yang sejak 2013 telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang saat ini sudah mulai dikenal di dunia. Rendang juga diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia.

Alih-alih dilakukan sendiri oleh pemerintah, akan lebih efektif bila ada kolaborasi yang baik antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan masyarakat lokal atau pelaku pariwisata khususnya di Pulau Bali untuk dapat memanfaatkan momentum G20 sebagai sarana promosi melalui even pariwisata atau *tour event* untuk delegasi dari Konferensi Tingkat Tinggi G20. Masyarakat Indonesia merupakan aset penting dalam menciptakan *nation branding*. Masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya menjadi kekuatan untuk mengukuhkan *nasion branding* Indonesia.

Hal ini dapat kita pelajari dari even balap motor di Mandalika Lombok. Masyarakat Lombok dengan *hospitality* atau keramahannya telah memikat hati pembalap dunia dan kru yang tinggal di Lombok selama even tersebut merasa betah dan senang. Pelayanan terbaik yang diberikan masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam *nation branding*.

Keempat, produk-produk unggulan Indonesia. Produk unggulan dari Indonesia yang mempunyai kualitas ekspor seperti di bidang otomotif, maskapai penerbangan, makanan, garmen, dan lain-lain bisa juga dipromosikan. Kesempatan untuk mengenalkan produk-produk unggulan tersebut diharapkan akan membuka peluang kerja sama di bidang ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan negara lain terhadap produk-produk unggulan Indonesia sehingga dapat menciptakan investasi yang baik di Indonesia. Selanjutnya dengan semakin majunya perekonomian Indonesia tentunya semakin banyak membuka kesempatan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

Kelima, reputasi. Dalam menerapkan *nation branding*, reputasi menjadi kuncinya. Reputasi yang terbentuk dari kinerja yang baik yang disosialisasikan melalui upaya komunikasi yang tepat dan selalu didukung oleh perilaku yang konsisten.

Hal ini tentunya membutuhkan perencanaan dan implementasi secara konsisten dalam jangka panjang. Pranata Humas dapat berperan serta dalam upaya penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan *nasion branding* Indonesia. Kekuatan humas pemerintah ikut andil dalam kesuksesan pelaksanaan G20 dan upaya *nation branding*.

* * * * *

Memantik Semangat G20 Lewat Diseminasi Melek Media

Oleh: Hartanto, S.Ksi.

Sejak awal 2021 lalu PT. Telkomsel Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam hal ini Dinas Kominfoandi Kabupaten Mamasa telah menyepakati untuk membangun 36 menara telekomunikasi Telkomsel yang tersebar ke seluruh pelosok desa di wilayah Kabupaten Mamasa. Rencana pembangunan 36 menara tower tersebut akan rampung pada awal 2023 mendatang.

Lalu apa untungnya bagi masyarakat desa yang bermukim di daerah pinggiran, hidup dari bertani dan petani penggarap? Apa pula hubungannya dengan perhelatan *Group of Twenty* (G20) yang diselenggarakan di Indonesia tahun ini? Dua sisi inilah yang akan Penulis kupas karena hal tersebut menjadi isu yang saling berhubungan dalam sebuah kebangkitan bersama masyarakat dunia di tengah pandemi Covid-19 yang masih menghantui kehidupan bersama.

Indonesia yang didaulat menjadi Presidensi G20 pada 2022 ini dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” memberikan sebuah harapan bagi kehidupan di desa-desa sebagai kelompok terkecil dalam tatanan kehidupan kemasyarakatan, juga masyarakat perkotaan yang telah lama didera pembatasan sosial hingga berimbas pada keterpurukan ekonomi, memberikan harapan kepada kehidupan berbangsa dan bahkan harapan pulihnya kehidupan

masyarakat dunia dari imbas pandemi covid-19 yang telah menelan korban ratusan juta jiwa manusia.

Fokus pada Kabupaten Mamasa, merupakan salah satu kabupaten yang masih tergolong berusia muda di Provinsi Sulawesi Barat. Berdiri pada 2002 dan telah genap 20 tahun pada 11 Maret 2022 lalu. Pada 2 dasawarsa berdirinya kabupaten yang terletak di Pedalaman Quarles ini telah mendapat kado istimewa dari PT. Telkomsel, yakni pembangunan 36 menara telekomunikasi yang akan menjadi sarana terbukanya akses informasi ke seluruh pelosok masyarakat pinggiran pedesaan di Kabupaten Mamasa.

Sejalan dengan tema yang diusung pada perhelatan G20 maka masyarakat Mamasa yang sebagian besar penduduknya masih terisolasi oleh akses jaringan telepon seluler dan perangkat teknologi internetnya memberikan sebuah harapan bahwa mereka bakal tidak terisolasi lagi dalam hal akses informasi. Bahkan pada akhir maret 2022 telah dilaporkan bahwa sudah berdiri 16 unit menara tower Telkomsel dari 36 unit yang direncanakan. Artinya sebagian masyarakat pedalaman tempat membangun fasilitas akses informasi ini telah mulai menikmati informasi jaringan internet yang cukup cepat dengan akses fasilitas layanan 4G.

Dengan adanya fasilitas akses informasi yang memadai, tentu akan mengubah tatanan masyarakat dari kehidupan masyarakat tradisional yang sederhana menuju masyarakat informasi yang kompleks. Mereka dimungkinkan menerima sejumlah informasi yang dapat membangun kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya dan sektor kehidupan lain yang dapat menyulap tatanan kehidupan dari masyarakat analog menjadi masyarakat digital.

Harapan terbangunnya masyarakat informasi di daerah-daerah pinggiran pedesaan dengan segala fasilitas akses informasi yang lebih mudah, cepat, berkualitas dan kompleks akan menciptakan masyarakat urban baru yang memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Kondisi itu akan terwujud seiring peningkatan taraf ekonomi masyarakat karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi digital yang beragam. Kemudahan yang dimaksud, di antaranya adalah pemasaran hasil pertanian secara *online* di media

sosial maupun aplikasi jual beli lainnya, termasuk kemudahan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Melek Media

Di sisi lain masyarakat pinggiran yang baru tersentuh oleh teknologi informasi akan dihadapkan pada sejumlah tampilan hal baru di internet. Dampaknya dapat saja menjebak mereka dalam ketidakpastian model kehidupan selanjutnya akibat pengaruh budaya luar, khususnya dari barat (*westernisasi*). Budaya luar yang memiliki karakter berbeda dengan dapat menggusur keberadaan model budaya kita. Untuk itu, perlu disikapi dengan baik melalui upaya ‘melek media’ (*media awareness*)!

Media khususnya internet dan lebih fokus lagi media sosial memberikan akses informasi dan fitur-fitur digital. Internet memudahkan pengembangan usaha dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, internet menampilkan distorsi sosial dan budaya yang membahayakan kelangsungan kearifan lokal daerah. Inilah yang mesti disadari oleh masyarakat pinggiran pedesaan.

Media is just a media. Ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Kesadaran akan sisi baik dan buruk tersebut yang dimaksudkan dengan melek media atau kesadaran bermedia.

Tugas Pranata Humas Pemerintah memberikan penjelasan kepada khalayak yang terkena imbas dua sisi perkembangan teknologi informasi. Kita harus memberikan penjelasan kepada para pemangku kepentingan di desa-desa, kepada para pendidik, para orang tua, bahwa kita tidak serta merta menghardik anak-anak kita.

“Stop pegang Hape!” Kalimat tersebut lebih nyaman disampaikan dengan menjelaskan mana yang layak dan mana yang tidak layak ditonton, mana yang mesti dikembangkan dan tidak dikembangkan, mana cara berpakaian yang layak ditiru dan tidak layak ditiru. Kata kuncinya, ‘bukan media yang mesti kita waspadai tetapi diri kita sendiri yang mesti waspada agar tidak terjerumus terhadap pengaruh buruk media.’

Pelajaran melek media pada sentra-sentra rencana pembangunan sejumlah menara telekomunikasi di daerah pinggiran diharapkan dapat memberikan filter informasi, melindungi kehidupan sosial budaya, memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pinggiran agar mampu selaras dengan kehidupan ekonomi perkotaan.

Humas pemerintah diharapkan dapat terus mengagumkan pelajaran melek media. Masyarakat pedesaan didorong bangkit menuju sebuah peradaban baru yang lebih baik seiring dengan semangat penyelenggaraan G20. Mari kita bangkit bersama masyarakat dunia dalam keterpurukan akibat pandemi Covid-19!

* * * * *

Momentum G20, Kesempatan GPR Aktifkan Bauran Promosi

Oleh: I Aeni Muharromah, S.S., M.M.

Indonesia, satu-satunya negara berkembang di Asia Tenggara yang masuk dalam G20. Indonesia, sebagai tuan rumah G20, memiliki kesempatan strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Konsekuensinya mata dunia tertuju dan kiprah Indonesia dinanti masyarakat internasional. Inilah momen Indonesia berbenah diri menunjukkan kiprah perbaikan ekonomi setelah bangkit dari pandemik.

Momen 20 tahunan ini tidak boleh berlalu tanpa pesan. Perhelatan besar harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan didukung oleh seluruh aspek termasuk dukungan dari masyarakat luas. Sebagai humas pemerintah kita berpadu menyuarakan dan menyampaikan peran penting Indonesia untuk dunia. Humas sebagai corong pemerintah harus serta merta menyampaikan pesan dan menjual dengan apik menarik apa yang kita miliki.

Persiapan Presidensi G20 Indonesia, dalam rentang waktu satu tahun diibaratkan sebuah pagelaran. Maka, kita harus bisa memanfaatkan momen rentang waktu tersebut untuk mempromosikan semua yang dimiliki Indonesia, yang relevan dengan tema besar. Humas pemerintah terus membuka terobosan dengan berbagai strategi, sebab dunia sedang menoleh pada kegiatan presidensi G20.

Bauran promosi adalah sebuah kombinasi strategi yang paling baik dari berbagai variabel periklanan, *personal selling* dan alat

promosi lainnya. Semua promosi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dibuat oleh perusahaan atau organisasi dalam hal ini Pranata Humas (Prahum).

Menurut Kotler dan Amstrong, bauran promosi adalah perpaduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan. Bauran promosi tersebut untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan.

Bauran promosi adalah gabungan dari alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan serta memberikan informasi yang mengarahkan konsumen untuk terbujuk melakukan pembelian. Dalam konteks tulisan ini adalah menggiring audiens (masyarakat luas) bisa melihat Indonesia dengan segala kegiatan seperti bidang ekonomi, keragaman budaya, nuansa alam pariwisata dan produk-produk lokal pilihan yang akan ditonjolkan.

Untuk menjalankan strategi tersebut, Kotler membuat salah satu dimensi bauran promosi, yaitu hubungan masyarakat (*Public Relations and Publicity*). Dalam hal ini *government public relations* (GPR) berfungsi menumbuhkan hubungan baik di antara kementerian/ lembaga dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. GPR bisa menjadi motor penyebar informasi semua geliat dan pergerakan G20.

Memanfaatkan Momentum

Memanfaatkan momentum G20 dengan perangkat digital marketing bisa dilakukan oleh setiap GPR. Dalam menderaskan informasi G20, GPR dapat mengoptimalkan platform komunikasi online untuk menerbitkan siaran pers, podcast, blog, vlog, dan beragam konten media sosial.

GPR dapat menggunakan jejaring sosial (*social network*) menawarkan informasi dan promosi ke lingkup yang sangat kecil, misalnya akun whatsapp GPR mengenalkan logo G20, membuat twibbon dengan atribut kegiatan G20. serta menarasikan, memahami makna, dan manfaat perhelatan bergengsi ini.

Side events perhelatan G20 yang digelar di beberapa kota di

Indonesia. Di Jakarta, Bali, Bintan, Batu, Bogor, Sorong, Makassar, Palembang, Solo, Belitung, Banjarmasin, Pontianak dibuka gelaran luas promosi Indonesia. Humas pemerintah bisa memaksimalkan kekuatan media sosial dan media massa dari setiap kegiatan tersebut.

Setidaknya ada 5 Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) yang harus menjadi ajang *showcase* citra positif dan budaya Indonesia. Misalnya, Danau Toba (Sumut), Borobudur, Mandalika, Likupang (SulSel), dan Labuan Bajo (NTT). Humas pemerintah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dapat menjadikan perhelatan ini sebagai ajang “jualan”. Momentum G20 bisa dijadikan panggung dan humas bisa menyiapkan etalase, menyiapkan produk dan mempromosikan. sekaligus mempromosikan Indonesia di ajang internasional.

Setiap kota yang menyelenggarakan kegiatan *side events* G20 berkesempatan mengenalkan produk lokal. Berbagai kegiatan yang diliput media nasional dan internasional menjadi keuntungan besar. Bila setiap humas mengemas bahan informasi dan publikasi lalu menyebarkan melalui media massa dan akun medsos masing-masing, maka akan tampak irama dan alunan bahasa yang beriringan mengusung tema utama.

Beragam kegiatan diramu menuju muara Presidensi G20 Indonesia dengan tema *Recover Together; Recover Stronger*. Terdapat 3 isu pembahasan strategis yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Ketiganya disuarakan melalui semua saluran komunikasi, ditata, dan disiramkan hingga mengalir menerobos semua ruang.

Perhelatan besar telah menyadarkan prahum bahwa *teamwork* harus terbentuk, apalagi pekerjaan besar lintas sektoral dan kementrian. Pekerjaan humas memang tidak terlepas dari jaringan. Era digital telah merubah paradigma bahwa informasi itu harus dikelola salah satunya dengan mengembangkan jejaring.

Menggemakan perhelatan ini sejalan dengan mengembangkan jejaring yang merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Siapa lagi kalau bukan kita para penggiat humas menggaungkan jejak Indonesia, menyuarakan eksistensi setelah masa pandemik. Paling tidak itulah aksi nyata yang bisa kita lakukan GPR. Kontribusi nyata

GPR menjelang konferensi tingkat tinggi G20 pada Oktober 2022 menjadi penambah spirit Prahum untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi humas berkelas dunia.

* * * * *

“Energi Risman” Pada Presidensi G20

Oleh: Iif Fikriyati Ihsani, MA.

Siapa yang tak mengenal nama “Risman”. Namanya tiba-tiba melambung ketika Miguel Oliveira berhasil memecah podium MotoGP Mandalika, pada bulan Maret lalu. Oliveira dalam *speech*-nya mendedikasikan kemenangannya di MotoGP secara khusus untuk putrinya dan Risman. Siapakah sesungguhnya Risman? Bagaimana ia bisa memberikan kesan mendalam kepada pembalap ternama sekelas Oliveira?

Sosok bernama lengkap Murtaya Risman adalah salah seorang staf di tempat Miguel Oliveira menginap, Hotel Novotel Lombok. Pekerjaan sebagai staf hotel yang mengantarkan Risman berkenalan dengan Oliveira. Kedekatan Risman dengan Oliveira tampak dari bagaimana keduanya saling *mem-follow* akun Instagram masing-masing. Dalam satu kesempatan, Risman bahkan mengucap doa khusus *nishfu sya’ban* untuk kemenangan Oliveira. Oliveira turut mengamini doa Risman “*Nisfu night... big wishes, My Champion*”.

Energi Risman selaku staf hotel dalam melayani pelanggannya termasuk di dalamnya Oliveira mengundang apresiasi Gubernur NTB dan juga Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno. Apa yang dilakukan Risman membuktikan identitas Indonesia sebagai Negara Paling Ramah di dunia. Indonesia menempati posisi ke-8 dari total 46 Negara dalam daftar subkategori negara paling ramah menurut survei Expat Insider 2019.

Namun, keramahan Indonesia berdasarkan survei tersebut

tidak berkorelasi dengan keamanan dan keselamatan untuk tinggal di Indonesia. Indonesia berada di posisi 17 dari 20 negara yang berbahaya untuk ditinggali. Alasan yang muncul dari partisipan survey ada pada politik dan ekstremisme agama. Pertanyaan kritis atas fakta survey ini adalah “bagaimana mungkin seseorang yang sangat ramah bisa menjadi ekstrim?”.

Moderasi-Esktremisme

Risman adalah potret kebanyakan warga Indonesia. Seorang muslim yang beraktivitas dan bergaul dengan siapa saja, termasuk rela untuk mendoakan orang yang tidak seagama dengannya. Dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, sikap seperti Risman menjadi kunci. Ekstremisme beragama yang menggunakan klaim kebenaran dengan mengedepankan intoleransi bukan gambaran realistik Indonesia.

Perubahan dari keramahan menuju kekerasan dapat dijelaskan dengan teori psikologi Fathali Moghaddam yang menyebutkan enam tangga yang dilalui seseorang sebelum berkomitmen menjadi ekstrim. Tangga pertama dimulai dari perasaan ketidakadilan yang kemudian mendorong tangga kedua dan ketiga, berupaya mencari dalang atas ketidakadilan dan mulai melawan. Biasanya di tangga kedua dan ketiga, seseorang mulai menemukan kelompok yang memiliki perasaan yang sama, sehingga berani memasuki tangga keempat dan keenam, persiapan membalaskan dendam dengan meledakkan diri.

Ekstremisme mengambil perannya pada tangga kedua dan ketiga. Perasaan ketidakadilan secara psikologis merupakan hal wajar. Namun, ketika perasaan ini divalidasi oleh pemahaman ekstrim kelompok yang mengidealisasikan keadaan dengan mengklaim kelompoknya sendiri. Maka, yang terjadi adalah arogansi eksklusivisme, dimana seseorang bersama kelompoknya dapat merasa paling benar dan mengancam kelompok lainnya.

Ekstremisme ini muncul dalam berbagai wajah. Kelompok geng motor, kelompok agama tertentu, kelompok tawuran, kelompok politik dan lain sebagainya. Pengelompokkan ini yang pada masa

penjajahan menjadi alat untuk meng-*divide-et-impera*. Untuk memoderasi ekstremisme yang terbentuk ke dalam kelompok-kelompok ini, energi Risman perlu terus dihidupkan!

Toleransi dan Presidensi G20

Recover together, recover stronger! menjadi semboyan Presidensi G20. Semboyan yang mengajak bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Keterlibatan Indonesia pada G20 tidak bisa dipisahkan dari krisis ekonomi 1998. Indonesia masuk ke G20 sebagai upaya pemulihan diri. Dengan potensi *emerging economy* terbesar di kawasan Asia, Indonesia berhasil melalui krisis dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presidensi G20 sebagai Momentum Branding Indonesia di Dunia Internasional. Kesepakatan anggota G20 untuk menetapkan Indonesia sebagai Presidensi G20 di tahun 2022 bukan tanpa alasan. Indonesia disebutkan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan berhasil menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil menangani Covid-19.

Terbaru, Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah MotoGP di Mandalika tanpa terjadi peningkatan kasus Covid-19. Dari kondisi perekonomian, Indonesia berada di urutan ke-16 dari 20 negara anggota G20. Ekonomi Indonesia menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US\$ 1,06 Triliun pada 2020. Angka toleransi Indonesia per tahun 2022 menurut hasil riset Setara Institute naik secara signifikan. Skala nilai toleransi kota-kota di Indonesia ada pada nilai 4 ke 6 dari skala penilaian 1 sampai 7.

Pencapaian Indonesia menuju Presidensi G20 mengilustrasikan titik kulminasi antar variabel pembentuk kebangsaan. Energi Risman harus menjadi variabel independen yang mempengaruhi berbagai variabel dependen. Keramahan Risman membuktikan puncak toleransi dan moderasi diri. Risman adalah simbol inklusivisme, keterbukaan terhadap sesama dengan tanpa kehilangan esensi dirinya sebagai seorang Indonesia yang beragama dan berkebudayaan.

Energi Risman adalah energi inti kebangsaan kita, yang termuat

dalam gagasan Negara-Bangsa. Gagasan yang dikemukakan Soekarno:

“Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tapi semua buat semua.”

Dengan energi Risman, gelaran kelas dunia seperti Mandalika akan terus terlaksana di Indonesia. Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang ramah. Presidensi G20 menjadi awal untuk Indonesia *merecovery* semua penyakit pandemik yang selama ini menggerogoti. Together We are Stronger!

* * * * *

Kala Mata Dunia Tertuju pada Indonesia

Oleh Imam Suryanto, S.I.Kom.

Indonesia siap menjadi tuan rumah dalam gelaran tingkat jagad, yaitu G20. Dikutip dari G20Pedia, G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Anggota G20 memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, kumpulan negara berkembang, hingga negara maju. Mengingat kegiatan ini memiliki level internasional, maka seluruh mata dunia pun tertuju pada Indonesia. Indonesia akan menjadi sorotan dunia dalam mengawal kegiatan akbar ini. Inilah ajang pembuktian kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki kepemimpinan yang berkualitas dalam menggelar G20. Perhelatan yang diyakini dapat menghasilkan butir kebijakan yang bermanfaat untuk semua.

Indonesia tentu memiliki peranan vital dalam menyelenggarakan presidensi G20 tahun ini. Berdasarkan data dari G20 Pedia, G20 menjadi bagian penting dunia sebagai representasi 2/3 dari penduduk dunia, selain itu juga sebagai 80% PDB Dunia, dan 75% perdagangan global. Adapun isu prioritas yang diangkat dalam presidensi G20 Indonesia adalah arsitektur kesehatan global, transisi energi yang berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Untuk mencapai kesuksesan itu semua, tentunya dibutuhkan perencanaan komunikasi dan publikasi yang matang.

Orkestrasi Komunikasi Publik GPR

Orkestrasi komunikasi publik dan publikasi menjadi salah

satu faktor penting dalam menyampaikan semangat G20. Mengglorifikasikan informasi G20 menjadi salah satu tugas Pranata Humas. Informasi yang dikemas oleh para Pranata Humas harus dapat disampaikan kepada publik, sehingga kegiatan G20 ini akan dimengerti dan didukung oleh publik. G20 merupakan hajat besar kita bersama, sehingga seluruh lapisan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendukung gelaran ini. Adapun strategi komunikasi publik harus disusun dengan sistematis dan didiseminasikan secara masif, baik untuk internal maupun eksternal.

Pranata Humas/Humas Pemerintah (*Government Public Relations/GPR*) memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan informasi G20 ke seluruh lapisan masyarakat dengan strategi yang tepat. Kerangka besar (*grand design*) komunikasi publik perlu disiapkan dan disusun secara matang. Pesan yang disusun tidak hanya pesan itu dapat terkirim (*sent*), tetapi perlu diperhatikan juga bagaimana pesan itu dapat diterima baik (*delivered*) oleh publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memohon dan mendapatkan informasi yang benar dan akuntabel, selain itu GPR yang menjadi bagian salah satu instansi/badan publik wajib memberikan informasi (terbuka) kepada pemohon/masyarakat. Selain itu, sebagai GPR harus dapat memahami, mendengarkan, dan mengakomodasi masukan atau aspirasi publik ketika melakukan perumusan kebijakan, dengan begitu kebijakan publik yang sedang dibuat dapat memayungi seluruh lapisan masyarakat serta tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Saat ini GPR diberikan kesempatan yang luas untuk beraksi di panggung instansi, nasional, bahkan internasional. Kesempatan ini dapat dilakukan oleh GPR untuk membangun orkestrasi komunikasi yang efektif untuk seluruh audiensnya. GPR harus dapat melakukan penjenamaan (*branding*) untuk Indonesia agar dapat dikenal lebih masyhur di seluruh belahan dunia. GPR juga diharapkan dapat melakukan manajemen isu yang mungkin berpotensi akan menjadi polemik atau masalah. Hal ini tentu tidaklah mudah, mulai dari menyosialisasikan program pemerintah terkait G-20, mengedukasi

publik, mengkampanyekan program prioritas pemerintah, sampai melakukan kontra narasi. Semua itu akan bermuara dengan menghasilkan citra positif Indonesia, sehingga *nation branding* yang baik akan semakin kuat.

Dikutip dari G20Pedia, diperkirakan akan ada sekitar 21.000 delegasi yang akan hadir dalam perhelatan akbar ini, mulai dari delegasi KTT G-20 hingga *working group/engagement group meetings*. Hal ini tentunya akan membuka mata dunia tentang Indonesia. GPR harus dapat menciptakan momentum ini yang hanya datang 20 tahun sekali. GPR harus dapat merangkul semua stakeholder yang terlibat, mulai dari kalangan anak muda, pebisnis, serikat pekerja, hingga institusi.

G20 merupakan ajang penting bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki peranan yang patut diperhitungkan dalam menentukan arus kebijakan dunia. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN serta memiliki peran penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian dunia. Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) di antara anggota G20. Selain itu, Indonesia juga menjadi kekuatan pasar baru (*New Established Emerging Market*) dengan PDB di atas USD 1 Triliun.

Para GPR diharapkan dapat menjadi “tentara perang” yang bertanggung jawab dalam menyusun *grand design* komunikasi publik mulai dari fase perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi. Pesan harus dapat disampaikan dengan baik dan efektif ke setiap audiens. Ini merupakan tantangan berat sekaligus sebagai kesempatan GPR membuktikan kemampuannya di ranah internasional. Pesan yang disampaikan kepada publik harus dikemas secara menarik, baik melalui kanal daring maupun konvensional. Pesan yang disajikan harus disesuaikan dengan masing-masing saluran. GPR patut memperhitungkan untuk menggunakan saluran daring mengingat pesan melalui kanal ini dapat disampaikan dengan cepat dan masif.

Untuk itu, kala mata dunia melihat Indonesia, GPR memiliki peranan penting dalam menentukan langkah strategi komunikasi publik yang akan digunakan. Strategi ini tentunya tidak hanya untuk audiens dalam negeri, tapi juga internasional. GPR harus bisa

menunjukkan sisi unik Indonesia yang indah yang penuh dengan keragaman seni dan budaya. Mari kita bersama bergandeng tangan, memperkuat barisan, mengumandangkan informasi dan pesan, menciptakan kesuksesan, karena kita GPR andal dan profesional.

* * * * *

Pesan Perdamaian dari Presidensi G20

Oleh: Muchammad Fadlan, S.Pd.I., S.Kom., M.Si.

Selasa, 15 Maret 2022, hari yang bersejarah dengan ditetapkannya hari tersebut sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamophobia sebagai sebuah Resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimotori oleh 55 negara yang mayoritas Negara muslim mampu meyakinkan 193 lainnya dalam sebuah konsensus bersama tentang pentingnya peringatan hari Internasional anti Islamophobia. Pengambilan tanggal 15 Maret 2022 merujuk pada peristiwa pengeboman pada dua masjid di Christchurch, Selandia Baru.

Kekerasan dan kebencian atas nama apapun tidaklah dapat dibenarkan. Nilai-nilai universal yang disepakati tentunya adalah perdamaian, kesetaraan dan keadilan. Momentum ditetapkan hari internasional anti Islamophobia sebagai pesan dimulainya suatu perdamaian yang diharapkan oleh semua pihak.

Saat ini, hampir semua negara yang mengalami konflik atau peperangan adalah negara yang rakyatnya mayoritas muslim atau yang mengalami penindasan beragama Islam. Bisa diambil contoh negara yang saat ini tengah dilanda konflik seperti Irak, Afghanistan, Palestina, Syria, Somalia, Tunisia, dan Libya.

Salah satu pemicu Islamophobia adalah adanya stereotip negatif dari media terhadap umat Islam. Berbagai studi mengemukakan, pelaku kriminal orang Islam tujuh kali lebih banyak diliput media, dibandingkan dengan pelaku nonmuslim dalam kasus yang sama.

Keadilan dalam segala hal adalah salah satu cara dalam mengikis Islamophobia di mana pun, keadilan dalam berpikir, keadilan dalam bersikap, serta keadilan dalam pengambilan kebijakan.

Dilansir dalam worldpopulationreview.com, agama Islam menjadi negara terbesar kedua dianut oleh 1,8 Miliar penduduk yang tersebar di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Apabila Islamophobia terus digaungkan, maka ketakutan sebagian penduduk dunia terus terpuruk dan kedamaian akan semakin jauh dirasakan.

Kemajuan ekonomi suatu negara tidaklah menjadi barometer kebahagiaan dan kesejahteraan penduduknya. Ada faktor yang lain yang tidak kalah penting, yaitu kedamaian dan ketenangan hati warganya. Ketenangan itu muncul karena adanya saling percaya, pengertian dan memahami. Akan menjadi masalah sosial dalam suatu negara ketika warganya tidak memiliki kedamaian dan ketenangan dalam kehidupannya.

Indonesia, negara yang memiliki warga negara muslim terbesar di dunia dan terpilih sebagai tuan rumah G20. Masyarakat Indonesia harus mampu menangkap momentum untuk memainkan perannya dalam menyampaikan pesan perdamaian kepada dunia melalui langkah nyata anti Islamophobia. Menilik posisi saat ini tentu akan mudah diperhatikan dan mampu menjadi *role model* negara anti Islamophobia.

Indonesia telah memiliki pondasi dalam melangkah menunjukkan kepada dunia, sebagai negara anti Islamophobia. Sebagaimana dalam Pancasila sebagai dasar negara, nilai ketuhanan akan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dalam agama telah menjadi landasan utama dalam bernegara, landasan dalam membentuk suatu peraturan perundangan, serta landasan dalam mengambil kebijakan.

Selain itu sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah bukti Indonesia memiliki tujuan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan untuk semua negara.

Indonesia memiliki kewajiban etik untuk tidak “egois” dalam bercita-cita, karena ada tanggungjawab yang diamanahkan

oleh negara untuk direalisasikan. Ada kesadaran di sana, bahwa perdamaian tidak harus dinikmati hanya oleh negara tertentu saja, tapi harus dirasakan oleh semua negara yang ada di dunia.

Negara tidak akan bertumbuh ekonominya bilamana tidak ada kedamaian dan keadilan di dalamnya. Maka dari itu dalam Presidensi G20 di Indonesia, pesan perdamaian yang disuarakan, bisa menjadi titik awal terkikisnya Islamophobia oleh berbagai pihak. Salah satu pesan perdamaian pemerintah Indonesia dengan menunjukkan potret kedamaian rakyat Indonesia dalam keberagaman di tengah multi ras, multi etnis, dan multi agama.

Penduduk beragama Islam mayoritas di Indonesia, memiliki kehidupan sosial yang penuh toleransi, saling memahami, saling menjaga keutuhan, dan perdamaian dengan berbagai pihak. Potret pemahaman keislaman moderat yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia turut menunjukkan bahwa Islam itu agama penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan orang Islam.

Untuk suksesi pesan perdamaian yang disuarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui kampanye ‘Anti Islamophobia’ perlu adanya orkestrasi pesan / konten melalui media digital oleh berbagai organisasi profesi Humas. Sebagai organisasi tempat bernaung ribuan ASN, Pranata Humas berperan penting dalam mengorkestrasi konten / pesan kepada dunia. Kolaborasi mewujudkan ketenangan dan kedamaian dengan meniadakan saling curiga, membenci, serta menimbulkan kecemasan.

Pesan kedamaian lain yang perlu disampaikan kepada dunia melalui G20 adalah kedamaian bukanlah hanya milik sebuah negara atau beberapa negara saja. Seluruh negara dan warga dunia memiliki hak yang sama tentang bagaimana memiliki kehidupan yang damai dan tenang melalui kebersamaan dan persamaan hak dalam pergaulan internasional.

* * * * *

Iprahumas Ramaikan G20 dengan Karya

Oleh: Nur Azizah, SS

Indonesia berbangga, karena tahun 2022, negeri seribu candi ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 atau *Group of Twenty*. Seluruh elemen masyarakat berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi terlaksananya acara yang dilaksanakan sekali dalam setahun.

Tak ayal, moment ini langsung dijadikan Indonesia sebagai upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan global secara inklusif pasca pandemik.

Perhelatan ini sudah dimulai pada 1 Desember 2021 hingga nanti puncaknya berupa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di November 2022.

Iprahumas (Ikatan Pranata Humas) sebagai organisasi Humas pemerintah pun tidak mau kehilangan kesempatan. Organisasi yang kini sudah memiliki anggota sebanyak 1458 ini ingin memberikan andil terbaik dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia secara umum tentang informasi yang bisa meningkatkan reputasi dan citra Indonesia di mata dunia. Andil tersebut dibentuk dalam proyek “100 Penulis” menyambut G20.

Dikutip dari situs Iprahumas.id bahwa sebagai salah satu dari komponen bangsa, Iprahumas ikut ambil bagian dalam menyukseskan pertemuan G20 melalui kegiatan “100 penulis” yang dapat

menunjukkan kepada masyarakat dalam negeri dan juga komunitas internasional hal-hal yang baik sehingga Indonesia mampu menjadi masyarakat yang menularkan energi positif dan kebaikan.

Program ini bertujuan untuk membangun kesan dan kepercayaan publik, menunjukkan Indonesia besar dan beragam, serta meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia layak masuk dalam kategori negara maju.

Penulis yang dilibatkan dalam proyek ini adalah penulis-penulis yang terlibat dalam organisasi Iprahumas di seluruh Indonesia. Ketua Iprahumas 2022-2024, Thoriq Ramadani dalam wawancara singkatnya menyatakan bahwa tujuan dari dipilihnya media tulisan sebagai media unjuk gigi di perhelatan G20 ini adalah karena tulisan opini menjadi penting bagi Pranata Humas dalam menjalankan tugas fungsi menyebarkan informasi dan kehumasan. Ia menambahkan bahwa, proyek ini merupakan salah satu Program Kerja Nasional Iprahumas.

Pilihan ini, masih menurut Thoriq menjadi momen yang pas untuk membuat tulisan menjadi kenangan yang limited edition bagi dukungan Iprahumas terhadap kesuksesan presidensi G20. ASN dari Kementerian ESDM ini berharap program ini dapat terlaksana dengan baik, mendukung kesuksesan Presidensi G20, dan memberikan kontribusi dalam membangun citra dan reputasi positif bangsa dan negara.

Iprahumas Menulis

Program 100 penulis merupakan upaya Iprahumas secara konsisten dalam mewujudkan penulis-penulis andal Humas Pemerintah. Sebelumnya, Iprahumas telah menyelesaikan program 100 penulis dalam penyebaran informasi tentang pencegahan virus covid-19.

Program 100 penulis ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan para anggota Iprahumas dalam menyebarkan informasi melalui tulisan. Terkait program 100 penulis menyambut G20, bagi saya pribadi, pilihan ini sangat menarik dan tepat, karena memang, Indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat literasi rendah

dengan peringkat ke-62 dari 70 negara.

Pilihan ini seakan Iprahumas ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perkembangan yang baik dalam hal literasi. Hal lainnya adalah dalam salah satu acara yang penulis ikuti, saya pernah mendengar K.H. Mustafa Ali Ya'kub (ahli hadist, penulis buku, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal) mengatakan bahwa “janganlah kamu mati sebelum menjadi penulis” . Ucapan tersebut menurut saya sangat berkaitan dengan apa yang menjadi semangat Iprahumas dalam memberikan kontribusi nyata di ajang internasional ini.

Iprahumas ingin menunjukkan eksistensinya di mata dunia dengan cara yang sangat elegan, sangat cantik. Karena apa, karena dengan tulisan, Iprahumas mengajak para anggotanya untuk terlibat aktif dalam dunia literasi, yaitu membaca dan menulis. Seluruh anggota diminta untuk menulis, di mana sebelum menulis pasti harus membaca. Dan ketika sudah menjadi buku, diharapkan akan banyak pembaca yang membaca buku ini. Dari sini terlihat Iprahumas ingin menciptakan lingkungan literasi Indonesia yang lebih baik.

Melihat semangat Iprahumas yang seperti ini, saya yakin, ke depannya Indonesia akan lebih baik lagi, karena bayangkan jika ada 100 orang terlibat dalam proyek ini, dia harus membaca berapa buku, hal tersebut dilihat oleh keluarganya, koleganya, orang-orang di lingkungannya, hal ini bisa menjadi motivasi tersendiri dalam menumbuhkan daya tarik literasi. Dan tentu saja, melalui tulisan, mudah sekali untuk berkontribusi di kancah internasional. Makanya, dengan pilihan ini, saya yakin sekali Iprahumas akan mendunia. Iprahumas tidak akan pernah mati. Iprahumas akan eksis selamanya.

* * * * *

Kompetensi Wawasan Global Humas Membawa Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia

Oleh: Ofiar Murwanti

Kemampuan untuk mengatasi konflik antara tujuan global dan tujuan lokal adalah salah satu kompetensi penting dalam dunia bisnis saat ini. Wawasan global seperti ini memengaruhi orang untuk lebih dapat mengatasi prioritas kepentingan secara konstruktif: kepentingan global *versus* kepentingan local (Briscoe, dkk 2012).

Selaras dengan perhelatan tingkat dunia G20 yang akan diselenggarakan di Indonesia, pranata humas memiliki kesempatan untuk bekerja dengan lingkungan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan G20 akan memberi dampak yang sangat baik bagi kepentingan Indonesia, tidak hanya dalam sektor perekonomian, tapi juga dalam sektor lainnya. Sehingga, hajat G20 di Indonesia harus dapat dimanfaatkan sebaik baiknya untuk kemajuan semua pihak.

Pranata humas memegang peranan penting dalam bidang layanan informasi dan kehumasan. Dalam upaya memberi pelayanan kehumasan berkelas dunia, pranata humas dituntut untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya, agar dapat mendukung capaian target kinerja institusi di tingkat internasional, namun tentu harus tetap menonjolkan identitas dan karakteristik Bangsa Indonesia.

Sebagai contoh pada kegiatan kuliah umum dari para dosen internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran

(Unpad). Pranata Humas harus berperan aktif memberi pelayanan informasi kehumasan kepada mitra dan calon mitra dari luar negeri. Kegiatan seperti ini, tentunya tidak hanya satu kali saja, karena akan ada rangkaian kegiatan lain yang melibatkan peran pranata humas untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan mitra dari negara lain, terutama pada saat menjelang dan setelah pelaksanaan KTT G20 ke 17 di Indonesia.

Kompetensi Wawasan Global (*Global Mindset Competency*)

Bekerja di lingkup multinasional, yang melibatkan orang-orang dari negara lain dengan budaya yang berbeda, memerlukan kompetensi yang harus terus dikembangkan, karena tidak selamanya komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat dihadapkan dengan konflik kepentingan, diperlukan suatu kecakapan untuk dapat mengatasinya, tanpa harus menyinggung orang dengan budaya yang berbeda. Kemampuan tersebut sering disebut sebagai kompetensi wawasan global.

Wawasan global tengah banyak digunakan dalam bidang bisnis, sehingga banyak diaplikasikan oleh para eksekutif dan manajer perusahaan asing ternama yang ditempatkan di negara lain. Chaney dkk (2014), dalam bukunya yang berjudul *International Business Communication* (Komunikasi Bisnis Internasional) menyebutkan bahwa agar para manajer sukses berinteraksi antar budaya (*interculture*), mereka perlu mengembangkan wawasan global.

Selanjutnya, Chaney dkk, menegaskan bahwa para pemimpin perusahaan di masa depan harus memiliki wawasan global, agar dapat berkompetisi di pasar dunia. Pernyataan ini berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh Javidan dkk pada tahun 2010, terhadap 215 eksekutif internasional dalam bidang perdagangan,

Berdasarkan pada studi studi yang dilakukan sebelumnya, wawasan global banyak digunakan oleh para eksekutif, manajer dan pengusaha yang merupakan para profesional dalam bidang perdagangan untuk dapat berinteraksi dan berkompetisi di pasar dunia. Dalam hal ini tentunya pranata humas, sebagai profesional dalam bidang informasi dan kehumasan dapat juga mengembangkan

kompetensi wawasan global untuk juga sukses berinteraksi di level dunia.

Kompetensi bahasa asing merupakan faktor penunjang kesuksesan, namun perlu ketahui bahwa pranata humas juga harus turut membantu meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Lebih lanjut perlu ditingkatkan pemahaman bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri dan kebanggaan nasional, seperti yang tertuang pada Undang Undang No 24 tahun 2009.

Menurut Dennis Briscoe dkk (2012), wawasan global merupakan kompetensi penting, yaitu kemampuan bekerja dengan budaya yang berbeda. Lebih detail lagi, Dennis dkk, menjelaskan bahwa Kompetensi Wawasan Global, adalah kemampuan seseorang untuk menghargai budaya negaranya sendiri, dan menghargai budaya negara lain yang berbeda.

Dalam buku yang berjudul *International Human Resources Management* (Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional), Dennis Brisco dkk (2012) memasukan wawasan global dalam kelompok *Global Talent Management* (Manajemen Bakat Global). Dennis menjelaskan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang berwawasan global, diantaranya adalah kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi dengan berbagai budaya yang berbeda, dan kemampuan mengelola konflik, kontradiksi dan kompleksitas global.

Di Indonesia, wawasan global dapat dilihat melalui dukungan untuk bekerja sama dengan mitra dari negara lain sudah tertulis pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Negara Indonesia, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. juga pada Pancasila, sila kedua, 'kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sama halnya dengan kesuksesan para profesional bisnis, dalam berinteraksi di tingkat dunia, pranata humas juga harus dapat mengembangkan kemampuan wawasan global, yaitu dengan terlebih dahulu memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia, turut meningkatkan Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara

bertahap. Selanjutnya mempelajari dan menghargai budaya bangsa lain.

Ini adalah kunci sukses Pranata Humas Indonesia untuk mengembangkan komunikasi dan mengatasi permasalahan saat berinteraksi di tingkat dunia dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai Bangsa Indonesia.

Pranata humas siap mendukung suksesnya G20 di Indonesia.
Recover Together, Recover Stronger.

* * * * *

Tagar Bantu Perluas Percakapan G20 di Media Sosial

Oleh: Ratih Anbarini, S.I.Kom.

Usai Presiden Joko Widodo secara simbolis menerima palu sebagai tanda serah terima kepemimpinan Presidensi G20 di tahun 2022 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi, tanda pagar (tagar) #KTTG20 menjadi perbincangan hangat (*trending topic*) di twitter pada 2 November 2021. Kata kunci 'Jokowi Ketua Presidensi G20' juga ikut ramai diperbincangkan warganet di platform yang sama. Topik yang menjadi perbincangan ini menunjukkan popularitas isu yang muncul karena banyaknya cuitan pengguna Twitter yang menggunakan tagar tersebut. Ya, penggunaan tagar sudah sangat lazim digunakan warganet saat mencuitkan sesuatu.

Tagar atau dalam bahasa Inggris disebut *hashtag* mulai populer digunakan di media sosial setelah pada 2007 Chris Messina mengunggah cuitan di Twitter yang menggunakan simbol tersebut. Rauschnabel et al. (2019) menjelaskan, Twitter merekomendasikan pengguna menggunakan simbol *pound* (#) sebelum kata kunci atau frasa yang relevan sehingga tweet yang dihasilkan dapat dikategorikan sesuai kata kunci tersebut dan dapat lebih mudah dicari dalam fitur pencarian (*search*) twitter.

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa tagar sangat berperan dalam aktivitas digital untuk suatu isu tertentu. Tagar #DirumahAja cukup populer saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Penelitian yang dilakukan Prihantoro dan rekan-rekannya

yang dipublikasikan pada 2021 menyebut bahwa jangkauan tagar tersebut sangat luas dengan nilai 67 dan lebih berhasil ketimbang tagar #PakaiMasker yang saat itu juga cukup ramai diperbincangkan warganet di Twitter. Penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan frasa tagar yang tepat akan mempengaruhi jangkauan perbincangan warganet dengan lebih luas.

Jangkauan Percakapan G20 di Twitter

Lalu bagaimana jangkauan percakapan G20 di Twitter? Untuk melihat seberapa besar jangkauan percakapan warganet mengenai G20, saya mencoba melakukannya dengan metode analisis jaringan media sosial (*social media network analysis/ SMNA*). Dibantu website Netlytic dan Gephi, saya memasukkan tagar #G20, #KTTG20, #PresidensiG20, #IndonesiaPresidensiG20, #RecoverTogetherRecoverStronger, dan #IndonesiaG20 sebagai kata kunci untuk menambang data. Data diambil untuk periode 20 s.d. 29 Maret 2022. Karena topik G20 berskala internasional, di sini saya hanya membatasi cuitan berbahasa Indonesia untuk melihat bagaimana percakapan isu ini di dalam negeri. Selama periode tersebut, terkumpul sebanyak 725 cuitan yang terbagi dalam 353 aktor (*node*) dan 457 hubungan (*link*). Selanjutnya dilakukan analisis dan ditemukan bahwa diameter percakapan kumpulan tagar tersebut bernilai 15. Ini memperlihatkan bahwa postingan menyebar dari satu pengguna ke pengguna akun media sosial lain sebanyak 15 tahap.

Sementara itu densitas yang menunjukkan interaksi di antara pemilik akun Twitter dan resiprositas yang menunjukkan postingan bersifat dua arah bernilai rendah, yaitu mendekati angka 0 (densitas = 0.003318, resiprositas = 0.009756). Demikian pula dengan sentralisasi, di mana nilainya 0.037700 yang berarti mendekati nol dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktor yang dominan dalam mengarahkan isi percakapan di jaringan sosial pengguna Twitter. Pada analisis modularitas ditemukan nilainya mendekati angka 1 yaitu senilai 0.913200 yang berarti homogenitas cukup kuat. Artinya akun-akun dengan tagar-tagar ini relatif lebih mengelompok, sehingga percakapan tidak cukup menyebar ke beberapa akun dan klaster.

Saya kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan Gephi untuk melihat akun media sosial yang paling banyak diacu (*retweet*, *mentions*, atau *reply*). Ditemukan ada lima akun teratas, yaitu @bank_indonesia (dengan nilai 24), @kpk_ri (22), @willylie99 (14), @ridwankamil (13), dan @kompascom (13).

Analisis di atas bisa jadi memiliki kelemahan. Pertama, data hanya diambil dari Twitter, sehingga analisis terbatas pada data di media sosial ini. Kedua, data yang ditambang tidak dilakukan dalam rentang waktu saat diselenggarakannya rangkaian kegiatan G20 berskala besar yang mengundang respons publik dan media massa sehingga cuitan yang tertambang kurang dari angka 1.000. Namun, hal ini setidaknya menjadi informasi penting bagi humas pemerintah bahwa rangkaian agenda G20 berlangsung hingga akhir November 2022 dan gaungnya perlu terus digemakan.

Pengalaman tagar #KTTG20 yang menjadi *trending* merupakan contoh nyata bersatunya humas pemerintah dan antusiasme khalayak Twitter terhadap Presidensi G20 oleh Indonesia. Langkah tersebut perlu dilakukan secara berkala oleh humas pemerintah, sehingga jangkauan percakapan tentang G20 terus tinggi, salah satunya ditandai dengan menjadi *trending topic*. Memancing para pranata humas untuk memproduksi konten, mengunggahnya di media sosial, atau sekadar memposting ulang konten yang sudah ada (*retweet*), dengan angka kredit adalah terobosan yang sangat baik.

Selain itu, pranata humas dapat memainkan tagar pada setiap cuitan yang diposting di Twitter. Jika menyertakan tagar seperti #G20 atau #KTTG20 bersifat ‘wajib’, maka Pranata Humas bisa menambahkan tagar yang telah disepakati yang sifatnya memancing seseorang untuk berkomentar, membagikan, atau menyukai postingan tersebut.

Penelitian Barisione et al. (2017) menyebut bahwa tagar yang berhasil memancing opini, selain bersifat emosional, umumnya adalah tagar yang memiliki bingkai jelas. Ketimbang memilih kata tunggal, tagar yang berpengaruh biasanya memuat kata kerja yang mengekspresikan rasa tindakan dan kekuatan yang kuat (Yang, 2016).

Tagar #G20PulihBersama bisa jadi adalah salah satu contoh dari apa yang dikemukakan peneliti tersebut. Selanjutnya, perlu dipikirkan strategi Pranata Humas bergerak bersama, menyukseskan pelaksanaan G20. Mari bersama Pranata Humas membangun perbincangan positif, tidak hanya di masyarakat dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tetap semangat! (*)

* * * * *

Mengartikulasikan Pemimpin dan Kepemimpinan yang Memberi Contoh

Oleh: Romi Setiawan, S.H.

Group 20 (G20) adalah forum ekonomi dunia yang memiliki posisi strategis dan merupakan kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 yang dibentuk pada tahun 1999 tidak lepas dari forum multilateral Group 7 (G7) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Jepang.

Dipicu oleh kondisi politik dan ekonomi dunia pasca krisis keuangan 1997 – 1999 yang tidak kunjung membaik, menyebabkan G7 mulai melibatkan 12 belaks negara lainnya termasuk Indonesia dan Uni Eropa, hingga terbentuklah G20 dengan komposisi keanggotaan seperti sekarang ini. G20 saat ini dianggap lebih mewakili dunia, karena terdiri dari negara-negara berpenghasilan menengah hingga tinggi dan memiliki pengaruh ekonomi yang sistemik. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global dan 80% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia.

G20 tidak memiliki sekretariat permanen, presidensi dirotasi di antara anggotanya. Pembahasan G20 dilakukan dalam dua jalur yaitu *finance* dan *sherpa*. Hasil kesepakatan dalam pertemuan G20 berbentuk deklarasi yang mengkompilasi seluruh *communiqué* pembahasan dan secara praktik tidak mengikat secara hukum (*legally binding*), akan tetapi memiliki agilitas untuk dilaksanakan oleh setiap anggotanya.

Indonesia menetapkan tiga isu prioritas utama pada Presidensi

G20 Tahun 2022 yaitu: arsitektur kesehatan dunia, transformasi digital, dan transisi energi. Sedangkan tema yang diangkat yaitu: “*Recover Together* dan *Recover Stronger*”. Tema tersebut memberikan pesan bahwa dunia harus pulih bersama dari COVID-19, melalui momentum Presidensi G20 Indonesia.

Kepemimpinan yang Memberi Contoh

Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan presidensi G20, negara Indonesia harus menunjukkan kepemimpinan yang memberi contoh (*leading by example*). Arah ini mendorong kepada seluruh pembahasan yang akan dilakukan agar berani menunjukkan langkah sukses yang telah dilakukan Indonesia, sehingga dapat memberikan inspirasi kepada negara lainnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui sambutannya pada acara *media briefing Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group* (EDM-CSWG) menyampaikan bahwa perlu kebersamaan dalam menghadapi pandemi COVID-19, untuk menuju keseimbangan kehidupan baru dunia. Momentum Presidensi G20 tahun ini juga mengamanatkan kepada Indonesia untuk memimpin proses pemulihan akibat pandemi, tidak hanya dari sisi kesehatan dan perekonomian, tetapi juga menginternalisasikan aspek lingkungan dan perubahan iklim.

Strategi menyampaikan pesan kepemimpinan yang memberi contoh dalam pembahasan isu lingkungan harus dilakukan secara serius. Langkah awal Indonesia telah mendapatkan dukungan untuk membawa tiga isu utama yaitu: pemulihan lingkungan berkelanjutan serta peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan dan peningkatan mobilisasi sumber daya untuk tujuan pemulihan lingkungan dan iklim.

Pembahasan dan keluaran EDM-CSWG didorong untuk menghasilkan kesepakatan dan kerja sama konkret yang menerapkan solusi berbasis alam dan pendekatan ekosistem. Solusi tersebut berfokus pada upaya penurunan kerusakan lahan, pengelolaan berkelanjutan dan pemulihan habitat terestrial seperti mangrove dan ekosistem gambut, serta komitmen global pengelolaan sumber

daya air untuk mendukung target ke-6 SDG's. Target yang dimaksud adalah yaitu ketahanan air dan sanitasi. Indonesia juga mendorong penyusunan pedoman pembiayaan berkelanjutan dalam pemulihan lingkungan, serta upaya pengelolaan sampah laut melalui penerapan perlindungan terintegrasi pesisir dan laut dari pencemaran daratan-lautan dan pelibatan masyarakat.

Cara kedua untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai contoh adalah dengan memberikan contoh sukses. Salah satunya adalah upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG).

Sampai tahun 2022, Indonesia telah memiliki amunisi lengkap terkait PPEG, meliputi aspek hukum, instrumen pelaksanaan di tingkat tapak dan dukungan program. Upaya PPEG juga telah diapresiasi dengan ditetapkannya resolusi tentang konservasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan pada *United Nations Environmental Assembly* (UNEA) ke-4 di Nairobi pada bulan Maret 2019, dan ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah pada forum *International Tropical Peatland Center*.

Indonesia juga sukses mengajak industri yang berada di kawasan ekosistem gambut untuk ikut berpartisipasi dalam memantau tinggi muka air tanah di 10.857 titik dan pemantauan curah hujan di 816 titik. Upaya ini sukses mengurangi kerusakan gambut dan menurunkan titik api. Sampai dengan tahun 2021, Indonesia telah membangun infrastruktur pembasahan gambut berupa sekat kanal sebanyak 30.961 unit. Selain itu, juga telah dilakukan upaya pemulihan lahan gambut oleh industri dan masyarakat, masing-masing seluas 3.643.799 Ha dan 49.874 Ha.

Proses partisipasi dan pelibatan masyarakat yang tinggal di kawasan ekosistem gambut juga ditingkatkan melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar turut serta dalam PPEG, sekaligus upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kisah sukses PPEG harus ditunjukkan kepada dunia. Cerita yang diawali dengan sorotan internasional saat ini telah menjadi langkah konkret yang layak menjadi inspirasi bagi dunia. Setidaknya untuk negara-negara G20 yang memiliki lahan gambut dengan luasan cukup signifikan seperti Amerika Serikat, Kanada dan Brazil, yang

sering diperhadapkan pada masalah yang sama yaitu kebakaran hutan.

Momentum Presidensi G20 bagi Indonesia mungkin baru akan terulang kembali dua puluh tahun yang akan datang. Indonesia harus sukses sebagai tuan rumah dan sukses prestasi dengan mengawal substansi isu yang dibahas. Semangat “Indonesia Memimpin dengan Memberi Contoh” harus dapat diartikulasi, dicerna, dan diaktualisasi oleh masyarakat. Langkah-langkah untuk itu harus dilakukan secara terstruktur, massif dan inovatif dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki. Kita bisa dan kita masih memiliki kesempatan.

Referensi:

Naskah Sambutan Menteri LHK dalam media briefing Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) tanggal 1 Maret 2022;

United Nations Environment Programme 2019. Resolution 4/16. Conservation and Sustainable Management of Peatlands - Resolution adopted by the United Nations Environment Assembly on 15 March 2019. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/30675>;

Issue Note Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG)

Bahan Paparan Refleksi Pemulihan Lingkungan Tahun 2021.

* * * * *

Informasi, Sumber Kekuatan Globalisasi

Oleh: Siska Lidya Asni, S.Sos.

“Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggam tangan beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak,” ungkap John Naisbitt, penulis buku “Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives” dan pembicara publik dari Amerika Serikat. Mengutip laman kemenag.go.id pada 2015, hal senada dinyatakan Menteri Agama terdahulu, Lukman Hakim Saifuddin, yang menyampaikan sumber kekuatan globalisasi itu bernama informasi.

Di era globalisasi saat ini, informasi merupakan sebuah kekuatan yang dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat menyatakan, masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai. Masyarakat dikondisikan untuk memungkinkan berperan dalam pembangunan. Ketersediaan informasi yang memadai akan mendorong masyarakat terlibat dalam wacana isu dan kebijakan publik serta mengambil peran.

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa dukungan penuh dari Humas Pemerintah dalam menyukseskan Presidensi G20 melalui akselerasi informasi merupakan kekuatan bagi negara Indonesia untuk bergerak maju menuju pemulihan negara. Untuk menyelesaikan kondisi ketidakstabilan Indonesia di berbagai sektor

akibat Pandemi Covid-19 melalui peran serta seluruh masyarakat. Selanjutnya, Humas Pemerintah mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat.

Eratnya kerja Humas Pemerintah dengan dunia digital, menjadikan humas pemerintah gancang dalam publikasi intensif guna menyingkap Indonesia dari berbagai sisi yang mungkin belum diketahui dunia internasional. Inilah kesempatan humas pemerintah untuk membumikan Indonesia lebih mendunia melalui akselerasi informasi tentang Presidensi G20 perdana bagi Indonesia sejak forum ini terbentuk pada tahun 1999 silam. Akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sebagai bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Keingintahuan yang begitu besar dari Humas Pemerintah menjadikan kepekaan tersendiri terhadap datangnya berbagai sumber informasi. Dipadu dengan keuletan dalam mencari data dan bahan informasi, menjadikannya sebagai jembatan informasi penting bagi publik. Selain itu, menjadi ruang komunikasi bagi publik dalam menjawab setiap pertanyaan, menampung saran dan kritik sebagai aspirasi publik untuk memberikan pemahaman dan memperkuat akselerasi informasi publik.

Dengan kepandaian bersosialisasi, keluwesan bergerak, dan pergaulan luas akan memudahkan hubungan internal dan eksternal Humas Pemerintah dalam bekerjasama dan berkolaborasi sesama humas pemerintah lintas instansi untuk mempublikasikan informasi dari berbagai sudut pandang. Sehingga, detail informasi mengenai Presidensi G20 dapat tersampaikan melalui berbagai saluran media, dan tidak ada sedikitpun yang tidak terpublikasi ke publik.

Keahlian Pranata Humas khususnya, dibutuhkan dalam mengolah bahan-bahan informasi, menguasai berbagai aplikasi dan penyusunan narasi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pranata Humas dituntut mampu menghasilkan konten-konten menarik, narasi berita, materi layanan informasi yang aktual dan akurat, serta berkualitas secara internasional juga sangat diperlukan.

Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang baik antara sesama humas pemerintah, bersama dapat mengatur strategi komunikasi dan program layanan informasi. Pembuatan konten dan materi informasi yang menarik melalui media yang tepat akan menjadi sajian informasi kekinian. Akurasi dan kebaruan metode penyampaian pesan kehumasan yang dapat diterima khalayak luas sebagai bagian penting dari pelayanan informasi publik. Untuk itu, kontribusi bersama Humas Pemerintah akan menyingkap nusantara dari berbagai sisi yang mungkin belum diketahui dunia internasional.

Perluas Jangkauan

Diseminasi informasi tetap menjadi senjata ampuh dalam memperluas jangkauan capaian informasi publik melalui media massa media sosial kontemporer. Dengan jejaring Humas pemerintah, pada media resmi pemerintah, maupun media sosial pribadi masing-masing humas pemerintah akan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi mengenai Presidensi G20. Sesuai dengan surat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meminta seluruh Humas Pemerintah untuk memperkuat penyebarluasan informasi kepada publik melalui diseminasi informasi.

Perlu disadari bahwa derasnya arus informasi yang semakin terbuka luas di berbagai media publik. Hal ini menantang Humas Pemerintah untuk mengokohkan benteng pertahanan dalam menangkal informasi dan pemberitaan miring mengenai negara dan pemerintahan Indonesia. Humas pemerintah tidak akan membiarkan adanya pemberitaan ‘miring’, melainkan gancang untuk meluruskan pemberitaan miring untuk menegaskan integritas pemerintah di masyarakat, bahkan di mata dunia.

Di salah satu media resminya, pemerintah menyatakan akan berkolaborasi dengan media asing yang memiliki jaringan di Indonesia sebagai langkah proaktif dalam pengolahan informasi publik. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi Humas Pemerintah untuk membangun relasi baik dengan banyak media.

Peluang Humas Pemerintah dalam perhelatan G20 juga ada dalam kesempatan berinteraksi dengan media asing. Hal ini

menambah pengalaman, memperkuat kemampuan, mengembangkan wawasan, dan tentu saja memperluas jaringan. Harapannya, Humas Pemerintah tidak sampai tertinggal dengan media lain, termasuk media asing.

Mengadopsi pernyataan Pearlson dan Saunders mengenai sistem informasi bahwa kombinasi keterampilan manajemen sistem informasi, diketahui bahwa Humas Pemerintah memiliki potensi besar untuk memasuki panggung kehumasan internasional melalui pelayanan publik berkelas internasional.

Mari bersama-sama bergerak dalam menyukseskan Presidensi G20 dengan senjata publikasi dan layanan kehumasan lainnya. Sejatinya, humas pemerintah tidak mau berdiam diri dan berpangku tangan, melainkan berlari cepat mengambil bagian dalam setiap kegiatan pemerintah. Saatnya berperan aktif menerima tantangan kehumasan dalam menyukseskan Presidensi G20 demi pemulihan pembangunan bangsa dan negara.

* * * * *

Bangun Jenama Via Juru Bicara

Oleh: Thoriq Ramadani, S.I.Kom., M.Tr.A.P.

“Sebagai milenial publik figur diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas terutama generasi milenial dan generasi Z,” tutur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat memperkenalkan Maudy Ayunda sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia 2022. Maudy yang memiliki nama asli Ayunda Faza Maudya ini dikenal sebagai aktris yang memiliki pengikut sebanyak 15,4 juta di media sosial *Instagram*.

Latar belakang pendidikan yang dienyam perempuan kelahiran 19 Desember 1994 didapat di University of Oxford dan Stanford University. Tugasnya sebagai Juru Bicara meliputi dua hal, yaitu menyampaikan informasi pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 Indonesia dan menyiapkan perkembangan pertemuan Presidensi G20 Indonesia secara rutin.

Menjadi Juru Bicara Pemerintah di usia muda merupakan sebuah prestasi membanggakan dan menjadi panutan. Maudy menjadi bagian dari Juru Bicara Pemerintah untuk mendukung Menkominfo terkait komunikasi penyelenggaraan Presidensi G20. Adapun, komunikasi mengenai isu kebijakan Presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Selain itu, Juru Bicara untuk *Serpha Track* diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sedangkan juru bicara *Finance Track*

yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Ada tiga faktor yang disyaratkan Cangara (2018) untuk dipenuhi seorang komunikator dalam hal ini Juru Bicara, agar dapat diterima masyarakat secara luas, yakni kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi tentang kelebihan yang dimiliki oleh seorang komunikator yang dengan kelebihan ini dapat diterima target sasaran.

Daya tarik umumnya disebabkan karena tutur kata yang sopan, ramah, gaya berpakaian yang sesuai, dan postur tubuh yang proporsional. Selanjutnya terkait dengan kekuatan ini lebih didasari kepada tugas yang diemban dan wewenang yang dimiliki.

Menilik dari tiga faktor yang disyaratkan, Maudy tentunya harus memiliki semuanya. Kredibilitas bisa dilihat dari pendidikan yang sudah direngkuhnya yaitu dari kampus top dunia. Ia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan, antara lain Festival Film Jakarta, Indonesian Choice Awards, dan I Fashion Festival yang membuktikan kredibilitasnya di dunia hiburan.

Mengenai daya tarik, Maudy memiliki paras yang menarik dan juga berpakaian sopan. Tak pelak, pengikut media sosialnya hingga belasan juta. Dengan pengikut itu, ketika dirinya membuat *postingan*, berpotensi besar dilihat, memberikan *love*, *comment* dan *share*. Sejalan dengan harapan untuk menjangkau generasi milenial dan generasi Z, yang menggandrungi media sosial.

Kekuatan yang ia miliki adalah tugas yang diembannya menjadi Juru Bicara dan wewenang untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan G20 kepada masyarakat, tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Apa yang Maudy sampaikan mengenai G20, tidak lagi Maudy sebagai pribadi anak muda yang berprofesi sebagai aktris. Akan tetapi, *official* sebagai Juru Bicara yang mewakili Pemerintah.

Bangun Jenama Nasional

Seow Ting Lee & Hun Shik Kim (2020) dalam *Nation branding in the COVID-19 era: South Korea's pandemic public diplomacy*

menjelaskan bahwa dalam situasi pandemi, kesehatan masyarakat bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertarungan. Melainkan jenama nasional dan bagaimana bangsa dapat memberikan pengaruh dalam merespons suatu krisis yaitu, COVID-19.

Mereka menawarkan penjelasan konseptual eksploratif dari diplomasi publik yang didasarkan pada kerangka normatif substansi, informasi, kepercayaan, kerjasama, dan saling menguntungkan. Analisis sentimen media sosial dan media berita internasional menunjukkan bahwa Korea Selatan dianggap sebagai contoh bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 oleh khalayak internasional.

Seorang aktris yang ditunjuk menjadi Juru Bicara dalam ajang bergengsi dunia menjadi jendela Indonesia kepada dunia, maka perlu juga dilihat dari apa yang Seow Ting Lee & Hun Shik Kim (2020) tawarkan yaitu mengenai substansi, informasi, kepercayaan, kerjasama, dan saling menguntungkan. Sehingga, Juru Bicara dari kalangan dunia hiburan ini menjadi tepat.

Bagi Pemerintah, substansi dan informasi tentunya sudah ada dalam genggamannya. Apa saja yang akan dibahas dan diputuskan dalam G20, Pemerintah telah menyiapkannya. Ini yang belum tentu masyarakat awam mendapatkannya. Maka kehadiran Juru Bicara yang *notabene* juga *public figure* dapat menyampaikan substansi dan informasi G20 yang bertajuk “*Recover Together, Recover Stronger*” menjadi lebih membumi dan “kena” di benak generasi milenial dan generasi Z.

Kepercayaan yang dibangun Pemerintah dalam ajang G20 sebagai pertarungan etalase bangsa di dunia internasional. Bagaimana keramah tamahan masyarakat dengan nilai kegotong-royongannya menerima dan menjamu hadirin dari mancanegara diuji. Sosok Juru Bicara yang menguasai tidak hanya Bahasa Indonesia, namun juga bahasa asing, perlu dengan tepat menerjemahkan hal tersebut kepada tamu internasional.

Kerjasama yang diupayakan tentunya harus saling menguntungkan, tidak hanya sebagai tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga bagi bangsa lain yang hadir. Ini yang menjadi

tantangan, bagaimana Juru Bicara mendorong usaha yang dilakukan mendapat apresiasi dan memiliki semangat bekerja sama yang saling menguntungkan. Tidak mementingkan diri sendiri, sesuai dengan tema G20 yang jika diartikan “Pulih Bersama” dari pandemi COVID-19.

Kehadiran Juru Bicara pada Presidensi G20 Indonesia sangat penting karena dapat membangun jenama nasional yang selama ini sudah apik dilakukan. Akhirnya, kita butuh waktu untuk Maudy bertugas sebagai Juru Bicara terlebih dahulu dan mewujudkan apa yang menjadi harapan. Mungkin jadwal *shooting*-nya beberapa bulan ke depan akan bergeser menjadi jadwal rapat, sidang, dan konferensi pers G20. Kita lihat bersama.

* * * * *

Tantangan Pranata Humas Berkelas Mendukung Presidensi G20

Oleh: Titik Nur Farikhah, SE.

Tak bisa dipungkiri menjadi humas pemerintah atau lebih dikenal dengan *public relation*, dianggap sebagai sosok yang multitalenta. Serba bisa dalam segala hal, energik, *humble*, komunikatif, *good looking*, pribadi yang menyenangkan, dan selalu memiliki *moodboster*. Anggapan ini yang kadang menjadi beban bagi seorang humas ketika tidak mampu menjalankan perannya dengan sempurna dan belum mampu memberikan yang terbaik pada kondisi tertentu.

Manusiawi, jika terkadang suatu saat tampilan kita tampak layu karena kurangnya waktu istirahat akibat tumpukan naskah berita yang harus segera tayang. Terkadang pula, tidak jarang saat pikiran penat, sehingga berimbas pada kualitas tulisan yang kita tuangkan. Atau hal lain yang menuntut seorang *public relations* harus selalu prima sementara tubuh terlampau lelah karena harus berkejar-kejaran dengan padatny agenda pimpinan.

Melihat realita yang terjadi di lapangan, sangat tidak mungkin jika humas harus bekerja sendiri tanpa saling bersinergi dan berkolaborasi. Tentu tumpukan pekerjaan akan selalu ada, padatnya jadwal pimpinan pun tidak bisa dihindari. Lalu apakah harus menunggu semua berlalu? Sangat tidak relevan jika seorang humas menyerah dengan keadaan tanpa mencari solusi yang bijak.

Kembali pada peran humas yang memang dituntut harus humanis dan harus mampu meyakinkan diri untuk dapat memberikan solusi

terbaik, hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah komunikasi, ini menjadi kunci untuk menyelesaikan segala persoalan yang tengah dihadapi.

Tantangan Humas Gaungkan G20

G20 sebagai forum kerja sama multilateral terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa memiliki tujuan yakni mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Tema besar yang diusung Presidensi G20 “*Recover Together, Recover Stronger*” Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Selain tema, Presidensi G20 juga memiliki logo yang mirip dengan pohon. Sama seperti pohon yang terus tumbuh dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Logo ini juga menjadi ilustrasi pengharapan atas tumbuhnya perekonomian global yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Hal ini juga merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya. Indonesia juga dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia.

Saat ini, negara kita tengah didaulat menjadi tuan rumah Presidensi G20. Setelah sebelumnya, Roma Italia ditunjuk sebagai tuan rumah. Tentu bukan tugas yang ringan karena dengan penunjukkan ini mengisyaratkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah internasional.

Sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama-

sama guna mensukseskan agenda besar dalam kisaran waktu sepuluh bulan terhitung mulai 26 Januari hingga November 2022 mendatang.

Sebuah kehormatan sekaligus peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana peran Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam memulihkan keadaan terutama sektor perekonomian di masa pandemi Covid-19 yang hingga kini masih belum usai.

Namun demikian kesempatan emas melanjutkan tongkat estafet Presidensi G20 sebagai bentuk kepercayaan kepada Indonesia harus diwujudkan secara bersama-sama, bersinergi dan berkolaborasi. Di sinilah peran humas pemerintah dituntut mampu menggaungkan sekaligus mewarnai media publikasi sebagai media yang adaptif, solutif dan efektif untuk menyampaikan berbagai informasi positif dalam mengedukasi masyarakat.

Profesi humas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tentu menjadi tantangan tersendiri. Bahkan tidak bisa dipungkiri, baik buruknya citra institusi ada di tangan humas. Karena produk yang dihasilkan humas dapat langsung dinikmati sekaligus dinilai publik.

Dalam menyambut Presidensi G20, keterlibatan Pranata Humas sebagai garda terdepan tentu tidak mudah. Terlebih, ini adalah event langka yang tidak semua pranata humas mendapat kesempatan terlibat dalam kepanitiaan. Tentu ada persyaratan dan sangat selektif untuk dapat bergabung mempublikasikan berbagai agenda yang melibatkan 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).

Tak bisa dipungkiri, menjadi Pranata Humas berkelas dunia sangatlah bergengsi. Kompetensi diri menjadi pertimbangan utama untuk bisa bergabung dan duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi dunia terlebih di masa pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir.

Humas berkelas dunia harus siap mengemban tugas mulia membantu negara-negara keluar dari keterpurukan dunia melalui publikasi massif. Ini bukanlah tugas yang ringan. Untuk itu bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas organisasi atau instansi menjadi sebuah keharusan demi mensukseskan agenda Presidensi G20.

Dalam perspektif kehumasan, momentum presidensi yang hanya terjadi satu kali setiap generasi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.

Momen ini juga dapat menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional khususnya dalam pemulihan ekonomi global, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Melalui pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia, menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional. Upaya ini diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.

* * * * *

7 Taktik Menghadapi Perang Konten Versi Humas

Oleh: Winarni, S.I.Kom.

Taktik perang versi humas merupakan strategi yang dapat dipakai oleh pranata humas dalam perang konten yang semakin ganas. Perang konten terjadi akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pertumbuhan media komunikasi semakin cepat. Humas sebagai garda terdepan penyampaian informasi perlu cekatan dan sigap menghadapi perubahan ini. Agar dapat menang dalam perang konten saat ini, maka diperlukan strategi atau taktik jitu yang dapat diaplikasikan oleh pranata humas.

Strategi pada awalnya merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia militer, tetapi kini penggunaan kata strategi lebih luas dan dapat diaplikasikan di semua bidang pekerjaan. Menurut Hafied Cangara dalam buku *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, menyebutkan bahwa strategi merupakan sebuah seni kemampuan berfikir untuk mengolah sumberdaya yang dimiliki demi mencapai tujuan dengan keuntungan maksimal dan efisien. Berdasarkan pengertian tersebut, yang harus dilakukan oleh seorang humas adalah mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki agar tujuan komunikasi yang telah direncanakan berhasil secara efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang tumbuh bak jamur di musim hujan, memudahkan humas untuk dapat memilih media terbaik dalam menjalankan strategi komunikasinya. Humas bebas menentukan

media mana yang akan digunakan. Dari media konvensional, media online maupun media sosial. Penentuan media tersebut disesuaikan dengan tujuan komunikasi kita dan khalayak sasaran yang kita tuju. Dari ketiga media tersebut, media sosial merupakan pilihan terbaik bagi humas.

Alasan mengapa media sosial adalah media terbaik di era saat ini karena selain minim biaya, media sosial merupakan media yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari kepios.com pengguna internet di Indonesia per Februari 2022 mencapai 73.7% atau sebanyak 204.7 juta jiwa. Sementara pengguna media sosial sebanyak 68.9% atau setara dengan 191.4 juta jiwa. Angka tersebut naik sebanyak 12.6 % atau bertambah sekitar 21 juta pengguna dari tahun 2021. Berdasarkan data dari Kepios yang disampaikan Centurion Chandratama, media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah whatsapp, instagram, facebook, tiktok, telegram, dan twitter.

Melihat angka fantastis tersebut, media sosial menjadi peluang yang sangat bagus bagi humas untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayaknya. Pengguna media sosial akan lebih mudah dan cepat menerima informasi yang disebarkan. Tetapi yang perlu menjadi perhatian, walaupun akses mudah dan jangkauan luas, humas harus bijaksana menggunakan media sosial. Melimpah ruahnya informasi di media sosial yang datang dari segala penjuru pada akhirnya membuat khalayak tenggelam dalam lautan informasi. Khalayak biasanya memilih informasi yang enak dilihat dan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, humas harus mampu menangkap dan mewujudkan keinginan khalayaknya tersebut. Kemudian, apa saja yang perlu dilakukan humas agar informasi yang disebarkan menang dalam peperangan konten?

Pertama, rencanakan tujuan dari komunikasi yang akan kita lakukan. Apa yang ingin kita capai dengan melakukan penyebaran informasi. Perencanaan tujuan ini biasanya mengacu pada kebijakan komunikasi yang berdasar pada nilai organisasi seperti visi dan misinya. Setelah itu, tentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua, kenali khalayak sasaran. Humas perlu mengetahui secara

detail khalayaknya. Apa yang mereka sukai, yang tidak mereka sukai, apa yang mereka butuhkan dan apa yang biasanya mereka gunakan. Mengenali khalayak akan membuat humas tahu yang dibutuhkan khalayaknya.

Taktik ketiga yang harus dilakukan adalah bermain dengan konten dan desain. Manusia akan lebih tertarik pada informasi yang indah dilihat dan mereka butuhkan. Oleh karena itu, humas harus menentukan informasi yang akan dibagi sesuai kebutuhan. Kemudian racik informasi tersebut dalam desain yang *eye catching* dan bahasa baku yang menarik.

Keempat, tentukan person atau tokoh yang akan ditunjuk sebagai juru bicara. Contohnya, menggunakan *influencer*. Seperti kita tahu, menentukan sumber yang kredibel adalah kunci. Tingkat kredibilitas seorang sumber dapat dilihat dari tingkat kepercayaan khalayak terhadap tokoh tadi. Selain itu, ia juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik.

Kelima, jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Sebaik apapun capaian kita, pasti ada satu dua hal yang kurang. Lakukan evaluasi dengan mencari kekurangan dan kelebihan strategi yang sudah dilakukan. Dengan begitu, kesalahan dapat diminimalisir dan tujuan tercapai lebih efektif.

Keenam, jalin hubungan baik dengan khalayak. Hubungan personal yang hangat dan cair melalui kontak langsung baik formal maupun informal merupakan bentuk hubungan terbaik untuk mencapai tujuan komunikasi (Pace et al., 2010). Kaitannya dengan media sosial, humas perlu lebih dekat dengan khalayaknya. Hal tersebut dapat dicapai dengan menjaga kontak erat atau *engagement* dengan khalayak. Yang perlu diwaspadai adalah bahwa hubungan ini dapat menjadi berkah atau hukuman. Menjadi berkah apabila khalayak merasa puas dengan layanan yang diberikan, misalnya pertanyaan yang diajukan melalui media sosial ditanggapi secara cepat oleh admin. Hubungan yang menjadi hukuman apabila admin media sosial cuek, tidak peduli dan tidak menanggapi komentar maupun pertanyaan khalayak.

Ketujuh, bangun kepercayaan khalayak dengan informasi yang disebarkan. Humas harus konsisten untuk selalu memberikan

informasi yang benar di tengah banyaknya informasi yang tidak jelas keakuratannya.

Ketujuh hal tersebut dapat menjadi taktik jitu humas dalam perang konten. Di Tengah perkembangan teknologi saat ini, mau tak mau humas harus berubah. Humas harus cerdas dalam menangkap dan memanfaatkannya peluang. Memang tak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi dapat menjadi senjata dalam perang konten, dapat pula menjadi alat yang menjatuhkan. Oleh karena itu, humas harus bijak dan bertanggung jawab sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Tidak kalah penting, humas harus fokus pada nilai, visi dan misi organisasi dalam mengolah informasi.

* * * * *

Transisi Energi

Menyingkap Pesona Desa Karangrejo Borobudur Sebagai Lokasi Kunjungan G20

Oleh: Fany Rachmawati, S.I.Kom.

Rangkaian kunjungan G20 diterima dengan baik di Kabupaten Magelang. Selain membahas soal transisi energi, para Delegasi Presidensi Government Group of 20 (G20) diajak mengunjungi Candi Borobudur dan objek wisata sekitarnya dengan menaiki mobil VW. Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang jadi tempat mereka singgah pertama pada Maret lalu. Mereka kagum dengan Balkondes binaan Pertamina ini dengan konsep Desa Energi Berdikari di kawasan wisata Candi Borobudur.

Balkondes Karangrejo terletak di lereng perbukitan Menoreh dengan pesona alam yang indah. Selain itu juga dilengkapi penginapan, restoran dan tempat meeting sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sekitar Candi Borobudur. Dalam kesempatan itu, 20 orang delegasi turut menyaksikan peresmian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Balkondes Karangrejo adalah salah satu contoh yang nyata dan komplit dilengkapi sumber energi dari matahari untuk mendukung interaksi wisata berbasis ekosistem sosial budaya dan alam desa. Semua konsep di Balkondes Karangrejo dinilai sesuai dengan isu G20 yang mendukung komitmen global untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Energi matahari yang digunakan

sesuai dengan konsep ‘actual deliveryable’ (mudah digunakan) yang diharapkan Presiden Jokowi (Rilis Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan (P2KL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro, Maret 2022).

Keberadaan panel surya solar cell itu mendapat apresiasi dari perwakilan 20 negara G20 sebagai program energi desa mandiri energi. Pertamina bekerja sama dengan KLHK ingin memberikan edukasi kepada masyarakat desa bahwa sumber energi itu bisa berasal dari tenaga surya (Rilis Chief Executive Officer (CEO) Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) Pertamina Dannif Danusaputro, Maret 2022).

Sumber energi itu dinilai mudah dipasang atau ‘affordable’ dan yang penting adalah bisa diandalkan. Selain murah dan bersih yang terpenting keberadaan aset energi listrik tenaga surya Balkondes Karangrejo bisa digunakan lama, hingga 20 tahun lebih. Para delegasi G20 sangat kagum bahwa ada konsep program Desa Mandiri Energi Berdikari PLTS yang diciptakan dari lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan Balkondes Karangrejo tidak terlepas dari dukungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dibangunnya Balkondes ini tidak lain adalah sebagai salah satu upaya mendukung program destinasi super prioritas Borobudur. Gasblock menjadi ikon Balkondes Karangrejo. Gasblock melambangkan interaksi dan kolaborasi energi gas bumi yang ramah lingkungan serta Desa Energi PGN yang unik, asri dan kaya akan budaya Indonesia.

Ada beberapa fasilitas yang dibangun untuk meningkatkan kenyamanan dan menarik minat wisatawan, salah satunya pipa gas sepanjang 3.900 meter untuk melayani 204 sambungan jaringan gas bumi rumah tangga warga sekitar Balkondes, terpatnya di Dusun Kretek dan Bumen. Sebagai new icon, Gasblock memasang monumen meter regulating system (MRS) ukuran G.1600 yang biasanya digunakan untuk pelanggan industri dan bulk customer dengan diameter pipa 12 inch dan 16 inch.

Selanjutnya, menggunakan energi gas bumi sebagai energi untuk water heater homestay balkondes, meja obor beberapa lokasi, serta obor abadi di beberapa titik. Kehadiran Balkondes Karangrejo

diharapkan bisa mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat setempat secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan semangat energizing community Subholding Gas Pertamina (Rilis General Manager Sales Operation Region 3 Wilayah Jatim Jateng (SOR 3) PT PGN, Iwan Yuli Widyastato, Maret 2022).

Di lokasi yang berjarak 3 kilomoter dari Candi Borobudur ini juga dibangun taman dan beberapa spot foto. Tujuannya tidak lain adalah untuk menarik minat wisatawan agar berkunjung ke sana.

Desa Wisata Karangrejo, 10 Terbaik di Nusantara

Pada 2019, Karangrejo masuk dalam 10 besar Desa Wisata Nusantara terbaik. Event ini diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta diikuti 300 desa se-Indonesia. Ada dua kategori dalam lomba ini, yaitu Maju dan Berkembang. Desa Karangrejo masuk dalam kategori Maju.

Prestasi ini diraih karena Desa Karangrejo memiliki beberapa objek wisata yang terintegrasi dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Objek wisata tersebut adalah Punthuk Setumbu, Bukit Rhema (sebelumnya Gereja Ayam), Bukit Barede, Kebun Buah, dan Balkondes Karangrejo itu sendiri.

Bagi penggemar film Ada Apa Dengan Cinta (AADC), salah satu adegan yang diambil pada sekuel keduanya, adalah di objek wisata Punthuk Setumbu, Desa Karangrejo Borobudur. Usai dua pemeran utamanya, Cinta (Dian Sastrowardoyo) dan Rangga (Nicolas Saputra) mengunjungi destinasi ini, popularitasnya semakin menanjak. Punthuk Setumbu adalah objek wisata favorit untuk berburu *sunrise*.

Sebelumnya, Punthuk Setumbu pun sudah viral berkat the power of social media. Pada zaman dahulu, Punthuk Setumbu hanyalah sebuah kebun di lereng perbukitan Menoreh. Lokasi ini sering dijadikan tempat menggembala hewan-hewan di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, ada seorang fotografer yang mengabadikan foto sunrise dari bukit ini dengan latar belakang Candi Borobudur dan siluet gunung Merapi. Seketika foto itu viral di media sosial sehingga banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke sana.

Sambut Gelaran KTT G20, Bali Darurat Sampah

Oleh: I Ketut Suardita, S.Pd.

Sebuah riset menunjukkan bahwa di Bali, produksi sampah mencapai 4.281 ton/hari. Dari jumlah tersebut, 52 persen sampah belum terkelola dengan baik. Sampah di Bali 50 persen berasal dari tiga daerah yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Dari sampah yang dibuang, 70 persen di antaranya berakhir di TPA Suwung. Sebagai daerah tujuan wisata, sekaligus etalase Indonesia di mata internasional, Bali memiliki peran penting untuk menangani masalah sampah plastik. Apa yang dilakukan di Bali akan diketahui negara-negara di dunia dengan mudah.

Saat ini Bali dalam keadaan darurat sampah, sehingga diperlukan program pengelolaan sampah. Untuk itu Pemda Bali mengeluarkan Pergub No.47/ 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Sebagai tindak lanjut, dikeluarkan SK Gubernur 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/ Kelurahan dan Desa Adat serta Instruksi Gubernur Bali No.8324/2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/ Kelurahan dan Desa Adat.

Peraturan yang dikeluarkan untuk mewujudkan pembangunan daerah Bali menuju Bali Era Baru. Upaya tersebut dilakukan melalui pola pembangunan semesta berencana berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Strategi Pengelolaan Sampah

Strategi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat yaitu antara lain pengaturan warga, dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah. Selain itu, warga diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, warga dilarang membuang sampah ke desa dan desa adat lain dan dilarang membuang sampah sembarangan.

Kemudian penggunaan bahan plastik sekali pakai dibatasi sesuai Pergub Bali No. 97/2018, warga dilarang membuang sampah ke danau, mata air, sungai dan laut sesuai dengan Pergub Bali No.24/2020. Selanjutnya mengembangkan kebersamaan secara gotong royong di berbagai komponen masyarakat untuk membuat peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah berbasis sumber serta pembuatan awig-awig/perareman. Pengelolaan sampah berbasis sumber dapat dilakukan oleh desa/kelurahan bekerjasama dengan desa adat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Para perbekel/ Lurah dan Bendesa Adat, wajib memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber, agar kesadaran warga masyarakat menjadi tergugah dan mau berperan aktif secara gotong royong untuk mewujudkan lingkungan bersih. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bali diharapkan agar membuat pengolahan sampah berbasis 3R (Reduce-Reuse-Recycle). Pengelolaan sampah selain didaur ulang juga bisa diolah menjadi sumber energy.

Wacana pengolahan sampah menjadi energi di TPA Suwung dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah lama di cetuskan namun sampai saat ini belum berjalan sesuai rencana. Banyak kendala yang dihadapi, masih adanya perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat, pro dan kontra masih membayangi pembangunan PLTSa di TPA Suwung, walaupun penyiapan lahan sudah dilakukan.

Perhelatan KTT G20 merupakan *moment* untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia sudah berupaya melakukan penyelamatan lingkungan dengan mengkonversi sampah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Selain itu Pemerintah

Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) dengan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan resmi untuk delegasi negara-negara G20 di Bali. Penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Sebagai pendukung penggunaan kendaraan listrik tersebut PLN sudah membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tipe *ultra fast charging* 200 Kw di areal pelaksanaan KTT G20 yang membutuhkan waktu pengisian daya kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan. Selain SPKLU *ultra fast charging*, juga dibangun ada SPKLU *fast charging* dan menyediakan *home charging*. Kemudian untuk jangka panjang infrastruktur dan kendaraan listrik ini akan disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Sumber listrik yang digunakan untuk SPKLU sudah tersertifikasi energi terbarukan (*renewable energy certificate/REC*).

Terkait dengan rencana pembangunan PLTSa sebagai upaya dalam melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan dan penyelamatan lingkungan, maka terlepas dari pendapat yang pro dan kontra sangat perlu dilakukan kajian dan pertimbangan yang mendalam serta melakukan komunikasi, dialog dan sosialisasi ke seluruh tokoh masyarakat di Bali untuk mencari solusi dalam penanganan sampah. Tujuannya agar Bali sebagai Dinasti Wisata Dunia tetap menjadi idola yang memiliki daya tarik dari segala hal salah satunya adalah lingkungan yang bersih.

* * * * *

Riset Kendaraan Listrik Untuk Percepatan Energi Hijau Berkelanjutan

Oleh: Karlina Gusmarani, S.I.Kom., M.A.

Energi hijau atau energi berkelanjutan merupakan satu dari beberapa isu prioritas dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Penggunaan mobil listrik yang ramah lingkungan menjadi bentuk perwujudan yang diharapkan dapat mempercepat proses transisi energi. Februari 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengukuhkan komitmen dan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Regulasi mengenai kendaraan listrik ini sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, sebagai upaya menyelaraskan dengan tren dunia untuk menggunakan kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan.

Berbagai kebijakan terkait hal tersebut, di antaranya dengan skema atau dapat memberikan petunjuk untuk *stakeholder* dalam mewujudkan target dari Indonesia yang mendukung pengembangan dan perwujudan dari kendaraan listrik ini. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik

Berbasis Baterai (KBLBB).

Kendaraan ramah lingkungan merupakan kendaraan berbahan bakar yang dapat mengurangi dampak emisi polusi udara serta gas rumah kaca, sehingga udara lebih bersih dan baik untuk lingkungan. Namun, dalam mewujudkan hal ini berbagai tantangan masih dihadapi. Keempat tantangan tersebut adalah investasi yang dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik ini; waktu, dalam pengembangannya berpacu dengan waktu antara teknologi yang telah ada dan pengembangan teknologinya; harga yang diharapkan dapat terjangkau, karena pengembangan kendaraan listrik ini teknologi baru, biasanya masih relatif mahal dan; infrastruktur yang dapat mendukung keberadaannya.

Riset Kendaraan Listrik

Indonesia, telah sejak lama melakukan berbagai penelitian dan pengembangan terkait dengan kendaraan listrik ini, dimulai dari pengembangan komponen-komponen pendukung hingga menjadi kendaraan listrik yang utuh.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), turut andil dalam perkembangan riset khususnya pada pengembangan kendaraan otonom yang merupakan rangkaian dari sistem mekatronika cerdas difungsikan sebagai alat transportasi, dimulai dari sistem deteksi objek dengan radar dan lidar sebagai wujud dari teknologi kunci, untuk kemudi dan pengereman pada sistem mekanik dan kontrolnya, serta pada sistem telekomunikasinya.

Micro Electric Vehicle Teleoperated Driving System dikenal dengan MEVi-TDS, merupakan salah satu hasil riset BRIN, mengusung konsep kendaraan listrik yang dapat digunakan pada lingkungan khusus, seperti tempat objek wisata, industri, kawasan perumahan, dan lainnya. Kendaraan listrik ini bersifat otonom/tanpa pengemudi serta dapat dikemudikan dari jarak jauh. Komponen penting dalam pengembangan mobil listrik sebelumnya telah dilakukan yang fokus pada penguasaan teknologi seperti baterai, platform, motor listrik, *charging system* dan *control system/power electronics*. Selanjutnya, akan lebih fokus pada penguasaan teknologi kunci otonom, sistem deteksi objek atau sensor, sistem

telekomunikasi, *human to vehicle interaction* dan *computer vision*.

Keberadaan kendaraan listrik membutuhkan ekosistem pendukung, sehingga Indonesia melalui Kementerian ESDM menyiapkan insentif bagi badan usaha yang membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mengisi daya bagi mobil listrik

Komitmen Energi Hijau di G20

Dalam perhelatan G20, salah satu yang akan dibahas adalah terkait transisi energi menuju ekonomi realisasi penerapan energi hijau di negara maju maupun berkembang. Menyambut hal ini sebagian besar lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraannya. Bukti komitmen Indonesia pun dapat dilakukan melalui penggunaan mobil listrik selama kegiatan KTT G20 ini berlangsung.

“Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO₂, serta menjadi *showcase* bahwa Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik” ungkap Presiden Jokowi, pada Peresmian SPKLU *UltraFast Charging* Pertama untuk mendukung operasional kendaraan delegasi negara-negara peserta G20, Maret 2022 lalu.

Penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 ini ditindaklanjuti dengan kerja sama antara berbagai pihak, baik swasta, BUMN dan pemerintah daerah. Baik dalam penyediaan kendaraan listrik, maupun yang berkelanjutannya pada pengembangannya ke depan. Mendukung keberadaan kendaraan listrik dalam G20, SPKLU akan dibangun di beberapa titik lokasi strategis oleh PT. PLN (Persero).

Regulasi yang mengatur mengenai ketentuan ketenagalistrikan dan tarif tenaga listrik, serta standar keselamatan ketenagalistrikan untuk SPKLU dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.13/2020 yang mengatur tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik diutamakan bagi KBLBB.

Pada Agustus 2021, telah terlaksana peresmian SPKLU di

Lenteng Agung dan MT Haryono, ini merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional - Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Pengembangan yang telah dilakukan oleh OR PPT dalam hal ini bukan hanya pada aspek *hardware*, tetapi juga *softwaranya* diantaranya pengembangan *Charging Station management System* (CSMS) Sistem Operasi Pengisian Kendaraan Listrik (SONIK). CSMS SONIK ini telah teruji secara *operatability* dan *security*-nya untuk memonitor seluruh fasilitas SPKLU.

Indonesia melalui kegiatan riset dan berbagai kebijakannya saat ini tengah berusaha untuk mendukung transisi untuk mendukung energi hijau bukan hanya untuk mengikuti trend yang sedang berlangsung di negara-negara berkembang namun juga untuk mewujudkan energi yang lebih ramah lingkungan serta aman untuk masyarakat. Kerjasama yang terjalin antara berbagai pihak, perwujudan dukungan dalam implementasi percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

* * * * *

Dari Pemuda Indonesia, untuk Transisi Energi Dunia

Oleh: Khoiria Oktaviani, M.Eng.

Debut Indonesia sebagai tuan rumah gelaran G20 memiliki arti strategis dalam menyokong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Tak tanggung-tanggung, Presiden menetapkan tiga topik utama yang diangkat dalam presidensi kali ini, yaitu Sistem Kesehatan Dunia, Transformasi Ekonomi dan Digital, serta Transisi Energi.

Berbicara tentang transisi energi, pada perhelatan kali ini Indonesia berkesempatan menunjukkan pada dunia bahwa kebijakan energi yang diambil telah sejalan dengan tren kebijakan energi global yang bergerak dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Sebelumnya, pada rangkaian agenda *Conference of Parties* (COP) ke-26 di Paviliun Indonesia, Glasgow, UK, awal Oktober 2021 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menegaskan target ambisius Indonesia sebagai wujud komitmen terhadap mitigasi perubahan iklim, yakni mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat lagi.

Bergerak sistemik mencapai NZE adalah sebuah keniscayaan sekaligus sebuah pekerjaan rumah yang besar terhadap kemajuan transisi energi bangsa ini, bangsa yang kebutuhan energinya hingga hari ini sebagian besar masih disokong oleh energi fosil. Tahun 2060

tampak masih jauh, tapi dari sisi penyediaan energi, durasi tersebut terbilang singkat untuk bisa beralih dari keterlanaan terhadap energi fosil yang kesediannya semakin menipis.

Kementerian ESDM mencatat, batubara masih menjadi andalan karena ketersediaannya yang besar di penjuru negeri. Sementara itu, tanpa adanya penemuan baru, minyak dan gas bumi (migas) Indonesia hanya akan berproduksi 20-30 tahun lagi. Bukan tidak mungkin dalam kurun tersebut ada temuan migas raksasa yang kemudian membalikkan data potensi migas kita. Namun, dari segi emisi, energi fosil telah menyumbang tingkat emisi yang tinggi, tanpa pengelolaan yang tepat juga berpotensi membebani lingkungan.

Padahal di sisi lain, potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sangat besar, melimpah dan beranekaragam. Namun, potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Air, panas bumi, surya, angin, hingga biomassa terdapat di sepanjang nusantara, namun pemanfaatannya masih di bawah angka 1 persen dari potensinya. Dibutuhkan upaya kolektif mendorong pemanfaatan sumber EBT yang didukung berbagai pihak, termasuk para generasi muda yang akan menjadi tulang punggung penyediaan energi nasional di masa depan.

Presiden pertama kita Soekarno pernah berujar: “Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Pemuda menjadi kekuatan untuk mencapai target-target di masa depan, tak terkecuali dalam mengakselerasi capaian transisi energi. Di tangan para pemudalah keberhasilan pembangunan ekonomi rendah karbon disandarkan.

Dalam Roadmap NZE diuraikan, selama periode tahun 2021 hingga 2025, kebijakan EBT akan diakselerasi habis-habisan, salah satunya melalui penghentian dini pembangkit berbasis batubara, perluasan pencampuran biomassa sebagai bahan bakar pembangkit pada PLTU yang dikenal sebagai *cofiring*, serta konversi bahan bakar diesel ke gas dan EBT. Pada tahun 2025, pangsa energi terbarukan ditargetkan sebesar 23% dan didominasi oleh Solar PV.

Menjembatani pemuda sebagai masa depan bangsa yang diharapkan dapat turut mengakselerasi pengembangan energi bersih

di Indonesia, berbagai program digulirkan oleh Kementerian ESDM, salah satunya melalui Kampus Merdeka Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (GERILYA) dan juga Patriot Energi.

GERILYA adalah sebuah program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dapat dikonversi hingga 20 SKS dan berlangsung selama satu semester, guna mengakomodir kebutuhan industri EBT khususnya di bidang energi surya. Lulusan GERILYA diharapkan siap berkarya di bidang industri solar PV yang *demand*-nya semakin besar dari tahun ke tahun. Pada *batch* pertama, 52 lulusan GERILYA telah membantu pemasangan solar PV hingga lebih dari 2 Mega Watt peak (MWp) di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Program selanjutnya adalah Patriot Energi. Sebanyak 100 pemuda dibekali dengan kemampuan teknis untuk memetakan potensi EBT setempat, mengusulkannya kepada pemerintah dan mewujudkan akses energi di daerah-daerah yang sebelumnya belum menikmati akses listrik sama sekali.

Di luar kedua program pemerintah tersebut, dukungan nyata para pemuda Indonesia untuk transisi energi juga semakin besar gaungnya. Dalam 5 tahun terakhir, lahir gerakan mahasiswa yang berfokus pada sektor energi, seperti Dewan Energi Mahasiswa (DEM) dan Society of Renewable Energy (SRE) di berbagai kampus di Indonesia. Berbagai proyek menggandeng berbagai institusi telah digulirkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung melalui pembangunan sumber-sumber EBT seperti biogas, biomassa, solar PV, serta program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Pada skala bisnis rintisan (*startup*), trend pengembangan *startup* energi bersih juga semakin menjamur, bahkan salah satu *startup* energi bersih Indonesia telah mendapatkan pendanaan seri A pertamanya, yang diperoleh SUN Energy yang bergerak di bidang panel surya. Skala bisnis yang lebih kecil di bidang EBT dalam sekejap juga tumbuh menjadi primadona dengan berbagai peluang pengembangannya.

Dan pada momentum G20 ini, jalur transisi energi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui pemuda, Indonesia menunjukkan kepada dunia akan peran penting mereka dalam

mencetuskan ide dan implementasi nyata untuk transisi energi. Sejatinya para pemuda adalah aktor kunci dari keberhasilan transisi energi Indonesia, juga dunia.

* * * * *

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Turunkan Emisi Karbon Dunia

Oleh: Kristanty Permata Vidiarsi, S.IP.

Listrik yang sudah menjadi kebutuhan primer warga menjadi barang yang tidak murah dan mudah akibat adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang berimbas pada harga batu bara dan gas sebagai bahan baku bagi pembangkitan listrik.

Untuk kali pertama, Indonesia memegang Presidensi *Group of 20* (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Presidensi G20 Indonesia tahun ini memiliki tiga prioritas utama, di antaranya transisi energi berkelanjutan, arsitektur kesehatan global dan transformasi ekonomi berbasis digital. Pada prioritas transisi energi, ada tiga isu utama dalam pembahasan transisi energi, yaitu akses energi berkualitas, kerja sama teknologi bersih dan pembiayaan energi terbarukan.

Di Indonesia terdapat 2 macam sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui (*fosil*). Penggunaan bahan bakar fosil untuk mendukung produksi listrik di Indonesia menghasilkan emisi karbon gas karbon dioksida (CO₂) yang merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data dari BP *Statistical Review of World Energy* Tahun 2021, Indonesia merupakan negara ke-8 penghasil emisi karbon di dunia, yaitu sebanyak 0,5 miliar metrik ton.

Transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi dan menghapus penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) karena menggunakan bahan baku sumber daya alam batubara yang memiliki kecenderungan menimbulkan polusi udara saat dioperasikannya PLTU.

Energi Baru Terbarukan (EBT) yang memiliki emisi karbon rendah, masuk dalam strategi *net zero emission* dan tidak memiliki ketergantungan pada kondisi tertentu atau cuaca adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Selain itu, PLTN memiliki energi yang padat sehingga memiliki energi yang sangat besar dari bahan bakar yang sedikit serta tidak memproduksi partikel polutan sehingga tidak akan menyebabkan *global warming*.

ORTN – BRIN tengah melakukan studi tapak dan uji kelayakan di Bengkayang, Kalimantan Barat, dan sejauh ini terlihat hasil studi yang menyatakan wilayah itu layak dibangun PLTN dikarenakan Kalimantan tidak masuk dalam *ring off fire* atau zona di mana terdapat banyak aktivitas vulkanik, selain potensi terjadi tsunami rendah.

Kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Dai'ichi di Jepang pada 11 Maret 2011 telah membuat masyarakat umum semakin takut terhadap teknologi nuklir. Padahal, di Indonesia sendiri sudah sejak lama memanfaatkan teknologi nuklir di berbagai bidang kehidupan, seperti pertanian, kesehatan, industri, lingkungan, pertambangan, dan peternakan.

Dukungan Publik

Pembangunan PLTN juga harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari publik. Pada 2021, ORTN BRIN telah melakukan survei tingkat penerimaan masyarakat terhadap dampak pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) iptek nuklir di provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melibatkan 600 responden.

Responden tersebut terdiri dari 300 laki-laki dan 300 perempuan. Sebaran responden dilakukan secara acak dengan berbagai latar belakang responden seperti jenis kelamin, kelompok usia, kategori lokasi, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan dan rata-rata

pengeluaran rutin rumah tangga dalam sebulan. Sebaran responden ini tersebar secara proporsional di 12 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Barat sebagai calon tapak PLTN pertama di Asia Tenggara.

Dari survei tersebut dapat disimpulkan, sebanyak 3% responden tidak setuju pengembangan teknologi nuklir untuk bidang energi/pembangkit listrik. 90,82% masyarakat dapat menerima teknologi nuklir untuk bidang energi/pembangkit listrik. Hal ini tentu menjadi prospek positif pengembangan PLTN di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian terkait pembangunan PLTN untuk kebutuhan listrik di Indonesia menghasilkan data sebanyak 87,17% responden menyatakan setuju dan mendukung rencana pemerintah membangun PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia dan sisanya sebanyak 12,83% menyatakan tidak setuju.

Indonesia diyakini memiliki kandungan uranium sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir cukup melimpah di Papua. Diperkirakan sumber daya uranium yang telah di Indonesia mencapai 89.000ton uranium (tU₃O₈) dan sumber daya thorium mencapai 143.234 ton (tTh). Akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sehingga dapat dikatakan, kunci utama dalam mengimplementasikan rencana pembangunan PLTN ada di tangan pemerintah jika ingin mencapai karbon netral atau *net zero emission* pada 2060. Untuk itu, dibutuhkan komitmen penuh pemerintah dalam bentuk dukungan resmi secara politik yang menyatakan “Go” terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia.

* * * * *

Transisi Energi Menuju Energi Terbarukan

Oleh: Rostamaji Korniawan

Transisi energi bukan merupakan sebuah gagasan yang baru. Semua negara, termasuk Indonesia, sudah membangun wacana dan merancang penggunaan energi terbarukan di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan penggunaan energi fosil, yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat umum, industri, dan alat transportasi. Mewujudkan tujuan tersebut tentu tidaklah mudah.

Uni Eropa dan Amerika Serikat bahkan masih mempertimbangkan biaya (*cost*) yang mereka nilai cukup besar untuk mengalihkan penggunaan energi fosil. Demikian pula dengan negara-negara di kawasan Asia, baik itu Cina, Jepang, Korea Selatan, India, maupun Indonesia. Mereka juga mempertimbangkan aspek pendanaan yang jumlahnya juga tentu tidak sedikit.

Masih besarnya ketergantungan negara-negara maju dan berkembang terhadap impor minyak dan gas menjadi bukti kuat bahwa wacana penerapan energi terbarukan belum menjadi prioritas. Dari data dan informasi yang dikemukakan oleh *worldstopexports.com* tahun 2020, negara-negara di Asia, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India, masih menjadi negara importir terbesar minyak bumi. Kurang lebih 59,2% hasil minyak bumi dunia diimpor ke kawasan Asia. Sedangkan 24,5% diimpor ke negara-negara di kawasan Eropa. Sisanya, 12,7%, diimpor ke kawasan Amerika Utara.

Kondisi ini juga berlaku dengan perdagangan gas bumi dunia

di mana sebagian produknya diimpor ke negara-negara di kawasan Asia. Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India masih menjadi importir terbesar (berdasarkan data *oec.world* tahun 2020). Cina bahkan menjadi negara importir yang paling besar dengan menguasai 16,8% dari produksi gas bumi yang diimpor, diikuti dengan Jepang 14,5%, Korea Selatan 7,51%, dan India 6,36%. Negara di kawasan Eropa menjadi kawasan kedua setelah Asia sebagai importir terbesar gas bumi yang dihasilkan negara produsen.

Dilihat dari informasi diatas, ketergantungan dunia terhadap energi fosil menjadi dasar hipotesis bahwa semua negara, baik maju maupun berkembang, masih belum cukup konsisten mendorong realisasi penggunaan energi terbarukan. Harga minyak bumi akibat eskalasi geopolitik Ukraina dan Rusia di bulan Februari 2022 mengalami kenaikan. Hal itu bahkan belum sanggup mendistorsi dunia untuk mengalihkan penggunaan energinya dengan sumber daya lainnya untuk energi terbarukan.

Demikian pula dengan perkembangan inflasi dan tekanan politik dunia paska keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua indikator makro tersebut tentu akan menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk bagaimana caranya agar agenda pertemuan G20 tahun 2022 masih bisa tetap dilaksanakan.

Dengan kata lain, kegiatan Presidensi G20 di Indonesia masih tetap berupaya melanjutkan rencana strategis di tengah situasi yang kurang menguntungkan. Implementasi energi terbarukan menjadi salah satu rencana strategis yang hendak dibicarakan, selain kerja sama pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan, dan kerja sama pemulihan kesehatan dunia selama pandemi Covid-19. Pada pertemuan G20 di Pittsburgh pada bulan September 2009, negara maju menyepakati pengurangan subsidi penggunaan energi fosil. Komitmen tersebut menjadi awal kesepakatan agar energi terbarukan bisa diterapkan.

Langkah Kebijakan Sumber Energi Terbarukan

Indonesia pada dasarnya sudah mengantisipasi dan berupaya mewujudkan penggunaan energi terbarukan, meskipun upaya pemerintah harus dihadapkan pada berbagai macam tantangan.

Penetapan kebijakan, regulasi, dan investasi sumber energi terbarukan sudah dilakukan secara bertahap sejak beberapa tahun yang lalu.

Pertama, pemerintah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008. Kedua, pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan transportasi ramah lingkungan yang dikenal dengan sebutan *lowcost green car* (LCGC), dengan dasar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013. Ketiga, pemerintah melakukan reformasi subsidi BBM di tahun 2014. Reformasi subsidi BBM juga diperkuat dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III tahun 2015.

Keempat, di tahun 2021, pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, mengeluarkan satu *roadmap* penggunaan energi terbarukan di mana target nol emisi (*net zero emission*) akan menjadi tujuan utamanya. Kemudian, pemerintah juga berencana meloloskan Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan menjadi Undang-Undang di tahun 2022 dan dibarengi pula dengan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga dan penggunaan kendaraan listrik yang ditargetkan di tahun 2025 mendatang.

Kelima, pemerintah juga berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di mana salah satu ketentuan di dalamnya mengatur pengenaan tarif pajak karbon bagi pelaku industri dan rumah tangga sebagai konsumen produk yang mengandung karbon atau produk yang menghasilkan emisi dalam jumlah dan waktu tertentu. Regulasi fiskal ini pada dasarnya digunakan untuk membangun energi yang ramah dengan lingkungan. Perlu dicatat pula bahwa implementasi pajak karbon bukan diutamakan untuk menarik pajak baru dari objek pajak yang berbeda. Regulasi pajak karbon lebih diarahkan untuk mendorong industri dan rumah tangga agar mereka terdorong dan termotivasi untuk segera menggunakan energi terbarukan di kemudian hari.

Sebagai penutup, analisis singkat ini ingin menekankan kembali bahwa penggunaan energi terbarukan merupakan upaya negara untuk menyelamatkan manusia dari perubahan iklim dan tingkat polusi yang sudah membahayakan kesehatan manusia. Tidak hanya itu, energi terbarukan juga menjadi energi alternatif bagi Indonesia untuk

mengurangi ketergantungan impor BBM yang selalu dipengaruhi oleh mekanisme harga pasar dunia. Namun demikian, semua itu bisa terlaksana dengan kesepakatan semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, BUMN, produsen energi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Semuanya membutuhkan waktu dan ini dilakukan secara bertahap.

* * * * *

Transisi Energi Berikan Manfaat untuk Indonesia

Oleh: Sherly Julianti

Pada 31 Oktober lalu, Indonesia secara resmi meneruskan estafet presidensi G20 untuk tahun 2022. Presidensi G20 yang semula dipegang oleh Italia, kemudian diserahkan secara simbolis oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi, kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia. Presidency G20 ini kemudian menjadi satu sejarah baru bagi Indonesia sejak bergabung di tahun 1999. Indonesia adalah negara dengan posisi strategis. Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G20.

G20 adalah kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB. Meski begitu posisi Indonesia telah sejajar dengan Cina dan India yang pertumbuhan ekonomi negaranya selalu di atas rata-rata perekonomian global. Sementara negara-negara maju lainnya biasanya memiliki tren yang fluktuatif.

Salah satu bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah bidang energi khususnya transisi energi yang merupakan salah satu upaya mengurangi resiko pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan di masa depan, Transisi energi menjadi topik pembicaraan banyak pihak saat ini. Terlebih setelah adanya Presidensi G20

Indonesia memasukkan transisi energi ke dalam salah satu topik pembahasan utama. Transisi energi adalah upaya untuk menekan resiko pemanasan global yang dapat mengancam kehidupan di masa depan.

Hal tersebut berpatokan pada perubahan sektor energi global dari produksi dan konsumsi energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Dalam *International Renewable Agency* diterangkan bahwa transisi energi merupakan perubahan energi dari bahan bakar fosil menjadi energi hijau. Hal tersebut berpatokan pada perubahan sektor energi global dari produksi dan konsumsi energi fosil menjadi energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

Transisi energi terbarukan saat ini sedang dilakukan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam databoks, disebutkan bahwa pada tahun 2021 indeks transisi energi Indonesia berada di posisi keenam di Asia Tenggara. Berdasarkan kebijakan tentang transisi energi di Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, akselerasi perpindahan energi di Indonesia perlu dilakukan berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, terjadi Perubahan Iklim. Alasan terbesar dalam percepatan transisi energi menuju *net zero emission* yaitu karena terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, adanya Negosiasi Iklim Nasional *Paris Agreement* merupakan sebuah kesepakatan peserta COP ke-21 di Paris pada tahun 2015 untuk mencegah peningkatan suhu bumi.

Terdapat pula terobosan teknologi dan penggunaan energi baru, yaitu adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di skala global meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi. Dengan demikian, energi terbarukan semakin beragam, berkualitas, dan efisien

Tidak hanya itu, kondisi geopolitik dan ekonomi menjadi alasan transisi energi nasional lainnya yaitu karena kondisi geopolitik dan ekonomi yang dimiliki negara kita. Hal lain, timbulnya perubahan perilaku konsumen listrik. Perubahan perilaku pada konsumen listrik

juga turut mempengaruhi transisi energi bersih dan terbarukan. Perubahan perilaku tersebut disebabkan oleh kesadaran akan perubahan iklim serta upaya untuk mengurangi polusi demi menjaga kesehatan dan lingkungan.

Kebutuhan terhadap lingkungan yang bersih dan perubahan cuaca telah menjadi perhatian dunia. Salah satunya adalah Kendaraan listrik, dari aspek lingkungan, ekonomi, dan kemandirian sangat menguntungkan bagi Indonesia yang peduli terhadap lingkungan. Karenanya, pemerintah terus mengakselerasi dan mengembangkan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai. Disruptif teknologi, termasuk kendaraan listrik merupakan bagian dari tanggung jawab guna mengatasi emisi rumah kaca walaupun terdapat banyak tantangan.

Kecanggihan Mobil Listrik

Mobil berbahan bensin menghasilkan emisi berupa gas CO₂ dan CO yang tidak hanya buruk bagi lingkungan, namun juga bagi kesehatan manusia. Ditambah lagi dengan banyaknya jumlah mobil berbahan bakar bensin yang ada di jalanan, semakin menambah urgensi untuk memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Inilah salah satu kelebihan mobil listrik.

Ketimbang mengeluarkan asap ke udara seperti mobil berbahan bakar bensin, pemakaian mobil listrik bisa membantu mengurangi polusi udara. Bahkan, satu mobil listrik bisa mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas rumah kaca. Selain itu, tenaga listrik bisa dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang selalu bisa diperbaharui. Berbeda dengan bahan bakar bensin yang diambil dari minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui dan jumlahnya terus berkurang.

Kenyamanan berkendara adalah salah satu kelebihan mobil listrik, tidak perlu khawatir soal mobil yang bising atau bergetar ketika sedang melaju kencang di jalanan. Mobil listrik terkenal dengan kualitas mesinnya yang hampir sama sekali tidak mengeluarkan suara, terutama saat dikendarai dalam kondisi baterai penuh, selain itu mesin mobil listrik juga lebih upgraded, sehingga tidak memerlukan perawatan mobil yang terlalu rumit.

Selain kenyamanan berkendara, keamanan pun menjadi prioritas ketika kita memilih mobil. Kelebihan mobil listrik juga terletak pada segi keamanannya. Mobil listrik tentunya sudah melalui proses uji tipe seperti uji ketahanan mobil, uji tahan api dan air, serta uji vibrasi dan guncangan. Secara istimewa, mobil listrik juga dilengkapi dengan Intelligent Transport System (ITS) yang akan langsung memutuskan aliran listrik pada mesin ketika terjadi tabrakan. Kantung udara akan terbuka dan mesin mobil pun akan otomatis mati, sehingga mampu menekan resiko cedera pada penumpang yang lebih parah. Kelebihan mobil listrik ini yang menjadikannya salah satu pilihan transportasi yang paling aman.

Dari segi perawatan pun Mobil listrik tidak membutuhkan oli dan bensin, cukup mengisi daya baterai menggunakan listrik di rumah. Menurut hasil penelitian menyebut bahwa untuk menempuh 120 kilometer, mobil listrik hanya memakan biaya Rp75 ribu, Mobil listrik dinilai mampu menghemat energi hingga 80 persen dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), oleh karena itu mobil listrik diyakini dapat merealisasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (CO₂) sebesar 29 persen pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat. Sementara mobil berbahan bakar bensin bisa memakan biaya 2x lipat.

Pengembangan kendaraan listrik di Indonesia tak bisa lepas dari dukungan ekosistem pendukungnya dan pemerintah saat ini juga tengah serius untuk membangun hal tersebut, caranya dengan berkolaborasi dengan pihak Kementerian maupun perusahaan swasta di Tanah Air. Kendaraan listrik tidak hanya secara signifikan mengurangi emisi CO₂ dan emisi gas rumah kaca lain, namun juga menawarkan suatu moda transportasi yang nyaman, efisien, mudah digunakan, berkelanjutan, serta meningkatkan gaya hidup atau lifestyle.

Sementara itu dikutip dari berbagai sumber dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik, industri otomotif dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600 ribu unit pada 2030, sehingga dengan angka tersebut akan dapat

mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barel dan menurunkan emisi CO₂ sebanyak 1,4 juta Ton.

Mobil listrik ini yang diandalkan sebagai mobil masa depan. Penggunaan mobil listrik diharapkan dapat ikut mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Dan dianggap mendukung kontribusi bagi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Sejumlah negara pun telah berkomitmen untuk secara bertahap menghapus penggunaan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil untuk kemudian bergantung sepenuhnya pada pemakaian mobil listrik.

Sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keberadaan kendaraan listrik, pemerintah Indonesia juga berencana mengganti kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah menargetkan, mulai tahun 2021 sampai tahun 2024, sudah bisa terwujud penggantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik di seluruh Indonesia. Beberapa kebijakan pun telah disiapkan.

Oleh karena itu perlu ada regulasi yang disiapkan agar limbah baterai dari mobil listrik tidak menjadi masalah baru nantinya atau teknologi yang mampu mengurangi limbah dan daur ulang dari baterai yang ada.

* * * * *

PROFIL PENULIS

-1-



Achmad Djuhdi Endawan adalah lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saat ini Djuhdie bekerja sebagai Pranata Humas Pemerintah di Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Waktu produktifnya diisi dengan membuat konten medsos lembaga di tempatnya bekerja, dan artikel ilmiah di bidang komunikasi dan kehumasan. Sebagai penyeimbang antara pekerjaan kantor, Djuhdie juga aktif menulis karya sastra bergenre fiksi dengan nama pena Sang Tajuk. Salah satu karya fiksi terbarunya adalah buku antologi cerpen yang disusun bersama Komunitas Menulis Online (KMO) dengan judul Renggana Kasih serta beberapa karya fiksi lainnya yang diunggah dalam bukulaku.id. Achmad Djuhdi Endawan bisa dihubungi melalui Instagram @djuhdie.

-2-



Achmad Faisal Nurghani adalah Pranata Humas Ahli Pertama di Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasial. Ia menamatkan studi jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sebelum mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara, Faisal sempat bekerja sebagai kontributor Jawa Barat di Harian Republika. Pada 2021, karyanya, “The Guardian of the Earth” memenangkan 2 nd Winner of MicroBlogging Competition pada Indonesia Energy Transition Dialog 2021 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Saat ini, Faisal mendapat kepercayaan dari LPDP untuk menempuh studi Master of Strategic Communication di University of Western Australia.

-3-



Adha Anggraini adalah alumni Universitas Negeri Surabaya yang saat ini menjalankan perannya sebagai Analis Humas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketertarikannya sebagai humas diawali dari karirnya sebagai Public Relation pada lembaga Non Profit Organization.

Capturing The World by Words menjadi headline akun Tumblr yang dimilikinya dan menjadi tempat menuangkan berbagai keresahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ibu dari Mikaila Adya Zara ini juga memiliki hobi membaca dan menulis dan tulisannya dapat ditemui di beberapa media nasional. Dengan senang hati jalin silaturahmi melalui Instagram @adha.anggraini.

-4-



Ahmad Sirajudin adalah lulusan S-1 Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini Ahmad menjadi Pranata Humas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga Redaktur Media Online rakyatpos.com Bangka Belitung, dan Redatur Harian Pagi Rakyat Pos Bangka Belitung. Selain itu,

saat juga sebagai Kepala Bidang Kominfo Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ahmad juga kerap berbagi ilmu menulis dengan relawan PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagaimana relawan menjadi penulis. Ahmad Sirajudin bisa dihubungi melalui Instagram @ahmad.sirajudin67, Email-ahmadsirajudin67@gmail.com.

-5-



Aji Muhawarman saat ini berstatus sebagai Pranata Humas Ahli Madya yang bertugas di Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Selain itu juga dipercaya sebagai Ketua Tim Kerja Strategi Komunikasi. Sebelum adanya restrukturisasi organisasi di kementerian/ lembaga, Aji juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi Peliputan. Aji berpendidikan di bidang teknik informatika dan kesehatan masyarakat. Meski tidak memiliki latar belakang komunikasi, tetapi punya pengalaman lebih dari 15 tahun di kehumasan pemerintah, dengan spesialisasi di pengelolaan opini publik, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.

-6-



ANDHIKA PRATAMA S.IP., M.I.Pol adalah Pranata Humas Ahli Muda Bawaslu Provinsi Jawa Barat merangkap sebagai Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga. Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada Tahun 2009 dan Magister Ilmu Politik Tata Kelola Pemilu Universitas Padjadjaran Tahun 2017 ini aktif dalam berbagai kegiatan dari tingkat sekolah sampai pada perguruan tinggi. Selain itu juga beberapa kali menulis dalam artikel atau jurnal media internal instansi maupun eksternal. Pengalaman dalam dunia kepemiluan juga sudah dilakukan saat menjadi mahasiswa dan pernah menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan sebelum menjadi ASN di Bawaslu Republik Indonesia tahun 2014.

-7-



Andi Rahmawati adalah lulusan S1 Kesehatan Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia. Pada Januari 2022 dilantik menjadi Pranata Humas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Pernah belajar dan bekerja di Sekolah Adibusana Harry Dharsono, menjadi Asisten Perancang Busana Merry Pramono dan Dian Indiarso di Jakarta. Gemar menjahit pakaian wanita dan membuat infografis untuk website satker dan majalah instansi tempatnya bekerja. Meskipun baru bergelut di dunia kehumasan, Andi Rahmawati sudah beberapa kali ditugaskan menjadi MC di kegiatan instansinya, menyumbangkan tulisan ke majalah Warta Balitbangkes dan Bingkai BKPK. Aktif berorganisasi menjadi DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia periode 2022-2024. Andi Rahmawati bisa dihubungi melalui Instagram @andirah73.

-8-



Arso Pranoto Nugroho merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini Arso juga sedang menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Arso saat ini menjadi Pranata Humas Ahli tingkat pertama yang bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk akun media sosial, Arso memiliki akun @ars.pn di Instagram dan Arso_PN di Twitter.

-9-



Asa Zumara adalah seorang Pranata Humas yang bertugas di Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Asa saat ini menempuh studi S2 Ilmu Komunikasinya di Universitas Fajar Makassar. Selain sibuk menyelesaikan studi, Asa juga sehari-hari berkecimpung di dunia kehumasan seperti penulis berita di kanal resmi kabupaten Nunukan juga merangkap sebagai editor. Asa yang punya hobi publik speaking ini pun sering di daulat menjadi MC, host, dan narasumber. Selain bekerja sebagai ASN, Asa juga terlibat di beberapa organisasi kepemudaan seperti PMI (Palang Merah Indonesia) dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia). Asa Zumara bisa dihubungi melalui Instagram @asazumara atau Facebook Asa Zumara.

-10-



Bety Yuliani adalah lulusan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember dan saat ini telah menempuh S2 Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo Surabaya. Saat ini Bety menjadi Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Selain aktif bermedia sosial, Bety juga suka melakukan kegiatan sosial dan menulis di media online. Selain itu juga sering menjadi MC di acara formal maupun non formal. Bety Yuliani bisa dihubungi melalui Instagram @bety.yuliani21.

-11-



Budi Setyo Wicaksono adalah lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saat ini Budi menjadi Pranata Humas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga seorang IT Development di STIH Pertiba Pangkalpinang. Suka sekali travelling. Dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi, dan bekerja di bagian Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo, membuat Budi untuk aktif menulis berita, menjadi editor, serta membuat konten kreatif, Budi dihubungi melalui Instagram @budisetyo88.

-12-



Christine Widianingrum adalah lulusan S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Saat ini Christine menjadi Pranata Humas Ahli Pertama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menulis dan menyanyi merupakan hobinya. Christine Widianingrum bisa dihubungi melalui Instagram @christine.widia.

-13-



Darmoyo, adalah lulusan Magister Teknik Informatika. lahir di Batang, Jawa Tengah. Saat ini Darmoyo menjadi Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2020. Sebelumnya pernah bertugas sebagai Ahli Perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja di UNNES sejak awal bekerja. Menyukai aktivitas kegiatan kehumasan, kerjasama, publik speaking, media sosial, dan olahraga panahan. Youtube: “Beautiful Gift Petani Bunga”. Dan Instagram: @kang_darmoyo.

-14-



Desi Hariati adalah lulusan S-1 dan S-2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Ibu dari 3 (tiga) orang anak yang sekarang menjadi Pranata Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Suka travelling dan membagikannya dalam bentuk konten pada media sosial dan konten kreatif di channel Youtube: “Channel Altamis”. Lahir di Muara Labuh, sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Terlahir dari keluarga sederhana dan penuh kasih sayang. Dididik dan dibesarkan oleh dua orang manusia yang berhati seperti malaikat. Orang tua adalah inspirasi sekaligus semangat terbesar dalam hidup saya. Semoga bisa menebar lebih banyak dan lebih luas lagi manfaat bagi orang lain. Sesuai dengan pegangan hidup saya bahwa sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Desi bisa dihubungi melalui Instagram @d_shie89.

-15-



Dessy Angreni adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi Konsentrasi Audio Visual Universitas Muhammadiyah Malang. Saat inimenjadiPranataHumaspadaPemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tepatnya di kantor Diskominfo, Statistik dan Persandian. Kontributor MMC (Multi Media Center) Kobar. Juga Kontributor RRI (Radio Republik Indonesia) Palangkaraya untuk wilayah Kobar. Suka sekali travelling dan menulis baik itu berita, artikel maupun opini. Aktif Dalam berorganisasi di Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kobar, gemar bermedia sosial. Pernah diundang menjadi MC, moderator ataupun narasumber terkait kehumasan (penulisan berita, jurnalistik). Akun Instagram: @dechi_84.

-16-



Dewi Indah Ayu D. memiliki nama pena Dewindah. Alumnus FISIP Universitas Indonesia ini pernah bertugas menjadi anggota Media Center Haji Tahun 2018. Bergabung bersama wartawan dari berbagai media, melatihnya untuk melakukan reportase melalui media sosial maupun website. Bertugas sehari-hari sebagai Pranata Humas Kementerian Agama, tulisan yang biasa dimuat berupa hard news dan rilis. Selain itu, Dewindah juga menjadi kontributor pada majalah in griya Silaturahmi Litbang Diklat sejak 2015. Dewindah bisa ditemui di Instagram @dewindahayu atau email: dewindah.ayu@gmail.com.

-17-



Dewi Yuliyanti, lulus S1 Jurusan Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS). Saat ini Dewi adalah Pranata Humas Muda pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehari-hari, ia mengelola konten di media sosial Fanpage @sekretariat daerah Kalteng. Menulis adalah hobi yang juga erat hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari sebagai Pranata Humas. Ia telah menulis satu buku bertema kehumasan berjudul “Sukses Mewujudkan Praktisi Humas Pemerintah (Refleksi Seorang Pranata Humas) diterbitkan oleh Dandelion Publisher tahun 2020. Dewi juga membagikan tulisan-tulisannya di blog kompasiana.com. Dewi Yuliyanti dapat dihubungi melalui Instagram @dewijoel79; e-mail: mamaeyo@gmail.com atau search Dewi Yuliyanti di kompasiana.com.

-18-



Diah Eka Palupi jebolan Jurusan Komunikasi UNS dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mulai menekuni dunia kerja di bidang media massa sejak 2004. Sebelum memasuki dunia pemerintahan, Diah pernah dipercayakan memegang kemudi dalam perusahaan media pada posisi Redaktur Muda di Koran harian

Solopos yang eksis di wilayah eks-karesidenan Surakarta, Jawa Tengah, menjadi Redaktur Pelaksana Media Multi Level Marketing “Sukses” serta pengajar di sejumlah lembaga pendidikan penulisan. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Diah saat kemudian mendapat amanah sebagai Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Kepala Bagian Publikasi dan Hubungan Media di Badan Kepegawaian Negara. Menggarap bisnis online Logam Mulia (LM) dengan membuka online store yang bisa diintip pada IG @palupi_gold.

-19-



Dian Din Yati atau akrab dipanggil Didy merupakan anggota IPRAHUMAS yang bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Daerah Kota Cimahi. Lulus sebagai sarjana Biologi di Universitas Pendidikan Indonesia, Didy kemudian memulai karirnya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai

Pranata Humas. Beberapa hasil karyanya selama menjadi Pranata Humas adalah buku “KEBUN RAYA BOGOR” Sejarah Perjalanan Konservasi Tumbuhan Indonesia dan Tropika. Ia bersama rekan Pranata Humas di Kebun Raya Bogor pun telah menghasilkan sebuah film yang merangkum pembangunan kebun raya daerah dengan judul “MATA RAJAWALI” Membingkai Pembangunan Kebun Raya di Indonesia, buku saku “Mengenal Keluarga Dipterocarpaceae di Ecopark CSC-LIPI” dan buku Panduan Teknik Fasilitasi Pendidikan Lingkungan “Tata Laksana Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Flora di Kebun Raya”. Media sosial Facebook: Neng Dian atau Instagram: didyan_me.

-20-



Dian Komara merupakan lulusan S-2 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saat ini Dian menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk Kawasan Cibinong Science Center. Sosok penggagas Pameran Temporer di MUNASAIN ini telah menulis beberapa KTI di Jurnal Prajnaparamita dan sebagai salah satu penulis buku *The Real GPR Pranata Humas Indonesia*, *Keragaman Negeri Tiada Tepi*, *Wajah Indonesia*, *Menelusur Wisata Negeriku*, majalah *TREN* dan media online *Kumparan* termasuk di website BRIN. Dengan menulis dapat bertambah pengetahuan dan meninggalkan jejak abadi. Ia dapat dihubungi ke alamat email diankomara18@gmail.com atau WhatsApp 08561170118.

-21-



Dimas Aditya Nugraha adalah Pranata Humas Ahli Madya di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat ini mengelola dua kanal media pemerintah di Subdit Audio Visual dan Media Sosial, Direktorat Pengelolaan Media: Government Public Relation Televisi (GPRTV) dan Indonesiabaik.id. Dimas pernah membawa Indonesiabaik.id meraih penghargaan dalam ajang World Summit on Information Society 2018 dengan predikat “Government Portal for Viral-able Public Policy Communication”. Dan kini masih terus belajar dan berusaha merintis kanal televisi pemerintah yang bersiaran 24 jam. Mengudara dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga pulau Rote. Alumni Jurnalistik Fikom Universitas Padjadjaran dan Komunikasi Politik Universitas Indonesia ini bisa dihubungi di dima001@kominfo.go.id / 0818.0815.2410.

-22-



Penulis bernama lengkap **Doddy Zulkifli Indra Atmaja**, S.Ikom., M.Si, Pranata Humas pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek, sekaligus Sub Koordinator Humas. Merupakan lulusan S2 Komunikasi Universitas Indonesia. Pernah meraih prestasi sebagai employee of the month selama 5 kali di lingkungan Ditjen Diktiristek. Salah satu hobinya adalah menulis, terutama opini. Juga merupakan vlogger aktif lewat channel youtube : Doddy_dzia dimana videonya juga banyak membahas mengenai bidang komunikasi dan kehumasan. Saat ini penulis tergabung pada bidang Kerja Sama dan Riset DPP Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) periode 2022-2024. Penulis dapat dihubungi lewat akun Instagram : @doddy_dzia.

-23-



Dodi Rosadi adalah lulusan S-1 di Universitas Muhammadiyah Palembang dan S-2 Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang pendidikan SDM Manajemen. Saat ini Dodi sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Memiliki hobi Bulutangkis dan Menulis. Beberapa tulisannya telah dimuat di Media Indonesia, Majalah PR Indonesia, Kumparan.com, dan Kompasiana.com. Memiliki prestasi di bidang kepenulisan antara lain Juara 1 lomba ASN menulis di media kumparan.com (2021). Juara 3 menulis essay kategori pranata humas, Iprahumas Indonesia (2021), dan Juara 3 call for paper Komunikasi dan Kehumasan Tingkat Nasional, Iprahumas Indonesia (2021). Dodi bisa dihubungi melalui Instagram @d0dir0sadi, facebook d0dir0sadi, dan YouTube:dodi rosadi.

-24-



Dyah R. Sugiyanto atau akrab disapa Mbak Dee adalah Pranata Humas di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meraih gelar doktor ilmu komunikasi di usia 34 tahun. Wanita yang memiliki hobi berkesenian, berolahraga, dan berorganisasi ini telah tersertifikasi sebagai public relations pada 2021. Pada akun @dyahsugiyanto, ia konsisten menggunakan tagar #HumasTuhGitu sejak 2016, sebagai ciri sekaligus pengingat dirinya untuk selalu menjadi Humas Pemerintah yang profesional. Selain sebagai PNS, ia juga berprofesi sebagai dosen sejak 2010.

-25-



Loida Dasuha lulusan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Mulai berkarier sebagai Humas di Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Balitbang Kementerian PUPR. Sebagai pengelola majalah serta penulis tetap pada majalah Balitbang PUPR. Serta beberapa tulisan di majalah ilmiah populer instansi di bawah Kementerian PUPR. Kegiatan lainnya adalah menerima kunjungan stakeholder dari DPR, DPRD, media, mahasiswa, PTN/PTS, konsultan, masyarakat lainnya.

-26-



Esti Wisnawati, lahir di Jakarta 9 Februari 1967. S1 dari Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta. Saat ini bekerja sebagai Pranata Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional di Kawasan Cibinong, Jawa Barat. Cita-cita bisa menulis. Ikut serta dalam penulisan buku Penemuan Jenis Baru Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2010 – 2014 dan The Real GPR 111 Tulisan Pranata Humas Indonesia tahun 2020. Email : ewisnawati@gmail.com. No HP: 085778704333.

-27-



Duly Apika Sari bertugas sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ditempatkan pada Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga sudah hampir 12 tahun, sehari-harinya menangani tentang penguatan kemitraan BKKBN dengan mitra kerja Pemerintah, non-pemerintah dan swasta untuk program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan stunting. No hp# 0812-81291314 ; e-mail dulyapikasari@gmail.com.

-28-



Dwi Novia Puspitasari, akrab dipanggil dengan Dwi. Lahir di Pati, 37 tahun yang lalu. Lulusan D3 Kepariwisata Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi Pranata Humas di Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan, Kawasan Cibodas, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam kesehariannya banyak berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Di Cibodas aktif sebagai fasilitator maupun pemandu. Bekerja di Kebun Raya Cibodas justru menjadi motivasinya untuk aktif menulis. Banyak materi yang dapat digali di Cibodas sebagai bahan untuk membuat tulisan. Dwi dapat dihubungi melalui email instagram @Dwi Novia Puspitasari maupun Facebook @Dwi Novia Puspitasari.

-29-



Dwi Onikencanawati lahir di Pacitan (Jawa Timur) 6 Oktober 1963, alumnus Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur bertugas sebagai salah satu Tim Pengelola Website Dinas: <https://diskopukm.jatimprov.go.id> ; Tim Redaksi Majalah Media Info KUKM dan Tim PPID/PLID. Dan saat ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Periode 2022-2024. Juga tergabung dalam komunitas ASN Menulis dan masih belajar menulis dalam rangka meningkatkan kompetensi diri.

-30-



Edi Susanto saat ini menjabat Pranata Humas, dan Sekretaris Redaktur Jurnal Ilmiah Media Gizi Mikro Indonesia di Balai Litbangkes Magelang, Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Borobudur, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). Penulis seringkali berperan sebagai master of ceremony (MC) pada berbagai kesempatan, baik pada pertemuan formal maupun informal. Edi pernah mengikuti diklat sebagai mediator di Universitas Airlangga (UNAIR). Salah satu kepiawaian adalah berbahasa Jawa dengan tingkatan tertinggi krama inggil dan bahasa Kawi, sehingga dalam menjalankan peran sebagai MC. Surel : edigaki@yahoo.co.id; No hp : 081328780870; Facebook : ediyusuf; Instagram : ediyusuf1272.

-31-



Edri Susilo, ASN Kementerian Keuangan lahir di Ponorogo pada 4 Mei 1987. Mulai bekerja di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 dengan penempatan pertama hingga sekarang di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Pada awal 2019 dipindah tugas ke Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan

Masyarakat dan Protokol untuk membina hubungan dan bekerja sama dengan berbagai media. Pendidikan SD sampai SMA di tempuh di Ponorogo kemudian Diploma I di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta. Sambil bekerja melanjutkan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Email: edrisusilo@kemenkeu.go.id - Fb: Edri Susilo - IG: @susiloedri.

-32-



Endah Heliana adalah Pranata Humas Ahli Muda di Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi. Sebelumnya bekerja di Biro Humas Settama Lemhannas RI (Desember 2009 hingga Agustus 2022). Perempuan kelahiran Jakarta 1986 ini adalah alumni

S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI dan S2 Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI. Ia juga pernah berkesempatan mendapatkan kesempatan sebagai Visiting Fellow ISEAS Yushof Ishak Singapura pada 2013.

-33-



Endah Kartikawati adalah lulusan Strata 2, Manajemen Bisnis, Institut Pertanian Bogor. Saat ini Endah adalah Pranata Humas Ahli Muda dan Sub Koordinator Hubungan Masyarakat pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, juga menjadi Anggota Dewan Pengarah pada Ikatan Pranata Humas

Indonesia (Iprahumas) dan Ketua Bidang Kerja Sama pada Dewan Pengurus Cabang Iprahumas Pertanian. Selain aktif menjadi narasumber di bidang kehumasan pemerintah khususnya untuk digital PR dan Audit Komunikasi, Endah juga aktif berorganisasi bersama petani dan pelaku usaha atau eksportir muda untuk menggerakkan peningkatan ekspor pertanian. Dapat dihubungi melalui Instagram: [endah_k_ismunandar](#).

-34-



Eny Sri Widijaningsih, lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Saat ini, saya mengabdikan diri di Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, dengan jabatan Sebagai Pranata Humas Ahli. Tugas kesehariannya sebagai Tim kreatif, Majalah “Gema Delta” (Majalah

Pemkab Sidoarjo), Tim Peliputan yang memproduksi pemberitaan kelembagaan setiap harinya, pengolah data untuk Seksi Kemitraan media, mengkonsep sambutan pimpinan, dan beberapa kali diminta menjadi narasumber dan moderator untuk kegiatan kehumasan di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Secara kebetulan disiplin ilmu linier dengan pekerjaan dan hobby yakni menulis. Aktif menggali informasi (creator) terkait program kerja dan inovasi Pemkab Sidoarjo untuk media sosial. Bisa dihubungi di instagram [@enywidijaningsih](#).

-35-



Erlinda Puspita Ningrum adalah lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan S2 Master of Communication the University of Queensland Australia. Saat ini Erlinda menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus Redaktur Pelaksana Media Center Daerah di <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/> dan Copy Writer akun Instagram @kalselmc. Ketertarikan terhadap dunia kehumasan mendorong Erlinda menerbitkan artikel ilmiah pada Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No.2 (2020) terakreditasi SINTA, serta aktif menjadi narasumber berbagai tema kehumasan, seperti jurnalistik, relasi media, media sosial, literasi digital, dan manajemen isu. Erlinda suka menjalin relasi dan terbuka untuk komunikasi melalui email erlinda.puspa1983@gmail.com.

-36-



Fachrudin Ali Ahmad, S.Sos.,MKM saat ini berkarir sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan sejak tahun 2019. Lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran yang melanjutkan ke Magister Promosi Kesehatan Universitas Indonesia di tahun 2010. Saat ini aktif di kepengurusan Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia periode 2022-2024.

-37-



Fajar Herlambang lulusan S2 Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini menjadi ASN di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai Pranata Humas Tingkat Ahli Muda, juga sebagai kontributor Kumparan. Selain itu bertugas sebagai editor berita di dki.kemenag.go.id. Mempunyai hobi travelling dan fotografi. Selain menjadi humas pemerintah, aktif juga menulis fiksi di beberapa penerbit dan narasumber terkait kehumasan. Bisa hubungi melalui Instagram @fher_lambang.

-38-



Fany Rachmawati, S.I.Kom adalah lulusan D-3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Yogyakarta. Saat ini Fany menjadi Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Magelang, juga Pemimpin Redaksi media online BeritaMagelang.id. Selain itu juga seorang content creator. Suka sekali travelling dan membagikannya dalam bentuk tulisan di berbagai media dan konten kreatif di channel YouTube: Fany Rachma. Dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi, aktif menulis dan bermedia sosial, membuat Fany sering diundang menjadi MC, moderator ataupun narasumber soal kehumasan, media sosial, public speaking, dan jurnalistik. Fany bisa dihubungi melalui instagram @fany.rachma.

-39-



Faza Nur Wulandari, S.I.Kom, Pranata Humas Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Menjadi humas merupakan cita-citanya sejak sekolah. Untuk itu, Faza memilih kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Selama pendidikannya, Faza juga aktif berorganisasi. Sejak 2017, bergabung menjadi anggota Iprahumas. Saat ini memegang amanah sebagai Bendahara Umum periode 2022-2024. Sedangkan periode sebelumnya menjadi Sekretaris Umum Iprahumas. Rutinitas pekerjaan yang dilakukan meliputi mengelola informasi publik dan aduan masyarakat, pembuatan konten sosial media, kontributor berita dan artikel di media internal, serta mendiseminasikan program-program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

-40-



Fentin Andriyani, SE,MM lulusan S1 STIE Perbanas Jakarta dan S2 ITB (MM-BAT), saat ini menjadi salah satu Pranata Humas Ahli Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain senang dan sering menjadi MC di lingkungan kantor ataupun acara-acara lingkup nasional, meng-*create* acara dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain juga menjadi andalan dalam pekerjaan. Nonton, *travelling* bersama keluarga dan *healing* bersama sahabat menjadi aktivitas favorit. Medsos yang dimiliki instagram @F Andri Andri; fent001@brin.go.id

-41-



Fitri Yuliantri Permana, M.Ikom adalah lulusan Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Solo (beasiswa Kominfo). Saat ini penulis menjadi Pranata Humas di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Beberapa karya tulisnya adalah

buku *Bagaimana Membuat Hobi Menjadi Profit* (diterbitkan oleh Yrama Widya), tulisan opini di media internal BPK dan media nasional (mediaindonesia.com, diplomasi.republika.co.id, kumparan.com), serta beberapa jurnal ilmiah bidang ilmu komunikasi.

-42-



Fitria Rizki Wijaya adalah lulusan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Fitria menjadi Pranata Humas Ahli Madya di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kawasan Kebun Raya Purwodadi. Aktif membuat konten kreatif di media sosial lembaga, instagram [@kebunrayapurwodadibrin](https://www.instagram.com/kebunrayapurwodadibrin) tentang

tanaman dan hasil penelitian lembaga. Dengan latar belakang Ilmu Komunikasi, aktif menulis dan bermedia sosial, menjadi moderator ataupun narasumber soal kehumasan dan pendidikan lingkungan. Fitria Rizki Wijaya bisa dihubungi melalui [instagram@fitr1608](https://www.instagram.com/fitr1608).

-43-



Hairil Anwar, SP, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Bangka. Beberapa artikel yang ia tulis kerap terbit di surat kabar lokal seperti *Kostratani* dan *Transformasi Informasi Berbasis Teknologi*, *Menduniakan Kembali Muntok White Pepper*, *Antara Partisipasi dan Netralitas ASN dalam Pilkada* dan berbagai tulisan lainnya. Selain itu untuk menyalurkan hobi menulis cerpen, pranata humas yang bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel ini memiliki blog pribadi (*musafirasmara.blogspot.com*) serta satu blog untuk merangkai pantun (*babelberpantun.blogspot.com*). Sedangkan media sosial aktif yang dimiliki adalah youtube (*Han Arifin*), facebook (*Hairil Anwar Arifin*) dan juga instagram (*@b4ng_han*).

-44-



Pria yang akrab disapa Arif ini memiliki nama lengkap **Haji Arif Arofah**. “Haji” di sini bukanlah gelar, melainkan “oleh-oleh” orangtuanya yang melahirkannya di Arofah saat berhaji. Ia bercita-cita suatu saat berkesempatan mengunjungi tanah kelahirannya itu. Pria lulusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bertugas sebagai pranata humas di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Dirinya memiliki minat khusus terhadap astronomi, film, komik, dan novel. Kegemarannya menulis fiksi menghasilkan sejumlah karya, seperti *Summer Triangle* (GPU 2005), *Love in Twilight* (GPU, 2016), dan beberapa antropologi. Arif bisa dihubungi melalui email *harahope21@gmail.com*; Instagram *@hara_hope*; dan Youtube *Ala Hara* serta *Cerita Lucu CHP*.

-45-



Hartanto adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Fajar Makassar 2005, sekarang Universitas Fajar (UNIFA) Makassar. Saat ini Hartanto menjadi Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Mamasa. Hartanto yang hobby menelisik kehidupan sosial masyarakat dan segala kompleksitasnya serta menuangkannya dalam tulisan yang dimuat di beberapa media lokal dan media nasional, juga dipercaya mengelola Fanpage resmi FB Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan nama akun “WartaKominfoSandiMamasa”. Dengan latar belakang Ilmu Komunikasi dan aktif menulis di media konvensional dan media sosial, Hartanto sering dipanggil menjadi narasumber yang berhubungan dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi. Hartanto aktif di media sosial FB dan Instagram @Hartanto Aby.

-46-



I Ketut Suardita adalah lulusan Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mana sebelumnya bernama IKIP Negeri Yogyakarta, Saat ini I Ketut Suardita menjadi Pranata Humas Ahli Muda yang bertugas di Fakultas Teknik Universitas Udayana, Selain sebagai Pranata Humas Ahli Muda juga memperoleh tugas tambahan menjadi Sub Koordinator Pendidikan dan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Udayana. I Ketut Suardita bisa dihubungi melalui email [ik.suardita@gmail](mailto:ik.suardita@gmail.com), WhatsApp di nomor 0816577953, atau melalui Instagram @ik_suardita dan Facebook Ketut Suardita.

-47-



I. Aeni Muharromah, ibu 2 anak kelahiran Cirebon, lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1993. Sepuluh tahun lebih berkiprah menjadi pranata humas di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebelum berintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bekerja sebagai humas pemerintah mendorongnya untuk menulis. Beberapa tulisan KTI telah dipublikasikan dan buku bunga rampai. Di samping itu beberapa tulisan opini telah diterbitkan media massa. Aeni bersama teman-teman ASN Menulis menjadi salah satu penulis buku berjudul 55 Kisah Inspiratif Menjadi ASN Berprestasi. Menjadi Humas senantiasa harus belajar untuk menambah percaya diri. Membaca berarti proses menambah kompetensi dan Menulis artinya mencoba mengaktualisasikan diri. IG @aenimuharromah atau FB mamie niswa.

-48-



Ied Sabilla merupakan lulusan S1 dan S2 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Kesehariannya sebagai seorang Pranata Humas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawanya ikut serta dalam berbagai kegiatan penulisan seperti dalam Buku The Real GPR: 111 Tulisan Pranata Humas dan Buku Pengalaman Jakarta: Transformasi Digital Pemprov DKI Masa Pandemi. Bidang kehumasan juga memberikan kesempatan bagi Ied menjadi narasumber untuk berbagi pengalaman pekerjaan sebagai humas pemerintah. Ied juga tergabung dalam Community of Practice Tugas Belajar Pemprov DKI Jakarta yang juga turut melahirkan kajian-kajian bagi kebijakan internal Pemprov DKI Jakarta. Ied Sabilla bisa dihubungi melalui Instagram @ied_sabilla.

-49-



Ifa Nurul Utami, S.Sos lahir tanggal 12 Juni 1985 lulusan S1 Komunikasi Periklanan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pranata Humas Ahli Pertama yang bertugas di RSUP Persahabatan, Kementerian Kesehatan. 12 tahun mengabdikan membuatnya memiliki

wawasan bidang kehumasan khususnya kesehatan perumaha-sakitan termasuk mengcreate suatu event dan MC . Sebagai Anggota Iprahumas, memiliki minat dalam bidang desain dan penulisan. Ikut serta sebagai salah satu penulis di The Real GPR serta saat ini menjadi 111 Penulis BUKU GPR Together GPR stronger 2022 serta aktif dalam membuat berita kegiatan kesehatan untuk Newsletter, website maupun media sosial (Instagram, facebook, dan Twitter) RSUP Persahabatan. Yang mau lebih mengenal, silakan menghubungi melalui email: ifanurulutami@gmail.com atau follow Instagram @ifa.utami.

-50-



Iif Fikriyati Ihsani merupakan Pranata Humas Muda di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tengah menyelesaikan disertasinya di tempat mengabdikannya di UIN Jakarta. Sejak menyelesaikan Magisternya di tahun 2009, Ibu dua anak ini terlibat ke dalam banyak Lembaga Non Struktur di UIN Jakarta, seperti di Indonesian Center

Civic Education (ICCE) yang berkecimpung dalam kampanye kebangsaan, Center Teaching Learning Development (CTLD) yang berkecimpung dalam penguatan metodologi pembelajaran, dan belakangan menjadi Peneliti di Lembaga Setara Institute dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat serta aktif menulis di berbagai Media. Beberapa tulisannya dapat diakses di akun Google Scholar Iif Fikriyati Ihsani dan di akun LinkedIn Iif Fikriyati.

-51-



Imam Suryanto, Pranata Humas dari Kementerian Perdagangan RI. Anggota pengurus pusat Iprahumas Indonesia, Founder/CEO Komunitas Bright Up Indonesia, Steering Committee Bidang Media Sosial Komunitas Aparatur Muda, Wakil Ketua Bidang Humas di Rumah Millenial, serta pengurus di Komunitas Nekarawan. Lulusan Universitas Indonesia jurusan Komunikasi Hubungan Masyarakat. Hobi berkomunitas, fotografi, bermedia sosial, menulis, dan bersantai dengan segelas teh atau kopi. Juga sering diundang sebagai MC, Moderator, atau Pembicara. Pernah menjadi ICON PR Indonesia 2018, Pranata Humas Terbaik 2019 (Gold) dari Majalah PR Indonesia, serta 40 besar PNS Inspiratif Nasional 2020 dari KemenPANRB. Saya dapat dihubungi di nomor 085868157609, atau email imam.kemendag@gmail.com, serta Instagram [@immsurya](https://www.instagram.com/immsurya).

-52-



Irfandika Pratama adalah lulusan S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. Saat ini, Irfandika atau lebih akrab dipanggil Sam Ngalam, berprofesi sebagai Pranata Humas Kementerian Keuangan dan bertugas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal. Irfandika memiliki hobi ber-stand up comedy, juga founder komunitas Standupindo Kemenkeu, komunitas stand up comedy ASN pertama di Indonesia di bawah naungan Standupindo. Juga sering menjadi MC maupun moderator pada acara kehumasan internal maupun eksternal instansi. Irfandika dapat dijumpai melalui instagram [@irfandika.pratama](https://www.instagram.com/irfandika.pratama) atau laman www.irfandika-pratama.rocks.

-53-



Ismi Subhan Hehamahua, pria berdarah Maluku dari Maluku Tengah dan Butta Toa Kab. Bantaeng ini pernah menimba ilmu di UIT, lulusan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Berkhidmat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Kantor Pusat Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku (P3E SUMA-KLHK). Rutinitas sehari-hari mengabdikan sebagai Fungsional Pelaksana Analisis Humas. Di samping itu pula pernah menulis di Media terkini.id, tribuntimur.com serta pada portal sumaekoregion.id. Selain itu, pemilik akun Instagram @ismihehamahua, Youtube “iBoGo Channel”. Serta aktif di dunia Jurnalistik, Kehumasan dan sebagai Konten Kreator. Penulis bisa dihubungi via DM di akun Instagram @ismihehamahua.

-54-



Karlina Gusmarani adalah Pranata Humas Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah menyelesaikan jenjang Pendidikan S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas di Gadjah Mada dan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saat ini Karlina merupakan Koordinator Layanan Hubungan Masyarakat Kawasan Multi Unit Kerja (Bandung - Cisit, Bandung - Coblong, Bandung - Djundjunan, Bandung - Ibum, Bandung - Ranggamalela, Bandung - Tubagus Ismail, Garut). Karlina merupakan Icon PR Indonesia 2017-2018 versi Majalah PR Indonesia. Aktif dalam berbagai kegiatan layanan humas juga tekun dalam kegiatan literasi melalui penulisan non ilmiah maupun ilmiah, serta menjadi bagian dalam organisasi kehumasan. Karlina dapat dihubungi di Instagram @karlingmr.

-55-



Kartika Irmawati adalah lulusan S-1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Jambi. Pranata Humas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kartika sangat menikmati perannya sebagai Humas Pemerintah karena ketertarikannya di dunia menulis, public speaking dan konten kreatif. Kartika merupakan salah satu dari Penulis E-Proceeding Pranata Humas Indonesia 2021 dengan tema Inovasi Humas Pemerintah Menangani Krisis Komunikasi di Masa Pandemi. Kartika juga aktif menjadi tutor dan editor untuk tim kontributor yang dibentuknya dan diberi nama Duta Berita Kemenag Tanjung Jabung Timur. Kartika dapat dihubungi melalui instagram @kartika_irmawati.

-56-



Khoiria Oktaviani adalah seorang Pranata Humas Muda Kementerian ESDM, penanggung jawab perencanaan komunikasi dan informasi @kesdm, redaktur esdm.go.id, juga Program Manager Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (GERILYA), sebuah program kolaborasi Kampus Merdeka dengan Kemendikbud Ristek bagi mahasiswa Indonesia setara pembelajaran 20 SKS di kampus. Suka menulis dan sering diundang sebagai moderator atau pembicara di bidang PR practices dan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Buku, terakhirnya Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan, dan karya nubar Kisah Pena Inspiratif. Dapat dihubungi melalui Instagram @khoiriaoktavia.

-57-



Kristanty Permata Vidiarsi adalah lulusan S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. Saat ini Tanty menjadi Pranata Humas Ahli Pertama di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu juga kontributor pada media sosial BRIN Kawasan Nuklir Bandung dengan alamat @Kawasan_NuklirBdg. Suka travelling dan memiliki ketertarikan pada olahraga khususnya lari. Tanty juga aktif menulis berita pada laman BATAN dan BRIN serta menjadi MC dalam acara kedinasan di BRIN Kawasan Nuklir Bandung. Kristanty Permata Vidiarsi bisa dihubungi melalui Instagram @tantyvidiarsi.

-58-



Kristinawati Pratiwi Hadi adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada, dan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Mulai berkarier sebagai humas di BPKSDM Kementerian Pekerjaan Umum, dan kini humas di Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Menjadi pelaksana komunikasi publik yang melaksanakan beberapa tugas diantaranya yaitu: peliputan berita kegiatan organisasi; penerbitan buletin; mengkoordinir kegiatan besar seperti: pameran, seminar, penyiapan press conference, talkshow di media, wawancara, media relations; pelayanan keterbukaan informasi publik dan pengaduan; pembuatan rilis; pendampingan dengan Balai untuk pelayanan publik; dan lain sebagainya. Memiliki hobi travelling, dengan akun Instagram: teeweeq, dan email : weeqdora@gmail.com.

-59-



Lida Noor Meitania adalah lulusan S2 Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini Lida menjadi Pranata Humas di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kegemarannya menulis dan bermedia sosial, mendapatkan penghargaan sebagai GPR Milenial Ditjen IKP (Desember 2020), Pegawai Teraktif dalam Diseminasi Informasi di Media Sosial Ditjen IKP (Februari 2021), Karya Tulis Ilmiah Terbaik dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial Pribadi (Government Public Relations) dalam Mengklarifikasi Hoaks Covid-19” (Mei 2021). Lida bisa dihubungi melalui Instagram dan Twitter @lida_buaya.

-60-



Lizzatul Farhatiningsih yang akrab disapa Iccha merupakan lulusan S1 ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dan S2 di ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Saat ini Iccha menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Ketua Tim Kerja Sama Media di Biro Humas Kementerian Perdagangan. Kecintaannya pada dunia komunikasi dan kehumasan membawanya menyabet gelar sebagai Icon PR yang diselenggarakan majalah PR Indonesia pada 2016 dan pada 2019 kembali mendapatkan penghargaan sebagai Silver Winner Pranata Humas Tingkat Ahli Terbaik. Saat ini, Lizza juga sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Iprahumas 2022–2024. Di sela-sela kesibukannya, Lizza tetap aktif menulis di media nasional, serta menuliskan puisi-puisi buah karyanya yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada 2020 berjudul Lembaran Fana.

-61-



Luciana Retno Prastiwi atau biasa dipanggil Retno adalah lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga dan S-2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga. Saat ini Retno berkarir sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di Badan Informasi Geospasial. Beberapa kegiatan kehumasan yang dilaksanakan seperti: kampanye/edukasi publik, publikasi, dan berbagai layanan kerjasama dengan berbagai pihak. Di waktu luangnya, Retno suka melakukan berbagai kegiatan luar ruangan seperti travelling, menonton film, dan membaca buku. Retno juga telah mempublikasikan beberapa tulisan lainnya pada berbagai media nasional dan prosiding internasional. Retno dapat dikontak melalui: lucianaretno11@gmail.com atau Instagram: [@Luciana_Retno](https://www.instagram.com/Luciana_Retno).

-62-



Muhammad Himawan Hidayanto, SE., MM. saat ini aktif bekerja pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pengampu jabatan Pranata Humas Ahli Madya. Menjadi penulis aktif pada berbagai kanal baik di media internal Kementerian dan eksternal. Fotografi menjadi hal yang sangat diminati karena dinilai sangat menarik dalam proses empiris pembelajaran kampus kehidupan. Latar belakang sebagai penulis, saat ini diamanahkan menjabat sebagai editor majalah Segara yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Muhammad Himawan Hidayanto dapat dihubungi via email himawan1976@gmail.com.

-63-



Marroli J. Indarto, Pranata Humas Madya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DJIKP) – Kominfo. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret. Tugas dan fungsi harian pada Dit Infokom Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) terkait komunikasi Kesehatan, pedesaan dan keamanan pangan. Pengalaman organisasi menjadi ketua bidang event Internasional dan nasional, KTT IORA, ASIAN GAMES 2018, Tim Konten Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Tim Media Centre Event GPDRR 2022, Tim Media Centre ASEAN PARAGAMES XI, Tim Agenda Setting Komunikasi Publik dan Media Centre KTT G-20 dan lain sebagainya. Email marr001@kominfo.go.id dan akun Instagram @rolindart.

-64-



Mas Aryo Kristiyanto adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi Jurusan Public Relations di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini menjabat Pranata Humas Ahli Pertama yang ditempatkan pada Bagian Pemberitaan dan Media, Biro Protokol Humas dan Media, Sekretariat Jenderal DPD RI. Kegiatan sehari-hari melakukan kegiatan peliputan kelembagaan, membuat siaran pers, selain itu juga melakukan media relations, dan menyelenggarakan konferensi pers kegiatan kelembagaan DPD RI. Memiliki Hobi bermain basket dan menonton film dan juga admin kreatif akun instagram THOR basket parlemen <https://www.instagram.com/thorbasketparlemen/>. Mas Aryo bisa dihubungi melalui instagram @masaryok.

-65-



Mayrianti Annisa Anwar, SP, M.Si adalah lulusan Institut Pertanian Bogor dalam bidang Arsitektur Pertamanan untuk Sarjana dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan untuk Magister, berdomisili di Kota Bogor. Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Riset dan Inovasi

Nasional sebagai Pranata Humas Ahli Muda/Koordinator Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Hukum dan Kerjasama mulai 1 September 2021 sampai dengan sekarang.

-66-



Muchammad Fadlan lahir di Banyumas pada tanggal 25 Juni 1981. Menempuh semua jenjang pendidikan di kota kelahiran dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi pascasarjana. Untuk Pascasarjana (S2) mengambil program studi Ilmu Administrasi di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Banyumas.

Berkarir sebagai staf honorer bagian administrasi pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (dulu STAIN Purwokerto) hingga diberi kepercayaan menduduki jabatan eselon IV sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, menduduki jabatan fungsional Pranata Humas Ahli Muda. Meskipun jabatan yang diemban saat ini adalah penyetaraan, telah memantapkan hati untuk berkarir dalam jabatan Pranata Humas sampai jenjang tertinggi.

-67-



Muhammad Fadly Suhendra, adalah Pranata Humas Ahli Muda yang bertugas di Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah (RMPI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pria yang memutuskan untuk menata rambutnya agar tidak lagi terlihat ini, aktif dalam bidang penulisan, penyuntingan, dan penerbitan sejak tahun 2004. Beliau menyelesaikan studinya di jurusan Editing, D3 FIB Unpad pada tahun 2004, empat tahun setelahnya melanjutkan studi S1 di Universitas Mercu Buana, dan sembilan tahun kemudian melanjutkan studi masternya di FIB UI. Beliau dapat dihubungi melalui email ke: muha102@brin.go.id.

-68-



Munawar Khalil N. Pria asal Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan ASN dengan jabatan fungsional sebagai Pranata Humas Muda. Sebelumnya dia pranata humas di Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang kemudian dilebur menjadi Badan Pangan Nasional. Sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Perpres 66 tahun 2021. Pernah menulis tiga buku solo dan tiga buku sebagai kontributor. Beberapa tulisannya juga pernah dimuat di media online detik.com, tribunnews.com, republika.co.id, kumparan.com, dan radarsulbar.co.id. Penulis dapat dihubungi melalui email khalilmunawar888@gmail.com atau akun Instagram Munawar_Khalil_N.

-69-



Niniek Andriani adalah lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2005. Saat ini Andri, sapaan karibnya menjadi Pranata Humas Kementerian Sosial. Sejak Maret 2022 bertugas mengelola Layanan Informasi dan Kehumasan serta Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Sentra “Satria”

Baturaden, Jawa Tengah. Kecintaannya menyelami persoalan sosial kemasyarakatan mewarnai beberapa karya penulisannya antara lain “Perlindungan Negara dan Intervensi Sosial bagi Penanganan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan” (Jurnal Kementerian Hukum: 2017); Artikel “Kampung Kesetiakawanan Sosial “Giri Winangun Setiadharna”, Asa Memutus Kemiskinan (Majalah Societa: 2019); Buku Kaleidoskop Kementerian Sosial 2021 “Bangkit, Pulih, Tumbuh Bersama” (Tim Editor: 2021). Andri bisa dihubungi melalui email: lalunadri@gmail.com.

-70-



Nuning Nugrahani, S.Pt. M.Si. adalah pranata humas ahli muda di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pernah menangani kehumasan di tahun 2013 dan sejak akhir Agustus 2018 ditugaskan menangani Kerja Sama. Sepanjang pandemi COVID-19 dari awal 2020 hingga akhir tahun 2021 aktif berpartisipasi sebagai

anggota delegasi RI pada pertemuan internasional sebagai anggota working group regional yang terkait dengan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, pertemuan regional ASEAN, dan pertemuan multilateral untuk organisasi internasional termasuk melakukan negosiasi kerja sama dengan pihak swasta asing dari negara PEA, Jepang, dan Prancis serta terlibat aktif pada setiap penyusunan bahan posisi untuk pertemuan internasional yang terkait substansi kerjasama penelitian dan pengembangan pertanian.

-71-



Nur Azizah, Ibu dari tiga orang anak ini bekerja di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Ketika menulis biasa menggunakan nama pena Azzah Zain Al Hasany. Puisinya masuk dalam Antologi Puisi Perempuan Penyair Indonesia 2005 dan Antologi Puisi 5,9 Skala Richter. Selain puisi, Mantan Ketua FLP (Forum Lingkar Pena) Ciputat itu juga menulis novel, cerpen, artikel, resensi, dan lainnya. Salah satu bukunya adalah Al-Qur'an Puncak Selera Sastra yang diterbitkan oleh Ziyad Visi Media, Solo. Tulisannya bisa dibaca di blognya, www.hubbinafillah.blogspot.com. Silaturahmi dengannya bisa saling follow di IG, FB, dan Twitter, dengan nama akun Azzah Zain Al Hasany.

-72-



Nur Hidayat, S.Sos, M.AP adalah Pranata Humas Ahli Muda Pemerintah Kabupaten Kebumen lahir di Kebumen 27 Juli 1985. Pemuda yang akrab disapa bang noer ini bekerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen sejak 2009. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi UNS Solo dan S2 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang sebelumnya pernah menjadi wartawan di media cetak lokal dan nasional. Berkat pengalaman itu, muncul ketertarikan menulis artikel, khususnya di bidang kehumasan.

-73-



Nurhaeni adalah alumni program studi Magister Manajemen (MM) konsentrasi Manajemen Perguruan Tinggi, Universitas Padjadjaran. Saat ini sebagai Pranata Humas Muda pada Sekretariat Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran. Pengelola dan pengisi content Website, Keprotokolan serta Kesekretarian MWA

Unpad menjadi tugas keseharian. Fashion dan Keinginan belajar Menulis tentang aktivitas atau travelling dituangkan dalam Personal Blog melalui wordpress ; nurhaeni. Menulis Kehumasan menjadi challenge baru setelah menyandang Jabatan Fungsional Pranata Humas, termasuk kesempatan sebagai MC ataupun Moderator dipergunakan untuk mengasah Kompetensi Kehumasan. Media sosial yang dipergunakan sebagai jejaring, FB dan Instagram; Nuy Nurhaeni.

-74-



Nurjaman adalah lulusan Strata 2 Manajemen Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, sebelumnya S1 Teknologi Pangan dan Gizi di Universitas Djuanda Bogor. Pranata Humas dan Koordinator Kerja Sama Pendayagunaan Hasil Penelitian di Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor, sebelumnya Pengelola

Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Penulis berpengalaman dalam melakukan pengelolaan alih teknologi dengan dunia usaha serta Penyusunan Drafting Paten dan sebagai editor sesuai sertifikat kompetensi BSN nomor 58111026412 0 0001305 2020 dengan No. Reg. KOM.1446.00265 2020. Dapat dihubungi melalui email nurjaman2610@gmail.com.

-75-



Nurul Badruttamam adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Itjen Kemenag RI, sekaligus Redaktur ItjenNews pada Itjen Kemenag RI. Berbagai program kehumasan telah lahir dari pemikirannya dengan menjalankan prinsip sinergi humas antar kementerian dan lembaga.

-76-



Ofiar Murwanti adalah lulusan Universitas Padjadjaran, Program Diploma Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) S1 Program Pendidikan Bahasa Jepang, dan Curtin University Singapore Program Master of International Business . Saat ini Ofiar menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Universitas Padjadjaran (Unpad). Pernah bertugas lama di Kantor Kerja Sama Unpad, menjadikan Ofiar memiliki pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan mitra kerja sama di dalam dan luar negeri. Ofiar Murwanti dapat dihubungi melalui email: ofiar@unpad.ac.id.

-77-



Pongki Nangolngolan Harahap adalah lulusan S2 Ilmu Ekonomi dan S1 Sastra Cina, yang keduanya berhasil ditempuh dan diselesaikan di Universitas Indonesia. Saat ini Pongki menjadi Pranata Humas Ahli Kementerian Perdagangan, juga sebagai Ketua Tim Bidang Administrasi dan Keuangan pada Biro Humas Kementerian Perdagangan. Suka sekali berpikir dan mencurahkan pemikiran dalam bentuk artikel dan puisi di Kompasiana. Berusaha menjadi seorang family man dengan memposting kata-kata bijak sebagai legacy di Instagram @pongki_harahap. Dengan semangat dan percaya diri yang tinggi, secara otodidak berpengalaman menjadi MC, moderator, narasumber ataupun pembuka acara/kegiatan sosialisasi kebijakan Biro Humas Kementerian Perdagangan. Pongki Nangolngolan Harahap bisa dihubungi melalui email: pongki.harahap@gmail.com.

-78-



Putri Puspita Agustine adalah lulusan S2 Hukum Bisnis Universitas Indonesia dan S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini Putri menjadi Pranata Humas Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga subkoordinator Hubungan Antar Lembaga yang menjadi Penghubung Kementerian PUPR dengan Lembaga Legislatif. Meskipun bukan berlatar belakang pendidikan Komunikasi, tapi terhubung sejak awal berkarir di Kementerian PUPR sudah bergelut di bidang komunikasi maka putri sudah memiliki pengalaman di bidang pelayanan hubungan media, informasi publik, sengketa informasi dan strategi komunikasi publik. Putri Puspita bisa dihubungi melalui Instagram @momtama_31.

-79-



Ratih Anbarini adalah Pranata Humas Ahli di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada 2008 dan melanjutkan S2 di almamater yang sama pada 2021. Artikel ilmiah pertamanya telah diterbitkan dalam e-Proceeding Komunikasi dan Kehumasan Iprahumas tahun 2021. Pada tahun yang sama, Ratih juga mengikuti Kompetisi “Call for Paper” Komunikasi dan Kehumasan tingkat Nasional 2021 yang diselenggarakan Iprahumas pada agenda Konvensi Nasional Pranata Humas 2021. Dalam ajang tersebut, ibu empat anak ini berhasil meraih Juara 1 artikel “Kinerja Humas Pemerintah Ditinjau dari Analisis Tingkat Kepuasan Pengunjung Pameran Virtual Hardiknas 2021”.

-80-



Revina Riyanika adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini Vina – sapaan akrabnya – berprofesi sebagai Pranata Humas Ahli Muda pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kecintaannya pada seni dan sastra sejak duduk di bangku sekolah hingga saat ini biasa ia tuangkan dalam karya berbentuk pantun serta puisi. Selain itu Vina juga sering diundang menjadi MC, Moderator serta Narasumber di berbagai kegiatan. Laman media sosialnya bisa ditemui melalui instagram @vinariyadi.

-81-



Ristyan Mega Putra merupakan lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan S-2 Administrasi Publik STIAM I Jakarta. Saat ini Ristyan bertugas sebagai Pranata Humas di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menjadi Editor Majalah Maisona yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Ristyan juga akrab disapa sebagai Risbul TV karena memiliki akun media sosial yakni Instagram: @risbultv serta channel Youtube: @Risbul TV. Ristyan Mega Putra juga bisa dihubungi melalui email ristyan@pu.go.id dan ristyan.pupr@gmail.com.

-82-



Rita Nurlita adalah Pranata Humas Ahli Muda di Diskominfo Kota Depok. Lulusan Ilmu Komunikasi Unisba (S1) dan Universitas Mercu Buana, Jakarta (S2) ini aktif menulis di berbagai media dan menerbitkan buku, diantaranya: Terjebak di Dunia Maya (nominasi novel non-fiksi terbaik anak-anak (2016), Anak Hebat di era Digital (2017) dan Manajemen Strategis PR (2020). Berbagai inovasinya dalam kegiatan literasi digital dan kehumasan, membuatnya menerima berbagai penghargaan sebagai ASN berprestasi Kota Depok, ASN berprestasi Provinsi Jawa Barat (2017), Tokoh Metro Tempo dari Koran Tempo (2018) dan Pranata Humas Ahli Terbaik (2019). Rita bisa dihubungi melalui Facebook: Rita Nurlita Setia dan Instagram: [ritanurlitasetia](https://www.instagram.com/ritanurlitasetia).

-83-



Rizka Ufliasari, S.H. adalah lulusan S-1 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan saat ini sedang menempuh S-2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini Rizka menjadi Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selain aktif mengelola media sosial

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan menjalin relasi dengan wartawan Pokja Kesehatan, Rizka juga suka melakukan kegiatan sosial dan menulis di media online. Selain itu juga sering menjadi MC formal di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Rizka bisa dihubungi melalui Instagram @rizka_ufliasari, FB Rizka Ufliasari dan Whatsapp 081331970119.

-84-



Romi Setiawan adalah Pranata Humas Ahli Pertama yang bertugas pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Jurusan Hukum Internasional Tahun

2007. Sangat senang melakukan kegiatan di luar ruangan seperti susur sungai, berkemah, lintas alam, dan bersepeda. Selain aktivitas tersebut, juga menyukai membaca buku dan artikel khususnya seputar alam dan lingkungan dan seni untuk menghabiskan waktu luangnya. Penulis melakukan korespondensi melalui nomor handphone dengan nomor 081317808171, email romi.setiawan2007@gmail.com dan instagram romi.setiawan2007.

-85-



Romlah Rachmayanti, S.Pd.I adalah lulusan S-1 Ilmu Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri sekarang sudah menjadi Institute Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung Tahun 2010. Saat ini Romlah sapaan akrabnya menjadi seorang Pranata

Humas Ahli Muda di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga koordinator untuk informasi publikasi website babelkemenag.go.id di bidang Pendidikan Islam se-Bangka Belitung. Selain itu juga seorang content creator dan penulis cerita fiksi, puisi di media sosial juga komunitas penulis online. Saat ini aktif dalam School Of Transformation HSDS Online Class di Indonesia Hypnotherapy Training Center. Romlah Rachmayanti bisa dihubungi melalui Instagram @romlahrachma.

-86-



Rostamaji Kornawan, sebagai salah satu penulis buku ini, menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 1995. Tahun 2018, menekuni profesi sebagai Pranata Humas. Sementara latar belakang pendidikannya berasal dari program akuntansi (D-III STAN). Penulis juga mencoba menekuni

bidang ilmu pengetahuan yang berbeda selain bidang ekonomi dan keuangan (Pascasarjana Universitas Budi Luhur). Tahun 2013, penulis meneruskan pendidikan Pascasarjana di bidang International and Area Studies di Pukyong National University. Termasuk Kajian Wilayah Internasional, khususnya Wilayah Eropa, di Universitas Indonesia. Dalam menjalani profesi kehumasan, penulis selalu berusaha mendokumentasikan hasil pengetahuannya untuk kepentingan edukasi. Penulis bisa dihubungi melalui akun Twitter @KornawanR.

-87-



Sandy Wisnu Aji menamatkan pendidikan di Akademi Teknologi Grafika Trisakti, kemudian memulai karir sebagai Job Preparator di sebuah percetakan dan penerbitan di wilayah Pulojadung. Dua tahun setelah itu saya kemudian dipercaya menjadi wakil kepala bagian planning production control (PPC) yang bertugas mengatur jadwal produksi. Empat tahun bertugas di PT. Intermasa, lalu pada 2005 berhasil lulus tes CPNS di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Mulai dari desain grafis, pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah, pejabat pembuat komitmen dan kepala sub bagian umum. Pada 2019 fokus menjadi Pranata Humas sampai sekarang, bahkan setelah mutasi ke Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2021.

-88-



Sherly Julianti Biasa disapa Cely, Saat ini menjabat sebagai Pranata Humas di Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehari-hari bertugas pada Biro Komunikasi Publik. Lulusan Interstudi School of Public Relations dengan peminatan khusus pada bidang Public Relations, Tahun 2019-2021 pernah menjabat sebagai Ketua bidang Diseminasi Informasi Iprahumas Indonesia, hobi traveling, membaca buku, berjejaring serta membuat konten-konten terutama yang berhubungan dengan dunia kehumasan. Pada 2022 bergabung menjadi anggota bidang Informasi dan komunikasi PC Iprahumas BRIN dan lagi-lagi masih menggeluti bidang perkontenan. Mengenal lebih dekat keseharian saya sebagai humas bisa klik link ini : <https://linktr.ee/Celys31> .

-89-



Shofatus Shodiqoh, S.Sos adalah lulusan S-1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini, perempuan yang akrab disapa Iqoh ini beraktivitas sebagai Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Kecintaannya akan dunia jurnalistik telah ada sejak SMA, berlanjut ke kampus, dan sempat menjadi jurnalis di Harian Wawasan, Suara Merdeka Group Semarang. Saat ini Iqoh menjadi redaktur di portal rembang.kemenag.go.id. Tertarik akan dunia kehumasan, sering menjadi MC, Host, Moderator, podcast dan narasumber terkait jurnalistik. Iqoh bisa disapa melalui media sosial, Iqo shofwa (facebook dan Instagram).

-90-



Siko Dian Sigit Wiyanto, S.S.T. CPR adalah lulusan D-IV Akuntansi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan saat ini sedang menjalani pendidikan pada Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saat ini Siko menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Kementerian Keuangan. Siko mendapatkan sertifikasi “Certified of Public Relations” (CPR) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia (LSPPRI). Siko juga pernah mengajar di almamaternya, PKN STAN sebagai dosen tamu. Suka menulis tulisan opini di berbagai media online seperti detik.com, kumparan.com, maupun kompasiana.com. Siko dapat dihubungi melalui email siko.wiyanto@gmail.com, Instagram [@sikowiyanto](https://www.instagram.com/sikowiyanto), dan Linked In [sikowiyanto](https://www.linkedin.com/in/sikowiyanto).

-91-



Silvany Dianita adalah lulusan Magister Profesi Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Pernah menjadi None Favorit Jakarta Utara, Runner up Jakarta Utara dan Finalis Abang None DKI Jakarta pada 2009. Saat ini Silvany menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Ia juga sangat aktif sebagai penulis artikel dan opini pada beberapa media nasional antara lain Kompas.com, Kumparan.com, Media Indonesia.com, Femina.com, dan rilis berita yang telah diterbitkan pada sejumlah berita online lokal di Indonesia. Ia juga tertarik dalam memberikan edukasi kesehatan mental dan pengalaman kehumasan melalui Instagram @silvany.psychologist_humas.

-92-



Sinta Nurwijayanti meraih gelar sarjana dari Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kemudian melanjutkan pendidikan double degree di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan International University of Japan sehingga mendapatkan dua gelar master yaitu Master of Economics dan Master of Arts. Memulai karir sebagai Pranata Humas Ahli Madya pada Oktober 2020 di Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP. Sejak menjabat sebagai pranata humas, Sinta bergabung dengan Iprahumas dan aktif menulis untuk mempromosikan berbagai kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Sinta dapat dihubungi melalui sientanur8@gmail.com.

-93-



Siska Lidya adalah lulusan Universitas Kristen Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini, mengabdikan pada negara sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sebagai Pranata Humas sejak 2018, hingga saat ini masih terus belajar dan mengasah diri untuk meningkatkan kemampuan menulis, sebab dipercaya bertanggung jawab menjadi penulis berita untuk dipublikasikan pada situs web Kanwil Kemenag Jambi. Di luar kehumasan pada instansi Kemenag, aktif sebagai guru sekolah minggu di HKBP Jambi yang bisa melatih kemampuan public speaking melalui cerita Firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Bisa dihubungi melalui email siskalidya.silaen@gmail.com atau Instagram [@sisid.silaen](https://www.instagram.com/sisid.silaen).

-94-



Siska Rannywati Purba adalah lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Saat ini Siska bekerja sebagai Pranata Humas Ahli Pertama di Komnas HAM RI. Siska aktif menulis artikel di beberapa media sosial, antara lain di platform Empuan.id: Berdamai dengan Rasa Cemas di Masa Pandemi, Artikel Opini di Media Indonesia: Menyoal Keraguan Pilkada 2020, Wacana HAM: Hukuman Mati dalam Perspektif HAM, serta di Majalah PR Indonesia: Mengelola Relasi Publik dan Sejuta Manfaat Menulis Opini. Aktif pula menekuni public speaking, terutama MC dan Moderator. Dapat dihubungi di Instagram [@siskarwpurba](https://www.instagram.com/siskarwpurba).

-95-

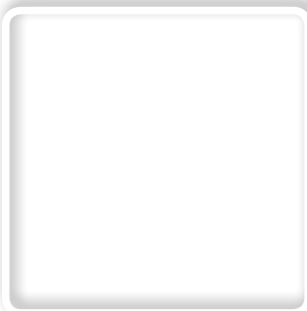


Suwinda Pratama, S.St.Pi.

Menyelesaikan pendidikan DIV/S1 di Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun 2010. Tahun 2019 diangkat sebagai Pranata Hubungan Masyarakat pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan

Perikanan (BRPPUPP) UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Kota Palembang. Aktif mengelola media digital lembaga dan menulis artikel pada website internal BRPPUPP. Dalam kurun waktu 10 tahun berkarir sebagai ASN telah tergabung dalam anggota tim riset dan berkontribusi dalam 2 invensi/paten. Penulis bisa dihubungi melalui alamat email grachilaria@gmail.com atau melalui Instagram @suwindapratama.

-96-



Suzan Lesmana adalah lulusan S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia. Saat ini Ucan, panggilan akrabnya—adalah Pranata Humas Ahli Madya dan Koordinator Layanan Humas Multi Satker Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno,

Cibinong. Ucan juga aktif nge-MC acara Formal, Non Formal dan Keagamaan, Moderator, Narasumber Komunikasi dan Kehumasan, serta Fasilitator Capacity Building/Outbond. Akhir 2020, Ucan pun aktif menulis di berbagai media online tanah air dan redaktur rubrik hiburan di media online ghibahin.id. Beberapa buku bidang keagamaan, komunikasi, kehumasan, dan outbond sempat ditulisnya bersama kolega ASN dan komunitas penulis. Artefak tulisan dan dokumentasi video Ucan dapat dilihat di linktr.ee/suzanlesmana. Ucan dapat dihubungi melalui IG: [suzanlesmana](https://www.instagram.com/suzanlesmana) dan FB: [suzanlesmana](https://www.facebook.com/suzanlesmana).

-97-



Syaiful Azhary adalah lulusan D4 Program Studi Manajemen Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali dan S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini Syaiful menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN. Selain itu juga memiliki hobby menulis di beberapa media online dan majalah PR Indonesia. Untuk akun media sosial yang digunakan IG: @azharysyaiful, FB: @Syaiful_Azhary, IG: @azharysyaiful. Sedangkan untuk email yang digunakan adalah www.diasya0303@gmail.com.

-98-



Thoriq Ramadani mendapat amanah sebagai Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) periode 2022-2024, yang sehari-hari bertugas menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Kementerian ESDM. Ia mendapatkan gelar Magister Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai lulusan terbaik konsentrasi Kebijakan Pembangunan dan Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Thoriq telah membuat 2 buku, yaitu Siapa Humas? Mengenal Ujung Tombak Komunikasi dan The Government Public Relations Handbook Panduan Praktis Humas Pemerintah. Pria yang menginisiasi wadah berbagi untuk sesama, @yukkejarpahala dan komunitas penulis di Kementerian ESDM, ESDM Writers ini aktif menulis di media, jurnal, dan prosiding, serta menjadi pembicara di berbagai forum, diklat, dan seminar kehumasan. Ia dapat dihubungi melalui Instagram: @thoriqramadani.

-99-



Tiara Kharisma lahir di Sukabumi, 7 Oktober 1988. Bergabung di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mulai Maret 2011. Saat ini menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat ANRI. Tiara pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Keanggotaan DPP Iprahumas 2018-2021 dan memiliki ketertarikan terhadap kajian komunikasi organisasi, humas pemerintah dan keterbukaan informasi publik.

-100-



Titik Nur Farikhah, akrab disapa Titik. Saat ini bertugas sebagai Pranata Humas Ahli Muda di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Ia adalah alumni STIE YKPN dan berhasil menyelesaikan S2 pada program Magister Manajemen Universitas Teknologi Yogyakarta. Selain menulis artikel opini, resensi dan buku antologi. Ia telah meluncurkan dua buku solo bertajuk Ketika Srikandi Humas Bicara dengan Hati dan Covid 19 Nyata Bukan Rekayasa. Meskipun Pendidikan tidak linier dengan pekerjaan, tetapi Titik kompeten di bidang kehumasan. Pernah menjadi narasumber dalam bidang videografi, public speaking dan kepenulisan. Srikandi humas ini bisa dihubungi melalui akun media sosial Facebook, Instagram, TikTok, Youtube @Titik Zarkasyi.

-101-



Tri Sundari alumni sarjana farmasi dan pendidikan profesi apoteker di Universitas Airlangga pada 2003. Selanjutnya Tri menyelesaikan Master of Health Science di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia tahun 2008. Karirnya sebagai pegawai negeri sipil dimulai pada 2003 sebagai analis pada deputi program riset iptek pada Kementerian Riset dan Teknologi. Bergabung menjadi Pranata Humas pada akhir 2020. Saat ini, Tri diberikan penugasan sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meskipun tidak memiliki background kehumasan, Tri sering diminta menjadi moderator, fasilitator dan narasumber dalam beberapa kegiatan di luar tugas unit kerjanya.

-102-



Ulyy Adhie Mulyani adalah Apoteker dari Universitas Padjadjaran dan lulusan Master of Science in Health Technology Assessment, Mahidol University. Lebih dari 10 tahun Ulyy menjadi peneliti di bidang ilmu kefarmasian, kemudian menjadi Pranata Humas Ahli Muda di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Sebagai Pranata Humas, Ulyy diberi tanggung jawab untuk mengolah substansi advokasi dan komunikasi kebijakan. Ulyy dapat dihubungi melalui Instagram @buuwie.

-103-



Vethria Rahmi dalam tiga tahun terakhir menerbitkan sejumlah buku antologi dan satu buku solo berjudul “Revolusi Humas” yang semakin memicu semangat untuk terus berkarya. Selain membaca dan berolahraga, bernyanyi dan memasak sudah menjadi bagian dari hobinya sejak belia. Tak ada yang mustahil selama Allah berkehendak. Semoga tulisan ini mampu menjadi bagian spirit dari perjalananku. Teman-teman dapat menghubungiku melalui Ig: Vethria Rahmi, blog pribadi: verahumas.blog.spot, blog Kompasiana: Vethria Rahmi, email: riaukanwilkemenag@gmail.com, saluran youtube “Dapur Eyata” dan Tik-tok: sport_art82.

-104-



Wahyu Setyo Budi, pemuda biasa saja ini merupakan lulusan D3 Desain Komunikasi Visual di Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Yogyakarta juga sedang menempuh Pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. Saat ini Wahyu menjadi Pranata Humas di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pecinta anime dan novel karangan Thomas Harris ini, sekarang sedang berusaha untuk menambah literasi mengenai Ilmu komunikasi dan tren visual terapan. Namun, sesekali juga mencari asupan ilmu mengenai pengelolaan diri dan keuangan. Wahyu bisa dihubungi melalui email wahyu.satiyabudhi@gmail.com.

-105-



Winarni adalah lulusan D-3 Kepariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bogor. Saat ini Winarni menjadi Pranata Humas di Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Suka sekali menikmati drama Korea karena dari

awal kuliah di UGM pernah belajar selama 2 tahun tentang bahasa dan budaya Korea. Menyukai berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kebun raya serta membagikannya melalui media sosial Instagram @wien_sava dan youtube channel Winarni Kandar KRC.

-106-



Wiwi Syafarhadiati saat ini bekerja sebagai Pranata Humas Ahli Madya di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelum melebur ke BRIN, Wiwi mengkoordinasikan tugas-tugas di bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan event, media relations,

BPPT TV, serta publikasi dan dokumentasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Latar belakang pendidikan diawali dengan mengikuti Program Diploma III di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Bahasa Belanda, dilanjutkan dengan program sarjana dan magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana dan STIKOM The London School of Public Relations Jakarta (LSPR-Jakarta). Wiwi dapat dihubungi melalui email wiwi002@brin.go.id atau wiwi67sy@gmail.com.

-107-



Yeniarta Margi Mulya adalah lulusan S1 Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, saat ini menempuh S2 di Universitas Brawijaya Malang. Yeni adalah Pranata Humas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang - Kementerian Pertanian. Kesehariannya, Yeni adalah seorang Koordinator PPID, content creator, dan Pengurus Cabang Iprahumas Provinsi Jatim, sebagai Kepala Bidang Diseminasi dan Konten Kreatif. Hobinya memasak, membuat kue, travelling dan membaca. Sering diundang sebagai narasumber atau pengajar dalam kapasitasnya sebagai seorang humas. Tahun 2022 Yeni meraih peringkat 3 dalam Anugerah Iprahumas Indonesia Kategori Pranata Humas Ahli Pertama. Pengen kenal bisa cek di akun IG @arthafathur23 lhoo.

-108-



Yetty Lestriani adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Saat ini berdomisili di Kota Bogor dan bekerja sebagai Pranata Humas BRIN/Science Enthusiast di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Kabupaten Bogor. Menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran. Menonton film, travelling dan olahraga berlari menjadi kesukaannya. Ia pun menjadi salah satu Pengurus Cabang dari Organisasi Ikatan Pranata Humas (IPRAHUMAS) BRIN pada Bidang Kemitraan (2022-2025). Selain itu ia juga tertarik dengan bidang psikologi komunikasi, maka baginya bekerja dengan ikhlas dan sesuai passion menjadi hal penting dalam melakukan pekerjaan.

-109-



Yulia Shoim adalah lulusan D-3 Ilmu Komunikasi jurusan Public Relations pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2000. Di Tahun 2013, Yulia menyelesaikan S-1 Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini, menjadi Pranata Humas di Pemerintah Kota Depok. Bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab peliputan media online berita.depok.go.id. Yulia merupakan salah satu penulis buku *The GPR 111* Tulisan Pranata Humas Indonesia dengan judul tulisan “Integrasi Publikasi Digital: Website dan Media Sosial Kota Depok”. Selain itu bersama Komunitas Rumah Organik Studio Alam Indah, turut menulis Buku “Revolusi Pangan Masyarakat Urban, Menghampar Kebun Organik di Halaman Rumah” dengan judul tulisan “Saya, Menanam dan ROSAI”. Yulia bisa dihubungi melalui Instagram [@yuliadepok](https://www.instagram.com/yuliadepok).

-110-



Yuliana biasa dipanggil Yuli, awal berkarir adalah menjadi seorang ahli gizi di Puskesmas Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, sejak tahun 2020 beralih menjadi Pranata Humas pada Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Lulusan Diploma III Akzi Depkes Palembang, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hobi menulis pada kolom opini pada media online, beberapa tulisan sudah dimuat pada media online seperti kumparan dan The Journal Publishing. Untuk korespondensi dapat kontak via DM instagram [@yulia_fl12ly](https://www.instagram.com/yulia_fl12ly).

-111-



Zaid adalah lulusan S1 Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini, Zaid menjadi Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, juga menjadi admin di www.lingga.kemenag.go.id. Selain itu juga seorang atlet tenis meja. Suka sekali travelling dan berburu

kuliner membagikannya dalam bentuk tulisan di berbagai media dan konten kreatif di facebook: “Zaid Jai”. Sejak 2019, diakui dan lulus uji kompetensi menjadi pranata humas. Melalui profesi sebagai pranata humas, dan aktif menulis buku, menulis opini di berbagai media dan bermedia sosial, membuat Zaid sering diundang menjadi narasumber soal kehumasan, media sosial, dan jurnalistik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lingga.

